



MODERASI BERAGAMA

dalam Pendidikan Agama Islam



Achmad Munib, S.Pd., M.S.I
Muhammad Abror Rosyidin, M.Pd.
Dr. Nicky Estu Putu Muchtar, M.Pd
Dr. Kurnia Muhajarah, S.Pd.I., M.S.I
Dewi Hidayatun Nihayah

MODERASI BERAGAMA

Dalam Pendidikan Agama Islam

Achmad Munib, S.Pd.,M.S.I

Muhammad Abror Rosyidin, M.Pd.

Dr. Nicky Estu Putu Muchtar, M.Pd

Dr. Kurnia Muhajarah, S.Pd.l., M.S.l

Dewi Hidayatun Nihayah

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah



MODERASI BERAGAMA

Dalam Pendidikan Agama Islam

Penulis:

Achmad Munib, S.Pd., M.S.I

Muhammad Abror Rosyidin, M.Pd.

Dr. Nicky Estu Putu Muchtar, M.Pd

Dr. Kurnia Muhajarah, S.Pd.l., M.S.l

Dewi Hidayatun Nihayah

ISBN:

978-634-7602-59-6

Editor:

Niswatin Nurul Hidayati, S.S., M.A.

Cover:

Maftuhul Ilma Wiratama

Penerbit:

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah

(Penerbit HN Publishing)

Redaksi:

Office I

Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban,
Jawa Timur 62314

Office II

Perumahan Menilo Garden, Tuban, Jawa Timur, 62372

Email: hn.publishing24@gmail.com

Mei, 2026

Ukuran:

15.5x23 cm

Hak pengarang dan penerbit dilindungi Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Dilarang memproduksi Sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulisan buku yang berjudul “Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju peradaban yang penuh dengan nilai-nilai ilmu, akhlak, dan kemanusiaan.

Buku ini disusun sebagai upaya akademik untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya moderasi beragama dalam konteks Pendidikan Agama Islam. Di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, arus informasi digital yang sangat cepat, serta munculnya berbagai pandangan keagamaan yang beragam, pendidikan agama memiliki peran strategis dalam membentuk sikap keberagamaan yang seimbang, toleran, dan inklusif. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi konsep penting yang perlu diinternalisasikan dalam proses pembelajaran agar peserta didik tidak hanya memahami ajaran agama secara tekstual, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara kontekstual dalam kehidupan sosial.

Pembahasan dalam buku ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari konsep dasar moderasi beragama, urgensinya dalam pendidikan Islam, penguatan nalar kritis, pengembangan literasi keagamaan, hingga tantangan dan prospek moderasi beragama di masa depan. Seluruh kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi pendidik, mahasiswa, peneliti, dan pemerhati pendidikan Islam dalam memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama secara lebih mendalam.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan keilmuan, serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun pendidikan Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan buku ini.

Salam,
Penulis

DAFTAR ISI

Sampul	i
Sampul Dalam	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB 1 KONSEP MODERASI BERAGAM DALAM ISLAM	1
A. Pengertian Moderasi Beragama	1
B. Konsep Wasathiyah dalam Islam	3
C. Nilai-nilai Moderasi dalam Ajaran Islam	5
D. Prinsip Keseimbangan, Keadilan, dan Toleransi	7
E. Moderasi Beragama dalam Konteks Masyarakat Multikultural	9
F. Relevansi Moderasi Beragama dalam Kehidupan Modern	10
BAB 2 LANDASAN TEOLOGIS MODERASI BERAGAMA	15
A. Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an	15
B. Moderasi dalam Hadis Nabi	18
C. Konsep Ummatan Wasathan	19
D. Nilai Rahmatan lil 'Alamin dalam Islam	21
E. Prinsip Toleransi dalam Tradisi Islam	22
F. Pemikiran Ulama tentang Moderasi Beragama	24
G. Implikasi Teologis bagi Pendidikan Islam	26
H. Sintesis: Koherensi Landasan Teologis Moderasi Beragama	29
BAB 3 MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN	31
A. Konsep Pendidikan Islam yang Moderat	31
B. Pendidikan sebagai Sarana Internalisasi Nilai Moderasi	34

C. Peran Lembaga Pendidikan dalam Membangun Sikap Moderat	37
D. Pendidikan Karakter dan Moderasi Beragama	39
E. Pendidikan Multikultural dalam Islam	42
F. Strategi Integrasi Moderasi dalam Sistem Pendidikan	45
G. Tantangan Pendidikan dalam Menanamkan Moderasi	48
 BAB 4 MODERASI BERAGAMA DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	 52
A. Konsep Kurikulum Pendidikan Agama Islam	52
B. Integrasi Nilai Moderasi dalam Kurikulum	57
C. Pengembangan Materi Pembelajaran Moderasi Beragama	61
D. Model Kurikulum Berbasis Moderasi	65
E. Peran Guru dalam Implementasi Kurikulum Moderasi	68
F. Evaluasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam	72
G. Pengembangan Kurikulum Moderasi di Era Digital	75
 BAB 5 METODE PEMBELAJARAN MODERASI BERAGAMA	 81
A. Konsep Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	81
B. Pendekatan Pembelajaran Moderasi Beragama	84
C. Metode Dialog dan Diskusi dalam Pembelajaran	87
D. Pembelajaran Kolaboratif dan Partisipatif	89
E. Studi Kasus dalam Pembelajaran Moderasi	91
F. Pembelajaran Berbasis Nilai dan Pengalaman	93

G. Evaluasi Pembelajaran Moderasi Beragama	95
BAB 6 MEDIA DAN SUMBER BELAJAR MODERASI BERAGAMA	97
A. Konsep media pembelajaran dalam pendididkan agama Islam	97
B. Jenis Media Pembelajaran Moderasi Beragama	99
C. Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran Moderasi	100
D. Media Digital dan Platform Pembelajaran	102
E. Pengembangan Sumber Belajar Moderasi Beragama	104
F. Literasi Digital dalam Pendidikan Agama Islam	106
G. Tantangan Penggunaan Media Digital	107
BAB 7 IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN	110
A. Konsep Implementasi Moderasi Beragama	110
B. Peran Guru dalam Implementasi Moderasi	124
C. Budaya Sekolah yang Moderat dan Inklusif	139
D. Praktik Baik Moderasi Beragama di Sekolah	151
E. Program Pendidikan Berbasis Moderasi	161
F. Kegiatan Ekstrakurikuler dan Moderasi Beragama	163
BAB 8 TANTANGAN DAN ISU KONTEMPORER MODERASI BERAGAMA	166
A. Radikalisme dan Ekstremisme dalam Perspektif Pendidikan	166
B. Tantangan Globalisasi terhadap Moderasi Beragama	180
C. Pengaruh Media Sosial terhadap Sikap Keagamaan	183

D. Polarisasi Keagamaan di Masyarakat	185
E. Peran Pendidikan dalam Mengatasi Intoleransi	187
F. Strategi Penguatan Moderasi Beragama	189
G. Moderasi Beragama di Era Digital	192
BAB 9 PERAN KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM MODERASI BERAGAMA	195
A. Keluarga sebagai Basis Pendidikan Moderasi	195
B. Peran Orang Tua dalam Pendidikan Keagamaan	197
C. Lingkungan Sosial dan Pembentukan Sikap Moderat	200
D. Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	203
E. Kolaborasi Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat	205
F. Program Penguatan Moderasi Berbasis Komunitas	207
G. Dampak Lingkungan Sosial terhadap Sikap Keagamaan	210
BAB 10 LITERASI KEAGAMAAN DAN MODERASI BERAGAMA	213
A. Konsep Literasi Keagamaan	213
B. Literasi Keagamaan dalam Pendidikan Islam	215
C. Literasi Digital dan Pemahaman Keagamaan	217
D. Pencegahan Misinterpretasi Ajaran Agama	220
E. Penguatan Nalar Kritis dalam Pendidikan Agama	222
F. Strategi Pengembangan Literasi Keagamaan	224
G. Masa Depan Moderasi Beragama dalam Pendidikan	225

DAFTAR PUSTAKA	228
PROFIL PENULIS	242

BAB 1

Konsep Moderasi Beragama Dalam Islam

Agama merupakan salah satu dimensi terdalam dalam kehidupan manusia. Ia bukan sekadar sistem kepercayaan, melainkan juga panduan moral, sumber identitas, dan kerangka makna yang membentuk cara seseorang memandang dunia dan berinteraksi dengan sesama. Dalam konteks masyarakat yang semakin majemuk dan terhubung secara global, pemahaman terhadap agama yang moderat, inklusif, dan toleran menjadi kebutuhan mendasar yang tidak bisa diabaikan. Islam, sebagai agama yang dipeluk oleh lebih dari 1,8 miliar umat di seluruh dunia, memiliki landasan teologis yang kuat untuk mendukung pemahaman dan praktik keberagamaan yang moderat.

Bab ini memaparkan fondasi konseptual moderasi beragama dalam perspektif Islam secara komprehensif. Pembahasan dimulai dari pengertian moderasi beragama, dilanjutkan dengan eksplorasi mendalam terhadap konsep wasathiyah sebagai inti ajaran moderasi dalam Islam, kemudian mengkaji nilai-nilai moderasi yang terkandung dalam ajaran Islam, serta prinsip-prinsip keseimbangan, keadilan, dan toleransi. Bab ini juga menjelaskan relevansi moderasi beragama dalam konteks masyarakat multikultural dan kehidupan modern yang penuh tantangan.

A. Pengertian Moderasi Beragama

Kata "moderasi" berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang berarti kesederhanaan, pengendalian diri, atau tidak berlebihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi diartikan sebagai pengurangan kekerasan atau

penghindaran dari keekstreman. Ketika kata ini dipadukan dengan "beragama," maka moderasi beragama mengacu pada cara beragama yang tidak berlebihan, tidak ekstrem, dan tidak melampaui batas-batas kewajaran dalam mengekspresikan keyakinan dan praktik keagamaan.

Kementerian Agama Republik Indonesia mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa (Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 15). Definisi ini menekankan tiga elemen penting: cara pandang (kognitif), sikap (afektif), dan praktik (psikomotorik) dalam beragama.

Secara akademis, Muqtedar Khan (2019, hlm. 42) mendefinisikan moderasi beragama sebagai pendekatan keberagamaan yang menolak ekstremisme dalam bentuk apapun, baik ekstremisme tekstualis yang mengabaikan konteks maupun ekstremisme liberalis yang mengabaikan teks. Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi (2012, hlm. 78) menyebut moderasi beragama sebagai *wasathiyah*, yaitu posisi tengah yang proporsional antara pembekuan teks tanpa konteks dan pencairan makna tanpa batas.

Dalam konteks Indonesia, Azyumardi Azra (2020, hlm. 31) menjelaskan bahwa moderasi beragama bukan sekadar sikap toleran pasif, melainkan komitmen aktif untuk membangun kerukunan dan harmoni dalam masyarakat yang beragam. Ia menegaskan bahwa moderasi bukan berarti "tidak memiliki keyakinan" atau "setengah-setengah dalam beragama," melainkan justru menunjukkan kedewasaan dan kedalaman pemahaman terhadap ajaran agama itu sendiri.

Penting untuk dibedakan antara moderasi beragama dengan relativisme agama. Moderasi tidak berarti menganggap semua agama sama atau tidak memiliki komitmen terhadap keyakinan sendiri. Sebaliknya, seorang Muslim yang moderat dapat berpegang teguh pada akidah Islamnya dengan kokoh, sekaligus menghormati hak orang lain untuk memeluk keyakinan yang berbeda. Moderasi beragama, dalam pengertian ini, adalah cara beragama yang

dewasa, bertanggung jawab, dan berempati terhadap sesama manusia (Nasaruddin Umar, 2019, hlm. 56).

Hanafi (2015, hlm. 23) menambahkan dimensi historis dalam memahami moderasi beragama. Ia menunjukkan bahwa sepanjang sejarah Islam, ulama-ulama besar seperti Imam al-Ghazali, Ibn Rushd, dan Ibn Khaldun telah mempraktikkan pendekatan yang moderat dalam berijtihad, menolak taklid buta sekaligus menghindari liberalisme tanpa batas. Tradisi intelektual ini merupakan warisan berharga yang perlu terus dikembangkan dalam konteks kekinian.

B. Konsep Wasathiyah dalam Islam

Konsep wasathiyah merupakan jantung dari ajaran moderasi dalam Islam. Kata wasath (وسط) dalam bahasa Arab memiliki makna yang kaya dan berlapis. Secara linguistik, ia dapat berarti "tengah," "terbaik," "adil," atau "pilihan." Raghib al-Asfahani dalam al-Mufradat fi Gharib al-Quran menjelaskan bahwa wasath merujuk pada sesuatu yang berada di antara dua ujung yang berlawanan, dan dalam penggunaan metaforis berarti yang terbaik karena keutamaan biasanya berada di tengah (Al-Asfahani, dalam Qardhawi, 2012, hlm. 92).

Landasan utama konsep wasathiyah adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan (wasath) agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas kamu."

(QS. Al-Baqarah [2]: 143)

Ayat ini mengandung beberapa implikasi teologis yang mendalam. Pertama, predikat "wasath" bukan sekadar deskripsi geografis atau kuantitatif, melainkan sebuah mandate moral dan misi peradaban. Kedua, umat Islam didefinisikan oleh posisi tengah ini bukan hanya dalam hal teologi, tetapi juga dalam perilaku sosial, etika, dan tata kelola kehidupan. Ketiga, predikat ini membawa tanggung jawab untuk menjadi syuhada (saksi dan teladan) bagi kemanusiaan (Izutsu, 2002, hlm. 177).

Para mufassir klasik dan kontemporer memberikan interpretasi yang beragam namun saling melengkapi terhadap ayat ini. Imam al-Tabari (wafat 923 M) menafsirkan wasath sebagai "adl" (keadilan), sementara al-Zamakhshari (wafat 1144 M) dalam Tafsir al-Kashshaf menekankan makna "khiyar" (pilihan terbaik). Ulama kontemporer seperti Sayyid Qutb dalam Fi Zilal al-Quran memahami wasathiyah sebagai keseimbangan sempurna antara nilai-nilai spiritual dan material, antara kepentingan individu dan kolektif (Al-Qaradawi, 2012, hlm. 101).

Yusuf al-Qaradawi (2012, hlm. 115-130) dalam karya monumentalnya *Fiqh al-Wasathiyah wa al-Tajdid* mengidentifikasi tujuh karakteristik utama wasathiyah Islam, yaitu: (1) al-rabbaniyyah (bersumber dari Tuhan), (2) al-insaniyyah (menghargai kemanusiaan), (3) al-shumul (komprehensif dan menyeluruh), (4) al-tawazun (keseimbangan), (5) al-yasir (kemudahan dan tidak memberatkan), (6) al-wuduh (kejelasan dan tidak ambigu), dan (7) al-jam'u bayna al-thabat wa al-murunah (perpaduan antara ketetapan dan fleksibilitas).

Dalam konteks kontemporer, konsep wasathiyah telah mendapat perhatian serius dari berbagai lembaga Islam internasional. Deklarasi Makkah 2019 yang dikeluarkan oleh Rabithah Alam Islami menegaskan bahwa wasathiyah adalah esensi Islam yang harus menjadi panduan bagi umat Muslim dalam menghadapi tantangan dunia modern. Sementara itu, Al-Azhar Kairo melalui berbagai fatwa dan publikasinya konsisten mempromosikan wasathiyah sebagai jawaban Islam terhadap ekstremisme dan radikalisme (Syamsuddin, 2020, hlm. 67).

Di Indonesia, konsep wasathiyah telah dioperasionisasikan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi Islam terbesar. NU mengembangkan konsep Islam Nusantara yang merupakan ekspresi wasathiyah dalam konteks budaya lokal, sementara Muhammadiyah mengusung konsep Islam Berkemajuan yang menekankan harmoni antara ajaran Islam dan nilai-nilai modernitas (Bruinessen, 2014, hlm. 204). Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa wasathiyah bukan

hanya konsep abstrak, melainkan dapat diimplementasikan secara konkret sesuai konteks sosial budaya masing-masing.

C. Nilai-nilai Moderasi dalam Ajaran Islam

Ajaran Islam mengandung nilai-nilai intrinsik yang secara alami mengarahkan pemeluknya kepada sikap moderat. Nilai-nilai ini tersebar dalam Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, dan tradisi intelektual Islam sepanjang masa. Pemahaman yang komprehensif terhadap nilai-nilai ini merupakan prasyarat bagi terwujudnya moderasi beragama yang autentik dan berkelanjutan.

1. Nilai Tawassuth (Pertengahan)

Tawassuth atau sikap pertengahan merupakan nilai pertama dan paling fundamental dalam moderasi Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

"Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya." (HR. al-Bukhari dan al-Baihaqi)

Nilai tawassuth mengajarkan agar umat Islam menghindari dua kutub ekstrem: *ifrath* (berlebihan/ghuluw) dan *tafrith* (meremehkan/lalai). Dalam konteks akidah, tawassuth berarti tidak berlebihan dalam pengagungan makhluk hingga mengarah kepada syirik, namun juga tidak meremehkan keagungan Allah hingga jatuh kepada kekufuran. Dalam ibadah, ia berarti tidak memberatkan diri secara berlebihan hingga menimbulkan keengganan, namun juga tidak meninggalkan ibadah dengan dalih kemudahan (Shihab, 2019, hlm. 78).

2. Nilai Tawazun (Keseimbangan)

Tawazun atau keseimbangan merupakan nilai kedua yang menjadi pilar moderasi Islam. Al-Qur'an dalam Surah Al-Hadid ayat 25 menyebut bahwa Allah menurunkan "*al-mizan*" (timbangan/keseimbangan) bersama para rasul-Nya, yang menunjukkan bahwa keseimbangan merupakan prinsip kosmik yang harus tecermin dalam kehidupan manusia. Dalam praktik, tawazun berarti menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, antara hak individu dan hak kolektif, antara kebutuhan spiritual dan material (Tim Penyusun Tafsir Tematik LPMQ, 2011).

3. Nilai I'tidal (Keadilan)

I'tidal atau keadilan merupakan nilai yang tidak terpisahkan dari moderasi. Al-Qur'an memerintahkan berlaku adil bahkan terhadap pihak yang berbeda keyakinan sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 8:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa."

(QS. Al-Maidah [5]: 8)

Ayat ini secara tegas melarang kebencian berbasis identitas menjadi penghalang keadilan. Seorang Muslim yang moderat dituntut untuk berlaku adil bahkan kepada mereka yang tidak disukainya, karena keadilan merupakan perintah Ilahi yang melampaui kepentingan pribadi atau kelompok (Azra, 2020, hlm. 89).

4. Nilai Tasamuh (Toleransi)

Tasamuh atau toleransi merupakan nilai yang secara eksplisit diperintahkan dalam Al-Qur'an. Dalam Surah Al-Kafirun, Allah menegaskan prinsip kebebasan beragama dengan kalimat "lakum dinukum waliya din" (bagimu agamamu dan bagiku agamaku). Toleransi dalam Islam bukan berarti sinkretisme atau mencampuradukkan ajaran agama, melainkan pengakuan atas hak asasi manusia untuk memilih dan menjalankan keyakinannya masing-masing tanpa paksaan dan diskriminasi (Umar, 2019, hlm. 102).

Nabi Muhammad SAW sendiri telah memberikan teladan nyata dalam hal toleransi. Piagam Madinah yang beliau susun pada tahun pertama hijrah merupakan dokumen toleransi pertama dalam sejarah Islam yang menjamin hak-hak kaum Yahudi, Kristen, dan penganut kepercayaan lainnya untuk hidup berdampingan secara damai dengan umat Muslim (Syamsuddin, 2020, hlm. 112).

5. Nilai Musawah (Kesetaraan)

Musawah atau kesetaraan merupakan nilai yang menegaskan kesamaan martabat seluruh manusia di hadapan Allah SWT. Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13

menyatakan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bukan untuk saling merendahkan, melainkan untuk saling mengenal (li ta'arafu). Ayat ini merupakan manifesto pluralisme dalam Islam yang mengakui keberagaman sebagai desain ilahi yang harus disyukuri dan dikelola dengan bijaksana (Izutsu, 2002, hlm. 213).

D. Prinsip Keseimbangan, Keadilan, dan Toleransi

Tiga prinsip utama moderasi beragama—keseimbangan, keadilan, dan toleransi—membentuk sebuah trinitas konseptual yang saling mengokohkan. Ketiganya tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang organik dan saling membutuhkan. Kegagalan dalam salah satu prinsip akan berdampak pada melemahnya dua prinsip lainnya.

1. Prinsip Keseimbangan (Al-Tawazun)

Keseimbangan dalam Islam memiliki dimensi kosmologis yang mendalam. Al-Qur'an menyebut bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan mizan (keseimbangan), dan manusia diminta untuk tidak merusak keseimbangan tersebut (QS. Al-Rahman: 7-9). Dalam konteks beragama, keseimbangan berarti mengintegrasikan dimensi hablum minallah (hubungan vertikal dengan Tuhan) dan hablum minannas (hubungan horizontal dengan sesama manusia) secara proporsional dan harmonis.

Tim Penyusun Tafsir Tematik LPMQ, (2011) menjelaskan bahwa ketidakseimbangan dalam beragama dapat mengambil dua bentuk yang sama-sama berbahaya. Pertama, ritualism berlebihan yang mengabaikan dimensi sosial agama, sehingga melahirkan individu yang rajin beribadah namun tidak peduli terhadap penderitaan sesama. Kedua, aktivisme sosial yang mengabaikan dimensi spiritual, sehingga gerakan sosial kehilangan rohnya dan berubah menjadi sekadar aktivitas politik tanpa landasan nilai transendental.

Keseimbangan juga diperlukan dalam hal pemahaman terhadap teks keagamaan. Islam mengenal dua sumber utama hukum: nash (teks Al-Qur'an dan hadis) dan akal (ijtihad). Pendekatan yang moderat mensyaratkan

penggunaan keduanya secara seimbang: teks sebagai acuan normatif yang mengikat, dan akal sebagai instrumen pemahaman yang dinamis dan kontekstual. Kelebihan pada teks tanpa akal melahirkan literalisme, sementara kelebihan pada akal tanpa teks melahirkan relativisme (Al-Qaradawi, 2012, hlm. 198).

2. Prinsip Keadilan (Al-Adalah)

Keadilan merupakan nilai sentral dalam sistem etika Islam. Ia disebutkan lebih dari dua puluh kali dalam Al-Qur'an dengan berbagai derivasinya, menunjukkan betapa fundamentalnya posisi keadilan dalam ajaran Islam. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, ulama besar abad ke-14, dengan tegas menyatakan bahwa syariat Islam dibangun di atas pondasi keadilan, dan segala hukum yang menyimpang dari keadilan tidak dapat diklaim sebagai hukum Islam sejati (Ibn Qayyim, dalam Khallaf, 2000, hlm. 56).

Dalam konteks moderasi beragama, keadilan memiliki beberapa implikasi praktis. Pertama, keadilan epistemik: kewajiban untuk bersikap objektif dalam menilai kelompok dan individu, tidak terjebak dalam prasangka berbasis identitas. Kedua, keadilan distributif: pemerataan akses terhadap sumber daya dan kesempatan tanpa diskriminasi berbasis agama, suku, atau ras. Ketiga, keadilan prosedural: jaminan proses yang adil dan transparan dalam penyelesaian konflik, termasuk konflik yang bernuansa keagamaan (Muqtedar Khan, 2019, hlm. 167).

3. Prinsip Toleransi (Al-Tasamuh)

Toleransi dalam Islam bersumber dari pengakuan terhadap kemajemukan sebagai sunnatullah (hukum alam Tuhan) yang tidak bisa dihindari. Al-Qur'an Surah Al-Hud ayat 118 menyatakan: "Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih." Ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman bukan kegagalan penciptaan, melainkan desain ilahi yang mengandung hikmah mendalam, yakni mendorong manusia untuk belajar, berdialog, dan saling melengkapi.

Bruinessen (2014, hlm. 189) membedakan antara dua model toleransi dalam tradisi Islam. Model pertama adalah toleransi berbasis dhimmah, yaitu toleransi yang bersifat protektif namun hierarkis, di mana non-Muslim dilindungi namun dengan status yang tidak sepenuhnya setara. Model kedua adalah toleransi berbasis musawah (kesetaraan), yang merupakan interpretasi modern yang lebih sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia universal. Moderasi beragama dalam konteks negara modern menuntut implementasi model kedua yang lebih egaliter dan demokratis.

Penting untuk dicatat bahwa toleransi memiliki batas-batas etisnya sendiri. Toleransi tidak berarti membiarkan praktik yang merugikan orang lain atas nama kebebasan beragama. Moderasi mengajarkan toleransi yang bertanggung jawab: menghormati perbedaan keyakinan sekaligus menegaskan nilai-nilai kemanusiaan universal yang melampaui batas agama manapun (Nasaruddin Umar, 2019, hlm. 134).

E. Moderasi Beragama dalam Konteks Masyarakat Multikultural

Indonesia merupakan laboratorium pluralisme terbesar di dunia. Dengan lebih dari 270 juta penduduk yang terdiri dari ratusan suku bangsa, enam agama yang diakui negara, dan ribuan tradisi lokal, Indonesia menyimpan kekayaan kemajemukan yang luar biasa sekaligus tantangan pengelolaan yang tidak mudah. Dalam konteks ini, moderasi beragama bukan sekadar ideal normatif, melainkan kebutuhan praksis yang menentukan keberlangsungan kehidupan berbangsa.

Pendekatan multikulturalisme dalam moderasi beragama menolak dua model pengelolaan keberagaman yang ekstrem. Pertama, asimilasionisme, yaitu model yang menuntut kelompok minoritas untuk melebur sepenuhnya ke dalam budaya mayoritas dengan mengorbankan identitas kultural-religius mereka. Kedua, separatisme, yaitu model yang membiarkan setiap kelompok hidup dalam isolasi tanpa interaksi dan dialog yang bermakna. Moderasi beragama mengusulkan model ketiga, yaitu interkulturalisme: dialog

aktif yang menghargai perbedaan sekaligus membangun titik-titik persamaan yang dapat menjadi pondasi kehidupan bersama (Syamsuddin, 2020, hlm. 178).

Dalam perspektif sosiologis, Robert Hefner (2000, hlm. 23) menunjukkan bahwa keberhasilan moderasi beragama dalam masyarakat multikultural sangat bergantung pada tiga faktor struktural. Pertama, peran negara dalam membangun regulasi yang adil dan tidak diskriminatif terhadap semua kelompok agama. Kedua, kekuatan masyarakat sipil, khususnya organisasi keagamaan yang moderat, dalam menjadi penyeimbang terhadap narasi ekstremisme. Ketiga, sistem pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai pluralisme dan toleransi sejak usia dini.

Azyumardi Azra (2020, hlm. 156) mengingatkan bahwa Indonesia memiliki warisan historis moderasi beragama yang sangat kaya. Para wali songo dalam menyebarkan Islam di Jawa menggunakan pendekatan kultural yang menghargai tradisi lokal. Mereka tidak memusnahkan budaya Hindu-Buddha yang telah berakar, melainkan mentransformasikannya melalui proses Islamisasi yang gradual dan dialogis. Pendekatan ini menghasilkan Islam Nusantara yang khas: Islam yang secara akidah ortodoks namun secara kultural inklusif dan adaptif.

Tantangan moderasi beragama dalam konteks multikultural semakin kompleks di era digital. Media sosial telah menciptakan echo chamber yang memperkuat polarisasi identitas, termasuk identitas agama. Hoaks dan ujaran kebencian berbasis agama menyebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam situasi ini, moderasi beragama harus menemukan cara baru untuk berkomunikasi dan membangun jembatan lintas komunitas, tidak hanya di ruang fisik tetapi juga di ruang digital (Hanafi, 2015, hlm. 201).

F. Relevansi Moderasi Beragama dalam Kehidupan Modern

Dunia kontemporer menghadirkan serangkaian tantangan baru yang menguji ketangguhan moderasi beragama. Globalisasi, revolusi informasi, radikalisme

agama, krisis lingkungan, dan pandemi global adalah beberapa contoh tantangan yang membutuhkan respons keagamaan yang cerdas, adaptif, dan moderat. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, moderasi beragama membuktikan relevansinya yang terus aktual dan mendesak.

1. Moderasi sebagai Respons terhadap Radikalisme

Fenomena radikalisme dan ekstremisme agama merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap perdamaian global abad ke-21. Berbagai kelompok ekstremis mengklaim legitimasi teologis atas tindakan kekerasan mereka, sehingga dibutuhkan counter-narrative yang juga berbasis teologi namun dengan pemahaman yang lebih autentik dan komprehensif. Moderasi beragama menyediakan narasi tandingan yang kuat: bahwa kekerasan atas nama agama bukan hanya bertentangan dengan hukum negara, tetapi juga menyalahi esensi terdalam ajaran agama itu sendiri (Muqtedar Khan, 2019, hlm. 89).

Program deradikalisasi yang efektif tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan semata. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis agama yang menghadirkan pemahaman Islam yang moderat, inklusif, dan manusiawi terbukti lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan pendekatan represif belaka. Organisasi seperti NU dan Muhammadiyah di Indonesia telah berhasil mengembangkan program-program semacam ini dengan hasil yang cukup menggembirakan (Bruinessen, 2014, hlm. 267).

2. Moderasi dalam Konteks Demokrasi

Moderasi beragama memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai demokrasi. Keduanya sama-sama menghargai pluralisme, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak-hak minoritas. Seorang Muslim yang moderat akan mampu menjadi warga negara yang demokratis yang baik: berpartisipasi aktif dalam proses politik, menghormati keputusan mayoritas namun tetap membela hak-hak minoritas, dan menggunakan jalur-jalur konstitusional dalam memperjuangkan kepentingan.

Azra (2020, hlm. 201) menunjukkan bahwa demokrasi dan Islam tidak bertentangan secara prinsipial. Nilai-nilai syura (musyawarah), mas'uliyah (akuntabilitas), dan adalah (keadilan) dalam tradisi Islam paralel dengan nilai-nilai demokratis seperti deliberasi, transparansi, dan rule of law. Yang diperlukan adalah rekonstruksi teologis yang menempatkan nilai-nilai demokratis dalam kerangka referensi Islam, sehingga partisipasi demokratis umat Islam menjadi bermakna spiritual, bukan sekadar kalkulasi pragmatis.

3. Moderasi dan Isu-isu Kontemporer

Moderasi beragama juga relevan dalam merespons berbagai isu kontemporer seperti kesetaraan gender, keadilan lingkungan, dan hak-hak anak. Interpretasi Islam yang moderat mampu memberikan landasan teologis yang kuat untuk mendukung kesetaraan gender bukan sebagai konsesi terhadap tekanan Barat, melainkan sebagai pemulihan terhadap visi Islam yang autentik yang sejak awal menghormati martabat perempuan (Umar, 2019, hlm. 178).

Terkait krisis lingkungan, moderasi beragama menawarkan konsep khalifah (wakil Tuhan di bumi) sebagai basis teologis untuk etika lingkungan. Manusia sebagai khalifah bertanggung jawab untuk menjaga, bukan mengeksploitasi, alam semesta. Pendekatan moderasi mengintegrasikan kesadaran ekologis ke dalam praktik keagamaan, melahirkan apa yang oleh para akademisi disebut sebagai "Islamic environmentalism" atau "eco-theology Islam" (Tim Penyusun Tafsir Tematik LPMQ, 2011).

4. Moderasi di Era Digital

Era digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi moderasi beragama. Di satu sisi, platform digital menjadi sarana penyebaran konten ekstremis yang sangat efektif. Di sisi lain, digital juga membuka ruang bagi penyebaran narasi moderat yang belum pernah ada presedennya dalam sejarah. Ulama moderat, akademisi, dan aktivis dapat menjangkau jutaan orang dengan konten keagamaan yang mencerahkan melalui media sosial, podcast, dan platform digital lainnya.

Hanafi (2015, hlm. 234) mengusulkan konsep "digital wasathiyah" sebagai kerangka bagi umat Islam dalam bernavigasi di ruang digital. Digital wasathiyah mencakup: literasi digital yang kritis, kemampuan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, komitmen untuk tidak menyebarkan konten yang memecah belah, dan aktif berkontribusi dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan konstruktif. Ini adalah manifestasi moderasi beragama yang relevan dan mendesak di abad ke-21.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab ini, dapat ditarik beberapa simpulan penting. Pertama, moderasi beragama bukan sekadar konsep impor dari luar, melainkan merupakan nilai intrinsik yang terkandung dalam ajaran Islam itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam konsep wasathiyah yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Kedua, nilai-nilai moderasi dalam Islam—*tawassuth*, *tawazun*, *i'tidal*, *tasamuh*, dan *musawah*—membentuk sistem etika yang koheren dan komprehensif yang dapat menjadi panduan bagi kehidupan beragama yang bertanggung jawab.

Ketiga, tiga prinsip utama moderasi—keseimbangan, keadilan, dan toleransi—merupakan satu kesatuan yang organik yang harus diimplementasikan secara bersama-sama. Ketiga prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks hubungan antar-umat beragama, tetapi juga dalam pengelolaan kehidupan internal umat Islam sendiri. Keempat, dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bukan sekadar pilihan etis, melainkan prasyarat bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa yang harmonis dan produktif.

Kelima dan terakhir, relevansi moderasi beragama dalam kehidupan modern tidak semakin berkurang, melainkan justru semakin meningkat seiring dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi umat manusia. Dari ancaman radikalisme, krisis demokrasi, isu-isu gender dan lingkungan, hingga dinamika ruang digital—semua membutuhkan respons keagamaan yang moderat, cerdas, dan berempati. Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moderasi secara mendalam, umat Islam dapat memainkan peran yang konstruktif dan

transformatif dalam membangun peradaban yang lebih adil, damai, dan bermartabat.

BAB 2

Landasan Teologis Moderasi Beragama

Landasan teologis merupakan fondasi utama dalam memahami konsep moderasi beragama dalam Islam. Tanpa pijakan teologis yang kokoh, wacana moderasi beragama hanya akan bersifat normatif-dangkal dan mudah terdistorsi oleh kepentingan ideologis tertentu. Bab ini menelaah secara komprehensif sumber-sumber teologis Islam—mulai dari Al-Qur'an, hadis Nabi, hingga tradisi keilmuan ulama klasik dan kontemporer—yang menjadi dasar argumen bagi moderasi beragama. Penelaahan ini mencakup pendekatan normatif-tafsiri, historis-kontekstual, dan teologis-sistematis agar diperoleh pemahaman yang menyeluruh dan berimbang.

Moderasi beragama dalam Islam bukanlah sebuah konsep impor yang berasal dari luar tradisi Islam, melainkan merupakan ajaran yang inheren dalam teks-teks suci dan praktik kenabian. Hal ini penting ditegaskan sejak awal agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa moderasi merupakan upaya kompromi antara Islam dengan nilai-nilai sekular. Sebagaimana dikemukakan oleh Quraish Shihab (2020, hlm. 47), moderasi Islam berakar dari sifat dasar ajaran Islam itu sendiri yang mengedepankan keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*'adalah*), dan kemudahan (*taysir*) dalam segala dimensi kehidupan.

A. Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum dan pandangan hidup Islam mengandung banyak ayat yang secara eksplisit maupun implisit menegaskan prinsip

moderasi. Kata "wasath" dalam berbagai derivasinya muncul beberapa kali dalam Al-Qur'an dan selalu berkonotasi positif, merujuk pada kondisi terbaik, paling adil, dan paling seimbang. Pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat ini menjadi pintu masuk utama dalam membangun landasan teologis moderasi beragama.

1. Ayat-ayat Kunci tentang Wasathiyah

Ayat yang paling sering dijadikan rujukan dalam diskursus moderasi adalah Surah Al-Baqarah ayat 143. Allah SWT berfirman:

وَكُذِّبَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan (wasath) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 143)

Imam Al-Thabari dalam tafsirnya menafsirkan kata "wasath" pada ayat tersebut dengan makna "udulun" (adil) dan "khiyar" (pilihan terbaik). Menurutnya, Allah menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik karena mereka mengambil posisi tengah antara sikap berlebih-lebihan (ghuluw) dan sikap meremehkan (taqshir) dalam beragama (Al-Thabari, 2001, hlm. 143-145). Penafsiran ini kemudian menjadi acuan bagi mayoritas mufasir sesudahnya.

Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim memperkuat pemaknaan ini dengan menyatakan bahwa "wasath" mengandung makna al-'adl wa al-khiyar, yakni sifat adil dan pilihan. Umat Islam disebut "umat pertengahan" karena mereka berada di tengah antara kaum Yahudi yang berlebih-lebihan dalam larangan dan kaum Nasrani yang berlebih-lebihan dalam memuja nabi mereka. Posisi Islam berada di antara keduanya dengan menjaga keseimbangan antara dimensi spiritual dan material, antara dunia dan akhirat (Ibnu Katsir, 2000, hlm. 376-377).

Selain Surah Al-Baqarah ayat 143, terdapat sejumlah ayat lain yang secara substansial mengandung prinsip moderasi. Surah Al-Furqan ayat 67 menegaskan bahwa sifat hamba-hamba Allah Yang Maha Pengasih adalah mereka yang apabila menafkahkan harta tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, melainkan di antara keduanya secara seimbang. Ayat ini menunjukkan bahwa moderasi bukan hanya berlaku dalam dimensi teologis-keimanan, tetapi juga dalam perilaku sosial-ekonomi sehari-hari.

Prinsip moderasi juga terkandung dalam Surah Al-Isra' ayat 110 yang memerintahkan agar tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu lemah dalam berdoa (membaca Al-Qur'an). Al-Qurthubi menafsirkan ayat ini sebagai petunjuk Islam tentang jalan tengah dalam segala aspek kehidupan beragama. Perintah untuk tidak ghuluw (berlebih-lebihan) juga ditemukan dalam Surah An-Nisa' ayat 171 yang ditujukan kepada Ahli Kitab, dan secara tersirat berlaku pula bagi umat Islam (Al-Qurthubi, 2006, hlm. 312).

2. Prinsip Kemudahan (Taysir) dalam Al-Qur'an

Salah satu manifestasi moderasi yang paling nyata dalam Al-Qur'an adalah prinsip kemudahan (taysir) dan penghilangan kesulitan (raf'u al-haraj). Surah Al-Baqarah ayat 185 dengan tegas menyatakan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesulitan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal menolak segala bentuk fanatisme dan ekstremisme yang mempersulit kehidupan beragama.

Yusuf Al-Qaradhawi (2013, hlm. 22-25) dalam karyanya yang monumental *Al-Shahwah Al-Islamiyyah bain Al-Juhud wal-Tatharruf* menjelaskan bahwa taysir merupakan salah satu ciri utama syariat Islam yang membedakannya dari agama-agama sebelumnya. Kemudahan yang dimaksud bukan berarti menggampangkan kewajiban agama, melainkan menempatkan setiap hukum pada konteks dan proporsinya yang tepat. Pemahaman ini sangat relevan untuk melawan dua kutub ekstrem: mereka yang terlalu ketat

(mutasyaddidin) dan mereka yang terlalu longgar (mutasahhilin).

B. Moderasi dalam Hadis Nabi

Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan sumber kedua hukum Islam yang sekaligus menjadi contoh paling konkret bagaimana Al-Qur'an diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Dalam konteks moderasi, Nabi tidak hanya mengajarkan konsep wasathiyyah secara lisan, tetapi juga mendemonstrasikannya melalui segenap perilaku dan kebijaksanaan beliau.

1. Hadis-hadis tentang Larangan Ghuluw

Nabi Muhammad SAW sangat tegas dalam melarang sikap berlebih-lebihan (ghuluw) dalam beragama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, beliau bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوَّ فِي الدِّينِ

"Jauhilah oleh kalian sikap ghuluw (berlebih-lebihan) dalam agama, karena sesungguhnya yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah ghuluw dalam agama."
(H.R. Ahmad dan Ibnu Majah)

Ibnu Hajar Al-'Asqalani dalam Fath Al-Bari menjelaskan bahwa hadis ini merupakan peringatan keras terhadap dua kelompok: mereka yang memperberat diri dalam ibadah hingga melampaui batas syariat, dan mereka yang memudahkan kewajiban agama hingga meremehkannya. Keduanya sama-sama merupakan penyimpangan dari jalan tengah yang diajarkan Islam (Ibnu Hajar, 2003, hlm. 220).

Hadis lain yang sangat relevan adalah sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: "Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama ini kecuali ia akan dikalahkan oleh agama itu sendiri. Maka bersikap luruslah, mendekatlah, bergembiralah, dan mintalah pertolongan pada waktu pagi dan petang hari serta sedikit dari malam hari." Hadis ini mencerminkan betapa

Nabi mengajarkan beragama dengan cara yang wajar, moderat, dan tidak ekstrem (Muslim, 2006, hlm. 441).

2. Praktik Moderasi dalam Kehidupan Nabi

Moderasi Nabi tidak hanya tercermin dalam hadis-hadis normatif, tetapi juga dalam praktik konkret kehidupan beliau. Dalam sebuah riwayat yang mashur, Nabi mengimbuu para sahabat yang bersikap berlebihan dalam ibadah—seperti berpuasa terus-menerus, tidak menikah, atau salat malam sepanjang waktu—agar kembali ke jalan tengah. Nabi bersabda bahwa beliau sendiri salat namun juga tidur, berpuasa namun juga berbuka, dan menikah. Barangsiapa yang membenci sunnahnya, maka ia bukan bagian dari golongan beliau (Bukhari, 2002, hlm. 67).

Said Ramadhan Al-Buthi (1993, hlm. 134-136) dalam karyanya *Al-Jihad fil-Islam* menegaskan bahwa sikap moderat Nabi dalam interaksi dengan non-Muslim di Madinah—yang diwujudkan melalui Piagam Madinah—merupakan contoh nyata bagaimana moderasi diterapkan dalam konteks kemajemukan sosial. Nabi tidak memaksakan konversi agama, namun juga tidak membiarkan identitas keislaman terdilusi oleh kompromi berlebihan. Ini adalah keseimbangan yang sulit namun berhasil diwujudkan Nabi secara konsisten.

C. Konsep Ummatan Wasathan

Konsep ummatan wasathan merupakan terminologi kunci dalam diskursus moderasi Islam. Frasa ini berasal langsung dari Al-Qur'an dan telah menjadi salah satu identitas paling sentral bagi umat Islam. Namun, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep ini menuntut kajian yang mendalam, bukan sekadar kutipan ayat tanpa konteks.

1. Dimensi-dimensi Makna Ummatan Wasathan

Para ulama tafsir telah mengidentifikasi setidaknya tiga dimensi makna dari frasa ummatan wasathan. Pertama, dimensi ontologis: umat Islam sebagai umat terbaik dan

pilihan di antara seluruh umat manusia. Kedua, dimensi epistemologis: umat Islam sebagai pengemban kebenaran yang menjadi tolok ukur penilaian antara yang hak dan yang batil. Ketiga, dimensi aksiologis: umat Islam sebagai saksi atas kemanusiaan, yakni menjadi teladan moral dan spiritual bagi peradaban manusia (Syaltut, 2001, hlm. 87).

Fazlur Rahman (2010, hlm. 156-158) dalam *Islamic Methodology in History* memberikan pembacaan yang lebih historis dan sosiologis. Menurutnya, konsep ummatan wasathan tidak hanya berimplikasi pada posisi teologis umat Islam, tetapi juga pada tanggung jawab historis mereka untuk membangun peradaban yang berkeadilan. Umat Islam diposisikan sebagai "komunitas penengah" yang tidak terperangkap dalam absolutisme yang kaku maupun relativisme yang tidak berprinsip.

2. Wasathiyyah sebagai Karakter Identitas Kolektif

Al-Qaradhawi (2007, hlm. 43-46) dalam *Kalimat fi Al-Wasathiyyah al-Islamiyyah wa Ma'alimiha* menekankan bahwa wasathiyyah bukan sekadar watak individual, melainkan karakter kolektif yang harus tercermin dalam institusi, kebijakan, dan wajah peradaban Islam secara keseluruhan. Dengan demikian, moderasi bukan hanya soal bagaimana seorang Muslim bersikap dalam kehidupan pribadinya, tetapi juga soal bagaimana komunitas Muslim membangun tata kehidupan bersama yang adil, inklusif, dan berdaya.

Kementerian Agama Republik Indonesia (2019, hlm. 17-23) dalam *Moderasi Beragama* mendefinisikan ummatan wasathan dalam konteks Indonesia sebagai umat yang mampu memadukan antara komitmen keislaman yang kuat dengan semangat kebangsaan yang tulus. Moderasi dalam konteks ini berarti menjadi Muslim yang baik sekaligus warga negara yang bertanggung jawab—dua identitas yang tidak saling bertentangan, melainkan saling memperkuat.

D. Nilai Rahmatan lil 'Alamin dalam Islam

Rahmatan lil 'alamin atau "rahmat bagi seluruh alam" merupakan salah satu konsep paling fundamental dalam Islam. Konsep ini bersumber dari Surah Al-Anbiya' ayat 107 yang menyatakan: "Tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta." Frasa "rahmat bagi seluruh alam" ini memiliki implikasi teologis yang sangat luas dan mendalam bagi pemahaman moderasi beragama.

1. Makna Teologis Rahmatan lil 'Alamin

Ibnu Katsir menafsirkan "'alamin" dalam ayat tersebut sebagai mencakup seluruh makhluk Allah tanpa terkecuali: manusia, jin, hewan, tumbuhan, dan bahkan seluruh ekosistem alam semesta. Artinya, misi kenabian Muhammad SAW bukan hanya untuk golongan Arab, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk kebaikan seluruh ciptaan Allah (Ibnu Katsir, 2000, hlm. 187). Penafsiran ini memiliki konsekuensi teologis yang sangat signifikan: Islam tidak hadir untuk menghancurkan keberagaman, melainkan untuk merawat dan menyempurnakannya.

Abuddin Nata (2016, hlm. 112-115) mengelaborasi konsep rahmatan lil 'alamin dalam konteks pendidikan Islam modern. Menurutnya, terdapat empat dimensi rahmat yang harus tercermin dalam cara umat Islam berinteraksi dengan dunia: (1) rahmat dalam dimensi keimanan, yakni tidak memaksakan keyakinan; (2) rahmat dalam dimensi sosial, yakni membangun keharmonisan antar komunitas; (3) rahmat dalam dimensi intelektual, yakni menghargai kemajuan ilmu pengetahuan; dan (4) rahmat dalam dimensi ekologis, yakni merawat kelestarian lingkungan hidup.

2. Rahmatan lil 'Alamin dan Pengakuan atas Keberagaman

Salah satu manifestasi paling nyata dari rahmatan lil 'alamin adalah pengakuan Islam terhadap kemajemukan kemanusiaan. Surah Al-Hujurat ayat 13 menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai bangsa dan suku agar mereka saling mengenal (lita'arafu), bukan untuk

saling merendahkan. Ayat ini menempatkan keberagaman sebagai sunnatullah, yakni hukum alam yang ditetapkan Allah sebagai bagian dari desain penciptaan.

Komaruddin Hidayat (2012, hlm. 78-80) menegaskan bahwa rahmatan lil 'alamin dalam konteks kehidupan berbangsa bermakna kesediaan umat Islam untuk menjadi kekuatan konstruktif bagi kemajuan bersama. Bukan dengan melepaskan identitas keislaman, melainkan justru dengan menampilkan wajah Islam yang ramah, inklusif, dan berdaya cipta. Sikap ini berbeda secara mendasar dari interpretasi eksklusif yang mereduksi Islam menjadi agama pertarungan dan permusuhan dengan "yang lain".

E. Prinsip Toleransi dalam Tradisi Islam

Toleransi (tasamuh) merupakan salah satu pilar penting dalam bangunan moderasi Islam. Namun penting untuk membedakan antara toleransi teologis dan toleransi sosial-politik. Islam tidak mengenal relativisme teologis yang menganggap semua agama sama benarnya. Yang Islam ajarkan adalah toleransi dalam makna menghormati hak hidup, hak beribadah, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan publik bagi setiap individu tanpa memandang latar belakang agamanya.

1. Dasar Teologis Toleransi dalam Islam

Surah Al-Kafirun ayat 6—"Untukmu agamamu, dan untukku agamaku"—sering dikutip sebagai deklarasi toleransi dalam Islam. Namun pemahaman yang lebih akurat melihat ayat ini bukan sebagai pengakuan terhadap kebenaran agama lain, melainkan sebagai pernyataan tentang hak setiap orang untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing tanpa paksaan. Surah Al-Baqarah ayat 256 lebih tegas lagi: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama." Ayat ini merupakan deklarasi kebebasan beragama yang diakui Islam sejak empat belas abad silam.

Muhammad Imarah (2011, hlm. 67-71) dalam *Al-Islam wa al-Ta'addudiyyah* membedakan antara tiga level toleransi dalam Islam: pertama, toleransi 'aqadiyyah yang

berarti tidak boleh ada paksaan dalam keimanan; kedua, toleransi mu'amaliyyah yang berarti kaum Muslim wajib berbuat adil dan baik kepada non-Muslim; dan ketiga, toleransi siyasiyyah yang berarti non-Muslim berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dalam negara Islam. Ketiga level ini saling terkait dan membentuk sebuah sistem toleransi yang komprehensif.

2. Praktik Toleransi Historis dalam Peradaban Islam

Sejarah peradaban Islam mencatat banyak contoh toleransi yang tidak hanya bersifat deklaratif tetapi juga diterapkan secara struktural. Pada era Khilafah Rasyidah, kaum Yahudi, Nasrani, dan Majusi yang hidup di bawah pemerintahan Islam mendapatkan perlindungan (dzimmah) atas jiwa, harta, dan tempat ibadah mereka. Khalifah Umar bin Khattab bahkan menolak salat di dalam Gereja Makam Suci di Yerusalem untuk mencegah terjadinya klaim kepemilikan oleh kaum Muslim di kemudian hari. Peristiwa bersejarah ini diabadikan oleh Al-Thabari dalam kronik sejarahnya sebagai teladan nyata penghormatan pemimpin Islam terhadap hak-hak keagamaan non-Muslim (Al-Thabari, 2001).

Adnan Aslan (1999, hlm. 88-92) dalam *Religious Pluralism in Christian and Islamic Philosophy* memberikan analisis perbandingan yang menarik tentang toleransi dalam tradisi Islam dibandingkan dengan tradisi Kristen Barat. Ia menyimpulkan bahwa toleransi Islam bersifat lebih terstruktur karena memiliki basis hukum yang jelas (fiqh dzimmah) dibandingkan toleransi Barat yang lebih bersifat filosofis-abstrak. Meskipun praktik historisnya tidak selalu sempurna, prinsip dasarnya sangat kuat dan konsisten.

3. Toleransi dalam Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, prinsip toleransi Islam menemukan ekspresi yang unik dan khas. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah lama menjadikan toleransi sebagai bagian dari identitas keberagamaan mereka. Konsep "Islam Nusantara" yang

dikembangkan Nahdlatul Ulama, misalnya, menempatkan toleransi bukan sebagai konsesi terhadap pluralisme, melainkan sebagai ekspresi otentik nilai-nilai Islam yang telah bertumbuh dalam konteks budaya lokal selama berabad-abad (Azra, 2016, hlm. 58-62).

F. Pemikiran Ulama tentang Moderasi Beragama

Konsep moderasi telah menjadi perhatian serius para ulama dari berbagai generasi. Baik ulama klasik maupun kontemporer telah memberikan kontribusi pemikiran yang berharga untuk merumuskan dan mengoperasionalkan wasathiyyah dalam kehidupan umat Islam.

1. Pemikiran Ulama Klasik

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum Al-Din* secara implisit mengembangkan konsep moderasi melalui pembahasan tentang keseimbangan antara dimensi zahir (lahiriah) dan batin (rohaniyah) dalam beragama. Al-Ghazali mengkritik dua kelompok ekstrem: mereka yang hanya memperhatikan ritual luar tanpa mepedulikan kualitas batin, dan mereka yang mengabaikan syariat dengan dalih kemurnian batin. Jalan tengah yang ia tawarkan adalah fikih yang dihidupi spiritualitas—suatu sintesis yang ia sebut sebagai "ilmu jalan menuju akhirat" (Al-Ghazali, 2005, hlm. 23-27).

Ibnu Taimiyyah, yang sering keliru diidentikkan dengan sikap keras, sesungguhnya juga memiliki pandangan yang moderat tentang hubungan antara fikih dan kehidupan masyarakat. Dalam *Majmu' Al-Fatawa*, ia menegaskan bahwa hukum Islam harus mempertimbangkan konteks sosial ('urf) dan kemaslahatan umum (maslahah). Ia menolak taklid buta terhadap mazhab tertentu dan menganjurkan ijtihad yang bertanggung jawab berdasarkan nas dan maqashid syariah (Ibnu Taimiyyah, 2004, hlm. 345).

2. Pemikiran Ulama Kontemporer

Yusuf Al-Qaradhwai merupakan salah satu tokoh kontemporer yang paling sistematis dalam mengembangkan konsep wasathiyyah Islam. Dalam karyanya *Al-Shahwah Al-*

Islamiyyah, ia mendefinisikan wasathiyah dengan delapan karakteristik: (1) komprehensif (syumul), tidak mereduksi Islam; (2) seimbang antara teks dan konteks; (3) memudahkan dan tidak mempersulit; (4) bersikap terbuka (munfatih) terhadap pemikiran baru; (5) realistis dan tidak utopis; (6) mengutamakan persatuan dan menghindari perpecahan; (7) menghormati kemajemukan; dan (8) berorientasi pada perubahan yang gradual dan bertahap (Al-Qaradhawi, 2013, hlm. 104-118).

Abdullah Ahmad An-Na'im (2008, hlm. 45-49) dalam *Islam and the Secular State* memberikan perspektif yang berbeda namun tetap dalam kerangka moderasi. Ia berpendapat bahwa pemisahan antara negara dan agama justru diperlukan untuk melindungi Islam dari politisasi yang merusak. Negara yang netral secara agama justru memungkinkan individu Muslim menjalankan agamanya dengan lebih autentik dan bebas. Meskipun pandangan ini kontroversial, ia mencerminkan keberagaman pemikiran dalam diskursus moderasi Islam kontemporer.

Di Indonesia, Quraish Shihab melalui *Tafsir Al-Mishbah* memberikan kontribusi penting dalam membumikan konsep wasathiyah. Ia menekankan bahwa moderasi Islam Indonesia harus memperhatikan empat aspek: (1) akidah yang lurus tanpa fanatisme; (2) ibadah yang khushyuk tanpa formalism; (3) muamalah yang adil tanpa diskriminasi; dan (4) akhlak yang mulia tanpa kemunafikan. Keempat aspek ini saling berkaitan dan membentuk karakter Muslim moderat yang utuh (Shihab, 2020, hlm. 89-95).

3. Moderasi dalam Pemikiran Ulama Nusantara

Tradisi pemikiran Islam Nusantara memiliki kekayaan tersendiri dalam memaknai moderasi. Ulama-ulama seperti Hamka, Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah merumuskan konsep moderasi dalam konteks spesifik Indonesia yang pluralis. Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menegaskan bahwa Islam di Indonesia harus mampu berdialog dengan tradisi lokal tanpa

kehilangan esensi ajarannya. Konsep ini kemudian dikenal sebagai "pribumisasi Islam" yang kemudian dipopulerkan oleh Abdurrahman Wahid (Hidayat & Nafis, 2003, hlm. 78-83).

G. Implikasi Teologis bagi Pendidikan Islam

Semua landasan teologis yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya memiliki implikasi langsung yang sangat signifikan bagi dunia pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari basis teologisnya, karena pendidikan pada hakikatnya adalah upaya untuk mentransfer dan mengoperasionalkan nilai-nilai teologi ke dalam kehidupan nyata. Moderasi beragama, sebagai nilai teologis, harus menjadi jiwa yang menghidupkan seluruh sistem dan praktik pendidikan Islam.

1. Wasathiyyah sebagai Paradigma Pendidikan

Wasathiyyah yang dipahami sebagai paradigma pendidikan berarti bahwa proses pendidikan Islam harus dirancang untuk menghasilkan manusia yang seimbang (insan mutawazin): seimbang antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual, seimbang antara kompetensi teknis dan kematangan moral, serta seimbang antara komitmen keislaman dan keterbukaan terhadap kemanusiaan universal. Model pendidikan yang terlalu menekankan hafalan teks tanpa pemahaman konteks, atau sebaliknya terlalu menekankan keterampilan tanpa fondasi nilai, sama-sama merupakan bentuk ketidakseimbangan yang bertentangan dengan prinsip wasathiyyah (Muhaimin, 2008, hlm. 34-38).

Muhaimin (2008, hlm. 67-70) dalam Rekonstruksi Pendidikan Islam menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai moderasi sebagai integrated curriculum, bukan sekadar mata pelajaran tersendiri. Artinya, nilai toleransi, penghargaan terhadap kemajemukan, dan kemampuan berdialog harus tercermin dalam setiap aspek kurikulum—mulai dari metode pembelajaran, materi ajar, hingga kultur sekolah secara keseluruhan.

2. Rahmatan lil 'Alamin sebagai Orientasi Pendidikan

Jika Islam dimaknai sebagai rahmatan lil 'alamin, maka pendidikan Islam harus diorientasikan untuk melahirkan individu-individu yang membawa rahmat—kebaikan, kontribusi, dan kemaslahatan—bagi lingkungan sekitarnya. Ini berarti pendidikan Islam tidak boleh bersifat isolatif yang hanya mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan internal komunitas Muslim, melainkan harus bersifat kontributif yang mempersiapkan mereka untuk berperan aktif dalam peradaban manusia yang lebih luas.

Azyumardi Azra (2016, hlm. 112-116) menegaskan bahwa madrasah dan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam khas Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi model pendidikan rahmatan lil 'alamin. Tradisi pesantren yang mengintegrasikan ilmu agama dengan keterampilan hidup, serta tradisi toleransi yang telah mengakar, menjadikannya laboratorium hidup bagi pendidikan moderasi. Yang diperlukan adalah sistemisasi dan penguatan nilai-nilai ini dalam kurikulum dan tata kelola kelembagaan.

3. Toleransi dan Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam

Implikasi paling langsung dari prinsip toleransi dalam tradisi Islam bagi pendidikan adalah pentingnya pendidikan multikultural dalam lembaga pendidikan Islam. Peserta didik harus diperkenalkan pada keberagaman—baik keberagaman internal Islam maupun keberagaman agama dan budaya secara lebih luas—bukan sebagai ancaman yang harus diwaspadai, melainkan sebagai kenyataan yang harus dipahami dan dihargai.

H.A.R. Tilaar (2004, hlm. 167-170) dalam *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Kini* dalam Transformasi Pendidikan Nasional mengargumentasikan bahwa pendidikan multikultural bukan berarti relativisme moral, melainkan kesediaan untuk

mendengar, belajar, dan berinteraksi dengan perspektif yang berbeda. Dalam konteks pendidikan Islam, hal ini berarti peserta didik perlu dilatih bukan hanya untuk mempertahankan keyakinannya, tetapi juga untuk memahami keyakinan orang lain dengan rasa hormat dan kejujuran intelektual.

4. Guru sebagai Teladan Moderasi

Dalam pendidikan Islam, figur guru (ustaz, kyai, atau pendidik) memegang peranan yang sangat sentral. Implikasi teologis dari konsep moderasi bagi posisi guru adalah bahwa para pendidik harus menjadi teladan konkret dari nilai-nilai wasathiyyah yang mereka ajarkan. Seorang guru yang moderat tidak hanya mengajarkan tentang toleransi, tetapi juga mendemonstrasikannya dalam cara ia berinteraksi dengan siswa, mengelola perbedaan pendapat, dan merespons tantangan pemikiran yang berbeda.

Zakiah Daradjat (2004, hlm. 88-90) menekankan bahwa kepribadian guru merupakan kurikulum tersembunyi yang justru paling kuat pengaruhnya terhadap pembentukan karakter peserta didik. Guru yang berwatak moderat akan secara organik membentuk lingkungan belajar yang kondusif bagi tumbuhnya sikap-sikap moderat pada diri peserta didik. Sebaliknya, guru yang fanatik atau diskriminatif—sekalipun tidak mengajarkan hal tersebut secara eksplisit—akan menciptakan iklim pendidikan yang kontraproduktif bagi tujuan moderasi.

5. Kaitan antara Landasan Teologis dan Praktik Pendidikan Islam

Semua landasan teologis yang telah dibahas dalam bab ini memiliki hubungan yang organik dan saling menopang dalam konteks pendidikan Islam. Wasathiyyah sebagai paradigma memberikan kerangka filosofis bagi kurikulum yang seimbang. Rahmatan lil 'alamin sebagai orientasi menentukan tujuan akhir pendidikan: melahirkan manusia yang bermanfaat bagi sesama. Toleransi sebagai nilai membentuk iklim pembelajaran yang inklusif dan dialogis. Dan pemikiran ulama tentang moderasi

memberikan inspirasi metodologis bagi para pendidik dan perancang kurikulum.

Pendidikan Islam yang berbasis landasan teologis moderasi seperti yang telah diuraikan di atas akan mampu menghasilkan generasi Muslim yang tidak hanya salih secara individual, tetapi juga salih secara sosial—mampu berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan peradaban tanpa mengorbankan integritas keislamannya. Inilah visi tertinggi dari pendidikan Islam yang berpijak pada wasathiyyah dan rahmatan lil 'alamin (Azra, 2016, hlm. 121).

H. Sintesis: Koherensi Landasan Teologis Moderasi Beragama

Setelah menelaah berbagai landasan teologis moderasi beragama dari berbagai sudut pandang—Al-Qur'an, hadis, konsep ummatan wasathan, rahmatan lil 'alamin, toleransi, dan pemikiran ulama—maka dapat disimpulkan bahwa moderasi merupakan tema yang pervasif dan koheren dalam keseluruhan bangunan teologi Islam.

Pertama, terdapat benang merah yang kuat antara wasathiyyah Al-Qur'an dengan praktik kenabian. Nabi Muhammad SAW tidak hanya menerima wahyu tentang umat pertengahan, tetapi juga hidup dan memimpin dengan mewujudkan nilai-nilai wasathiyyah tersebut dalam setiap aspek kehidupannya.

Kedua, konsep ummatan wasathan dan rahmatan lil 'alamin bukan dua konsep yang berdiri sendiri, melainkan dua sisi dari satu koin yang sama. Menjadi umat pertengahan (wasathan) adalah cara untuk mewujudkan misi rahmat bagi seluruh alam. Umat yang moderat adalah umat yang mampu membawa rahmat, dan umat yang membawa rahmat niscaya bersikap moderat.

Ketiga, toleransi bukan sekadar nilai etis yang berdiri di pinggiran teologi Islam, melainkan merupakan derivat langsung dari keyakinan teologis tentang Ke-Mahaesaan Allah, kedaulatan-Nya atas seluruh makhluk, dan kebebasan yang Ia berikan kepada manusia untuk memilih jalannya

masing-masing. Toleransi dalam Islam dengan demikian memiliki akar yang sangat dalam dalam tradisi teologi.

Keempat, pemikiran ulama dari berbagai generasi menunjukkan bahwa moderasi bukan produk modernisasi yang dipaksakan dari luar, melainkan merupakan tradisi intelektual Islam yang otentik dan berkelanjutan. Meskipun terminologi dan konteks terus berkembang, esensi pemikiran tentang keseimbangan, keadilan, dan rahmah tetap menjadi arus utama dalam tradisi keilmuan Islam.

Kelima, implikasi semua landasan teologis ini bagi pendidikan Islam sangat konkret dan mendesak. Sistem pendidikan Islam harus dirancang, dikelola, dan dievaluasi berdasarkan nilai-nilai moderasi—bukan hanya pada tataran kurikulum formal, tetapi juga dalam iklim kelembagaan, kompetensi pendidik, dan relasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat yang lebih luas.

Dengan demikian, landasan teologis moderasi beragama yang dibahas dalam bab ini bukan sekadar deretan dalil normatif yang berdiri sendiri, melainkan merupakan sebuah sistem pemikiran yang koheren dan memiliki daya transformatif yang nyata bagi kehidupan umat Islam—khususnya dalam konteks pendidikan sebagai arena pembentukan generasi masa depan.

BAB 3

Moderasi Beragama Dalam Perspektif Pendidikan

A. Konsep Pendidikan Islam yang Moderat

Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan sistem pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang paripurna (*insan kamil*), yakni pribadi yang memiliki keseimbangan antara dimensi spiritual, intelektual, sosial, dan moral. Konsep pendidikan Islam yang moderat berangkat dari pemahaman bahwa Islam adalah agama yang secara inheren mengandung prinsip-prinsip keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*adalah*), dan jalan tengah (*wasathiyyah*). Prinsip-prinsip ini bukanlah sesuatu yang ditambahkan dari luar ajaran Islam, melainkan merupakan inti dari ajaran Islam itu sendiri yang terpatrit dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa umat Islam adalah umat yang moderat dan seimbang, dijadikan sebagai saksi atas seluruh umat manusia:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰى الْاِنْسَانِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ شٰهِدًا

"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu." (Q.S. Al-Baqarah: 143)

Ayat tersebut menjadi landasan teologis yang tidak terbantahkan bahwa karakter *wasathiyyah* (moderasi) adalah identitas esensial umat Islam yang harus tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam sistem

pendidikan. Istilah moderat dalam konteks pendidikan Islam merujuk pada orientasi pembelajaran yang tidak ekstrem, tidak berlebih-lebihan dalam memahami teks-teks agama, dan senantiasa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, serta perkembangan zaman. Pendidikan Islam yang moderat tidak berarti melemahkan keyakinan atau mengurangi kualitas keberagamaan, melainkan justru memperkuat identitas keislaman yang otentik melalui pemahaman yang komprehensif dan kontekstual (Muhaimin, 2004).

Secara historis, konsep pendidikan Islam moderat memiliki akar yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam klasik. Para ulama besar seperti Imam al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Rusyd telah meletakkan fondasi pemikiran pendidikan Islam yang memadukan antara ilmu-ilmu agama (*ulum al-din*) dengan ilmu-ilmu rasional (*ulum al-aqliyyah*). Al-Ghazali dalam karyanya *Ihya Ulum al-Din* menegaskan pentingnya integrasi antara keilmuan wahyu dan keilmuan rasio dalam membentuk pribadi Muslim yang utuh. Sementara itu, Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya mengedepankan pendekatan empiris dan rasional dalam memahami realitas sosial, yang sesungguhnya merupakan manifestasi dari semangat pendidikan Islam yang terbuka dan moderat (Ibnu Khaldun, 2000).

Dalam konteks Indonesia, pendidikan Islam yang moderat mendapat pijakan yang sangat kuat dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi Islam terbesar di negeri ini. NU melalui konsep *Ahlussunnah Wal Jamaah* (*Aswaja*) mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada keseimbangan antara *tawassuth* (sikap tengah), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang), dan *i'tidal* (lurus). Muhammadiyah di sisi lain mengembangkan pendidikan Islam modern yang memadukan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan kontemporer, dengan semangat *tajdid* (pembaruan) yang tetap berpijak pada Al-Quran dan Sunnah (Nashir, 2010).

Ciri khas pendidikan Islam yang moderat dapat diidentifikasi dari beberapa aspek utama. Pertama, dari

aspek kurikulum, pendidikan Islam moderat mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum tanpa memisahkan keduanya secara dikotomis, menolak keras pandangan yang mempertentangkan ilmu agama dengan ilmu dunia. Kedua, dari aspek metodologi, pendidikan Islam moderat mengembangkan pendekatan pembelajaran yang kritis, dialogis, dan kontekstual, bukan sekadar hafalan atau transmisi pengetahuan secara mekanis. Ketiga, dari aspek orientasi nilai, pendidikan Islam moderat menekankan pembentukan karakter yang *rahmatan lil alamin*, yakni memberi rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya bagi kelompok tertentu (Wahid, 2006).

Konsep pendidikan Islam yang moderat juga mensyaratkan adanya kompetensi keberagamaan yang mendalam. Artinya, seorang peserta didik tidak cukup hanya memahami Islam secara tekstual dan harfiah, tetapi juga harus mampu memahami Islam secara kontekstual dan substansial. Pemahaman yang demikian memungkinkan peserta didik untuk membedakan antara aspek-aspek ajaran Islam yang bersifat permanen dan universal (*tsawabit*) dengan aspek-aspek yang bersifat temporal dan kontekstual (*mutaghayyirat*). Kemampuan membedakan keduanya merupakan kunci utama dalam mewujudkan keberagamaan yang moderat dan tidak mudah terseret oleh arus radikalisme maupun liberalisme yang berlebihan (Shihab, 2007).

Pendidikan Islam yang moderat juga sangat erat kaitannya dengan pengembangan tradisi ilmiah dalam Islam. Tradisi membaca, menulis, berdiskusi, dan berijtihad merupakan bagian integral dari sejarah peradaban Islam yang gemilang. Ketika tradisi ilmiah ini diintegrasikan dalam sistem pendidikan Islam, maka yang terbentuk adalah generasi Muslim yang tidak hanya saleh secara ritual, tetapi juga cerdas secara intelektual dan responsif terhadap perubahan zaman. Pendidikan Islam yang moderat dengan demikian bukan sekadar pilihan metodologis, melainkan sebuah keharusan teologis yang bersumber dari pemahaman

yang benar terhadap ajaran Islam yang *syamil* (komprehensif) dan *mutakamil* (integral).

Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa pendidikan Islam yang moderat tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan lingkungan sosial, kebijakan pemerintah, dan komitmen komunitas Muslim secara luas. Pembaruan pendidikan Islam menuju moderasi memerlukan gerak bersama (*ijtihad jamaiy*) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari ulama, akademisi, pendidik, orang tua, hingga peserta didik itu sendiri, dalam sebuah gerakan transformasi pendidikan yang berkelanjutan dan berwawasan jauh ke depan.

B. Pendidikan sebagai Sarana Internalisasi Nilai Moderasi

Internalisasi nilai merupakan proses yang jauh lebih mendalam dibandingkan sekadar *transfer* pengetahuan atau sosialisasi norma. Internalisasi menghendaki bahwa nilai-nilai yang diajarkan tidak hanya berhenti pada tataran kognitif atau pengetahuan semata, tetapi meresap masuk ke dalam lapisan afektif dan psikomotorik peserta didik, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari karakter dan kepribadian yang terwujud dalam perilaku nyata sehari-hari. Pendidikan, dalam hal ini, merupakan medium yang paling efektif dan sistematis untuk menjalankan proses internalisasi nilai moderasi (Lickona, 1991).

Proses internalisasi nilai moderasi melalui pendidikan berlangsung dalam beberapa tahapan yang saling terkait. Tahapan pertama adalah tahap pengenalan (*introduction*), di mana peserta didik diperkenalkan dengan konsep-konsep moderasi secara teoritis dan konseptual. Pada tahap ini, peserta didik mendapatkan pengetahuan tentang apa itu moderasi, mengapa moderasi penting, dan bagaimana moderasi tercermin dalam tradisi keilmuan Islam. Tahapan kedua adalah tahap pemahaman (*comprehension*), di mana peserta didik tidak hanya mengetahui moderasi secara tekstual, tetapi mulai memahami moderasi secara kontekstual melalui diskusi, kajian kasus, dan refleksi kritis (Zuhdi, 2010).

Tahapan ketiga adalah tahap penghayatan (*internalization*) yang merupakan inti dari proses internalisasi itu sendiri. Pada tahap ini, peserta didik mulai merasakan dan menghayati nilai-nilai moderasi sebagai bagian dari keyakinan dan jati dirinya. Proses ini tidak bisa berlangsung secara instan, melainkan membutuhkan pengalaman belajar yang kaya, lingkungan pendidikan yang kondusif, dan teladan nyata dari para pendidik. Tahapan keempat adalah tahap manifestasi perilaku (*behavioral manifestation*), di mana nilai-nilai moderasi yang telah terhayati mulai terwujud dalam sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan nyata (Mulyasa, 2011).

Pendidikan memiliki beberapa keunggulan komparatif sebagai sarana internalisasi nilai moderasi. Pertama, pendidikan memiliki struktur yang sistematis dan berkelanjutan, sehingga proses internalisasi nilai dapat dirancang secara bertahap dan terprogram sesuai dengan perkembangan kognitif dan moral peserta didik. Kedua, pendidikan memiliki lingkungan yang terkontrol namun dinamis, yang memungkinkan terjadinya pengalaman belajar yang autentik melalui interaksi antar-peserta didik yang beragam latar belakang. Ketiga, pendidikan memiliki tenaga pendidik yang terlatih dan kompeten untuk menjadi fasilitator sekaligus teladan bagi internalisasi nilai moderasi (Tilaar, 2002).

Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, internalisasi nilai moderasi dilakukan melalui berbagai jalur dan metode yang beragam. Di pesantren, internalisasi nilai moderasi berlangsung melalui sistem *ngaji*, *wetonan*, *bandongan*, dan *sorogan* yang memungkinkan santri untuk belajar langsung dari kiai dalam suasana yang penuh kearifan dan kedamaian. Di madrasah dan sekolah Islam, internalisasi nilai moderasi dilakukan melalui kurikulum yang terintegrasi, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, dan program pembiasaan akhlak mulia. Di perguruan tinggi Islam, internalisasi nilai moderasi dilakukan melalui mata

kuliah-mata kuliah yang mengkaji Islam secara kritis, historis, dan kontekstual (Departemen Agama RI, 2007).

Metode yang paling efektif dalam internalisasi nilai moderasi adalah metode keteladanan (*uswah hasanah*). Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah." (Q.S. Al-Ahzab: 21).

Nabi Muhammad SAW merupakan teladan terbaik dalam berislam yang moderat. Para pendidik yang mampu menunjukkan sikap moderat dalam perilaku sehari-hari, dalam menyikapi perbedaan pendapat, dan dalam berinteraksi dengan kelompok yang berbeda, akan menjadi model internalisasi nilai yang jauh lebih efektif dibandingkan sekadar mengajarkan moderasi melalui ceramah dan teori (Arief, 2002).

Selain keteladanan, metode dialog (*hiwar*) dan diskusi kritis juga sangat penting dalam internalisasi nilai moderasi. Melalui dialog, peserta didik dilatih untuk mendengarkan perspektif yang berbeda, mengargumentasikan pendapat dengan etika yang baik, dan mencari titik temu dalam perbedaan. Kemampuan berdialog secara konstruktif merupakan salah satu indikator paling konkret dari keberhasilan internalisasi nilai moderasi dalam pendidikan. Dengan metode ini, peserta didik tidak hanya mengetahui moderasi secara teoritis, tetapi benar-benar mempraktikkan moderasi dalam proses pembelajaran itu sendiri (Freire, 2000).

Metode lain yang tidak kalah penting adalah pendekatan *reflective learning* atau pembelajaran berbasis refleksi. Melalui pendekatan ini, peserta didik diajak untuk secara terus-menerus merenungkan pengalaman belajar mereka, mengaitkan nilai-nilai moderasi dengan realitas kehidupan nyata yang mereka hadapi, dan mengembangkan kesadaran kritis tentang tantangan keberagaman di era

kontemporer. Refleksi yang mendalam dan berkelanjutan inilah yang pada akhirnya akan mengubah pengetahuan tentang moderasi menjadi sikap dan perilaku moderat yang mengakar kuat dalam kepribadian peserta didik.

C. Peran Lembaga Pendidikan dalam Membangun Sikap Moderat

Lembaga pendidikan memiliki peran strategis yang tidak tergantikan dalam membentuk sikap dan karakter peserta didik, termasuk sikap moderat dalam beragama. Sebagai institusi sosial yang terorganisir, lembaga pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat *transfer* ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai laboratorium sosial di mana peserta didik belajar hidup bersama, menghargai perbedaan, dan menempa diri sebagai warga negara yang baik sekaligus Muslim yang moderat. Peran ini menjadi semakin krusial di tengah meningkatnya ancaman radikalisme agama dan intoleransi yang menargetkan generasi muda melalui berbagai saluran, terutama media sosial dan komunitas tertutup (Suryani, 2017).

Lembaga pendidikan formal, yang mencakup madrasah ibtidaiyah hingga perguruan tinggi Islam, berperan dalam membangun sikap moderat melalui tiga dimensi utama. Dimensi pertama adalah dimensi kurikuler, yakni melalui desain dan implementasi kurikulum yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai moderasi ke dalam setiap mata pelajaran. Tidak hanya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, tetapi juga dalam mata pelajaran ilmu sosial, sains, bahasa, dan seni, nilai-nilai moderasi dapat diinternalisasikan secara terpadu dan tidak parsial. Dimensi kedua adalah dimensi ko-kurikuler, yakni melalui kegiatan-kegiatan yang melengkapi kurikulum formal (Muhaimin, 2012).

Dimensi ketiga adalah dimensi budaya sekolah atau madrasah (*school culture*). Budaya lembaga pendidikan yang mengedepankan inklusivitas, saling menghormati, dan kebersamaan dalam keberagaman merupakan media

internalisasi nilai moderasi yang sangat efektif. Ketika peserta didik setiap hari berinteraksi dalam lingkungan yang menghargai perbedaan, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan merayakan keberagaman sebagai anugerah Allah SWT, maka nilai-nilai moderasi perlahan namun pasti akan terpatritasi dalam diri mereka. Budaya sekolah yang moderat juga tercermin dari cara lembaga pendidikan mengelola konflik antar peserta didik, di mana pendekatan mediasi dan dialog selalu diprioritaskan di atas pendekatan punitif (Azzet, 2011).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang khas Indonesia memiliki peran yang sangat unik dalam membangun sikap moderat. Selama berabad-abad, pesantren telah menjadi benteng moderasi Islam di Nusantara melalui pengajaran kitab-kitab kuning (*al-kutub al-musharrafah*) yang mengandung khasanah pemikiran Islam yang kaya, moderat, dan kontekstual dengan realitas Indonesia. Kiai sebagai figur sentral di pesantren memainkan peran yang sangat penting sebagai teladan moderasi, mediator konflik sosial, dan penjaga tradisi Islam yang *rahmatan lil alamin*. Tradisi *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *i'tidal* (sikap adil) yang diajarkan di pesantren merupakan nilai-nilai inti moderasi yang relevan sepanjang zaman (Dhofier, 2011).

Perguruan tinggi Islam, seperti UIN, IAIN, dan STAIN yang tersebar di seluruh Indonesia, memiliki peran khusus dalam membangun sikap moderat melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Melalui penelitian, publikasi ilmiah, dan pengajaran yang kritis dan akademis, perguruan tinggi Islam berkontribusi pada pembentukan narasi Islam yang moderat yang dapat menjadi referensi bagi masyarakat luas. Program-program studi seperti Studi Agama-Agama, Filsafat Islam, dan Hukum Islam yang diajarkan dengan pendekatan komparatif dan kritis membantu mahasiswa untuk memahami Islam dalam perspektif yang lebih luas, inklusif, dan toleran (Azra, 2012).

Dalam konteks era digital, lembaga pendidikan juga perlu memperluas perannya ke ruang digital sebagai arena internalisasi nilai moderasi. Konten-konten digital yang mempromosikan nilai-nilai keberagaman yang ekstrem dan intoleran semakin masif dan mudah diakses oleh peserta didik. Lembaga pendidikan perlu merespons tantangan ini dengan mengembangkan literasi digital (*digital literacy*) yang berbasis moderasi, yakni kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons konten-konten digital yang berpotensi memprovokasi intoleransi dan radikalisme. Program pendidikan literasi digital yang terintegrasi dalam kurikulum merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa diabaikan oleh lembaga pendidikan saat ini (Wahid Foundation, 2016).

Peran lembaga pendidikan juga mencakup fungsi sebagai *agent of social change* atau agen perubahan sosial. Dalam kapasitas ini, lembaga pendidikan tidak hanya merespons dinamika sosial yang ada, tetapi juga aktif membentuk arah perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih moderat, toleran, dan berkeadaban. Lembaga pendidikan yang progresif dan visioner akan selalu menjadi garda terdepan dalam mempromosikan nilai-nilai Islam *wasathiyyah* di tengah berbagai tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang terus berlangsung dengan cepat.

D. Pendidikan Karakter dan Moderasi Beragama

Pendidikan karakter dan moderasi beragama merupakan dua hal yang pada hakikatnya tidak terpisahkan. Karakter yang baik adalah karakter yang seimbang, adil, dan mampu menempatkan sesuatu pada proporsi yang tepat, dan inilah esensi dari moderasi. Al-Quran dengan tegas mengingatkan manusia untuk tidak berlebih-lebihan dalam segala hal:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

"Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar." (Q.S. An-Nisa: 171).

Pesan larangan *ghuluw* (berlebih-lebihan) dalam agama ini berlaku universal dan menjadi fondasi teologis bagi pendidikan karakter yang moderat. Moderasi beragama yang autentik akan selalu melahirkan karakter yang mulia, karena Islam yang dipahami secara moderat adalah Islam yang mendorong pemeluknya untuk menjadi manusia yang berakhlak baik kepada Allah SWT, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta (Lickona, 1991).

Konsep pendidikan karakter dalam perspektif Islam sangat kaya dan komprehensif. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW menyebutkan ratusan nilai karakter yang harus dimiliki oleh seorang Muslim, mulai dari kejujuran (*sidq*), amanah (*amanah*), keberanian (*syajaah*), kesabaran (*shabr*), kebijaksanaan (*hikmah*), kasih sayang (*rahmah*), hingga keadilan (*adalah*). Nilai-nilai karakter ini, jika dipahami dan dihayati secara holistik, akan membentuk kepribadian Muslim yang moderat (Al-Attas, 1979).

Dalam kerangka pendidikan karakter yang berbasis moderasi, terdapat beberapa nilai inti yang perlu mendapat penekanan khusus. Pertama, nilai toleransi (*tasamuh*), yakni kemampuan untuk menghormati dan menghargai perbedaan, baik perbedaan dalam pemahaman keagamaan, perbedaan budaya, maupun perbedaan identitas sosial. Toleransi yang dimaksud bukan berarti meleburkan perbedaan atau menganggap semua agama dan keyakinan sama, tetapi menerima kenyataan bahwa perbedaan adalah *sunnatullah* yang harus disikapi dengan kedewasaan dan kebijaksanaan. Kedua, nilai empati (*ta'athuf*), yakni kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain (Kemendikbud, 2017).

Ketiga, nilai keadilan (*adalah*), yakni kemampuan untuk berlaku adil dalam setiap situasi dan kondisi, tanpa memihak berdasarkan kepentingan kelompok, agama, atau identitas tertentu. Keadilan dalam perspektif moderasi berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya, memberikan hak kepada yang berhak, dan menolak segala bentuk diskriminasi dan kezaliman. Nilai

keadilan ini merupakan fondasi dari masyarakat yang damai dan harmonis. Keempat, nilai kewarganegaraan (*muwathanah*), yakni kesadaran dan komitmen untuk menjadi warga negara yang baik, mencintai tanah air, menaati peraturan, dan berkontribusi aktif bagi kemajuan bangsa (Majelis Ulama Indonesia, 2019).

Implementasi pendidikan karakter yang berorientasi pada moderasi beragama membutuhkan pendekatan yang holistik dan multidimensional. Pendekatan holistik berarti bahwa pendidikan karakter tidak hanya dilakukan melalui pengajaran nilai secara verbal dan teoritis, tetapi juga melalui pemodelan (*modeling*) oleh guru dan tenaga kependidikan, penciptaan lingkungan sekolah yang karakter-sentris, penguatan melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan pelibatan orang tua serta komunitas dalam proses pendidikan. Pendekatan multidimensional berarti bahwa pendidikan karakter menjangkau seluruh dimensi perkembangan peserta didik secara serentak (Berkowitz & Bier, 2005).

Kurikulum pendidikan karakter yang berbasis moderasi juga harus dirancang dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik. Pada jenjang pendidikan dasar, nilai-nilai moderasi ditanamkan melalui cerita-cerita sederhana tentang persahabatan lintas agama, kegiatan bermain bersama, dan pembiasaan sikap saling menghormati dalam keseharian. Pada jenjang pendidikan menengah, nilai-nilai moderasi dikuatkan melalui diskusi tentang isu-isu aktual keberagamaan dan kebangsaan serta kajian tentang tokoh-tokoh Islam moderat. Pada jenjang pendidikan tinggi, nilai-nilai moderasi diperdalam melalui kajian akademis yang kritis dan riset ilmiah tentang fenomena keberagamaan dan moderasi (Kementerian Agama RI, 2019).

Evaluasi dalam pendidikan karakter yang berorientasi moderasi perlu dikembangkan secara komprehensif, tidak hanya melalui tes tertulis yang mengukur dimensi kognitif semata. Evaluasi yang komprehensif melibatkan observasi perilaku peserta didik,

penilaian portofolio, penilaian sejawat (*peer assessment*), penilaian diri (*self-assessment*), dan laporan dari orang tua tentang perilaku peserta didik di luar sekolah. Dengan evaluasi yang demikian, gambaran tentang perkembangan karakter moderat peserta didik dapat diperoleh secara lebih akurat dan menyeluruh (Damon, 2002).

E. Pendidikan Multikultural dalam Islam

Pendidikan multikultural merupakan pendekatan pendidikan yang mengakui, menghargai, dan merespons keberagaman budaya, agama, etnis, bahasa, dan identitas sosial dalam proses pembelajaran. Dalam konteks Islam, pendidikan multikultural mendapatkan justifikasi teologis yang sangat kuat dari Al-Quran:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (Q.S. Al-Hujurat: 13).

Ayat ini menegaskan bahwa keberagaman adalah kehendak Allah SWT (*iradatullah*) yang harus disikapi dengan sikap saling mengenal (*ta'aruf*), menghargai, dan bekerja sama, bukan dengan sikap saling menolak, mendiskriminasi, atau melakukan kekerasan (Banks, 2010). Konsep pendidikan multikultural dalam Islam bersumber dari pandangan dunia Islam (*Islamic worldview*) yang mengakui universalitas kemanusiaan di satu sisi dan kekhususan identitas budaya di sisi lain.

Pendidikan multikultural dalam Islam memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya dari pendidikan multikultural sekuler. Prinsip pertama adalah tauhid sebagai fondasi pluralisme. Artinya, pengakuan terhadap keberagaman budaya dan agama dalam pendidikan

multikultural Islam tidak dilandasi oleh relativisme nilai yang menganggap semua nilai dan keyakinan sama, tetapi dilandasi oleh keyakinan tauhid bahwa Allah SWT adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan keberagaman dengan tujuan dan hikmah tertentu. Dengan fondasi tauhid ini, pendidikan multikultural dalam Islam dapat mengembangkan sikap toleran dan inklusif tanpa harus mengorbankan akidah dan identitas keislaman (Abdurrahman, 2009).

Prinsip kedua adalah keadilan sosial (*social justice*) berbasis Islam. Pendidikan multikultural dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan apresiasi terhadap keberagaman, tetapi juga untuk melawan segala bentuk ketidakadilan, diskriminasi, dan marginalisasi yang dialami oleh kelompok-kelompok yang lemah dan terpinggirkan. Nilai Islam tentang keadilan (*'adalah*), persamaan (*musawah*), dan persaudaraan (*ukhuwwah*) memberikan landasan yang kuat bagi pendidikan multikultural yang berorientasi pada transformasi sosial. Prinsip ketiga adalah dialog antar-budaya (*inter-cultural dialogue*) yang konstruktif dan dilandasi oleh niat baik, kejujuran, dan saling menghormati (Tilaar, 2002).

Implementasi pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia menghadapi beberapa tantangan sekaligus peluang. Tantangan utamanya adalah masih kuatnya pandangan bahwa Islam dan nilai-nilai multikultural adalah dua hal yang tidak kompatibel. Peluangnya adalah kenyataan bahwa Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang sangat tinggi, dan mayoritas masyarakat Indonesia telah lama hidup dalam kerukunan dan harmoni antar-budaya. Kearifan lokal (*local wisdom*) yang telah menjadi warisan turun-temurun merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam pengembangan pendidikan multikultural berbasis Islam (Tilaar, 2004).

Kurikulum pendidikan multikultural dalam Islam perlu dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik

tidak hanya belajar tentang keberagaman secara kognitif, tetapi juga mengalami keberagaman secara langsung dalam proses pembelajaran. Program pertukaran pelajar antar-sekolah yang berbeda latar belakang agama dan budaya, proyek kolaborasi lintas komunitas, dan kunjungan ke tempat-tempat ibadah dan komunitas budaya yang berbeda merupakan beberapa contoh kegiatan pendidikan multikultural yang dapat diintegrasikan. Pengalaman langsung (*experiential learning*) semacam ini terbukti lebih efektif dalam membentuk sikap toleran dan inklusif dibandingkan sekadar pembelajaran teoritis di dalam kelas (Grant & Sleeter, 2011).

Tokoh-tokoh Muslim moderat yang dapat dijadikan inspirasi dalam pengembangan pendidikan multikultural sangat banyak. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan figur yang paling ikonik dalam memperjuangkan Islam yang inklusif, humanis, dan multikultural di Indonesia. Nurcholish Madjid (Cak Nur) mempromosikan nilai-nilai pluralisme melalui semboyan terkenalnya bahwa "Islam, Yes; Partai Islam, No," sebagai ekspresi dari keberagaman yang substantif dan tidak sekadar simbolik. Keduanya telah mewariskan tradisi intelektual Islam yang *rahmatan lil alamin* yang menjadi referensi penting bagi pengembangan pendidikan Islam multikultural di Indonesia (Barton, 2002). Selain itu juga ada KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah), adik Gus Dur yang juga memiliki pandangan Islam moderat dalam bingkai perpaduan keislaman dan keindonesiaan, di mana di dalam beragama kita tidak dapat menyangkal fakta bahwa kita juga dilahirkan dalam darah keindonesian, sehingga kedua entitas itu tidak boleh dipisahkan dan dipertentangkan (Wahid, 2018).

Lebih jauh, pendidikan multikultural dalam Islam juga perlu mengembangkan kompetensi antarbudaya (*intercultural competence*) peserta didik, yakni kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan hidup bersama secara efektif dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Kompetensi ini mencakup pengetahuan

tentang keberagaman budaya, keterampilan komunikasi lintas budaya, dan sikap terbuka terhadap perbedaan. Pengembangan kompetensi antarbudaya ini merupakan salah satu kontribusi terpenting yang dapat diberikan oleh pendidikan Islam terhadap pembangunan masyarakat Indonesia yang damai dan berkeadaban.

F. Strategi Integrasi Moderasi dalam Sistem Pendidikan

Integrasi nilai-nilai moderasi ke dalam sistem pendidikan membutuhkan perencanaan yang matang, komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan, dan strategi yang komprehensif yang menjangkau seluruh komponen sistem pendidikan. Tidak cukup hanya menambahkan beberapa materi tentang moderasi dalam kurikulum, atau mengadakan beberapa seminar tentang toleransi, karena integrasi yang autentik dan bermakna menghendaki transformasi yang lebih mendalam dan sistemik dalam seluruh dimensi pendidikan (Sleeter, 2011).

Strategi pertama adalah reformasi kurikulum yang berorientasi pada moderasi. Reformasi ini tidak berarti mengganti seluruh kurikulum yang ada, tetapi melakukan tinjauan kritis terhadap kurikulum yang berlaku untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang perlu diperkuat, direvisi, atau ditambahkan nilai-nilai moderasi. Dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, perlu dipastikan bahwa materi-materi yang diajarkan tidak hanya mencakup ibadah ritual dan akidah, tetapi juga mencakup nilai-nilai universal Islam tentang toleransi, perdamaian, keadilan, dan kewarganegaraan (*muwathanah*). Buku-buku teks yang berpotensi memicu intoleransi perlu direvisi atau diganti dengan buku-buku teks yang mempromosikan nilai-nilai moderasi (Kemendikbud, 2017).

Strategi kedua adalah pengembangan kompetensi guru dalam pendidikan moderasi. Guru merupakan ujung tombak dari setiap upaya reformasi pendidikan. Guru yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang moderasi,

atau yang sendiri memiliki pandangan keberagamaan yang eksklusif dan intoleran, tidak akan mampu menjadi agen internalisasi nilai moderasi yang efektif. Oleh karena itu, program *pre-service* dan *in-service training* guru perlu dirancang secara khusus untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal pemahaman tentang moderasi beragama, kemampuan mengintegrasikan nilai moderasi dalam pembelajaran, dan kemampuan mengelola kelas yang beragam secara inklusif dan demokratis (Kementerian Agama RI, 2019).

Strategi ketiga adalah penguatan ekosistem pendidikan (*educational ecosystem*) yang mendukung moderasi. Ekosistem ini mencakup lingkungan fisik sekolah, budaya organisasi lembaga pendidikan, pola hubungan antar-warga sekolah, dan keterhubungan lembaga pendidikan dengan komunitas di sekitarnya. Lingkungan fisik sekolah dapat dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai moderasi, misalnya melalui pameran karya seni yang mencerminkan keberagaman budaya dan perpustakaan yang menyediakan buku-buku dari berbagai perspektif keagamaan. Budaya organisasi yang mendukung moderasi ditandai oleh kepemimpinan yang demokratis, pengambilan keputusan yang partisipatif, dan penyelesaian konflik yang mengedepankan dialog dan mediasi (Suprayogo, 2004).

Strategi keempat adalah pengembangan kemitraan strategis (*strategic partnership*) antara lembaga pendidikan dengan berbagai pemangku kepentingan. Integrasi moderasi dalam sistem pendidikan membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, komunitas orang tua, dan sektor swasta. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki peran kunci dalam menyusun kebijakan, mengalokasikan anggaran, dan membangun kerangka regulasi yang mendukung integrasi moderasi dalam sistem pendidikan nasional (Azra, 2017).

Strategi kelima adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiseminasikan konten pendidikan moderasi. Platform-platform digital, aplikasi pembelajaran berbasis *web*, media sosial, dan konten multimedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi kepada peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat luas. Pengembangan konten digital pendidikan moderasi yang berkualitas dan mudah diakses merupakan investasi strategis yang tidak bisa diabaikan. Program pendidikan literasi media dan literasi digital perlu diintegrasikan dalam kurikulum untuk membekali peserta didik dengan kemampuan kritis dalam mengonsumsi dan memproduksi konten digital (Wahid Foundation, 2016).

Strategi keenam adalah pengembangan sistem evaluasi dan akuntabilitas (*accountability*) yang berbasis nilai-nilai moderasi. Evaluasi pendidikan yang selama ini terfokus pada hasil belajar kognitif perlu diperluas untuk mencakup penilaian terhadap perkembangan sikap dan perilaku peserta didik dalam hal toleransi, inklusivitas, dan moderasi beragama. Pengembangan instrumen penilaian yang valid dan reliabel untuk mengukur dimensi-dimensi sikap moderat merupakan kebutuhan akademis dan praktis yang mendesak. Sistem akreditasi lembaga pendidikan perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai moderasi (Damon, 2002).

Strategi-strategi di atas perlu diimplementasikan dalam sebuah kerangka kerja (*framework*) yang kohesif dan terintegrasi, bukan secara parsial dan terpisah-pisah. Kerangka kerja integrasi moderasi yang kohesif mensyaratkan adanya koordinasi yang baik antara berbagai komponen sistem pendidikan, mulai dari kebijakan di tingkat nasional hingga praktik pembelajaran di tingkat kelas. Dengan kerangka kerja yang kohesif dan berkelanjutan, integrasi moderasi dalam sistem pendidikan nasional dapat memberikan hasil yang optimal dan berdampak jangka

panjang bagi pembentukan generasi Muslim Indonesia yang moderat, cerdas, dan berkarakter mulia.

G. Tantangan Pendidikan dalam Menanamkan Moderasi

Upaya pendidikan dalam menanamkan moderasi beragama tidak berlangsung dalam ruang yang vakum, tetapi berhadapan dengan berbagai tantangan yang kompleks dan saling terkait. Pemahaman yang komprehensif terhadap tantangan-tantangan ini merupakan prasyarat untuk merancang strategi pendidikan moderasi yang efektif dan berkelanjutan. Allah SWT mengingatkan dalam Al-Quran bahwa ujian dan tantangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia:

أَحْسِبَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ أَنْ يَقُولُوا ءَامِنًا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ

"Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman,' dan mereka tidak diuji?" (Q.S. Al-Ankabut: 2).

Ayat ini mengingatkan bahwa setiap upaya menegakkan kebaikan, termasuk menanamkan moderasi melalui pendidikan, pasti akan menghadapi ujian dan tantangan. Tantangan-tantangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tantangan internal dari dalam sistem pendidikan itu sendiri, tantangan eksternal dari lingkungan sosial dan budaya, serta tantangan struktural dari konteks politik dan ekonomi yang lebih luas.

Tantangan internal pertama adalah inkonsistensi antara pesan dan praktik dalam lembaga pendidikan. Seringkali terjadi bahwa lembaga pendidikan secara formal mengajarkan nilai-nilai moderasi dan toleransi, namun dalam praktik pengelolaan lembaga dan interaksi antarwarga sekolah, nilai-nilai tersebut tidak benar-benar diterapkan. Fenomena ini dalam kajian pendidikan disebut sebagai *hidden curriculum* atau kurikulum tersembunyi yang negatif, yakni ketika pesan-pesan implisit yang disampaikan oleh lingkungan sekolah bertentangan dengan pesan-pesan eksplisit yang diajarkan di kelas. Inkonsistensi semacam ini

merusak kredibilitas pendidikan moderasi dan mengirimkan pesan yang kontradiktif kepada peserta didik (Zuhdi, 2010).

Tantangan internal kedua adalah keterbatasan kompetensi guru dalam pendidikan moderasi. Sebagian besar guru, terutama guru Pendidikan Agama Islam, tidak mendapatkan pelatihan yang memadai tentang cara mengajarkan moderasi secara efektif. Sebagian dari mereka mungkin sendiri belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang moderasi beragama, atau bahkan memiliki pandangan keberagamaan yang cenderung eksklusif. Kondisi ini menciptakan masalah mendasar dalam rantai transmisi nilai moderasi dari institusi pendidikan ke peserta didik. Program *pre-service* dan *in-service training* guru yang secara khusus membahas kompetensi pendidikan moderasi masih sangat terbatas (Mulyasa, 2011).

Tantangan eksternal yang paling signifikan adalah pengaruh media digital dan media sosial yang massif terhadap pembentukan pandangan keberagamaan peserta didik. Generasi muda saat ini menghabiskan rata-rata tujuh hingga delapan jam per hari di dunia digital, dan dalam rentang waktu tersebut mereka terpapar oleh ribuan konten yang beragam, termasuk konten-konten keagamaan yang seringkali bernada ekstrem dan intoleran. Algoritma media sosial yang cenderung menciptakan *echo chamber* dan memperkuat *confirmation bias* membuat peserta didik semakin sulit untuk terpapar oleh perspektif keberagamaan yang beragam dan moderat (Wahid Foundation, 2016).

Tantangan eksternal kedua adalah pengaruh lingkungan keluarga dan komunitas yang mungkin tidak mendukung nilai-nilai moderasi. Keluarga merupakan lembaga sosialisasi pertama dan terkuat bagi anak. Jika di dalam keluarga anak terpapar oleh pandangan keberagamaan yang eksklusif dan intoleran, maka upaya lembaga pendidikan untuk menanamkan moderasi akan menghadapi tantangan yang sangat besar. Demikian pula, komunitas agama dan sosial yang diikuti peserta didik di luar sekolah dapat memberikan pengaruh yang kuat. Gerakan-

gerakan keagamaan berhaluan keras seringkali merekrut anggota baru dari kalangan remaja melalui kegiatan-kegiatan yang tampak positif namun secara gradual menanamkan ideologi yang bertentangan dengan *wasathiyyah* (Suryani, 2017).

Tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian serius adalah ketidaksetaraan kualitas pendidikan antar daerah dan antar kelompok sosial ekonomi. Daerah-daerah terpencil dan masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah seringkali mendapatkan akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan yang mempromosikan moderasi. Kondisi ini menciptakan *educational gap* yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal. Oleh karena itu, pemerataan akses dan kualitas pendidikan moderasi secara nasional merupakan keharusan yang tidak bisa ditunda (Azra, 2012).

Tantangan lainnya adalah resistensi dari sebagian komunitas terhadap program pendidikan moderasi yang dianggap sebagai upaya sekularisasi atau *westernisasi* Islam. Narasi bahwa moderasi adalah produk impor Barat yang bertujuan melemahkan identitas Islam seringkali digunakan untuk menolak program pendidikan moderasi. Untuk menghadapi tantangan ini, perlu dibangun narasi yang meyakinkan bahwa moderasi adalah nilai asli Islam yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pelibatan ulama dan tokoh agama yang dihormati masyarakat merupakan strategi yang efektif untuk menghadapi resistensi ini (Nashir, 2010).

Akhirnya, tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah keberlanjutan (*sustainability*) dari program-program pendidikan moderasi. Seringkali program-program ini bersifat sporadis dan *project-oriented*, yang berarti hanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan berhenti ketika proyek selesai atau anggaran habis. Untuk menanamkan moderasi yang mengakar dan bertahan lama, dibutuhkan program pendidikan yang sistemik dan terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional secara

permanen. Ini membutuhkan komitmen politik dan anggaran dari pemerintah, serta komitmen institusional yang kuat dari seluruh lembaga pendidikan di Indonesia (Kementerian Agama RI, 2019).

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, dunia pendidikan Islam perlu mengembangkan sikap *adaptif* dan *inovatif* tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai dasarnya. Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fiqih yang mashur: *al-muhafazhah ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*, yakni menjaga warisan lama yang masih relevan dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Dengan semangat inilah, pendidikan Islam dapat terus berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai moderasi di tengah dinamika zaman yang terus berubah, demi terwujudnya generasi Muslim Indonesia yang *rahmatan lil alamin*.

BAB 4

Moderasi Beragama Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam

A. Konsep Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu komponen fundamental dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yang memiliki kedudukan strategis dalam pembentukan karakter dan kepribadian generasi bangsa. Secara etimologis, kata *curriculum* berasal dari bahasa Latin yang berarti "jalan yang harus ditempuh" atau "arena perlombaan". Dalam konteks pendidikan modern, kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Hasan, 2021). Pemahaman ini mengisyaratkan bahwa kurikulum bukan sekadar daftar mata pelajaran, melainkan suatu sistem yang menyeluruh dan terintegrasi yang mencakup visi, misi, tujuan, konten, proses, dan evaluasi pendidikan.

Dalam perspektif Islam, konsep kurikulum sesungguhnya telah dikenal sejak masa awal perkembangan peradaban Islam melalui istilah *manhaj* yang bermakna jalan yang terang atau program yang terencana. Para ulama dan cendekiawan Muslim sepanjang sejarah peradaban Islam telah merancang berbagai program pembelajaran yang terstruktur, mulai dari sistem *halaqah* di masjid-masjid, *kutab* untuk pendidikan dasar, hingga kurikulum *madrasah*

yang berkembang sejak era dinasti Abbasiyyah. Semua sistem pendidikan tersebut memiliki tujuan yang jelas, konten yang terorganisasi, dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Al-Quran sendiri telah memberikan petunjuk mengenai pentingnya pendidikan yang terprogram dan sistematis, sebagaimana firman Allah SWT:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan." (QS. Al-Alaq: 1).

Ayat tersebut menjadi landasan teologis yang paling mendasar bagi pengembangan kurikulum PAI yang menekankan pentingnya proses pembelajaran yang berpijak pada nilai-nilai ketuhanan. Perintah membaca dalam ayat ini tidak hanya dimaknai secara literal sebagai kemampuan membaca teks, melainkan juga dalam makna yang lebih luas, yaitu kemampuan untuk membaca, memahami, dan menginterpretasikan seluruh ayat-ayat Allah, baik *ayat qauliyyah* (ayat-ayat Al-Quran) maupun *ayat kauniyyah* (tanda-tanda Allah di alam semesta). Dengan demikian, kurikulum PAI sesungguhnya diorientasikan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami dan menghayati kedua jenis ayat tersebut secara seimbang dan terpadu. Maka sejatinya perintah *iqra'* itu tidak hanya berarti "bacalah!", tetapi juga melakukan penelitian (*istiqra'*) berkelanjutan, sehingga dapat dipahami bahwa membaca yang dimaksud adalah melakukan analisis dan penelitian ilmiah, terhadap sesuatu yang sudah ada (*maa kaana*) dan yang kemungkinan ada (*maa yumkinu kauhunu*). Dari situ, PAI mendorong adanya analisis mendalam, inovasi, penemuan, penelitian berkelanjutan, dan pengembangan keilmuan.

Kurikulum PAI tidak sekadar memuat aspek pengetahuan agama semata, melainkan juga mencakup dimensi sikap, keterampilan, dan karakter yang mencerminkan nilai-nilai Islam yang komprehensif. Dalam pandangan para ahli pendidikan Islam, kurikulum PAI yang

ideal harus mampu mengintegrasikan tiga domain utama, yaitu domain intelektual yang berkaitan dengan pengembangan pemikiran dan pengetahuan keagamaan, domain spiritual yang berkaitan dengan pendalaman keimanan dan ketakwaan, serta domain sosial-moral yang berkaitan dengan pembentukan akhlak mulia dan kemampuan berinteraksi dengan sesama secara harmonis.

Pengertian kurikulum PAI dalam konteks pendidikan formal di Indonesia dapat dipahami melalui dua dimensi utama yang saling melengkapi. Pertama, dimensi dokumen, yaitu kurikulum sebagai rencana tertulis yang memuat berbagai komponen pembelajaran mulai dari tujuan, materi, metode, hingga evaluasi. Dokumen kurikulum ini berfungsi sebagai panduan bagi seluruh praktisi pendidikan dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Kedua, dimensi pengalaman, yaitu kurikulum sebagai totalitas pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama mengikuti proses pendidikan, baik di dalam maupun di luar kelas (Muhaimin, 2020). Dimensi kedua ini sering disebut dengan *hidden curriculum* atau kurikulum tersembunyi, yang mencakup semua pengalaman tidak terencana yang turut membentuk pemahaman, sikap, dan perilaku peserta didik.

Komponen utama kurikulum PAI mencakup beberapa elemen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tujuan pendidikan menjadi komponen pertama yang berfungsi sebagai arah dan pedoman seluruh proses pembelajaran. Dalam kurikulum PAI, tujuan tidak hanya bersifat kognitif semata, melainkan juga menyentuh aspek afektif dan psikomotorik yang terintegrasi dalam satu kesatuan utuh yang holistik. Secara hierarkis, tujuan kurikulum PAI dapat dibedakan menjadi tujuan umum yang mencerminkan visi besar pendidikan Islam, tujuan institusional yang merujuk pada profil lulusan yang diharapkan dari setiap jenjang pendidikan, tujuan kurikuler yang berkaitan dengan mata pelajaran PAI secara keseluruhan, dan tujuan instruksional yang bersifat lebih spesifik dan terukur untuk setiap unit pembelajaran. Tujuan

akhir PAI adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang moderat (*wasathiyyah*).

Komponen kedua adalah materi atau isi kurikulum yang mencakup berbagai bidang kajian keislaman. Dalam konteks kurikulum PAI nasional, materi pembelajaran mencakup lima aspek utama, yaitu *Al-Quran dan Hadis*, *aqidah*, *akhlak*, *fiqh*, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Kelima aspek ini dipilih dan diorganisasikan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta relevansinya dengan kehidupan nyata. Prinsip pemilihan materi dalam kurikulum PAI yang berorientasi moderasi harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain keseimbangan antara konten normatif-doktrinal dengan konten kontekstual-empiris, keseimbangan antara perspektif klasik dan perspektif kontemporer, serta keseimbangan antara dimensi individual dan dimensi sosial dari ajaran Islam. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, materi PAI tidak hanya akan membentuk peserta didik yang paham tentang Islam secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial yang plural dan dinamis.

Komponen ketiga adalah metode pembelajaran yang dipilih untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Metode dalam kurikulum PAI modern tidak lagi terbatas pada metode ceramah atau *talaqqi* semata, melainkan telah berkembang menjadi beragam pendekatan yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Berbagai metode seperti *inquiry learning*, *problem-based learning*, *project-based learning*, diskusi kelompok, simulasi, bermain peran (*role-playing*), dan studi kasus semakin banyak diintegrasikan dalam pembelajaran PAI untuk mendorong peserta didik berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Pemilihan metode yang tepat harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik materi, kondisi peserta didik, dan ketersediaan sumber daya yang ada.

Komponen keempat adalah media dan sumber pembelajaran yang digunakan untuk mendukung proses penyampaian materi. Dalam era digital saat ini, media pembelajaran PAI telah berkembang jauh melampaui buku teks dan papan tulis. Berbagai media digital seperti video pembelajaran, *podcast* keagamaan, aplikasi *mobile*, platform *e-learning*, dan berbagai sumber informasi daring lainnya kini tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Pemanfaatan media yang beragam dan inovatif bukan hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan literasi informasi yang sangat dibutuhkan di era digital.

Komponen kelima adalah evaluasi yang berfungsi untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi dalam kurikulum PAI yang berbasis moderasi tidak hanya mengukur penguasaan pengetahuan faktual, melainkan juga menilai perkembangan sikap, perilaku, dan kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengukur dimensi-dimensi tersebut secara komprehensif, diperlukan berbagai instrumen evaluasi yang beragam, mulai dari tes tertulis, penilaian kinerja, observasi perilaku, portofolio, hingga penilaian antarteman dan penilaian diri.

Dalam perkembangannya, kurikulum PAI di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dan pembaruan yang signifikan, mulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum yang berlaku saat ini. Setiap perubahan kurikulum mencerminkan respons terhadap dinamika sosial, politik, dan kebutuhan pembangunan bangsa yang terus berkembang. Kurikulum PAI yang pernah berlaku antara lain Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, dan Kurikulum 2013 yang kemudian disempurnakan menjadi Kurikulum Merdeka. Setiap pergantian kurikulum ini selalu disertai dengan refleksi kritis terhadap kekurangan

dan tantangan yang dihadapi oleh kurikulum sebelumnya, serta upaya untuk merumuskan pendekatan yang lebih relevan dan efektif bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional (Hasan, 2021).

Kurikulum PAI kontemporer semakin menekankan pentingnya nilai-nilai moderasi beragama sebagai inti dari seluruh materi dan pengalaman belajar. Orientasi ini sejalan dengan semangat Islam *wasathiyah* yang telah menjadi arus utama dalam kebijakan pendidikan keagamaan di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam berbagai regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI. Dengan demikian, pengembangan kurikulum PAI masa kini tidak dapat dilepaskan dari komitmen untuk mewujudkan pendidikan agama yang moderat, inklusif, dan mampu menjawab tantangan kehidupan modern yang semakin kompleks.

B. Integrasi Nilai Moderasi dalam Kurikulum

Integrasi nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum PAI merupakan sebuah keniscayaan dalam konteks Indonesia sebagai negara yang majemuk dan kaya akan keberagaman. Moderasi beragama, atau yang dalam wacana keislaman dikenal dengan istilah *wasathiyah*, bukan sekadar konsep teologis abstrak yang hanya relevan dalam ruang diskusi ilmiah, melainkan suatu paradigma hidup yang harus diwujudkan secara konkret dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Moderasi beragama, sebagaimana didefinisikan oleh Kementerian Agama RI (2019), adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: "Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu." (QS. Al-Baqarah: 143)

Ayat ini menjadi landasan teologis yang paling fundamental bagi pengembangan kurikulum berbasis moderasi. Konsep *ummatan wasathan* (umat pertengahan) mengandung makna yang sangat dalam dan multidimensi. Menurut Shihab (2020), kata *wasath* dalam bahasa Arab tidak hanya bermakna "di tengah-tengah" dalam pengertian spasial, tetapi juga mengandung makna kebaikan, keadilan, dan keseimbangan. Umat yang *wasath* adalah umat yang tidak berlebihan dalam segala hal, mampu berlaku adil, tidak fanatik buta, dan selalu menempatkan diri sebagai penyeimbang di antara berbagai ekstremitas. Dalam konteks kurikulum PAI, integrasi nilai moderasi berarti menjadikan nilai-nilai *wasathiyyah* tersebut sebagai nafas dan ruh yang mewarnai seluruh komponen kurikulum, dari tujuan hingga evaluasi.

Proses integrasi nilai moderasi dalam kurikulum PAI dapat dilakukan melalui beberapa strategi yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Strategi pertama adalah integrasi secara *embedded* atau tersembunyi, yakni menanamkan nilai-nilai moderasi secara implisit dalam setiap materi pembelajaran tanpa harus membuat mata pelajaran atau pokok bahasan khusus tentang moderasi. Misalnya, ketika membahas topik *aqidah*, nilai moderasi dapat diintegrasikan dengan menekankan bahwa keyakinan yang benar tidak mengarah pada sikap meremehkan atau menyalahkan keyakinan orang lain, melainkan mendorong rasa syukur atas hidayah yang diterima dan sikap menghormati hak orang lain untuk memeluk keyakinannya masing-masing.

Strategi kedua adalah integrasi secara *infused* atau disisipkan, yaitu menjadikan moderasi sebagai perspektif yang mewarnai seluruh konten kurikulum secara lebih eksplisit dan terencana. Dalam pendekatan ini, setiap topik dibahas dari sudut pandang moderasi, misalnya ketika membahas *fiqh* atau hukum Islam, peserta didik diajak untuk memahami bahwa ada keragaman pendapat di antara para ulama dalam berbagai masalah, dan bahwa perbedaan

tersebut adalah rahmat, bukan perpecahan. Peserta didik diajarkan untuk menghargai perbedaan *mazhab* dan tidak bersikap fanatik terhadap satu pendapat tertentu. Strategi *infused* ini membutuhkan kemampuan guru untuk secara kreatif mengaitkan setiap topik pembelajaran dengan nilai-nilai moderasi yang relevan.

Strategi ketiga adalah integrasi secara *immersed* atau tercelup, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang secara keseluruhan mencerminkan dan mendukung nilai-nilai moderasi. Dalam strategi ini, nilai-nilai moderasi tidak hanya hadir dalam konten mata pelajaran, tetapi juga tercermin dalam kultur sekolah, tata tertib, interaksi antara guru dan peserta didik, serta berbagai kegiatan sekolah lainnya. Sekolah yang menerapkan strategi ini berupaya untuk menjadi komunitas yang secara nyata menghidupi nilai-nilai moderasi dalam keseharian, sehingga peserta didik dapat belajar dari pengalaman langsung, bukan hanya dari teks buku.

Strategi keempat adalah integrasi melalui kegiatan ekstrakurikuler dan program pengembangan diri. Nilai-nilai moderasi tidak cukup hanya disampaikan melalui mata pelajaran formal, melainkan juga perlu diperkuat melalui berbagai kegiatan di luar kelas yang memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Kegiatan seperti dialog lintas agama, kunjungan ke komunitas yang berbeda, proyek sosial bersama, atau kampanye antikekerasan dapat menjadi media yang sangat efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai moderasi dalam diri peserta didik. Kegiatan-kegiatan ini memberikan peserta didik kesempatan untuk mengalami sendiri bagaimana nilai-nilai moderasi dapat diwujudkan dalam situasi nyata.

Nilai-nilai inti moderasi yang perlu diintegrasikan dalam kurikulum PAI mencakup empat pilar utama sebagaimana dirumuskan oleh para ulama dan organisasi Islam di Indonesia. Pertama adalah *tawassuth* (jalan tengah), yang menuntut peserta didik untuk selalu memilih sikap yang seimbang dan tidak berlebihan dalam segala hal, baik

dalam urusan agama maupun kehidupan sehari-hari. Kedua adalah *tawazun* (keseimbangan), yaitu kemampuan untuk menimbang berbagai pertimbangan secara proporsional sehingga menghasilkan keputusan yang adil dan bijaksana. Ketiga adalah *i'tidal* (keadilan dan kelurusan), yang menekankan pentingnya bersikap adil dan objektif dalam menilai segala persoalan, tidak terpengaruh oleh prasangka atau kepentingan pribadi. Keempat adalah *tasamuh* (toleransi), yaitu sikap lapang dada dan menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, maupun praktik keagamaan orang lain (Kementerian Agama RI, 2019).

Di samping keempat pilar tersebut, beberapa nilai moderasi lain yang juga penting untuk diintegrasikan dalam kurikulum PAI antara lain adalah *musawah* (kesetaraan), *syura* (musyawarah), *islah* (perbaikan dan reformasi), *aulawiyah* (mendahulukan yang lebih penting), dan *tahadhdur* (berperadaban). Nilai-nilai ini secara bersama-sama membentuk suatu bangunan etika keislaman yang komprehensif, yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga hubungan antarsesama manusia dan antara manusia dengan alam semesta.

Integrasi nilai-nilai tersebut dalam kurikulum PAI memerlukan perencanaan yang matang dan sistematis. Dalam konteks pengembangan kurikulum, nilai-nilai moderasi harus tercermin secara eksplisit dalam rumusan *Capaian Pembelajaran* (CP) dan *Alur Tujuan Pembelajaran* (ATP) yang menjadi acuan bagi seluruh proses pembelajaran. Capaian pembelajaran yang dirumuskan harus secara jelas memuat indikator-indikator yang menunjukkan penguasaan nilai-nilai moderasi, bukan hanya penguasaan pengetahuan faktual tentang ajaran Islam. Dengan demikian, moderasi bukan sekadar tambahan atau ornamen dalam kurikulum, melainkan menjadi tujuan inti yang ingin dicapai melalui seluruh proses pendidikan.

Tantangan terbesar dalam proses integrasi nilai moderasi ke dalam kurikulum adalah memastikan bahwa nilai-nilai tersebut benar-benar dihayati dan dipraktikkan

oleh peserta didik, bukan sekadar dipahami secara kognitif atau dihafal untuk kepentingan ujian. Penelitian dalam bidang pendidikan nilai menunjukkan bahwa perubahan nilai dan sikap membutuhkan proses yang panjang, konsisten, dan melibatkan seluruh aspek kehidupan peserta didik (Azra, 2020). Oleh karena itu, integrasi nilai moderasi dalam kurikulum harus didukung oleh ekosistem pendidikan yang kondusif, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang secara konsisten mencontohkan dan memperkuat nilai-nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari.

C. Pengembangan Materi Pembelajaran Moderasi Beragama

Pengembangan materi pembelajaran moderasi beragama dalam PAI merupakan proses yang kompleks, dinamis, dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif serta berbasis penelitian. Materi pembelajaran bukan sekadar kumpulan informasi yang harus disampaikan kepada peserta didik, melainkan merupakan wahana yang dirancang secara cermat untuk membantu peserta didik mengembangkan pemahaman, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan yang pluralistik dan penuh tantangan. Proses pengembangan materi yang baik harus dimulai dari analisis kebutuhan yang mendalam, kemudian dilanjutkan dengan perumusan tujuan yang jelas, pemilihan dan pengorganisasian konten yang tepat, serta evaluasi yang berkelanjutan.

Prinsip-prinsip utama yang harus menjadi pedoman dalam pengembangan materi pembelajaran moderasi beragama mencakup beberapa hal penting. Prinsip *relevansi* mengharuskan materi yang dikembangkan senantiasa berkaitan erat dengan realitas kehidupan peserta didik dan persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. Prinsip *keseimbangan* menuntut bahwa materi harus menyajikan perspektif yang beragam dan tidak berpihak pada satu pandangan ekstrem tertentu. Prinsip *kebermaknaan*

menekankan bahwa materi harus disajikan dalam konteks yang dapat dipahami dan dirasakan signifikansinya oleh peserta didik. Prinsip *kecukupan* mensyaratkan bahwa materi harus mencakup seluruh dimensi kompetensi moderasi yang ingin dikembangkan. Prinsip *konsistensi* menuntut bahwa materi yang dikembangkan harus konsisten dengan tujuan kurikulum dan nilai-nilai moderasi yang ingin ditanamkan. Prinsip *progresivitas* mengharuskan materi dikembangkan secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan moral peserta didik.

Dalam tataran praktis, pengembangan materi moderasi beragama dalam PAI dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kluster tematik yang saling berkaitan dan memperkuat. Kluster pertama adalah materi tentang *pemahaman keislaman yang komprehensif dan moderat*. Materi dalam kluster ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang luas, mendalam, dan berimbang tentang ajaran Islam, termasuk keragaman interpretasi dan pendapat ulama dalam berbagai persoalan keagamaan. Peserta didik diajak untuk memahami bahwa Islam adalah agama yang kaya dengan tradisi intelektual yang dinamis dan memiliki toleransi tinggi terhadap perbedaan pendapat di antara para ulama sepanjang sejarah. Pemahaman ini penting untuk menghindarkan peserta didik dari sikap fanatisme yang sempit dan kecenderungan untuk menganggap pandangannya sendiri sebagai satu-satunya kebenaran.

Materi-materi dalam kluster pertama dapat mencakup antara lain: sejarah perkembangan pemikiran Islam yang menunjukkan kekayaan dan keragaman tradisi intelektual Muslim, pengenalan terhadap berbagai *mazhab* fiqh dan perbedaan pendapat di antara para ulama beserta metodologinya, kajian tentang prinsip-prinsip *maqashid al-syariah* yang menekankan tujuan utama syariat Islam dalam melindungi jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama, serta pembahasan tentang konsep *ikhtilaf* (perbedaan pendapat)

dalam Islam dan bagaimana menyikapinya secara positif dan produktif.

Kluster kedua adalah materi tentang *kehidupan kebangsaan, kewarganegaraan, dan kebhinekaan*. Materi ini dirancang untuk membangun pemahaman peserta didik tentang realitas kemajemukan Indonesia dan relevansinya dengan nilai-nilai Islam. Melalui materi ini, peserta didik diajak untuk memahami bahwa keberagaman adalah *sunnatullah* (ketentuan Allah) yang harus disikapi dengan rasa syukur dan semangat untuk saling mengenal serta bekerja sama. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya: "*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.*" (QS. Al-Hujurat: 13).

Berdasarkan ayat ini, materi dalam kluster kedua dapat mencakup antara lain: kajian tentang konsep *ukhuwwah* dalam Islam yang meliputi *ukhuwwah Islamiyyah* (persaudaraan sesama Muslim), *ukhuwwah wathaniyyah* (persaudaraan kebangsaan), dan *ukhuwwah basyariyyah* (persaudaraan sesama manusia); pembahasan tentang Piagam Madinah sebagai model hidup berdampingan secara damai antara berbagai kelompok yang berbeda; serta kajian tentang nilai-nilai Pancasila dari perspektif Islam yang menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

Kluster ketiga adalah materi tentang *pencegahan ekstremisme, radikalisme, dan kekerasan berbasis agama*. Materi dalam kluster ini memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang bahaya berbagai bentuk ekstremisme dan bagaimana Islam memberikan panduan yang jelas untuk menghindarinya. Peserta didik dibekali dengan kemampuan berpikir kritis untuk mengidentifikasi ciri-ciri narasi ekstrem, memahami bagaimana narasi tersebut biasanya disebarkan, dan mengembangkan argumen-argumen yang

kuat untuk menangkalnya berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan *Hadis*. Materi ini sangat penting mengingat ancaman radikalisasi yang semakin nyata, terutama melalui media digital.

Kluster keempat adalah materi tentang *dialog, kerja sama lintas iman, dan peacebuilding*. Materi ini mengajarkan kepada peserta didik tentang pentingnya membangun komunikasi yang produktif, saling menghormati, dan bekerja sama dengan semua pihak, termasuk pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda, dalam berbagai bidang kehidupan yang bersifat publik. Peserta didik diajarkan tentang prinsip-prinsip dialog yang sehat dan produktif, serta berbagai praktik kerja sama lintas iman yang telah berhasil diwujudkan di berbagai konteks, termasuk di Indonesia.

Selain keempat kluster tematik tersebut, pengembangan materi pembelajaran moderasi juga harus memperhatikan aspek kontekstualisasi, yakni kemampuan untuk menyajikan nilai-nilai Islam universal dalam konteks lokal yang spesifik dan kultural. Dalam konteks Indonesia, materi dapat menampilkan kearifan lokal (*local wisdom*) yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi Islam, seperti filosofi *memayu hayuning bawana* dalam budaya Jawa yang bermakna menjaga keindahan dan keselarasan alam, *pela gandong* dalam budaya Maluku yang mencerminkan semangat persaudaraan antarperbedaan, *dalihan na tolu* dalam budaya Batak yang menekankan musyawarah dan keseimbangan, serta berbagai kearifan lokal lainnya dari berbagai penjuru Nusantara. Kontekstualisasi semacam ini penting untuk membuat nilai-nilai moderasi terasa dekat, relevan, dan bermakna bagi peserta didik dari berbagai latar belakang budaya.

Aspek penting lainnya dalam pengembangan materi adalah kualitas dan keragaman sumber belajar yang digunakan. Sumber belajar yang baik untuk pendidikan moderasi harus memenuhi beberapa kriteria: akurat secara akademis, berimbang dalam menyajikan berbagai perspektif, relevan dengan konteks kehidupan peserta didik, menarik

dan mudah dipahami, serta bebas dari muatan yang memprovokasi atau memicu intoleransi. Pengembang materi harus melakukan seleksi yang ketat terhadap sumber belajar yang akan digunakan, dengan melibatkan para ahli agama, akademisi, dan praktisi pendidikan yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai moderasi (Said Agil Husain Al-Munawar, 2021).

D. Model Kurikulum Berbasis Moderasi

Pengembangan model kurikulum berbasis moderasi merupakan langkah strategis dan mendasar dalam upaya menjadikan moderasi beragama sebagai paradigma sentral dalam pendidikan agama Islam. Model kurikulum yang dimaksud bukan sekadar dokumen administratif yang berisi daftar tujuan dan materi, melainkan suatu kerangka konseptual yang holistik dan menyeluruh yang mencakup filosofi, prinsip, struktur, dan operasionalisasi kurikulum secara terpadu. Model kurikulum yang baik harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar: Mengapa pendidikan moderasi penting? Apa yang ingin dicapai? Bagaimana cara mencapainya? Dan bagaimana kita tahu apakah tujuan tersebut telah tercapai?

Model pertama yang relevan untuk dikembangkan adalah *Integrated Curriculum Model* atau Model Kurikulum Terpadu. Dalam model ini, nilai-nilai moderasi tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan secara organis ke dalam seluruh bidang studi dan pengalaman belajar yang ada. Integrasi ini dilakukan secara horizontal, yakni mengaitkan berbagai mata pelajaran dalam satu tema besar moderasi pada periode waktu tertentu, maupun secara vertikal, yakni mengembangkan nilai-nilai moderasi secara progresif dari jenjang pendidikan yang lebih rendah ke jenjang yang lebih tinggi. Model kurikulum terpadu menekankan bahwa moderasi bukan hanya urusan mata pelajaran PAI semata, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh komunitas sekolah.

Model kedua adalah *Competency-Based Curriculum Model* atau Model Kurikulum Berbasis Kompetensi. Model ini menempatkan pengembangan kompetensi moderasi sebagai tujuan utama kurikulum yang harus dicapai secara terukur dan dapat diverifikasi. Kompetensi moderasi yang dimaksud mencakup tiga dimensi yang saling melengkapi: kompetensi pengetahuan (*knowledge competency*), yaitu pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang konsep, dalil-dalil, dan landasan moderasi dalam Islam; kompetensi sikap (*attitudinal competency*), yaitu internalisasi nilai-nilai moderasi dalam kepribadian sehingga menjadi bagian dari karakter yang menetap; dan kompetensi keterampilan (*skill competency*), yaitu kemampuan aktual untuk mempraktikkan moderasi dalam berbagai situasi kehidupan nyata yang kompleks dan penuh tantangan.

Model ketiga adalah *Character-Based Curriculum Model* atau Model Kurikulum Berbasis Karakter. Model ini berangkat dari keyakinan bahwa tujuan akhir pendidikan agama Islam adalah pembentukan karakter atau *akhlak karimah* pada diri peserta didik. Karakter moderat yang ingin dibentuk mencakup berbagai sifat dan kualitas pribadi seperti: keterbukaan pikiran (*open-mindedness*), empati, rasa hormat terhadap perbedaan, kemampuan berpikir kritis, keberanian moral untuk mempertahankan kebenaran, dan kemampuan untuk berkolaborasi dengan mereka yang berbeda. Dalam model ini, seluruh komponen kurikulum dirancang untuk secara konsisten dan koheren mendukung pembentukan karakter moderat, mulai dari rumusan tujuan, pemilihan materi, metode pembelajaran, budaya sekolah, hingga sistem evaluasi.

Model keempat adalah *Problem-Based Curriculum Model* atau Model Kurikulum Berbasis Masalah. Model ini menempatkan berbagai persoalan nyata yang berkaitan dengan isu moderasi beragama sebagai titik tolak proses pembelajaran. Peserta didik diajak untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi atas berbagai persoalan seperti intoleransi, diskriminasi berbasis agama, ujaran

kebencian (*hate speech*), *hoaks* bermuatan agama, dan radikalisme dengan menggunakan perspektif nilai-nilai Islam yang moderat. Model ini sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab pada diri peserta didik.

Model kelima yang perlu dipertimbangkan adalah *Community-Based Curriculum Model* atau Model Kurikulum Berbasis Komunitas. Model ini menekankan pentingnya keterlibatan komunitas yang lebih luas, termasuk keluarga, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial lainnya, dalam proses pendidikan moderasi. Dalam model ini, sekolah tidak dilihat sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan moderasi, melainkan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang lebih besar. Kerja sama antara sekolah dan komunitas ini sangat penting karena nilai-nilai yang diajarkan di sekolah harus diperkuat dan dikukuhkan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dalam implementasi berbagai model tersebut, terdapat beberapa elemen struktural yang harus ada dalam kurikulum PAI berbasis moderasi. Pertama, rumusan visi dan misi kurikulum yang secara eksplisit mencantumkan moderasi sebagai nilai inti yang ingin dikembangkan. Visi ini harus dirumuskan secara inspiratif dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Kedua, profil lulusan yang menggambarkan secara konkret dan operasional karakteristik peserta didik moderat yang ingin dibentuk melalui proses pendidikan. Profil lulusan ini menjadi acuan bagi seluruh keputusan kurikuler, mulai dari pemilihan materi hingga penentuan standar kelulusan. Ketiga, capaian pembelajaran yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dan mencakup seluruh dimensi kompetensi moderasi. Keempat, struktur kurikulum yang menunjukkan bagaimana berbagai mata pelajaran dan kegiatan belajar diorganisasikan untuk mendukung pengembangan nilai-nilai moderasi secara terpadu.

Satu hal yang sangat penting dalam pengembangan model kurikulum berbasis moderasi adalah keselarasan antara kurikulum tertulis (*written curriculum*), kurikulum yang diajarkan (*taught curriculum*), dan kurikulum yang dipelajari (*learned curriculum*). Ketiga dimensi ini harus saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain. Seringkali terjadi kesenjangan yang signifikan antara apa yang tertulis dalam dokumen kurikulum dengan apa yang sebenarnya terjadi di ruang kelas. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pemahaman guru tentang filosofi dan tujuan kurikulum, keterbatasan sumber daya yang tersedia, resistensi terhadap perubahan, atau ketidaksesuaian antara kurikulum dengan realitas dan kebutuhan lokal (Tilaar, 2022).

Untuk meminimalkan kesenjangan tersebut, diperlukan upaya yang sistematis dalam beberapa bidang. Pertama, program sosialisasi dan pelatihan yang komprehensif bagi seluruh guru tentang filosofi, tujuan, dan cara mengimplementasikan kurikulum moderasi. Kedua, pengembangan perangkat pembelajaran yang berkualitas dan mudah digunakan oleh guru, seperti buku ajar, modul, lembar kerja peserta didik, dan instrumen evaluasi. Ketiga, sistem pendampingan dan supervisi yang berkelanjutan untuk memastikan implementasi kurikulum berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Keempat, mekanisme umpan balik yang efektif yang memungkinkan guru untuk melaporkan tantangan dan keberhasilan dalam implementasi kurikulum, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat dan tepat sasaran.

E. Peran Guru dalam Implementasi Kurikulum Moderasi

Guru merupakan figur sentral yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kurikulum moderasi di sekolah. Betapa pun baiknya dokumen kurikulum yang telah disusun, tanpa guru yang kompeten, berkomitmen, dan memiliki pemahaman yang benar tentang moderasi beragama, seluruh rancangan kurikulum tersebut

tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan peserta didik. Dalam tradisi Islam, guru atau *mu'allim* bukan hanya bertugas sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai *murabbi* (pembimbing jiwa), *muaddib* (pembentuk adab dan akhlak), *musyrif* (pembimbing), dan *mursyid* (penunjuk jalan) bagi peserta didiknya. Ketiga peran ini semuanya sangat relevan dalam konteks implementasi kurikulum moderasi.

Peran guru sebagai *model* atau teladan merupakan dimensi yang paling fundamental dan tidak dapat digantikan oleh media atau teknologi pembelajaran apapun. Nilai-nilai moderasi yang ingin ditanamkan kepada peserta didik tidak cukup hanya disampaikan melalui kata-kata dan penjelasan verbal, melainkan harus lebih dahulu tercermin dalam sikap, perilaku, cara berpikir, dan cara berinteraksi guru itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Seorang guru PAI yang moderat akan menunjukkan sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat, tidak mudah menghakimi orang lain, mampu berdialog secara santun dan konstruktif dengan siapa pun yang berbeda pandangan, serta mampu menerima kesalahan dan belajar dari pengalaman. Keteladanan guru ini memiliki kekuatan edukatif yang jauh lebih besar daripada ratusan ceramah tentang moderasi, karena peserta didik belajar tidak hanya dari apa yang dikatakan guru, tetapi terutama dari apa yang dilakukan guru dalam kehidupan nyata.

Peran guru sebagai *fasilitator* pembelajaran merupakan dimensi yang semakin penting dalam paradigma pendidikan modern. Dalam paradigma ini, guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang menuangkan informasi ke dalam benak peserta didik, melainkan lebih sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik untuk mengeksplorasi, bertanya, berdiskusi, berargumentasi, dan menemukan sendiri nilai-nilai moderasi melalui pengalaman belajar yang autentik. Guru yang efektif dalam mengimplementasikan kurikulum moderasi adalah guru

yang mampu merancang kegiatan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, berempati terhadap perspektif yang berbeda, dan mengembangkan kemampuan berargumen secara rasional, santun, dan berdasarkan bukti.

Peran guru sebagai *desainer* kurikulum di tingkat kelas merupakan dimensi yang membutuhkan kreativitas dan keprofesionalan yang tinggi. Meskipun kurikulum secara formal dirancang oleh pihak yang berwenang di tingkat nasional atau institusional, namun dalam praktiknya guru memiliki ruang yang luas untuk melakukan adaptasi, kontekstualisasi, dan pengembangan kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang dihadapinya. Guru PAI yang kreatif dan berkomitmen terhadap moderasi akan senantiasa mencari cara-cara baru untuk menyajikan nilai-nilai moderasi secara lebih relevan, menarik, dan mengena bagi peserta didiknya. Kemampuan desain pembelajaran ini membutuhkan kombinasi antara penguasaan materi keislaman yang mendalam, pemahaman tentang psikologi perkembangan peserta didik, keterampilan pedagogis yang memadai, serta kemampuan untuk merespons dinamika sosial yang terus berubah.

Peran guru sebagai *mediator* dan *konselor* menjadi semakin penting dalam konteks masyarakat yang semakin terpolarisasi dan rentan terhadap konflik. Dalam lingkungan sekolah yang pluralistik, konflik dan ketegangan antarpeserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Guru PAI memiliki peran yang sangat penting sebagai mediator yang mampu menengahi konflik dengan bijaksana dan membantu peserta didik menemukan solusi yang damai, berkeadilan, dan konstruktif. Selain itu, guru juga berperan sebagai konselor yang mendampingi peserta didik yang mungkin terpapar oleh paham-paham ekstrem, yang mengalami kebingungan identitas keagamaan, atau yang berhadapan dengan tekanan dari kelompok-kelompok yang mengajarkan intoleransi.

Peran guru sebagai *peneliti* dan *refleksi praktis* juga merupakan dimensi yang tidak boleh diabaikan. Guru yang profesional tidak hanya mengajarkan apa yang sudah diketahuinya, tetapi juga senantiasa berupaya untuk memperbarui dan memperdalam pengetahuannya tentang moderasi beragama, perkembangan pemikiran Islam kontemporer, serta berbagai isu aktual yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan peserta didik. Refleksi kritis terhadap praktik mengajar sendiri juga merupakan bagian penting dari profesionalisme guru, karena dengan berefleksi guru dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang diselenggarakannya.

Untuk dapat menjalankan seluruh peran tersebut secara efektif, guru PAI membutuhkan berbagai kompetensi yang harus dikembangkan secara berkelanjutan. Kompetensi pedagogis moderasi mencakup kemampuan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai moderasi secara efektif dan efisien. Kompetensi substantif mencakup penguasaan materi keislaman yang komprehensif, termasuk keragaman pandangan ulama lintas mazhab dan era, perkembangan pemikiran Islam kontemporer, dan isu-isu aktual yang berkaitan dengan moderasi beragama dalam konteks Indonesia maupun global. Kompetensi sosial-emosional mencakup kemampuan guru untuk membangun hubungan yang positif, empatik, dan saling menghormati dengan seluruh peserta didik tanpa terkecuali, serta kemampuan untuk mengelola dinamika kelompok yang beragam secara efektif (Suyanto & Jihad, 2021).

Program pelatihan dan pengembangan profesional guru PAI harus secara serius dan sistematis memasukkan dimensi moderasi sebagai salah satu fokus utama yang tidak dapat dinomorduakan. Program *in-service training* yang dirancang secara sistematis dan berkesinambungan, komunitas belajar profesional (*professional learning community*) antar guru PAI, program pendampingan (*mentoring*) yang melibatkan mentor berpengalaman, serta

kesempatan untuk belajar dari praktik terbaik (*best practices*) di berbagai sekolah dan komunitas, merupakan beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk mengembangkan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum moderasi secara efektif dan berkelanjutan.

F. Evaluasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Evaluasi kurikulum PAI merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem pengembangan dan implementasi kurikulum. Evaluasi yang dirancang dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten berfungsi tidak hanya untuk mengukur sejauh mana tujuan kurikulum telah tercapai, tetapi juga untuk memberikan umpan balik yang berharga bagi upaya perbaikan dan pengembangan kurikulum secara berkelanjutan. Dalam konteks kurikulum berbasis moderasi, evaluasi memiliki peran yang sangat strategis karena harus mampu mengukur perkembangan nilai, sikap, dan karakter yang tidak mudah dikuantifikasi namun sangat menentukan keberhasilan pendidikan moderasi dalam jangka panjang.

Secara konseptual, evaluasi kurikulum PAI berbasis moderasi dapat didekati melalui beberapa model evaluasi yang telah dikembangkan dalam ilmu pendidikan. Model *CIPP* (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam merupakan salah satu model yang paling komprehensif dan relevan untuk digunakan. Evaluasi *context* (konteks) bertujuan untuk menilai relevansi tujuan kurikulum moderasi dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Evaluasi *input* (masukan) menilai kualitas dan kecukupan sumber daya yang tersedia untuk mendukung implementasi kurikulum. Evaluasi *process* (proses) menilai kualitas pelaksanaan kurikulum di lapangan, termasuk efektivitas metode pembelajaran dan kualitas interaksi guru-peserta didik. Evaluasi *product* (produk) menilai sejauh mana tujuan kurikulum telah tercapai, termasuk perkembangan kompetensi moderasi pada diri peserta didik.

Evaluasi kurikulum PAI berbasis moderasi harus mencakup beberapa level atau tingkatan yang saling melengkapi. Level pertama adalah evaluasi terhadap dokumen kurikulum itu sendiri, yang meliputi penilaian terhadap kualitas rumusan tujuan, relevansi dan keberimbangan materi, kesesuaian metode yang direkomendasikan, dan kelengkapan instrumen evaluasi yang disediakan. Evaluasi pada level ini biasanya dilakukan oleh tim ahli yang terdiri dari pakar pendidikan Islam, ulama, akademisi, dan praktisi pendidikan dengan menggunakan berbagai instrumen analisis dokumen yang terstandar. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap dokumen kurikulum secara berkala.

Level kedua adalah evaluasi terhadap implementasi kurikulum di tingkat sekolah dan kelas. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kurikulum yang telah dirancang secara ideal dalam dokumen benar-benar dilaksanakan di lapangan dengan kualitas yang memadai. Berbagai metode evaluasi dapat digunakan pada level ini, antara lain: observasi kelas yang dilakukan secara terencana dan sistematis, wawancara mendalam dengan guru, peserta didik, orang tua, dan kepala sekolah, analisis dokumen perangkat pembelajaran seperti *Rencana Pelaksanaan Pembelajaran* (RPP) dan modul ajar, serta survei tentang iklim sekolah dan budaya kelas yang mencerminkan nilai-nilai moderasi. Evaluasi implementasi sangat penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi proses pelaksanaan kurikulum di lapangan.

Level ketiga adalah evaluasi terhadap hasil atau dampak kurikulum. Pada level ini, evaluasi ditujukan untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah mengembangkan kompetensi moderasi yang diharapkan sebagai hasil dari pengalaman belajar yang telah mereka jalani. Pengukuran kompetensi moderasi harus dilakukan secara multidimensi dan menggunakan berbagai instrumen yang saling

melengkapi. Untuk dimensi pengetahuan, tes tertulis dalam berbagai format seperti pilihan ganda, uraian, dan studi kasus dapat digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang konsep, dalil, dan prinsip-prinsip moderasi. Untuk dimensi sikap, berbagai instrumen seperti skala *Likert*, skala *Thurstone*, atau instrumen penilaian sikap berbasis observasi dapat digunakan untuk mengukur orientasi nilai dan sikap peserta didik terhadap isu-isu moderasi.

Untuk dimensi perilaku dan keterampilan, berbagai bentuk penilaian autentik (*authentic assessment*) seperti penilaian kinerja, proyek, presentasi, portofolio, dan observasi perilaku dalam situasi nyata harus digunakan secara intensif. Penilaian autentik ini sangat penting karena mampu mengukur kemampuan peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai moderasi dalam konteks kehidupan yang sesungguhnya, bukan hanya dalam situasi ujian yang artifisial. Selain itu, teknik penilaian diri (*self-assessment*) dan penilaian antarteman (*peer assessment*) juga merupakan komponen penting dari evaluasi komprehensif yang dapat memberikan perspektif tambahan tentang perkembangan kompetensi moderasi peserta didik.

Salah satu tantangan terbesar dalam evaluasi kurikulum moderasi adalah pengukuran perubahan sikap dan perilaku yang bersifat jangka panjang dan kontekstual. Tidak seperti pengetahuan yang relatif mudah diukur melalui tes tertulis, perubahan sikap dan perilaku yang autentik memerlukan pendekatan evaluasi yang lebih kompleks, membutuhkan waktu yang lebih panjang, dan harus dilakukan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda. Evaluasi yang hanya dilakukan pada akhir semester atau tahun ajaran sangat tidak memadai untuk mengukur perkembangan nilai dan karakter peserta didik. Diperlukan sistem evaluasi yang berkelanjutan dan formatif, yang memungkinkan guru untuk memantau perkembangan peserta didik secara reguler dan memberikan umpan balik yang tepat waktu dan bermakna.

Dalam konteks penilaian berbasis moderasi, pengembangan rubrik penilaian yang komprehensif, jelas, dan terstandar sangat diperlukan. Rubrik tersebut harus mencerminkan dimensi-dimensi moderasi secara konkret dan operasional, sehingga dapat digunakan oleh guru secara konsisten dan objektif di berbagai konteks dan situasi. Pengembangan rubrik ini sebaiknya melibatkan tidak hanya para ahli pendidikan dan ahli agama, tetapi juga perwakilan peserta didik, orang tua, dan komunitas yang lebih luas, sehingga hasil penilaian benar-benar mencerminkan standar moderasi yang disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan (Mardapi, 2020).

Hasil evaluasi kurikulum PAI harus ditindaklanjuti secara serius, sistematis, dan tepat waktu. Informasi yang diperoleh dari berbagai level evaluasi harus dikompilasi, dianalisis, dan diinterpretasikan secara cermat, kemudian digunakan sebagai basis untuk melakukan revisi dan pengembangan kurikulum secara berkelanjutan. Siklus evaluasi-revisi-implementasi yang berjalan secara konsisten dan profesional merupakan kunci keberhasilan dalam memastikan bahwa kurikulum PAI senantiasa relevan, efektif, dan mampu merespons dinamika perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan cepat dan tepat.

G. Pengembangan Kurikulum Moderasi di Era Digital

Era digital telah membawa perubahan yang sangat fundamental dan akseleratif dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah secara radikal cara manusia belajar, berkomunikasi, mengakses informasi, membentuk identitas, dan berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sosial. Revolusi digital ini, yang sering disebut juga dengan *digital revolution* atau *fourth industrial revolution*, telah menciptakan realitas sosial baru yang penuh dengan kompleksitas dan ketidakpastian. Dalam konteks pengembangan kurikulum moderasi beragama, era digital menghadirkan sekaligus

peluang yang sangat besar dan tantangan yang tidak bisa diabaikan atau diremehkan.

Peluang pertama yang ditawarkan oleh era digital adalah ketersediaan sumber belajar digital yang tidak terbatas dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kondisi ini memberikan kesempatan luar biasa kepada pengembang kurikulum untuk merancang pengalaman belajar yang jauh lebih kaya, beragam, dan interaktif dibandingkan dengan kurikulum konvensional yang hanya mengandalkan buku teks. Video pembelajaran, *podcast*, *infographic*, simulasi virtual, *game* edukatif, dan berbagai format media lainnya dapat dimanfaatkan untuk menyajikan nilai-nilai moderasi dengan cara yang lebih menarik, inovatif, dan mudah dipahami oleh peserta didik generasi digital atau yang dikenal sebagai *digital native* atau Generasi Z dan Alpha.

Peluang kedua adalah kemampuan platform digital untuk memungkinkan peserta didik berinteraksi dan berkolaborasi dengan sesama pelajar dari berbagai latar belakang budaya, agama, etnis, dan geografi yang sangat berbeda-beda. Pengalaman belajar lintas batas (*cross-boundary learning*) semacam ini sangat berharga untuk mengembangkan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan pemahaman antarperbedaan yang autentik. Melalui proyek kolaboratif online, diskusi virtual, *virtual exchange*, dan pertukaran budaya digital, peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung dalam berkomunikasi, bernegosiasi, dan bekerja sama secara produktif dengan mereka yang sangat berbeda dari dirinya.

Peluang ketiga adalah kemampuan teknologi digital untuk memungkinkan personalisasi pembelajaran yang belum pernah ada sebelumnya. Sistem pembelajaran berbasis *artificial intelligence* (AI) dapat menganalisis kebutuhan, gaya belajar, tingkat penguasaan, dan perkembangan setiap peserta didik secara individual, kemudian secara otomatis menyajikan konten pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.

Personalisasi pembelajaran ini sangat relevan dalam konteks pendidikan moderasi, karena setiap peserta didik membawa latar belakang, pengalaman, dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan pendekatan dan materi yang disesuaikan agar dapat menginternalisasikan nilai-nilai moderasi secara optimal.

Di sisi lain, era digital juga menghadirkan tantangan yang serius dan memerlukan respons yang cepat dan tepat dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Tantangan pertama dan paling serius adalah maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat, menyesatkan (*misleading*), atau bahkan secara aktif mempromosikan nilai-nilai ekstrem, intoleransi, dan kebencian melalui berbagai platform digital. Konten bermuatan *hate speech*, *hoaks* bernuansa agama, dan propaganda ekstremis yang mudah diakses melalui internet dan media sosial dapat dengan cepat memengaruhi pemikiran dan sikap peserta didik, terutama mereka yang belum memiliki kemampuan literasi digital yang memadai dan fondasi pemahaman keagamaan yang kuat.

Tantangan kedua berkaitan dengan fenomena yang disebut *echo chamber* atau ruang gema di dunia digital. Algoritma media sosial yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan dan waktu penggunaan (*engagement*) cenderung menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi, keyakinan, dan pandangan yang sudah ada pada diri pengguna, sehingga menciptakan lingkungan informasi yang homogen dan mengurung individu dalam gelembung ideologis mereka sendiri (*filter bubble*). Fenomena ini bertentangan secara langsung dengan nilai-nilai moderasi yang menekankan keterbukaan terhadap perbedaan dan kemampuan untuk menimbang berbagai perspektif secara adil dan objektif.

Tantangan ketiga adalah isu privasi, keamanan, dan kesehatan mental yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital secara berlebihan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang intensif dan tidak terkelola dengan baik dapat berdampak negatif

terhadap kesehatan mental, terutama pada remaja, termasuk meningkatkan kecemasan, depresi, dan rasa tidak aman yang pada gilirannya dapat membuat individu lebih rentan terhadap pengaruh narasi-narasi ekstrem yang menawarkan identitas dan kepastian yang semu.

Dalam menghadapi realitas ini, kurikulum moderasi di era digital harus secara eksplisit dan komprehensif mengintegrasikan pengembangan kompetensi *literasi digital* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan moderasi. Literasi digital dalam konteks ini tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan berbagai perangkat dan platform digital, tetapi juga mencakup kemampuan yang jauh lebih penting, yaitu kemampuan untuk secara kritis mengevaluasi informasi yang diterima, mengidentifikasi *disinformasi* dan *misinformasi*, memahami bagaimana algoritma digital bekerja dan memengaruhi pilihan informasi, serta menggunakan media digital secara etis, bijak, dan bertanggung jawab. Allah SWT mengingatkan dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya." (QS. Al-Hujurat: 6).

Ayat ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kondisi era digital saat ini, di mana informasi mengalir dengan sangat deras melalui berbagai saluran digital tanpa filter kualitas yang memadai. Prinsip *tabayyun* (verifikasi dan klarifikasi) yang diajarkan Al-Quran bukan hanya merupakan kewajiban etis individual, tetapi juga merupakan kompetensi kritis yang harus dikembangkan melalui kurikulum PAI di era digital. Kurikulum yang mengintegrasikan prinsip *tabayyun* dalam konteks digital akan membantu peserta didik untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, baik yang berasal dari sumber keagamaan maupun sumber umum lainnya.

Pengembangan kurikulum moderasi di era digital juga harus mempertimbangkan integrasi berbagai teknologi pembelajaran yang inovatif dan terbukti efektif secara pedagogis. Pemanfaatan *gamification* dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam belajar tentang moderasi. Penggunaan *augmented reality* (AR) dan *virtual reality* (VR) dapat menciptakan pengalaman belajar yang imersif dan bermakna, misalnya dengan memungkinkan peserta didik untuk secara virtual "mengunjungi" komunitas keagamaan yang berbeda di berbagai belahan dunia dan mengalami secara langsung bagaimana mereka menjalani kehidupan keagamaannya. Teknologi *artificial intelligence* juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan simulasi dialog lintas agama yang memungkinkan peserta didik berlatih kemampuan komunikasi moderatif dalam lingkungan yang aman dan terkontrol.

Salah satu inovasi penting dalam kurikulum moderasi di era digital adalah pengembangan platform atau ekosistem pembelajaran digital yang dirancang khusus sebagai ruang bagi peserta didik untuk belajar, berdiskusi, berkreasi, dan berkolaborasi dalam tema-tema moderasi beragama. Platform semacam ini harus dikembangkan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan digital bagi pengguna yang masih berusia muda, kualitas konten yang terkurasi dengan baik, kemudahan penggunaan, serta fitur-fitur yang mendorong interaksi positif dan kolaboratif antarpeserta didik dari berbagai latar belakang (Nashir, 2019).

Sebagai penutup dari pembahasan dalam bab ini, dapat ditegaskan bahwa pengembangan kurikulum moderasi beragama dalam PAI merupakan proyek pendidikan jangka panjang yang membutuhkan komitmen yang kuat, kreativitas yang tinggi, dan kerja sama yang erat dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Tidak ada satu model kurikulum pun yang sempurna dan mampu menjawab seluruh tantangan secara sekaligus dan tuntas. Yang

diperlukan adalah keberanian untuk terus berinovasi dan bereksperimen dengan pendekatan-pendekatan baru, kesediaan untuk belajar dari pengalaman dan kesalahan, kemampuan untuk merespons perubahan secara adaptif, dan komitmen yang tidak goyah untuk mewujudkan cita-cita pendidikan Islam yang *rahmatan lil-alamin*, yaitu pendidikan yang membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menjadi kontributor aktif bagi perdamaian, keadilan, dan kemajuan peradaban umat manusia.

BAB 5

Metode Pembelajaran Moderasi Beragama

A. Konsep Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian metode pembelajaran PAI

Metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan cara yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi ajar kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal (Hidayat, 2022). Dalam konteks ini, metode tidak hanya dipahami sebagai teknik mengajar semata, tetapi juga mencakup pendekatan, strategi, serta langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk memudahkan proses pemahaman nilai-nilai keislaman (Putri & Suhaeni, 2025). Oleh karena itu, pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakteristik materi dan kondisi peserta didik.

Dalam praktiknya, metode pembelajaran PAI memiliki peran yang sangat penting karena materi yang disampaikan tidak hanya bersifat pengetahuan, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan sikap dan perilaku (Yusuf et al., 2024). Seorang guru tidak cukup hanya menyampaikan informasi, melainkan juga harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai agama ke dalam diri peserta didik. Hal ini menuntut adanya metode yang variatif dan tidak monoton.

Selain itu, metode pembelajaran PAI juga harus mempertimbangkan aspek perkembangan peserta didik, baik dari segi usia, tingkat pemahaman, maupun latar belakang sosial budaya (Lestari et al., 2024). Setiap peserta didik memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga metode

yang digunakan harus mampu mengakomodasi perbedaan tersebut. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan menyenangkan.

Penggunaan metode yang tepat akan membantu peserta didik dalam memahami ajaran Islam secara lebih mendalam (Maulida et al., 2023). Tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi juga mampu menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari (Barokah et al., 2025). Hal ini menjadi tujuan utama dari pembelajaran PAI yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotor.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran PAI merupakan komponen penting dalam proses pendidikan yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran secara menyeluruh (Judrah et al., 2024). Tanpa metode yang tepat, penyampaian materi akan kurang efektif dan tujuan pembelajaran sulit tercapai secara maksimal.

2. Tujuan metode pembelajaran PAI

Tujuan metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada dasarnya adalah untuk memudahkan peserta didik dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara benar dan menyeluruh (As-Shidqi et al., 2025). Metode yang digunakan harus mampu mengarahkan peserta didik tidak hanya pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Barokah et al., 2025). Oleh karena itu, metode pembelajaran memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan pendidikan agama.

Salah satu tujuan utama dari penggunaan metode dalam pembelajaran PAI adalah untuk membentuk akhlak peserta didik yang mulia (Hapsari, 2025). Pembelajaran agama tidak hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter yang baik (Ahdan Hawari et al., 2024). Melalui metode yang tepat, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi dapat ditanamkan secara efektif.

Selain itu, metode pembelajaran juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ajaran Islam secara komprehensif. Pemahaman ini

mencakup aspek aqidah, ibadah, dan akhlak yang harus dipahami secara seimbang. Dengan metode yang tepat, peserta didik dapat memahami hubungan antara teori dan praktik dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan lain dari metode pembelajaran PAI adalah untuk menumbuhkan sikap moderat dalam beragama. Peserta didik diharapkan mampu memahami ajaran Islam secara proporsional, tidak berlebihan, dan tidak pula mengabaikan nilai-nilai agama (Rosela et al., 2025). Hal ini penting dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan di era modern yang penuh dengan perbedaan.

Dengan demikian, tujuan metode pembelajaran PAI tidak hanya berorientasi pada hasil belajar secara akademik, tetapi juga pada pembentukan kepribadian peserta didik yang utuh. Metode yang digunakan harus mampu mengintegrasikan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam satu kesatuan yang harmonis.

3. Karakteristik metode PAI yang efektif

Metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang efektif memiliki beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan oleh pendidik. Salah satu karakteristik utama adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai (Ahdan Hawari et al., 2024). Metode yang digunakan harus mampu mendukung tercapainya kompetensi yang telah ditetapkan, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan.

Selain itu, metode yang efektif juga harus bersifat kontekstual, yaitu mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik (Syifaurrehman et al., 2025). Dengan demikian, peserta didik dapat lebih mudah memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang kontekstual akan membuat materi menjadi lebih bermakna.

Karakteristik lainnya adalah fleksibilitas dalam penerapan metode (Misbah, 2022). Seorang guru harus mampu menyesuaikan metode dengan kondisi kelas, karakter peserta didik, serta situasi pembelajaran. Tidak ada satu metode yang cocok untuk semua kondisi, sehingga diperlukan kreativitas dalam mengkombinasikan berbagai metode pembelajaran.

Metode yang efektif juga harus mampu melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Keaktifan peserta didik menjadi indikator penting dalam keberhasilan pembelajaran (Syifaurrehman et al., 2025). Dengan keterlibatan aktif, peserta didik tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi subjek dalam proses belajar.

Pada akhirnya, metode pembelajaran PAI yang efektif adalah metode yang mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna. Dengan suasana yang kondusif, peserta didik akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal.

B. Pendekatan Pembelajaran Moderasi Beragama

1. Pengertian moderasi beragama

Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menempatkan diri secara seimbang di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak pula mengurangi ajaran agama. Konsep ini menekankan pentingnya memahami agama secara utuh tanpa terjebak pada sikap ekstrem (Arikarani et al., 2016). Dalam konteks pendidikan, moderasi beragama menjadi landasan penting dalam membentuk karakter peserta didik yang toleran dan terbuka terhadap perbedaan.

Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, moderasi beragama menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Perbedaan agama, budaya, dan latar belakang sosial sering kali menjadi potensi konflik apabila tidak disikapi dengan bijak (Bintari & Musyarapah, 2023). Oleh karena itu, moderasi beragama hadir sebagai solusi untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai di tengah keberagaman.

Moderasi beragama juga mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya masing-masing tanpa adanya paksaan (Abusama et al., 2025). Sikap saling menghormati dan menghargai menjadi nilai utama dalam konsep ini (Rusmiati, 2023). Dengan demikian, peserta didik dapat belajar untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang lain yang berbeda keyakinan.

Selain itu, moderasi beragama tidak berarti mengurangi komitmen terhadap ajaran agama. Justru sebaliknya, moderasi mengajarkan untuk menjalankan ajaran agama secara lebih bijaksana dan proporsional (Ahdan Hawari et al., 2024). Peserta didik diajak untuk memahami esensi ajaran agama, bukan hanya pada aspek formalitas semata.

Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai sikap beragama yang adil, seimbang, dan menghargai perbedaan. Sikap ini sangat penting untuk ditanamkan sejak dini melalui proses pendidikan agar tercipta generasi yang mampu menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Jenis pendekatan pembelajaran

Pendekatan dalam pembelajaran moderasi beragama merupakan cara yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai moderasi kepada peserta didik secara efektif. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan humanis, yaitu pendekatan yang memandang peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi dan hak untuk berkembang (Hapsari, 2025). Pendekatan ini menekankan pada penghargaan terhadap martabat manusia.

Selain pendekatan humanis, terdapat pula pendekatan inklusif yang menekankan pada keterbukaan terhadap perbedaan (Ahdan Hawari et al., 2024). Dalam pendekatan ini, peserta didik diajak untuk menerima dan menghargai keberagaman yang ada di sekitarnya (Pratama, 2022). Pembelajaran tidak hanya berfokus pada satu sudut pandang, tetapi juga memberikan ruang bagi berbagai perspektif yang berbeda.

Pendekatan multikultural juga menjadi bagian penting dalam pembelajaran moderasi beragama. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial sebagai kekayaan yang harus dihargai (Marbun, 2023). Peserta didik diajak untuk melihat perbedaan sebagai sesuatu yang positif, bukan sebagai ancaman.

Dalam penerapannya, pendekatan-pendekatan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik

dan lingkungan belajar (Azzahra et al., 2024). Guru memiliki peran penting dalam memilih pendekatan yang tepat agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Kreativitas dan kepekaan guru menjadi kunci keberhasilan dalam proses ini.

Dengan demikian, penggunaan pendekatan yang tepat dalam pembelajaran moderasi beragama akan membantu peserta didik dalam memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai moderasi secara lebih mendalam. Pendekatan yang beragam juga akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna.

3. Tujuan pendekatan moderasi

Tujuan utama dari pendekatan moderasi beragama dalam pembelajaran adalah untuk membentuk peserta didik yang memiliki sikap toleran dan menghargai perbedaan. Dalam kehidupan yang penuh dengan keberagaman, sikap ini sangat penting agar tercipta hubungan yang harmonis antar individu (Rosela et al., 2025). Melalui pendekatan yang tepat, nilai-nilai toleransi dapat ditanamkan sejak dini.

Selain itu, pendekatan moderasi beragama juga bertujuan untuk mencegah berkembangnya sikap ekstrem dalam beragama. Peserta didik diarahkan untuk memahami ajaran agama secara seimbang dan tidak berlebihan (Ahdan Hawari et al., 2024). Hal ini penting untuk menghindari munculnya sikap yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Tujuan lainnya adalah untuk menumbuhkan sikap saling menghormati antar sesama. Peserta didik diajak untuk memahami bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan keyakinan yang berbeda (Mubarak & Anhar, 2024). Dengan pemahaman ini, diharapkan peserta didik mampu bersikap lebih bijak dalam menyikapi perbedaan yang ada.

Pendekatan moderasi beragama juga bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang mampu hidup berdampingan secara damai. Kehidupan yang damai tidak hanya ditentukan oleh kesamaan, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola perbedaan. Oleh karena itu,

pembelajaran harus mampu membekali peserta didik dengan nilai-nilai tersebut.

C. Metode Dialog dan Diskusi dalam Pembelajaran

1. Pengertian metode dialog dan diskusi

Metode dialog dan diskusi merupakan salah satu cara pembelajaran yang menekankan pada interaksi aktif antara peserta didik dengan peserta didik lainnya maupun dengan pendidik (Panji et al., 2023). Dalam metode ini, proses pembelajaran tidak hanya berlangsung satu arah, tetapi melibatkan pertukaran ide, pendapat, dan pengalaman. Dengan demikian, peserta didik memiliki kesempatan untuk mengemukakan pandangannya secara terbuka.

Dialog dalam pembelajaran biasanya dilakukan melalui percakapan yang terarah untuk mencapai pemahaman bersama terhadap suatu materi (Hartati et al., 2024). Sementara itu, diskusi lebih menekankan pada proses tukar pendapat dalam kelompok untuk membahas suatu permasalahan tertentu. Kedua metode ini saling melengkapi dan dapat digunakan secara bersamaan dalam kegiatan pembelajaran.

Penggunaan metode dialog dan diskusi sangat relevan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam membahas nilai-nilai moderasi beragama (Yuniarsih et al., 2023). Hal ini karena banyak materi yang membutuhkan pemahaman mendalam serta keterbukaan dalam melihat berbagai sudut pandang. Peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga diajak untuk berpikir secara kritis.

Selain itu, metode ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar menghargai pendapat orang lain. Dalam proses diskusi, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan justru menjadi bagian penting dari pembelajaran. Dengan bimbingan guru, perbedaan tersebut dapat diarahkan menjadi sarana untuk memperkaya wawasan peserta didik.

2. Manfaat metode dialog

Metode dialog dan diskusi memiliki berbagai manfaat dalam proses pembelajaran, terutama dalam meningkatkan

keaktifan peserta didik (Hapsari, 2025). Melalui metode ini, peserta didik didorong untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembelajaran. Mereka tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi bagian dari proses penyampaian dan pengembangan materi.

Salah satu manfaat utama dari metode ini adalah melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dalam diskusi, peserta didik dihadapkan pada berbagai pendapat yang berbeda, sehingga mereka perlu menganalisis, membandingkan, dan mengambil kesimpulan (Pratama, 2022). Proses ini membantu mengembangkan kemampuan berpikir secara lebih mendalam.

Selain itu, metode dialog dan diskusi juga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik. Mereka belajar untuk menyampaikan pendapat dengan jelas dan sopan, serta mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Kemampuan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Manfaat lainnya adalah menumbuhkan sikap saling menghargai antar peserta didik (Pratama, 2022). Dalam diskusi, perbedaan pendapat tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari, tetapi sebagai hal yang harus dihargai. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai moderasi beragama yang menekankan pentingnya toleransi.

3. Penerapan dalam moderasi beragama

Penerapan metode dialog dan diskusi dalam pembelajaran moderasi beragama dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif peserta didik (Hakeu et al., 2023). Guru dapat mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, dan kehidupan sosial untuk didiskusikan bersama. Dengan demikian, peserta didik dapat memahami konsep moderasi beragama secara lebih nyata.

Dalam pelaksanaannya, guru perlu menciptakan suasana diskusi yang kondusif dan terbuka. Peserta didik harus merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut atau tertekan (Syifaurrehman et al., 2025). Peran guru sangat penting dalam mengarahkan jalannya

diskusi agar tetap fokus pada tujuan pembelajaran dan tidak menimbulkan konflik.

Salah satu contoh penerapan metode ini adalah dengan memberikan studi kasus yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat diminta untuk menganalisis kasus tersebut dan memberikan solusi berdasarkan nilai-nilai moderasi beragama (Rosela et al., 2025). Kegiatan ini akan membantu peserta didik dalam menghubungkan teori dengan praktik.

Selain itu, guru juga dapat membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk melakukan diskusi. Setiap kelompok dapat diberikan topik yang berbeda, kemudian hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga melatih kerja sama dan tanggung jawab.

D. Pembelajaran Kolaboratif dan Partisipatif

1. Pengertian pembelajaran kolaboratif

Pembelajaran kolaboratif merupakan suatu metode pembelajaran yang menekankan pada kerja sama antar peserta didik dalam mencapai tujuan belajar (Bakar et al., 2024). Dalam metode ini, peserta didik tidak belajar secara individu, melainkan bekerja dalam kelompok untuk memahami materi dan menyelesaikan tugas bersama. Melalui kerja sama tersebut, diharapkan terjadi proses saling membantu dan bertukar pengetahuan.

Dalam pembelajaran kolaboratif, setiap peserta didik memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Mereka dituntut untuk aktif berkontribusi dalam kelompok agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik (Bintari & Musyarapah, 2023). Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses interaksi antar peserta didik.

Metode ini juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dari pengalaman orang lain. Perbedaan kemampuan dan latar belakang menjadi kekuatan yang dapat memperkaya proses pembelajaran. Peserta didik dapat saling melengkapi dan mengisi kekurangan satu sama lain dalam kelompok.

2. Ciri pembelajaran partisipatif

Pembelajaran partisipatif merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik dalam seluruh proses pembelajaran (Indriyati et al., 2024). Dalam pendekatan ini, peserta didik tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai subjek yang ikut menentukan jalannya pembelajaran. Hal ini membuat suasana belajar menjadi lebih hidup dan dinamis.

Salah satu ciri utama pembelajaran partisipatif adalah adanya interaksi yang aktif antara peserta didik dengan pendidik maupun sesama peserta didik (Misbah, 2022). Proses pembelajaran berlangsung secara dua arah, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran ide dan pengalaman. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Ciri lainnya adalah adanya kesempatan bagi peserta didik untuk mengemukakan pendapat dan bertanya. Guru memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik untuk mengekspresikan pemikirannya (Bintari & Musyarapah, 2023). Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian dalam berkomunikasi.

Pembelajaran partisipatif juga ditandai dengan penggunaan berbagai metode yang bervariasi, seperti diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok. Variasi metode ini bertujuan untuk menghindari kejenuhan dan meningkatkan minat belajar peserta didik. Dengan metode yang beragam, pembelajaran menjadi lebih menarik.

3. Manfaat dalam moderasi beragama

Pembelajaran kolaboratif dan partisipatif memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Melalui kerja sama dalam kelompok, peserta didik belajar untuk menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang (Rusmiati, 2023). Hal ini sejalan dengan prinsip moderasi yang menekankan keseimbangan dan toleransi.

Dalam kegiatan kolaboratif, peserta didik sering kali dihadapkan pada perbedaan pandangan (Hapsari, 2025). Perbedaan ini menjadi sarana untuk belajar memahami perspektif orang lain (Ulin Nuha et al., 2024). Dengan

bimbingan guru, peserta didik dapat diarahkan untuk menyikapi perbedaan tersebut secara bijak dan tidak emosional.

Selain itu, pembelajaran partisipatif memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Keterlibatan ini membuat mereka lebih mudah memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama (Rosela et al., 2025). Peserta didik tidak hanya mengetahui, tetapi juga merasakan dan mengalami secara langsung.

Dengan demikian, pembelajaran kolaboratif dan partisipatif tidak hanya berfungsi sebagai metode pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter peserta didik. Melalui metode ini, nilai-nilai moderasi beragama dapat ditanamkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

E. Studi Kasus dalam Pembelajaran Moderasi

1. Pengertian metode studi kasus

Metode studi kasus merupakan salah satu metode pembelajaran yang menggunakan peristiwa nyata atau situasi tertentu sebagai bahan kajian dalam proses belajar (Hapsari, 2025). Dalam metode ini, peserta didik diajak untuk memahami suatu masalah secara mendalam melalui analisis terhadap kasus yang diberikan (Muslimin, 2023). Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata.

Studi kasus biasanya diambil dari kejadian yang terjadi di masyarakat, baik yang berkaitan dengan konflik sosial, perbedaan pendapat, maupun isu-isu keberagaman (Bintari & Musyarapah, 2023). Melalui kasus tersebut, peserta didik dapat melihat secara langsung bagaimana suatu masalah terjadi dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Hal ini membantu peserta didik dalam memahami materi secara lebih konkret.

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, metode studi kasus sangat efektif digunakan untuk membahas nilai-nilai moderasi beragama (Rizkiyana et al., 2024). Peserta didik tidak hanya diberikan konsep, tetapi

juga diajak untuk melihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, pemahaman peserta didik menjadi lebih mendalam.

2. Tujuan penggunaan metode studi kasus

Penggunaan metode studi kasus dalam pembelajaran memiliki beberapa tujuan yang penting untuk dicapai. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk melatih kemampuan analisis peserta didik terhadap suatu permasalahan (Sulaeman et al., 2022). Peserta didik diajak untuk memahami suatu kasus secara menyeluruh, mulai dari latar belakang hingga dampak yang ditimbulkan.

Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan. Melalui studi kasus, peserta didik dihadapkan pada situasi yang membutuhkan penyelesaian (Rahmi Pertiwi et al., 2023). Mereka belajar untuk menentukan langkah yang tepat berdasarkan nilai-nilai yang telah dipelajari, termasuk nilai moderasi beragama.

Metode studi kasus juga bertujuan untuk menghubungkan teori dengan praktik (Nasyiwa Ramadhini et al., 2025). Peserta didik tidak hanya memahami konsep secara abstrak, tetapi juga melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak mudah dilupakan.

3. Contoh penerapan berdasarkan nilai moderasi

Penerapan metode studi kasus dalam pembelajaran moderasi beragama dapat dilakukan dengan menghadirkan berbagai peristiwa yang relevan dengan kehidupan peserta didik (As-Shidqi et al., 2025). Guru dapat mengambil contoh kasus yang berkaitan dengan sikap intoleransi, perbedaan pendapat, atau konflik sosial yang terjadi di masyarakat (Panji et al., 2023). Kasus tersebut kemudian dijadikan bahan diskusi dan analisis bersama.

Dalam pelaksanaannya, guru dapat membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil (Bintari & Musyarapah, 2023). Setiap kelompok diberikan satu kasus untuk dianalisis. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi masalah, mencari penyebab, serta merumuskan solusi berdasarkan nilai-nilai moderasi

beragama. Kegiatan ini dapat meningkatkan keaktifan peserta didik.

Guru juga dapat memberikan arahan dan penguatan terhadap hasil diskusi yang telah dilakukan (Angin & Juariyah, 2024). Hal ini penting agar peserta didik tidak salah dalam memahami nilai-nilai yang ingin disampaikan. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan proses pembelajaran.

F. Pembelajaran Berbasis Nilai dan Pengalaman

1. Penanaman nilai moderasi

Penanaman nilai moderasi beragama merupakan proses penting dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang bertujuan untuk membentuk sikap seimbang dalam beragama (Bintari & Musyarapah, 2023). Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan saling menghormati perlu ditanamkan secara bertahap kepada peserta didik. Proses ini tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi, tetapi juga melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pelaksanaannya, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai teladan bagi peserta didik. Sikap dan perilaku guru akan menjadi contoh yang diamati dan ditiru oleh peserta didik (Azzahra et al., 2024). Oleh karena itu, guru harus mampu menunjukkan sikap moderat dalam beragama agar nilai tersebut dapat tersampaikan secara nyata.

Penanaman nilai moderasi juga dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang melibatkan interaksi antar peserta didik (Arikarani et al., 2016). Kegiatan seperti diskusi, kerja kelompok, dan simulasi dapat menjadi sarana untuk melatih sikap saling menghargai. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik belajar untuk menerima perbedaan.

2. Pembelajaran berbasis pengalaman

Pembelajaran berbasis pengalaman merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan langsung peserta didik dalam proses belajar. Dalam metode ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi secara teoritis, tetapi juga mengalami secara langsung apa yang

dipelajari (Dwi et al., 2022). Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami.

Pengalaman belajar dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan, seperti praktik, observasi, maupun kegiatan sosial di lingkungan sekitar (Rusmiati, 2023). Melalui pengalaman tersebut, peserta didik dapat memahami nilai-nilai yang diajarkan secara lebih nyata. Pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Misalkan peserta didik di ajak karya wisata ke Desa Pancasila, Lamongan. Belajar bagaimana masyarakat bisa hidup rukun, tempat ibadah yang berdekatan ada Masjid, Gereja dan Pura.

Dalam konteks moderasi beragama, pembelajaran berbasis pengalaman sangat efektif untuk menanamkan nilai toleransi dan saling menghormati (Ma'ad & Mardhiyah, 2024). Peserta didik dapat dilibatkan dalam kegiatan yang melibatkan interaksi dengan berbagai latar belakang. Hal ini membantu mereka untuk memahami keberagaman secara langsung.

Selain itu, pengalaman yang diperoleh peserta didik akan lebih mudah diingat dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya bersifat teoritis (Maulida et al., 2023). Pengalaman tersebut akan membentuk pemahaman yang lebih mendalam dan berkesan. Dengan demikian, nilai-nilai yang diajarkan dapat lebih mudah diinternalisasikan.

3. Dampak pembelajaran berbasis nilai

Pembelajaran yang berbasis nilai memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan peserta didik, terutama dalam pembentukan karakter (C. Hasibuan & Nalibaho, 2020). Nilai-nilai yang ditanamkan melalui proses pembelajaran akan mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak peserta didik dalam kehidupan sehari-hari (Ramadani & Sofa, 2025). Oleh karena itu, pembelajaran nilai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan.

Salah satu dampak utama dari pembelajaran nilai adalah terbentuknya sikap toleransi dalam diri peserta didik. Mereka belajar untuk menghargai perbedaan dan tidak mudah menghakimi orang lain (Rusmiati, 2023).

Sikap ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Selain itu, pembelajaran nilai juga dapat membentuk sikap tanggung jawab dan kepedulian sosial (Ahdan Hawari et al., 2024). Peserta didik menjadi lebih peka terhadap kondisi di sekitarnya dan terdorong untuk berbuat kebaikan. Nilai-nilai tersebut akan membentuk kepribadian yang positif.

G. Evaluasi Pembelajaran Moderasi Beragama

1. Pengertian evaluasi pembelajaran

Evaluasi pembelajaran merupakan proses yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai (Nafisah & Sahlan, 2023). Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, evaluasi tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada perubahan sikap dan perilaku peserta didik (Ahdan Hawari et al., 2024). Oleh karena itu, evaluasi menjadi bagian penting dalam keseluruhan proses pembelajaran.

Evaluasi dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang perkembangan peserta didik. Proses ini melibatkan berbagai teknik dan instrumen yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran (Vahlevi, 2023). Dengan demikian, hasil evaluasi dapat memberikan informasi yang akurat.

Dalam pembelajaran moderasi beragama, evaluasi memiliki peran yang sangat penting karena nilai-nilai yang diajarkan bersifat abstrak dan berkaitan dengan sikap (Rosela et al., 2025). Oleh sebab itu, evaluasi tidak cukup hanya dilakukan melalui tes tertulis, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku peserta didik.

2. Jenis evaluasi dalam pembelajaran

Jenis evaluasi dalam pembelajaran moderasi beragama dapat dibedakan berdasarkan aspek yang dinilai, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Evaluasi kognitif berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran (Hapsari, 2025). Biasanya dilakukan melalui tes tertulis atau lisan untuk mengukur tingkat pemahaman.

Evaluasi afektif berfokus pada sikap dan nilai yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam konteks moderasi

beragama, aspek ini sangat penting karena berkaitan dengan sikap toleransi, saling menghormati, dan keseimbangan dalam beragama (Bintari & Musyarapah, 2023). Evaluasi afektif dapat dilakukan melalui observasi dan penilaian sikap.

Dalam pelaksanaannya, ketiga jenis evaluasi tersebut harus dilakukan secara seimbang. Guru tidak boleh hanya menekankan pada satu aspek saja, tetapi harus memperhatikan keseluruhan perkembangan peserta didik. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih komprehensif.

3. Indikator keberhasilan

Indikator keberhasilan pembelajaran moderasi beragama dapat dilihat dari perubahan sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari (Misbah, 2022). Salah satu indikator utama adalah munculnya sikap toleransi terhadap perbedaan. Peserta didik mampu menerima dan menghargai orang lain yang memiliki latar belakang berbeda.

Selain itu, keberhasilan pembelajaran juga dapat dilihat dari kemampuan peserta didik dalam bersikap adil dan tidak berlebihan dalam beragama (Syifaurrehman et al., 2025). Mereka tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman yang ekstrem dan mampu bersikap bijak dalam menghadapi berbagai permasalahan (Sulaeman et al., 2022). Hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang baik terhadap konsep moderasi.

Selain aspek sikap, keberhasilan juga dapat dilihat dari pemahaman peserta didik terhadap konsep moderasi beragama. Mereka mampu menjelaskan dan memberikan contoh penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran telah berjalan dengan baik.

BAB 6

Media dan Sumber Belajar Moderasi Beragama

A. Konsep media pembelajaran dalam pendidikan agama Islam

1. Pengertian media pembelajaran PAI

Media pembelajaran dalam Pendidikan Agama Islam merupakan segala bentuk sarana yang digunakan untuk membantu proses penyampaian materi kepada peserta didik (Khumayroh et al., 2025). Media ini dapat berupa alat, bahan, maupun lingkungan yang dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran (P. M. Hasibuan & Hadijaya, 2024). Kehadiran media menjadi penting karena dapat mempermudah guru dalam menjelaskan materi yang bersifat abstrak.

Dalam pembelajaran PAI, media tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu visual, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan secara lebih efektif (Akbar et al., 2025). Materi yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan akhlak sering kali membutuhkan penjelasan yang mendalam (Maulida et al., 2023). Dengan adanya media, penyampaian materi dapat menjadi lebih konkret dan mudah dipahami.

Penggunaan media pembelajaran juga membantu menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan tidak monoton. Peserta didik cenderung lebih tertarik pada pembelajaran yang melibatkan unsur visual dan interaktif (C. Hasibuan & Nalibaho, 2020). Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar serta mendorong keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran.

2. Fungsi media dalam pembelajaran

Media pembelajaran memiliki berbagai fungsi yang mendukung keberhasilan proses belajar mengajar (Ramadani & Sofa, 2025). Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai alat bantu dalam menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik (Ahdan Hawari et al., 2024). Dengan adanya media, materi yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Media pembelajaran juga membantu dalam menjelaskan konsep-konsep yang bersifat abstrak. Dalam Pendidikan Agama Islam, terdapat banyak materi yang sulit dipahami jika hanya dijelaskan secara verbal (Nurhayati et al., 2023). Dengan menggunakan media seperti gambar, video, atau ilustrasi, konsep tersebut dapat disampaikan dengan lebih mudah.

Fungsi lainnya adalah sebagai sarana untuk memperkuat ingatan peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari (Busa, 2023). Informasi yang disampaikan melalui media visual dan audio cenderung lebih mudah diingat dibandingkan dengan penjelasan biasa. Hal ini akan membantu peserta didik dalam memahami dan mengingat materi dalam jangka waktu yang lebih lama.

3. Peran media dalam PAI

Media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Pendidikan Agama Islam. Salah satu peran utamanya adalah sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara lebih menarik dan mudah dipahami (Muflich et al., 2024). Dengan media yang tepat, pesan-pesan keagamaan dapat disampaikan secara lebih efektif kepada peserta didik.

Dalam pembelajaran PAI, media juga berperan dalam membantu peserta didik memahami ajaran agama secara lebih mendalam (Indriyati et al., 2024). Materi yang berkaitan dengan akhlak dan nilai-nilai kehidupan memerlukan pendekatan yang tepat agar dapat diterima dengan baik. Media dapat membantu menjelaskan materi tersebut melalui contoh-contoh yang konkret.

B. Jenis Media Pembelajaran Moderasi Beragama

1. Media pembelajaran visual

Media visual merupakan salah satu jenis media pembelajaran yang mengandalkan indera penglihatan dalam penyampaian informasi (Manao et al., 2021). Media ini dapat berupa gambar, poster, grafik, maupun infografis yang dirancang untuk menyampaikan pesan secara jelas dan menarik. Dalam pembelajaran moderasi beragama, media visual dapat digunakan untuk menggambarkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman.

Penggunaan media visual dalam pembelajaran memiliki kelebihan dalam menyampaikan informasi secara singkat namun padat (Rukhmana, 2021). Peserta didik dapat dengan mudah memahami pesan yang disampaikan melalui gambar atau ilustrasi (Hamdani et al., 2023). Hal ini sangat membantu dalam menjelaskan konsep yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret.

Dalam konteks moderasi beragama, media visual dapat digunakan untuk menampilkan contoh-contoh sikap saling menghargai antar umat beragama (Juanda, 2021). Gambar atau poster yang menunjukkan kerukunan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta didik. Pesan yang disampaikan menjadi lebih mudah diterima.

Selain itu, media visual juga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik (Isma et al., 2024). Tampilan yang menarik akan membuat peserta didik lebih tertarik untuk memperhatikan materi yang disampaikan. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan tidak membosankan.

2. Media pembelajaran audio-visual

Media audio-visual merupakan media pembelajaran yang menggabungkan unsur suara dan gambar dalam penyampaian informasi. Media ini dapat berupa video, film, animasi, maupun dokumenter yang menyajikan materi secara lebih hidup dan menarik (Jalal et al., 2002). Dalam pembelajaran moderasi beragama, media ini sangat efektif digunakan untuk menyampaikan pesan secara menyeluruh.

Penggunaan media audio-visual memungkinkan peserta didik untuk melihat dan mendengar secara

langsung materi yang disampaikan (Rukhmana, 2021). Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih nyata dan mudah dipahami. Peserta didik dapat memahami situasi atau peristiwa tertentu melalui tayangan yang disajikan.

Dalam pembelajaran moderasi beragama, media audio-visual dapat digunakan untuk menampilkan kisah-kisah inspiratif tentang toleransi dan kerukunan (Rusmiati, 2023). Melalui tayangan tersebut, peserta didik dapat belajar dari contoh nyata yang terjadi di masyarakat. Hal ini akan memperkuat pemahaman mereka terhadap nilai-nilai moderasi.

3. Media pembelajaran berbasis interaktif

Media berbasis interaktif merupakan jenis media pembelajaran yang memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan media yang digunakan (C. Hasibuan & Nalibaho, 2020). Media ini dapat berupa aplikasi pembelajaran, kuis digital, maupun simulasi yang dirancang untuk melibatkan peserta didik secara aktif (Arifudin et al., 2024). Dalam pembelajaran moderasi beragama, media ini sangat relevan digunakan.

Keunggulan media interaktif terletak pada kemampuannya untuk melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berpartisipasi secara langsung (Kahfi et al., 202M). Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton.

Dalam konteks moderasi beragama, media interaktif dapat digunakan untuk memberikan simulasi atau latihan yang berkaitan dengan sikap toleransi (Diniah et al., 2024). Peserta didik dapat diajak untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu. Hal ini akan membantu mereka dalam memahami penerapan nilai moderasi secara nyata.

C. Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran Moderasi

1. Peran teknologi dalam pendidikan

Perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Juanda, 2021). Teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi

secara lebih luas dan cepat. Dengan adanya teknologi, proses pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Dalam kegiatan pembelajaran, teknologi membantu guru dalam menyampaikan materi dengan berbagai cara yang lebih menarik. Penggunaan perangkat seperti komputer, proyektor, dan internet memungkinkan penyajian materi dalam bentuk yang lebih variatif (Hakeu et al., 2023). Hal ini membuat peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan.

Selain itu, teknologi juga memberikan akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber belajar. Peserta didik dapat mencari informasi tambahan melalui internet untuk memperdalam pemahaman mereka. Dengan demikian, proses belajar tidak hanya bergantung pada materi yang diberikan oleh guru di dalam kelas.

2. Integrasi teknologi dalam pembelajaran

Integrasi teknologi dalam pembelajaran merupakan upaya untuk menggabungkan penggunaan teknologi ke dalam proses belajar mengajar secara sistematis. Hal ini dilakukan agar teknologi tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran (Akbar et al., 2025). Dengan integrasi yang baik, proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif.

Dalam praktiknya, integrasi teknologi dapat dilakukan melalui penggunaan berbagai media digital, seperti presentasi interaktif, video pembelajaran, dan sumber belajar daring (Arikarani et al., 2016). Guru dapat memanfaatkan teknologi untuk menjelaskan materi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Hal ini membantu meningkatkan minat belajar peserta didik.

Dalam pembelajaran moderasi beragama, integrasi teknologi dapat digunakan untuk menyajikan berbagai perspektif yang beragam (Akbar et al., 2025). Peserta didik dapat belajar dari berbagai sumber yang terpercaya. Hal ini membantu mereka dalam memahami konsep moderasi secara lebih luas.

3. Manfaat teknologi untuk moderasi beragama

Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran moderasi beragama memberikan berbagai manfaat yang

signifikan. Salah satu manfaat utamanya adalah kemudahan dalam menyebarkan informasi tentang nilai-nilai toleransi dan keberagaman (Rusmiati, 2023). Teknologi memungkinkan informasi tersebut dapat diakses oleh banyak orang dalam waktu yang singkat.

Selain itu, teknologi juga membantu peserta didik dalam memperoleh berbagai sumber belajar yang relevan. Mereka dapat mengakses artikel, video, maupun materi lainnya yang berkaitan dengan moderasi beragama. Hal ini membantu memperkaya pemahaman mereka terhadap konsep tersebut.

Manfaat lainnya adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan sikap kritis terhadap informasi yang diterima. Dalam era digital, banyak informasi yang beredar dengan berbagai sudut pandang (Ulin Nuha et al., 2024). Dengan bimbingan yang tepat, peserta didik dapat belajar untuk memilah informasi yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai moderasi. Teknologi juga dapat digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif (C. Hasibuan & Nalibaho, 2020). Melalui berbagai aplikasi dan platform digital, peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan.

D. Media Digital dan Platform Pembelajaran

1. Pengertian media digital

Media digital merupakan sarana pembelajaran yang memanfaatkan teknologi berbasis komputer dan internet dalam penyampaian informasi. Media ini mencakup berbagai bentuk, seperti teks digital, gambar, audio, video, dan animasi yang dapat diakses melalui perangkat elektronik (Arikarani et al., 2016). Dalam dunia pendidikan, media digital menjadi bagian penting dalam mendukung proses pembelajaran yang lebih modern.

Penggunaan media digital dalam pembelajaran memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai sumber informasi (Muchtar, Inayati, et al., 2025). Peserta didik tidak lagi terbatas pada buku teks, tetapi dapat memperoleh materi dari berbagai sumber yang tersedia

secara daring. Hal ini memperluas wawasan dan pengetahuan peserta didik.

Dalam konteks pembelajaran moderasi beragama, media digital dapat digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai toleransi dan keberagaman secara lebih luas (Rizqy et al., 2023). Materi yang disajikan dalam bentuk digital dapat menjangkau lebih banyak peserta didik. Dengan demikian, penyebaran nilai moderasi menjadi lebih efektif.

Selain itu, media digital memungkinkan penyajian materi yang lebih menarik dan interaktif. Penggunaan video, animasi, dan ilustrasi dapat membantu peserta didik dalam memahami materi dengan lebih mudah. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih variatif.

2. Jenis platform pembelajaran

Platform pembelajaran merupakan sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara daring (Jubaedah et al., 2025). Platform ini dapat berupa aplikasi atau sistem yang dirancang khusus untuk mendukung proses pembelajaran. Dalam perkembangan saat ini, berbagai platform pembelajaran telah banyak digunakan dalam dunia pendidikan.

Salah satu jenis platform pembelajaran adalah e-learning yang memungkinkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran secara online (Misbah, 2022). Melalui platform ini, guru dapat menyampaikan materi, memberikan tugas, serta melakukan evaluasi. Pembelajaran dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka secara langsung.

Media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai platform pembelajaran. Guru dapat menggunakan media sosial untuk berbagi materi, berdiskusi, serta memberikan informasi kepada peserta didik. Pemanfaatan media sosial dapat membuat pembelajaran menjadi lebih dekat dengan kehidupan peserta didik.

3. Kelebihan penggunaan platform pembelajaran

Penggunaan platform digital dalam pembelajaran memiliki berbagai kelebihan yang mendukung efektivitas proses belajar. Salah satu kelebihan utamanya adalah fleksibilitas dalam waktu dan tempat (Isma et al., 2024). Peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran kapan

saja tanpa terikat oleh ruang kelas. Selain itu, platform digital memungkinkan penyampaian materi yang lebih variatif. Guru dapat menggunakan berbagai bentuk media, seperti video, audio, maupun presentasi interaktif (Manao et al., 2021). Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton.

Kelebihan lainnya adalah kemudahan dalam mengakses berbagai sumber belajar. Peserta didik dapat memperoleh informasi dari berbagai referensi yang tersedia secara daring. Hal ini membantu dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman mereka. Platform digital juga memudahkan proses komunikasi antara guru dan peserta didik. Interaksi dapat dilakukan melalui forum diskusi, pesan, maupun video conference (Devisiana et al., 2024). Dengan demikian, proses pembelajaran tetap dapat berlangsung secara efektif meskipun tidak dilakukan secara langsung.

E. Pengembangan Sumber Belajar Moderasi Beragama

1. Pengertian sumber belajar

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, baik berupa bahan, alat, maupun lingkungan. Dalam konteks pendidikan, sumber belajar tidak terbatas pada buku teks, tetapi juga mencakup berbagai media lain yang dapat membantu peserta didik dalam memahami materi (Misbah, 2022). Dengan demikian, sumber belajar memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan pembelajaran.

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, sumber belajar digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara lebih luas dan mendalam (Ahdan Hawari et al., 2024). Peserta didik dapat memperoleh pengetahuan tidak hanya dari guru, tetapi juga dari berbagai sumber lainnya. Hal ini membantu memperkaya wawasan peserta didik.

2. Prinsip pengembangan sumber belajar

Pengembangan sumber belajar harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip agar dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran. Salah satu

prinsip utama adalah relevansi, yaitu kesesuaian sumber belajar dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai (Hanum, 2017). Sumber belajar yang digunakan harus mendukung pencapaian kompetensi peserta didik.

Selain itu, sumber belajar juga harus bersifat kontekstual, yaitu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Materi yang disajikan harus dekat dengan kehidupan sehari-hari agar mudah dipahami. Dengan demikian, peserta didik dapat mengaitkan materi dengan pengalaman mereka.

Prinsip lainnya adalah keakuratan informasi yang disampaikan. Sumber belajar harus berasal dari referensi yang dapat dipercaya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman (Rukhmana, 2021). Hal ini sangat penting terutama dalam pembelajaran yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan. Pengembangan sumber belajar juga harus memperhatikan aspek kemenarikan. Sumber belajar yang menarik akan meningkatkan minat belajar peserta didik. Penggunaan media yang variatif dapat membantu menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan.

3. Contoh sumber belajar moderasi

Sumber belajar moderasi beragama dapat berupa berbagai bentuk yang mendukung pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Salah satu contohnya adalah buku atau artikel yang membahas tentang moderasi beragama (Maulida et al., 2023). Sumber ini dapat memberikan penjelasan secara teoritis kepada peserta didik.

Selain itu, video edukasi juga dapat digunakan sebagai sumber belajar. Video yang menampilkan contoh nyata tentang sikap toleransi dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep moderasi beragama (Dewi et al., 2025). Penyajian dalam bentuk visual dan audio membuat materi lebih mudah dipahami.

Sumber belajar lainnya adalah studi kasus yang diambil dari kehidupan masyarakat. Peserta didik dapat mempelajari berbagai peristiwa yang berkaitan dengan keberagaman. Hal ini membantu mereka dalam memahami penerapan nilai moderasi secara nyata (Arikarani et al., 2016). Lingkungan sekitar juga dapat dijadikan sebagai

sumber belajar. Interaksi dengan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda dapat memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Pengalaman ini sangat berharga dalam pembentukan sikap toleransi.

F. Literasi Digital dalam Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian literasi digital

Literasi digital merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, serta mengevaluasi informasi yang diperoleh melalui media digital (Hanum, 2017). Dalam konteks pendidikan, literasi digital menjadi keterampilan yang sangat penting karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Peserta didik dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat, tetapi juga mencakup kemampuan memahami isi informasi yang berkaitan dengan ajaran agama (Ahdan Hawari et al., 2024). Peserta didik harus mampu membedakan antara informasi yang benar dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Hal ini menjadi penting dalam menjaga pemahaman yang benar.

2. Pentingnya literasi digital

Literasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat (Muchtar, Prawirosastro, et al., 2025). Peserta didik tidak hanya dituntut untuk mampu menggunakan teknologi, tetapi juga harus mampu memahami dan memanfaatkannya secara bijak (Ahdan Hawari et al., 2024). Hal ini menjadi bagian dari keterampilan yang harus dimiliki di era modern.

Salah satu alasan pentingnya literasi digital adalah untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak benar. Dalam media digital, banyak informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Rachmad, 2023). Tanpa kemampuan literasi digital yang baik, peserta didik dapat dengan mudah terpengaruh oleh informasi tersebut.

3. Peran literasi digital dalam moderasi

Literasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembelajaran moderasi beragama. Melalui literasi digital, peserta didik dapat mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan nilai-nilai toleransi dan keberagaman (Ulin Nuha et al., 2024). Hal ini membantu mereka dalam memahami konsep moderasi secara lebih luas.

Selain itu, literasi digital juga membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Mereka tidak hanya menerima informasi secara langsung, tetapi juga menganalisis dan mengevaluasi kebenarannya (Muchtar, Hermawansyah, et al., 2025). Hal ini sangat penting dalam menghadapi berbagai informasi yang beredar di media digital.

Dalam pembelajaran moderasi beragama, literasi digital juga berperan dalam membentuk sikap bijak dalam menggunakan media sosial. Peserta didik diharapkan mampu menggunakan media digital sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Hal ini akan memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar.

G. Tantangan Penggunaan Media Digital

1. Penyalagunaan teknologi

Penggunaan media digital dalam pembelajaran tidak terlepas dari berbagai tantangan, salah satunya adalah penyalahgunaan teknologi (Hamdani et al., 2023). Teknologi yang seharusnya digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, terkadang justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak sesuai. Hal ini menjadi perhatian penting dalam dunia pendidikan.

Peserta didik memiliki akses yang luas terhadap berbagai informasi di internet. Namun, tidak semua informasi tersebut bersifat positif dan mendukung pembelajaran (Azzahra et al., 2024). Terdapat berbagai konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan maupun ajaran agama. Hal ini dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku peserta didik.

Dalam konteks moderasi beragama, penyalahgunaan teknologi dapat berdampak pada munculnya pemahaman

yang tidak seimbang . Informasi yang bersifat ekstrem dapat dengan mudah diakses tanpa adanya penyaringan yang baik (Akbar et al., 2025). Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan dari guru dalam penggunaan teknologi. Selain itu, penggunaan teknologi yang tidak terkontrol juga dapat mengganggu fokus belajar peserta didik. Mereka dapat terdistraksi oleh berbagai aplikasi yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Hal ini dapat menurunkan kualitas proses belajar.

2. Kurangnya literasi digital

Kurangnya literasi digital menjadi tantangan lain dalam penggunaan media digital dalam pembelajaran (Khaira et al., 2024). Tidak semua peserta didik memiliki kemampuan yang memadai dalam memahami dan menggunakan teknologi secara bijak. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan media digital. Peserta didik yang memiliki literasi digital rendah cenderung kesulitan dalam memilah informasi yang benar dan yang tidak (Suhartini et al., 2024). Mereka dapat dengan mudah mempercayai informasi yang belum tentu kebenarannya. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam memahami materi pembelajaran.

Dalam pembelajaran moderasi beragama, kurangnya literasi digital dapat berdampak pada munculnya sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moderasi. Peserta didik dapat terpengaruh oleh informasi yang bersifat provokatif. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi sangat penting.

3. Keterbatasan fasilitas dan pengawasan

Keterbatasan fasilitas menjadi salah satu tantangan dalam penggunaan media digital dalam pembelajaran (Khaira et al., 2024). Tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi dan jaringan internet. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam proses pembelajaran. Peserta didik yang tidak memiliki fasilitas yang memadai akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran berbasis digital (Arifudin et al., 2024). Mereka tidak dapat mengakses materi yang disediakan secara daring. Hal ini dapat mempengaruhi hasil belajar mereka.

Selain itu, keterbatasan pengawasan juga menjadi tantangan dalam penggunaan media digital. Penggunaan teknologi yang tidak diawasi dengan baik dapat menyebabkan peserta didik mengakses konten yang tidak sesuai (Ramadhani & Musyarapah, 2024). Oleh karena itu, peran guru dan orang tua sangat penting dalam melakukan pengawasan.

Dalam pembelajaran moderasi beragama, pengawasan diperlukan agar peserta didik tetap berada pada jalur yang benar. Mereka perlu dibimbing dalam menggunakan media digital secara bijak (Ahdan Hawari et al., 2024). Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pemahaman. Dengan demikian, keterbatasan fasilitas dan pengawasan menjadi tantangan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan media digital (Khaira et al., 2024). Upaya untuk mengatasi tantangan ini perlu dilakukan agar pembelajaran dapat berjalan dengan optimal.

BAB 7

Implementasi Moderasi Beragama di Lingkungan Pendidikan

A. Konsep Implementasi Moderasi Beragama

a. Pengertian moderasi beragama

Moderasi beragama merupakan konsep penting dalam kehidupan beragama di tengah masyarakat yang majemuk dan plural. Secara etimologis, moderasi berasal dari kata moderate yang berarti tengah, tidak berlebihan, dan tidak ekstrem. Dalam konteks keagamaan, moderasi beragama merujuk pada sikap beragama yang seimbang, adil, dan proporsional dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama, tanpa terjebak pada sikap ekstremisme maupun liberalisme yang berlebihan. Moderasi beragama tidak berarti mengurangi keyakinan terhadap ajaran agama, melainkan menempatkan pemahaman dan praktik keagamaan secara bijak, kontekstual, dan menghargai keberagaman (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Dalam perspektif Islam, moderasi beragama sering dikaitkan dengan konsep wasathiyah yang berarti jalan tengah. Konsep ini menegaskan bahwa umat Islam diharapkan menjadi umat yang adil dan seimbang dalam segala aspek kehidupan. Prinsip ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang menyebut umat Islam sebagai ummatan wasathan (umat pertengahan), yang menunjukkan karakter moderat, tidak ekstrem, dan mampu menjadi teladan bagi umat lainnya. Moderasi dalam Islam mencakup keseimbangan antara

dimensi spiritual dan sosial, antara hak individu dan kepentingan kolektif, serta antara teks keagamaan dan konteks kehidupan (Nata, 2016).

Lebih lanjut, moderasi beragama juga mengandung nilai-nilai utama seperti toleransi (tasamuh), keadilan (i'tidal), keseimbangan (tawazun), dan sikap tengah (tawasuth). Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam membangun kehidupan beragama yang damai, harmonis, dan saling menghargai antar pemeluk agama maupun antar kelompok dalam satu agama. Dalam konteks pendidikan, moderasi beragama berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk karakter peserta didik yang inklusif, terbuka, dan memiliki kesadaran multikultural.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengamalkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum. Definisi ini menegaskan bahwa moderasi beragama tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, termasuk dalam interaksi sosial, pendidikan, dan kehidupan berbangsa.

Dalam konteks global, moderasi beragama menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya tantangan seperti radikalisme, intoleransi, dan konflik berbasis agama. Oleh karena itu, moderasi beragama dipandang sebagai pendekatan strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi sejak dini, sehingga peserta didik mampu memahami perbedaan sebagai bagian dari realitas sosial yang harus disikapi secara bijak.

Selain itu, moderasi beragama juga menekankan pentingnya keseimbangan antara teks dan konteks.

Artinya, pemahaman terhadap ajaran agama tidak hanya didasarkan pada teks secara literal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Pendekatan ini memungkinkan ajaran agama tetap relevan dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan modern (Azra, 2020).

Moderasi beragama dapat dipahami sebagai suatu pendekatan beragama yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi dalam kehidupan individu maupun sosial. Konsep ini menjadi sangat penting dalam konteks pendidikan, khususnya dalam pembentukan karakter peserta didik yang mampu hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman. Implementasi moderasi beragama tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan.

b. Landasan teologis moderasi dalam Islam

Landasan teologis moderasi dalam Islam berakar kuat pada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Moderasi beragama bukanlah konsep baru atau hasil kompromi modern, melainkan bagian inheren dari ajaran Islam itu sendiri. Prinsip keseimbangan (wasathiyah), keadilan ('adl), dan toleransi (tasamuh) merupakan nilai-nilai fundamental yang secara eksplisit maupun implisit diajarkan dalam teks-teks keagamaan.

Salah satu dasar teologis utama moderasi dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu konsep ummatan wasathan (umat pertengahan), sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam ditetapkan sebagai umat yang moderat, adil, dan seimbang, yang mampu menjadi saksi bagi umat lain. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam menolak sikap ekstrem, baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme yang berlebihan. Moderasi dalam Islam berarti menempatkan segala sesuatu secara

proporsional, tidak condong pada salah satu sisi secara berlebihan.

Selain itu, prinsip keadilan (al-'adl) juga menjadi landasan penting dalam moderasi beragama. Islam mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang latar belakang, agama, maupun kelompok tertentu. Dalam QS. An-Nisa ayat 135, Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil bahkan terhadap diri sendiri atau kelompok terdekat. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya berkaitan dengan sikap toleransi, tetapi juga dengan komitmen terhadap keadilan universal.

Nilai keseimbangan (tawazun) juga menjadi aspek penting dalam landasan teologis moderasi. Islam mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara hak individu dan kepentingan sosial, serta antara aspek spiritual dan material. Keseimbangan ini tercermin dalam berbagai ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjalani kehidupan secara harmonis dan tidak berlebihan dalam segala hal. Menurut Abuddin Nata (2016), keseimbangan dalam Islam merupakan karakter utama yang membedakan ajaran Islam dari sikap ekstrem yang cenderung merusak tatanan sosial.

Landasan teologis moderasi juga dapat ditemukan dalam ajaran toleransi (tasamuh). Islam mengakui keberagaman sebagai bagian dari kehendak Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, yang menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai suku dan bangsa untuk saling mengenal (ta'aruf). Ayat ini mengandung pesan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk konflik, melainkan kesempatan untuk membangun hubungan yang saling menghargai dan bekerja sama.

Lebih lanjut, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya sikap moderat dalam beragama.

Rasulullah dikenal sebagai sosok yang mengedepankan kemudahan (taysir) dan menghindari kesulitan (ta'sir) dalam menjalankan ajaran agama. Dalam berbagai riwayat, beliau menekankan bahwa agama Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan umatnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menolak sikap berlebihan dalam beragama yang dapat menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Dalam konteks kehidupan sosial, moderasi beragama juga tercermin dalam prinsip menjaga kemaslahatan (maslahah) dan menghindari kerusakan (mafsadah). Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kebaikan bersama. Oleh karena itu, sikap ekstrem yang berpotensi menimbulkan konflik dan kerusakan sosial tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), moderasi beragama memiliki empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Keempat indikator ini menunjukkan bahwa landasan teologis moderasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Landasan teologis moderasi dalam Islam mencakup berbagai prinsip yang saling terkait, seperti keadilan, keseimbangan, toleransi, dan kemaslahatan. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam membangun kehidupan beragama yang damai, harmonis, dan inklusif. Dalam konteks pendidikan, pemahaman terhadap landasan teologis ini sangat penting untuk menanamkan sikap moderat pada peserta didik, sehingga mereka mampu menghadapi keberagaman dengan bijak dan bertanggung jawab.

- c. Prinsip-prinsip moderasi beragama (tawasuth, tasamuh, tawazun, i'tidal)

Moderasi beragama dalam Islam tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki prinsip-prinsip operasional yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai dasar ajaran Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan sikap tengah dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan. Empat prinsip utama yang sering digunakan sebagai kerangka moderasi beragama adalah tawasuth, tasamuh, tawazun, dan i'tidal. Keempat prinsip ini saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan nilai yang utuh dalam membangun kehidupan beragama yang damai dan harmonis.

Prinsip pertama adalah tawasuth, yang berarti mengambil jalan tengah atau tidak bersikap ekstrem. Dalam konteks beragama, tawasuth mengajarkan umat Islam untuk menghindari sikap berlebihan (ghuluw) maupun sikap meremehkan ajaran agama. Sikap ini menempatkan individu pada posisi moderat yang mampu memahami ajaran agama secara proporsional, tidak kaku, namun tetap berpegang pada prinsip dasar yang benar. Konsep ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an tentang ummatan wasathan, yaitu umat yang berada di tengah, yang mampu menjadi teladan dalam kehidupan sosial. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), tawasuth merupakan inti dari moderasi beragama yang mendorong umat untuk bersikap adil dan tidak ekstrem dalam beragama.

Prinsip kedua adalah tasamuh, yang berarti toleransi. Tasamuh mengajarkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik dalam aspek keyakinan, pemikiran, maupun praktik keagamaan. Dalam masyarakat yang plural, prinsip ini menjadi sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan mencegah konflik sosial. Toleransi dalam Islam bukan berarti mencampuradukkan akidah, tetapi memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan keyakinannya tanpa adanya paksaan atau diskriminasi. Prinsip ini didasarkan pada pengakuan bahwa perbedaan adalah

sunnatullah yang harus disikapi dengan bijak (Azra, 2020).

Prinsip ketiga adalah tawazun, yaitu keseimbangan. Dalam Islam, keseimbangan menjadi nilai fundamental yang mengatur hubungan antara berbagai aspek kehidupan, seperti antara dunia dan akhirat, antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan sosial. Tawazun mengajarkan bahwa kehidupan yang ideal adalah kehidupan yang tidak condong secara berlebihan pada salah satu aspek, melainkan mampu menjaga harmoni dalam berbagai dimensi kehidupan. Dalam konteks moderasi beragama, prinsip ini mendorong umat untuk tidak hanya fokus pada ritual keagamaan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan.

Prinsip keempat adalah i'tidal, yang berarti keadilan atau lurus. I'tidal menekankan pentingnya bersikap adil dalam segala hal, termasuk dalam menilai, bersikap, dan bertindak. Keadilan dalam Islam bersifat universal dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok. Prinsip ini menuntut individu untuk bersikap objektif dan tidak diskriminatif, bahkan terhadap pihak yang berbeda pandangan atau keyakinan. Menurut Abuddin Nata (2016), keadilan merupakan inti dari ajaran Islam yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual.

Keempat prinsip tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tawasuth memberikan arah agar tidak ekstrem, tasamuh membuka ruang untuk menghargai perbedaan, tawazun menjaga keseimbangan dalam kehidupan, dan i'tidal memastikan keadilan dalam setiap tindakan. Jika keempat prinsip ini diimplementasikan secara konsisten, maka akan terbentuk sikap beragama yang moderat, inklusif, dan harmonis.

Dalam konteks pendidikan, prinsip-prinsip moderasi beragama ini dapat diinternalisasikan melalui pembelajaran yang menekankan nilai-nilai toleransi, dialog, dan penghargaan terhadap keberagaman. Peserta didik tidak hanya diajarkan tentang ajaran agama secara normatif, tetapi juga dibimbing untuk memahami bagaimana ajaran tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya religius, tetapi juga memiliki sikap moderat dan mampu hidup berdampingan secara damai.

d. Moderasi beragama dalam konteks pendidikan

Moderasi beragama dalam konteks pendidikan merupakan upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai keberagaman yang seimbang, toleran, dan inklusif kepada peserta didik melalui proses pembelajaran yang terencana. Pendidikan menjadi ruang strategis dalam membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku beragama generasi muda agar tidak terjebak pada ekstremisme, radikalisme, maupun sikap intoleran. Dalam hal ini, moderasi beragama tidak hanya diajarkan sebagai konsep, tetapi diinternalisasikan sebagai nilai yang hidup dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Secara konseptual, moderasi beragama dalam pendidikan mengacu pada proses pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai seperti toleransi (tasamuh), keseimbangan (tawazun), keadilan (i'tidal), dan sikap tengah (tawasuth) ke dalam kurikulum, metode, serta budaya sekolah. Hal ini sejalan dengan pandangan Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) yang menegaskan bahwa moderasi beragama harus diwujudkan dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sosial, termasuk dalam dunia pendidikan.

Dalam praktiknya, moderasi beragama dalam pendidikan dapat diimplementasikan melalui beberapa

aspek utama. Pertama, kurikulum yang memuat nilai-nilai moderasi. Materi pembelajaran, khususnya dalam Pendidikan Agama Islam (PAI), perlu dirancang agar tidak hanya menekankan aspek normatif dan ritual, tetapi juga aspek sosial, kemanusiaan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Kurikulum yang inklusif akan membantu peserta didik memahami bahwa perbedaan merupakan bagian dari realitas sosial yang harus dihargai.

Kedua, strategi pembelajaran yang dialogis dan partisipatif. Guru perlu mengembangkan metode pembelajaran yang mendorong diskusi, refleksi, dan keterbukaan terhadap berbagai perspektif. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta sikap saling menghargai. Menurut Abuddin Nata (2016), pendidikan Islam yang efektif adalah pendidikan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan realitas sosial secara kontekstual.

Ketiga, budaya sekolah yang mencerminkan nilai moderasi. Lingkungan sekolah harus menjadi ruang yang aman, inklusif, dan menghargai keberagaman. Interaksi antar siswa, guru, dan seluruh warga sekolah harus dilandasi oleh sikap saling menghormati dan tidak diskriminatif. Budaya sekolah yang positif akan memperkuat internalisasi nilai moderasi secara alami dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

Keempat, peran guru sebagai teladan. Guru memiliki posisi strategis dalam membentuk sikap moderat peserta didik. Tidak hanya melalui pengajaran, tetapi juga melalui sikap, perilaku, dan cara berinteraksi, guru dapat menjadi contoh nyata praktik moderasi beragama. Keteladanan ini sangat penting karena peserta didik cenderung meniru apa yang mereka lihat dalam lingkungan belajar.

Selain itu, moderasi beragama dalam pendidikan juga berkaitan erat dengan penguatan pendidikan karakter. Nilai-nilai seperti toleransi, empati, keadilan, dan tanggung jawab sosial merupakan bagian integral dari moderasi beragama. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan sosial.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, moderasi beragama dalam pendidikan menjadi semakin penting. Peserta didik saat ini hidup dalam arus informasi yang sangat cepat dan terbuka, yang berpotensi membawa berbagai ideologi, termasuk yang bersifat ekstrem. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu membekali peserta didik dengan kemampuan literasi kritis dan pemahaman keagamaan yang moderat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan (Azra, 2020).

Moderasi beragama dalam konteks pendidikan merupakan proses integratif yang melibatkan kurikulum, metode pembelajaran, budaya sekolah, serta peran guru dan lingkungan. Implementasi yang efektif akan menghasilkan peserta didik yang tidak hanya religius, tetapi juga toleran, inklusif, dan mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beragam.

e. Urgensi implementasi moderasi di sekolah

Implementasi moderasi beragama di sekolah merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika sosial, budaya, dan keagamaan di era modern. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku peserta didik sejak dini. Dalam konteks masyarakat yang plural, keberadaan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moderasi menjadi sangat penting untuk mencegah berkembangnya sikap

intoleransi, radikalisme, dan konflik sosial berbasis agama.

Salah satu alasan utama urgensi moderasi beragama di sekolah adalah meningkatnya tantangan global yang memengaruhi pola pikir generasi muda. Arus informasi yang cepat melalui media digital memungkinkan peserta didik terpapar berbagai ideologi, termasuk yang bersifat ekstrem. Tanpa adanya filter yang kuat melalui pendidikan, peserta didik berpotensi mengadopsi pemahaman keagamaan yang sempit dan eksklusif. Oleh karena itu, sekolah harus menjadi ruang edukatif yang mampu membekali peserta didik dengan pemahaman agama yang inklusif, rasional, dan kontekstual (Azra, 2020).

Selain itu, keberagaman latar belakang peserta didik—baik dari segi agama, budaya, maupun sosial—menuntut adanya pendekatan pendidikan yang mampu mengelola perbedaan secara konstruktif. Moderasi beragama menjadi kerangka penting dalam membangun sikap saling menghargai dan hidup berdampingan secara damai. Tanpa implementasi nilai-nilai moderasi, potensi konflik horizontal di lingkungan sekolah dapat meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada terganggunya proses pembelajaran.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), moderasi beragama merupakan strategi penting dalam menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti bahwa sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter kebangsaan yang berlandaskan nilai toleransi dan kebhinekaan. Dengan demikian, implementasi moderasi beragama di sekolah berkontribusi langsung terhadap penguatan persatuan nasional.

Urgensi lainnya terletak pada fungsi pendidikan sebagai proses pembentukan karakter (*character building*).

Moderasi beragama sejalan dengan nilai-nilai pendidikan karakter seperti toleransi, empati, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Melalui integrasi nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan sikap terbuka terhadap perbedaan serta memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Hal ini penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan sosial.

Implementasi moderasi beragama di sekolah juga menjadi respons terhadap fenomena polarisasi sosial yang semakin meningkat di masyarakat. Perbedaan pandangan keagamaan sering kali menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis dan sikap bijak dalam menyikapi perbedaan. Menurut Abuddin Nata (2016), pendidikan Islam harus mampu menanamkan nilai keseimbangan dan keadilan sebagai fondasi dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.

Di samping itu, urgensi moderasi beragama juga berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Sekolah yang menerapkan nilai-nilai moderasi akan lebih mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi seluruh peserta didik, tanpa adanya diskriminasi atau marginalisasi. Lingkungan yang positif ini akan mendukung perkembangan optimal peserta didik, baik dari aspek akademik maupun non-akademik.

Dalam perspektif jangka panjang, implementasi moderasi beragama di sekolah berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang damai dan berkeadaban. Peserta didik yang terbiasa dengan nilai-nilai moderasi akan tumbuh menjadi individu yang mampu menghargai perbedaan, menjunjung tinggi keadilan, dan berperan aktif dalam menjaga harmoni

sosial. Dengan demikian, pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan berbagai alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi moderasi beragama di sekolah bukan hanya penting, tetapi juga mendesak. Sekolah harus mengambil peran aktif dalam mengintegrasikan nilai-nilai moderasi ke dalam seluruh aspek pendidikan, mulai dari kurikulum, metode pembelajaran, hingga budaya sekolah. Upaya ini diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya religius, tetapi juga moderat, toleran, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman.

f. Indikator keberhasilan moderasi beragama

Keberhasilan implementasi moderasi beragama tidak dapat diukur hanya dari aspek normatif atau pemahaman konseptual semata, tetapi harus terlihat secara nyata dalam sikap, perilaku, dan praktik kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan indikator yang jelas dan terukur untuk menilai sejauh mana nilai-nilai moderasi beragama telah terinternalisasi dalam diri peserta didik dan warga sekolah secara umum.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), terdapat empat indikator utama dalam moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Keempat indikator ini menjadi acuan penting dalam menilai keberhasilan moderasi beragama, baik dalam konteks individu maupun institusi pendidikan.

Indikator pertama adalah komitmen kebangsaan, yaitu sikap menerima dan menghargai konsensus nasional seperti Pancasila, UUD 1945, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks pendidikan, indikator ini tercermin dalam sikap peserta didik yang memiliki rasa cinta tanah air, menghargai

simbol negara, serta mampu hidup berdampingan dalam keragaman. Moderasi beragama yang berhasil akan melahirkan individu yang tidak mempertentangkan antara ajaran agama dan nilai kebangsaan, melainkan memadukan keduanya secara harmonis.

Indikator kedua adalah toleransi, yaitu sikap menghargai perbedaan keyakinan, pendapat, dan praktik keagamaan orang lain. Toleransi tidak hanya sebatas pengakuan terhadap keberagaman, tetapi juga diwujudkan dalam interaksi sosial yang penuh penghormatan dan empati. Dalam lingkungan sekolah, indikator ini dapat dilihat dari kemampuan peserta didik untuk bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang, tidak melakukan diskriminasi, serta mampu berdialog secara terbuka dan konstruktif.

Indikator ketiga adalah anti-kekerasan, yaitu penolakan terhadap segala bentuk tindakan kekerasan, baik fisik maupun verbal, dalam menyelesaikan perbedaan. Moderasi beragama menekankan penyelesaian konflik melalui cara-cara damai, dialogis, dan beradab. Dalam konteks pendidikan, keberhasilan indikator ini terlihat dari menurunnya perilaku bullying, intoleransi, maupun radikalisme di lingkungan sekolah. Peserta didik yang memiliki sikap moderat akan lebih memilih pendekatan persuasif dan komunikatif dalam menghadapi perbedaan.

Indikator keempat adalah penerimaan terhadap tradisi, yaitu sikap terbuka terhadap budaya lokal dan praktik keagamaan yang berkembang di masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran agama. Sikap ini mencerminkan kemampuan untuk menghargai kearifan lokal sebagai bagian dari identitas sosial. Dalam pendidikan, indikator ini dapat dilihat dari keterlibatan peserta didik dalam kegiatan budaya, penghargaan terhadap tradisi lokal, serta kemampuan untuk memadukan nilai agama dengan budaya secara bijak.

Selain keempat indikator tersebut, beberapa ahli juga menambahkan indikator lain yang bersifat pendukung, seperti kemampuan berpikir kritis, sikap inklusif, dan kematangan emosional dalam menyikapi perbedaan. Menurut Abuddin Nata (2016), keberhasilan pendidikan Islam yang moderat ditandai dengan terbentuknya individu yang memiliki keseimbangan antara aspek intelektual, spiritual, dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya berkaitan dengan sikap eksternal, tetapi juga dengan kedalaman pemahaman dan kematangan kepribadian.

Dalam konteks evaluasi pendidikan, indikator-indikator tersebut dapat diukur melalui berbagai instrumen, seperti observasi perilaku, angket sikap, jurnal refleksi, serta penilaian autentik. Evaluasi yang komprehensif akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat keberhasilan implementasi moderasi beragama di sekolah. Selain itu, hasil evaluasi juga dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan program pendidikan yang lebih efektif.

B. Peran Guru dalam Implementasi Moderasi

a. Guru sebagai teladan (role model) moderasi

Dalam implementasi moderasi beragama di lingkungan pendidikan, peran guru sebagai teladan (role model) memiliki posisi yang sangat strategis dan menentukan. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai figur yang ditiru oleh peserta didik dalam sikap, perilaku, dan cara berpikir. Oleh karena itu, keberhasilan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama sangat bergantung pada sejauh mana guru mampu menampilkan praktik moderasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Secara konseptual, keteladanan (*uswah hasanah*) merupakan metode pendidikan yang sangat efektif dalam Islam. Peserta didik cenderung belajar melalui proses imitasi, yaitu meniru apa yang mereka lihat dari figur yang dianggap otoritatif dan inspiratif. Dalam

konteks ini, guru menjadi representasi nilai-nilai moderasi beragama, seperti toleransi (tasamuh), keseimbangan (tawazun), keadilan (i'tidal), dan sikap tengah (tawasuth). Ketika guru mampu menunjukkan sikap terbuka terhadap perbedaan, menghargai pendapat orang lain, serta bersikap adil dalam memperlakukan peserta didik, maka nilai-nilai tersebut akan lebih mudah diinternalisasi oleh peserta didik.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), moderasi beragama harus tercermin dalam sikap dan perilaku nyata, bukan hanya dalam wacana atau teori. Dalam hal ini, guru memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh konkret dalam mengamalkan nilai-nilai tersebut. Keteladanan guru dapat terlihat dalam berbagai aspek, seperti cara berkomunikasi yang santun, sikap menghargai keberagaman, serta kemampuan mengelola perbedaan secara bijak di dalam kelas.

Selain itu, guru sebagai teladan moderasi juga dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian dan sosial yang kuat. Kompetensi kepribadian mencakup integritas, kedewasaan, dan konsistensi dalam bersikap, sedangkan kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan berinteraksi secara harmonis dengan berbagai pihak. Guru yang memiliki kedua kompetensi ini akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kondusif bagi tumbuhnya sikap moderat pada peserta didik.

Peran keteladanan guru juga sangat penting dalam mencegah berkembangnya sikap intoleransi dan diskriminasi di lingkungan sekolah. Sikap guru yang tidak adil atau cenderung memihak pada kelompok tertentu dapat memicu konflik dan memperkuat stereotip negatif di kalangan peserta didik. Sebaliknya, guru yang menunjukkan sikap adil dan objektif akan membantu membangun kepercayaan serta memperkuat nilai persatuan di antara peserta didik. Menurut

Abuddin Nata (2016), pendidikan Islam yang efektif adalah pendidikan yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter melalui keteladanan.

Lebih jauh, keteladanan guru dalam moderasi beragama juga mencakup kemampuan dalam mengelola perbedaan pandangan keagamaan di dalam kelas. Dalam situasi di mana terdapat perbedaan interpretasi atau praktik keagamaan, guru harus mampu menjadi mediator yang bijak, tidak memaksakan satu pandangan tertentu, serta memberikan ruang dialog yang sehat. Pendekatan ini akan membantu peserta didik memahami bahwa perbedaan adalah bagian dari dinamika keilmuan dan bukan sumber konflik.

Dalam era digital saat ini, peran guru sebagai teladan juga meluas ke ruang virtual. Sikap dan perilaku guru di media sosial turut menjadi perhatian peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu menunjukkan konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai moderasi, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas guru sebagai figur pendidikan.

Guru sebagai teladan moderasi beragama merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi nilai-nilai moderasi di sekolah. Keteladanan yang konsisten dan autentik akan memberikan dampak yang lebih kuat dibandingkan sekadar penyampaian materi secara teoritis. Melalui peran ini, guru tidak hanya mendidik peserta didik menjadi individu yang religius, tetapi juga menjadi pribadi yang toleran, inklusif, dan mampu hidup harmonis dalam keberagaman.

b. Kompetensi guru dalam moderasi beragama

Kompetensi guru dalam moderasi beragama merupakan aspek kunci dalam keberhasilan implementasi nilai-nilai moderasi di lingkungan pendidikan. Guru tidak hanya dituntut memiliki kemampuan pedagogis dalam menyampaikan materi, tetapi juga harus memiliki kapasitas intelektual, sosial, dan kepribadian yang

mencerminkan sikap moderat dalam beragama. Kompetensi ini menjadi fondasi utama agar guru mampu menginternalisasikan nilai-nilai moderasi secara efektif kepada peserta didik.

Secara umum, kompetensi guru dalam moderasi beragama dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai moderasi seperti toleransi (tasamuh), keseimbangan (tawazun), keadilan (i'tidal), dan sikap tengah (tawasuth) dalam proses pembelajaran maupun interaksi sosial. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), moderasi beragama harus tercermin dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak, sehingga guru sebagai pendidik memiliki tanggung jawab untuk menjadi agen utama dalam menyebarkan nilai tersebut.

Kompetensi pertama yang harus dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik berbasis moderasi. Guru perlu mampu merancang pembelajaran yang inklusif, dialogis, dan menghargai keberagaman. Hal ini mencakup kemampuan memilih materi yang tidak bias, menggunakan metode pembelajaran yang mendorong diskusi terbuka, serta menciptakan suasana kelas yang aman bagi semua peserta didik. Dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memahami ajaran agama secara tekstual, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sosial yang plural.

Kompetensi kedua adalah kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi keagamaan yang komprehensif dan kontekstual. Guru harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam, termasuk berbagai perspektif dan perbedaan pendapat (ikhtilaf) dalam tradisi keilmuan Islam. Pemahaman ini penting agar guru tidak menyampaikan ajaran agama secara sempit atau eksklusif. Menurut Abuddin Nata (2016), penguasaan ilmu yang luas dan kontekstual akan membantu guru dalam menyampaikan ajaran Islam yang relevan dengan perkembangan zaman.

Kompetensi ketiga adalah kompetensi kepribadian, yang mencerminkan integritas moral dan spiritual guru. Guru yang memiliki kepribadian moderat akan menunjukkan sikap adil, sabar, terbuka, dan tidak mudah menghakimi. Sikap ini sangat penting karena peserta didik cenderung meniru perilaku guru dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan yang konsisten akan memperkuat internalisasi nilai moderasi secara lebih efektif dibandingkan dengan penyampaian teori semata.

Kompetensi keempat adalah kompetensi sosial, yaitu kemampuan berinteraksi secara harmonis dengan berbagai pihak, baik peserta didik, sesama guru, maupun masyarakat. Dalam konteks moderasi beragama, kompetensi ini mencakup kemampuan untuk menghargai perbedaan, membangun komunikasi yang inklusif, serta menyelesaikan konflik secara damai. Guru yang memiliki kompetensi sosial yang baik akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan penuh penghargaan terhadap keberagaman.

Selain keempat kompetensi utama tersebut, guru juga perlu memiliki kompetensi literasi digital moderat. Di era digital, guru harus mampu memilah informasi keagamaan yang valid dan moderat, serta menghindari penyebaran konten yang bersifat provokatif atau ekstrem. Kemampuan ini penting untuk membimbing peserta didik agar tidak terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan di media sosial dan internet.

Lebih lanjut, kompetensi guru dalam moderasi beragama juga mencakup kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Guru harus mampu mengevaluasi berbagai pandangan keagamaan secara objektif dan tidak terjebak pada sikap fanatisme sempit. Sikap ini akan membantu guru dalam memberikan pemahaman yang seimbang kepada peserta didik, serta mendorong mereka untuk mengembangkan cara berpikir yang terbuka dan rasional.

Kompetensi guru dalam moderasi beragama merupakan kombinasi dari berbagai aspek, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, sosial, dan literasi digital. Penguatan kompetensi ini sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai moderasi tidak hanya diajarkan, tetapi juga dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan pendidikan. Guru yang kompeten dalam moderasi beragama akan mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya religius, tetapi juga toleran, inklusif, dan siap menghadapi tantangan keberagaman di masyarakat.

c. Peran guru sebagai fasilitator dialog

Dalam konteks implementasi moderasi beragama di lingkungan pendidikan, guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator dialog yang mampu menciptakan ruang komunikasi terbuka, inklusif, dan konstruktif. Peran ini sangat penting dalam membangun pemahaman keagamaan yang moderat, karena dialog memungkinkan peserta didik untuk saling bertukar pandangan, memahami perbedaan, serta mengembangkan sikap toleransi dan empati.

Sebagai fasilitator dialog, guru bertugas mengarahkan proses komunikasi di kelas agar berlangsung secara sehat dan beradab. Dialog yang dimaksud bukan sekadar percakapan biasa, melainkan interaksi yang bertujuan untuk mencari pemahaman bersama (mutual understanding) tanpa adanya paksaan atau dominasi satu pihak terhadap pihak lain. Dalam hal ini, guru harus mampu menciptakan suasana yang aman (safe space), di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), moderasi beragama menekankan pentingnya sikap terbuka terhadap perbedaan serta kemampuan untuk berdialog secara damai. Oleh karena itu, guru perlu

mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, seperti mendengarkan secara aktif, memberikan respon yang bijak, serta mengelola dinamika diskusi agar tetap fokus dan tidak menimbulkan konflik.

Peran guru sebagai fasilitator dialog juga mencakup kemampuan dalam mengelola perbedaan pandangan keagamaan di dalam kelas. Dalam situasi di mana terdapat berbagai interpretasi atau praktik keagamaan, guru harus bersikap netral dan objektif, tidak memaksakan satu pandangan tertentu, serta memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai perspektif. Pendekatan ini akan membantu peserta didik memahami bahwa perbedaan adalah bagian dari kekayaan intelektual dan bukan sumber perpecahan.

Selain itu, guru perlu menerapkan strategi pembelajaran dialogis, seperti diskusi kelompok, debat terarah, studi kasus, dan refleksi bersama. Metode-metode ini memungkinkan peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis. Menurut Abuddin Nata (2016), pendidikan Islam yang efektif adalah pendidikan yang mampu mendorong peserta didik untuk berpikir secara terbuka dan kontekstual dalam memahami ajaran agama.

Peran fasilitator dialog juga menuntut guru untuk memiliki sensitivitas sosial dan emosional yang tinggi. Guru harus peka terhadap perasaan peserta didik, terutama ketika membahas isu-isu yang sensitif seperti perbedaan agama atau keyakinan. Dalam hal ini, guru perlu memastikan bahwa dialog tidak berubah menjadi perdebatan yang bersifat konfrontatif atau menyinggung pihak tertentu. Sebaliknya, dialog harus diarahkan untuk membangun rasa saling menghormati dan memperkuat hubungan sosial.

Di era digital, peran guru sebagai fasilitator dialog juga meluas ke ruang virtual. Diskusi daring melalui platform pembelajaran atau media sosial menjadi bagian dari proses pendidikan. Oleh karena itu, guru perlu membimbing peserta didik dalam berkomunikasi secara etis di dunia digital, termasuk dalam menyampaikan pendapat dan menanggapi perbedaan secara santun.

Lebih jauh, dialog yang difasilitasi oleh guru dapat menjadi sarana efektif untuk internalisasi nilai moderasi beragama. Melalui dialog, peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mengalami proses refleksi yang mendalam terhadap nilai-nilai yang dipelajari. Proses ini akan membantu mereka mengembangkan sikap moderat yang lebih autentik dan berkelanjutan.

Peran guru sebagai fasilitator dialog merupakan elemen penting dalam membangun pendidikan yang moderat dan inklusif. Guru yang mampu memfasilitasi dialog secara efektif akan membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sikap toleran, serta keterampilan komunikasi yang konstruktif. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan pendidikan yang harmonis dan berkeadaban.

d. Strategi guru dalam menanamkan nilai toleransi

Penanaman nilai toleransi merupakan bagian integral dari implementasi moderasi beragama di lingkungan pendidikan. Guru memiliki peran strategis dalam membentuk sikap peserta didik agar mampu menghargai perbedaan, baik dalam aspek agama, budaya, maupun pandangan sosial. Namun, nilai toleransi tidak dapat ditanamkan hanya melalui penyampaian materi secara teoritis, melainkan harus melalui strategi yang terencana, kontekstual, dan berkelanjutan.

Salah satu strategi utama adalah integrasi nilai toleransi dalam pembelajaran. Guru perlu memasukkan nilai-nilai toleransi ke dalam materi ajar, khususnya dalam Pendidikan Agama Islam (PAI), dengan menekankan ajaran Islam yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Materi pembelajaran dapat dikaitkan dengan realitas sosial yang dihadapi peserta didik, sehingga mereka mampu memahami pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), moderasi beragama harus diwujudkan dalam praktik pendidikan yang mengedepankan sikap saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai.

Strategi berikutnya adalah pembelajaran berbasis dialog dan diskusi. Guru dapat menciptakan ruang diskusi yang terbuka, di mana peserta didik dapat menyampaikan pendapat, bertanya, dan berdialog mengenai perbedaan yang ada. Melalui dialog, peserta didik belajar untuk mendengarkan perspektif orang lain, mengembangkan empati, serta menghargai perbedaan tanpa harus kehilangan identitas diri. Pendekatan ini juga melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi yang konstruktif.

Selanjutnya, guru dapat menerapkan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*). Dalam strategi ini, peserta didik diajak untuk mengalami langsung situasi yang menuntut sikap toleransi, misalnya melalui kerja kelompok dengan anggota yang beragam, kegiatan sosial, atau proyek kolaboratif. Pengalaman langsung akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan dengan pembelajaran teoritis semata. Menurut Abuddin Nata (2016), pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang mampu menghubungkan teori dengan praktik kehidupan nyata.

Strategi lainnya adalah keteladanan guru (*modeling*). Guru harus menunjukkan sikap toleran dalam interaksi

sehari-hari, baik terhadap peserta didik maupun rekan kerja. Sikap guru yang adil, tidak diskriminatif, dan menghargai perbedaan akan menjadi contoh nyata yang ditiru oleh peserta didik. Keteladanan ini merupakan metode yang sangat efektif dalam pendidikan karakter, karena peserta didik cenderung meniru perilaku yang mereka lihat.

Selain itu, guru juga dapat memanfaatkan media pembelajaran dan teknologi untuk menanamkan nilai toleransi. Video, cerita, film, atau konten digital yang mengangkat tema keberagaman dan toleransi dapat digunakan sebagai bahan refleksi dan diskusi. Media ini membantu peserta didik memahami isu-isu sosial secara lebih konkret dan menarik, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima.

Strategi berikutnya adalah penguatan budaya sekolah yang inklusif. Guru perlu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan rutin seperti peringatan hari besar, kegiatan sosial, serta program sekolah yang menekankan nilai persatuan dan kebhinekaan. Lingkungan yang kondusif akan memperkuat internalisasi nilai toleransi secara alami.

Guru juga perlu menerapkan pendekatan reflektif, yaitu mengajak peserta didik untuk merenungkan pengalaman mereka terkait perbedaan dan toleransi. Melalui refleksi, peserta didik dapat mengevaluasi sikap dan perilaku mereka sendiri, serta memahami pentingnya toleransi dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini membantu membentuk kesadaran internal yang lebih mendalam.

Dalam era digital, strategi penanaman toleransi juga harus mencakup literasi digital. Guru perlu membimbing peserta didik dalam menyaring informasi, menghindari konten yang bersifat provokatif, serta

berkomunikasi secara etis di media sosial. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran sikap intoleran di ruang digital yang dapat memengaruhi pola pikir peserta didik.

e. Guru dalam mengelola keberagaman di kelas

Keberagaman di kelas merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam dunia pendidikan, khususnya di masyarakat yang plural seperti Indonesia. Perbedaan latar belakang agama, budaya, bahasa, sosial, dan kemampuan akademik menjadi dinamika yang harus dikelola secara bijak oleh guru. Dalam konteks ini, peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pengelola keberagaman (*diversity manager*) yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, harmonis, dan kondusif bagi seluruh peserta didik.

Mengelola keberagaman di kelas berarti kemampuan guru dalam memahami, menerima, dan mengakomodasi perbedaan sebagai potensi, bukan sebagai hambatan. Guru perlu memiliki kesadaran bahwa setiap peserta didik memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pendekatan pembelajaran harus bersifat fleksibel dan adaptif. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), moderasi beragama menekankan pentingnya sikap inklusif dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai bagian dari kehidupan sosial.

Salah satu langkah utama dalam mengelola keberagaman adalah menciptakan lingkungan kelas yang aman dan inklusif. Guru harus memastikan bahwa setiap peserta didik merasa dihargai dan diterima tanpa adanya diskriminasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan aturan kelas yang menjunjung tinggi nilai saling menghormati, serta menindak tegas segala bentuk perilaku intoleran seperti ejekan, stereotip, atau bullying. Lingkungan yang aman akan mendorong peserta didik untuk lebih aktif dan percaya diri dalam proses pembelajaran.

Selanjutnya, guru perlu menerapkan pendekatan pembelajaran diferensiasi, yaitu menyesuaikan metode, materi, dan strategi pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pendekatan ini memungkinkan setiap peserta didik mendapatkan kesempatan belajar yang optimal sesuai dengan kemampuan dan latar belakangnya. Dengan demikian, keberagaman tidak menjadi penghambat, melainkan menjadi sumber kekayaan dalam proses belajar.

Guru juga berperan dalam memfasilitasi interaksi positif antar peserta didik. Melalui kegiatan kelompok, diskusi, dan proyek kolaboratif, peserta didik dapat belajar bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang. Interaksi ini akan membantu mereka mengembangkan sikap toleransi, empati, dan kemampuan komunikasi lintas budaya. Menurut Abuddin Nata (2016), pendidikan Islam harus mampu membentuk individu yang tidak hanya religius, tetapi juga memiliki kemampuan sosial yang baik dalam menghadapi keberagaman.

Selain itu, guru perlu mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman dalam materi pembelajaran. Materi ajar dapat dikaitkan dengan isu-isu sosial yang relevan, seperti toleransi, keadilan, dan persatuan. Dengan pendekatan kontekstual, peserta didik akan lebih mudah memahami pentingnya menghargai perbedaan dalam kehidupan nyata. Guru juga dapat menggunakan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari untuk memperkuat pemahaman tersebut.

Peran guru dalam mengelola keberagaman juga mencakup kemampuan mengatasi konflik yang muncul di kelas. Perbedaan yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu konflik antar peserta didik. Dalam situasi ini, guru harus bertindak sebagai mediator yang adil dan bijak, serta membantu peserta didik menyelesaikan konflik melalui dialog dan pendekatan damai.

Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menjadi pembelajaran berharga bagi peserta didik dalam mengelola perbedaan.

Di era digital, keberagaman tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga melalui interaksi di dunia maya. Oleh karena itu, guru perlu membimbing peserta didik dalam mengelola keberagaman di ruang digital, termasuk dalam berkomunikasi di media sosial. Literasi digital yang baik akan membantu peserta didik menghindari sikap intoleran dan mampu berinteraksi secara etis di dunia digital.

Lebih jauh, guru juga perlu menjalin kolaborasi dengan orang tua dan lingkungan sekolah dalam mengelola keberagaman. Nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah perlu diperkuat di lingkungan keluarga dan masyarakat agar internalisasi nilai menjadi lebih konsisten. Kolaborasi ini akan menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung terbentuknya sikap moderat pada peserta didik.

Pengelolaan keberagaman di kelas merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan kompetensi multidimensional dari seorang guru. Guru yang mampu mengelola keberagaman secara efektif akan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, harmonis, dan produktif. Hal ini pada akhirnya akan membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki sikap toleran, empati, dan kemampuan hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam.

- f. Tantangan guru dalam implementasi moderasi
Implementasi moderasi beragama di lingkungan pendidikan tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks, baik yang berasal dari faktor internal guru maupun dari lingkungan eksternal. Guru sebagai ujung tombak pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai moderasi, namun dalam

praktiknya sering dihadapkan pada berbagai kendala yang memerlukan strategi dan kesiapan yang matang.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman guru tentang konsep moderasi beragama. Tidak semua guru memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang memadai terkait moderasi beragama. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan interpretasi dalam memahami konsep moderasi, bahkan berpotensi menimbulkan bias dalam penyampaian materi. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), moderasi beragama memerlukan pemahaman yang komprehensif agar tidak disalahartikan sebagai sikap yang mengurangi nilai-nilai ajaran agama.

Tantangan berikutnya adalah pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Peserta didik datang dari latar belakang keluarga dan masyarakat yang beragam, yang mungkin memiliki pandangan keagamaan yang berbeda, termasuk yang cenderung eksklusif atau bahkan intoleran. Kondisi ini dapat memengaruhi pola pikir peserta didik dan menjadi hambatan bagi guru dalam menanamkan nilai moderasi. Guru harus mampu menjembatani perbedaan tersebut tanpa menimbulkan konflik atau resistensi.

Selain itu, arus informasi di era digital juga menjadi tantangan besar. Peserta didik memiliki akses luas terhadap berbagai sumber informasi, termasuk konten keagamaan yang tidak terverifikasi dan berpotensi mengandung paham radikal atau intoleran. Guru dituntut untuk memiliki literasi digital yang baik agar dapat membimbing peserta didik dalam memilah informasi yang benar dan sesuai dengan nilai moderasi. Tanpa kemampuan ini, guru akan kesulitan menghadapi pengaruh negatif dari media digital.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan metode dan media pembelajaran. Banyak

guru yang masih menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional yang bersifat satu arah dan kurang memberi ruang dialog. Padahal, penanaman nilai moderasi membutuhkan pendekatan yang interaktif, dialogis, dan kontekstual. Menurut Abuddin Nata (2016), pendidikan Islam harus mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan efektif.

Di samping itu, terdapat pula tantangan dalam menjaga netralitas dan objektivitas. Dalam situasi tertentu, guru mungkin memiliki pandangan pribadi yang kuat terkait isu keagamaan. Hal ini dapat menjadi kendala jika tidak dikelola dengan baik, karena guru dituntut untuk bersikap adil dan tidak memaksakan pandangan tertentu kepada peserta didik. Menjaga keseimbangan antara keyakinan pribadi dan profesionalisme menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi moderasi.

Resistensi dari lingkungan sekolah atau masyarakat juga dapat menjadi hambatan. Tidak semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya moderasi beragama. Dalam beberapa kasus, upaya guru dalam menanamkan nilai toleransi dan inklusivitas dapat disalahartikan sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran agama. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik antara guru, sekolah, dan masyarakat untuk membangun pemahaman yang sama.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan dukungan kebijakan dan fasilitas. Implementasi moderasi beragama membutuhkan dukungan dari pihak sekolah, baik dalam bentuk kebijakan, program, maupun fasilitas pendukung. Tanpa dukungan tersebut, upaya guru akan sulit berjalan secara optimal. Guru membutuhkan ruang dan kesempatan untuk mengembangkan inovasi pembelajaran yang mendukung nilai moderasi.

Selain itu, perbedaan karakter dan kemampuan peserta didik juga menjadi tantangan dalam proses internalisasi

nilai moderasi. Setiap peserta didik memiliki tingkat pemahaman dan kesiapan yang berbeda dalam menerima nilai-nilai tersebut. Guru perlu menggunakan pendekatan yang variatif dan adaptif agar semua peserta didik dapat memahami dan menginternalisasi nilai moderasi dengan baik.

Dengan berbagai tantangan tersebut, guru dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Penguatan kapasitas melalui pelatihan, kolaborasi, serta refleksi diri menjadi langkah penting dalam menghadapi berbagai kendala yang ada. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup kompleks, peran guru tetap sangat vital dalam membangun generasi yang moderat, toleran, dan mampu hidup harmonis dalam keberagaman.

C. Budaya Sekolah yang Moderat dan Inklusif

a. Konsep budaya sekolah inklusif

Budaya sekolah inklusif merupakan fondasi penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang moderat, toleran, dan menghargai keberagaman. Secara konseptual, budaya sekolah dapat dipahami sebagai seperangkat nilai, norma, kebiasaan, dan praktik yang berkembang dan menjadi karakter khas suatu lembaga pendidikan. Ketika nilai-nilai inklusivitas diinternalisasikan dalam budaya sekolah, maka seluruh warga sekolah—baik guru, peserta didik, maupun tenaga kependidikan—akan memiliki kesadaran kolektif untuk menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kesetaraan.

Budaya sekolah inklusif mengacu pada kondisi di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakang agama, suku, budaya, gender, kemampuan, maupun status sosial, mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Dalam konteks ini, inklusivitas tidak hanya berarti menerima keberadaan perbedaan, tetapi juga secara aktif menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi semua pihak

secara adil dan bermartabat. Hal ini sejalan dengan konsep moderasi beragama yang menekankan sikap terbuka, toleran, dan tidak diskriminatif dalam kehidupan sosial.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), moderasi beragama dalam pendidikan harus diwujudkan melalui praktik yang mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman dan komitmen terhadap keadilan sosial. Dalam hal ini, budaya sekolah inklusif menjadi sarana konkret untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Lingkungan sekolah yang inklusif akan mendorong terbentuknya interaksi sosial yang harmonis, serta mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan.

Salah satu karakteristik utama budaya sekolah inklusif adalah pengakuan terhadap keberagaman sebagai kekayaan. Sekolah tidak memandang perbedaan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk memperkaya pengalaman belajar. Peserta didik diajak untuk memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan yang perlu dihargai. Pendekatan ini akan membantu mereka mengembangkan sikap empati dan menghormati orang lain.

Selain itu, budaya sekolah inklusif juga ditandai dengan adanya kebijakan dan praktik yang adil. Sekolah harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan sekolah lainnya. Guru dan tenaga kependidikan harus memperlakukan semua peserta didik secara setara, serta memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang. Menurut Abuddin Nata (2016), keadilan merupakan nilai utama dalam pendidikan Islam yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam lingkungan sekolah.

Lebih lanjut, budaya sekolah inklusif juga mencakup penciptaan iklim psikologis yang aman dan nyaman.

Peserta didik harus merasa diterima, dihargai, dan bebas dari rasa takut akan diskriminasi atau penolakan. Lingkungan yang aman akan mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam belajar dan berinteraksi. Hal ini penting dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional mereka.

Dalam praktiknya, budaya sekolah inklusif dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti pembelajaran kolaboratif, dialog lintas budaya, kegiatan sosial, serta program-program yang menekankan nilai toleransi dan kebersamaan. Guru memiliki peran penting dalam mengarahkan dan membimbing peserta didik agar mampu menghayati nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Di era globalisasi dan digitalisasi, budaya sekolah inklusif juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Interaksi tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media digital. Oleh karena itu, nilai-nilai inklusivitas perlu ditanamkan tidak hanya dalam konteks fisik, tetapi juga dalam ruang digital, sehingga peserta didik mampu berinteraksi secara etis dan menghargai perbedaan di dunia maya.

Konsep budaya sekolah inklusif merupakan upaya sistematis untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang menghargai keberagaman, menjunjung tinggi keadilan, serta mendorong partisipasi semua pihak secara aktif. Budaya ini menjadi landasan penting dalam implementasi moderasi beragama di sekolah, karena melalui budaya yang inklusif, nilai-nilai moderasi dapat terinternalisasi secara alami dan berkelanjutan dalam kehidupan peserta didik.

b. Nilai-nilai moderasi dalam lingkungan sekolah

Nilai-nilai moderasi dalam lingkungan sekolah merupakan fondasi utama dalam membangun budaya pendidikan yang inklusif, harmonis, dan berkeadaban. Sekolah sebagai ruang sosial yang mempertemukan

berbagai latar belakang peserta didik memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai yang mampu menjaga keseimbangan antara keyakinan pribadi dan kehidupan bersama. Moderasi beragama dalam konteks ini tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan praktik keseharian seluruh warga sekolah.

Salah satu nilai utama dalam moderasi adalah toleransi (tasamuh), yaitu sikap menghargai dan menghormati perbedaan. Dalam lingkungan sekolah, toleransi tercermin dalam interaksi antar peserta didik yang saling menghargai, tidak diskriminatif, serta mampu bekerja sama meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Toleransi juga mencakup kemampuan untuk menerima perbedaan pendapat dalam proses pembelajaran tanpa menimbulkan konflik.

Nilai berikutnya adalah keadilan (i'tidal), yang menekankan perlakuan yang adil dan proporsional terhadap semua peserta didik. Keadilan dalam sekolah berarti tidak adanya perlakuan istimewa atau diskriminatif berdasarkan latar belakang tertentu. Guru dan pihak sekolah harus memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan hak yang sama dalam proses belajar, serta kesempatan yang setara untuk berkembang. Menurut Abuddin Nata (2016), keadilan merupakan prinsip utama dalam pendidikan Islam yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan pendidikan.

Nilai keseimbangan (tawazun) juga menjadi bagian penting dalam moderasi. Dalam lingkungan sekolah, keseimbangan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai aspek pendidikan, seperti antara akademik dan karakter, antara aspek spiritual dan sosial, serta antara hak dan kewajiban. Sekolah yang menerapkan nilai keseimbangan akan mampu menciptakan proses pendidikan yang holistik dan tidak berat sebelah.

Selain itu, terdapat nilai sikap tengah (*tawasuth*), yaitu menghindari sikap ekstrem dalam berpikir dan bertindak. Dalam praktiknya, nilai ini mendorong peserta didik untuk bersikap bijak dalam menyikapi perbedaan, tidak mudah terprovokasi, serta mampu melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang. Sikap ini sangat penting dalam mencegah munculnya konflik dan menjaga keharmonisan di lingkungan sekolah.

Nilai lain yang tidak kalah penting adalah anti-kekerasan, yaitu penolakan terhadap segala bentuk tindakan kekerasan, baik fisik maupun verbal. Lingkungan sekolah yang moderat harus menjadi ruang yang aman bagi semua peserta didik. Oleh karena itu, segala bentuk bullying, diskriminasi, atau ujaran kebencian harus dicegah dan ditangani secara serius. Nilai ini sejalan dengan prinsip moderasi yang menekankan penyelesaian masalah melalui cara-cara damai dan dialogis.

Selanjutnya, nilai inklusivitas juga menjadi bagian dari moderasi beragama. Inklusivitas berarti keterbukaan terhadap keberagaman dan kesediaan untuk melibatkan semua pihak dalam kehidupan sekolah. Sekolah yang inklusif akan memberikan ruang bagi setiap peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, tanpa memandang perbedaan latar belakang. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), moderasi beragama menuntut sikap terbuka dan penerimaan terhadap keberagaman sebagai bagian dari kehidupan sosial.

Selain itu, nilai empati dan solidaritas sosial juga menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan sekolah yang moderat. Peserta didik perlu diajarkan untuk memahami perasaan orang lain, membantu sesama, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan

sekitar. Nilai ini akan memperkuat hubungan sosial dan menciptakan suasana kebersamaan yang harmonis.

Dalam implementasinya, nilai-nilai moderasi tersebut harus diintegrasikan ke dalam berbagai aspek kehidupan sekolah, seperti dalam pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, serta interaksi sehari-hari. Guru memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai ini melalui keteladanan, metode pembelajaran, dan pengelolaan kelas yang inklusif.

Nilai-nilai moderasi dalam lingkungan sekolah mencakup toleransi, keadilan, keseimbangan, sikap tengah, anti-kekerasan, inklusivitas, serta empati sosial. Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam membangun budaya sekolah yang harmonis dan berkeadaban. Implementasi yang konsisten akan membantu membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter moderat dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman.

c. Iklim sekolah yang toleran dan harmonis

Iklim sekolah yang toleran dan harmonis merupakan kondisi lingkungan pendidikan yang ditandai oleh hubungan sosial yang positif, rasa saling menghargai, serta terciptanya suasana aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Iklim ini tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan nilai, kebijakan, interaksi, dan praktik keseharian yang konsisten. Dalam konteks moderasi beragama, iklim sekolah yang toleran dan harmonis menjadi prasyarat penting untuk menginternalisasikan nilai-nilai keberagaman yang inklusif dan berkeadaban.

Secara konseptual, iklim sekolah mengacu pada persepsi bersama tentang suasana sosial dan emosional yang dirasakan oleh warga sekolah. Iklim yang toleran berarti adanya penerimaan terhadap perbedaan, baik dalam aspek agama, budaya, maupun pandangan. Sementara itu, iklim yang harmonis menunjukkan adanya

hubungan yang rukun, minim konflik, serta didukung oleh komunikasi yang efektif dan saling menghargai. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), moderasi beragama dalam pendidikan harus tercermin dalam praktik kehidupan sehari-hari yang menjunjung tinggi toleransi, anti-kekerasan, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Salah satu ciri utama iklim sekolah yang toleran dan harmonis adalah adanya rasa aman secara psikologis. Peserta didik merasa diterima tanpa takut didiskriminasi atau dihakimi karena perbedaan yang mereka miliki. Rasa aman ini sangat penting untuk mendukung proses belajar yang optimal, karena peserta didik akan lebih berani berpartisipasi dan mengekspresikan diri. Lingkungan yang bebas dari bullying, stereotip, dan ujaran kebencian menjadi indikator kuat dari iklim sekolah yang sehat.

Selain itu, iklim yang toleran juga ditandai dengan interaksi sosial yang positif dan inklusif. Hubungan antara guru dan peserta didik, maupun antar peserta didik, didasarkan pada prinsip saling menghormati dan menghargai. Guru berperan sebagai fasilitator yang mampu mengelola perbedaan secara bijak, sementara peserta didik belajar untuk bekerja sama dan berkomunikasi secara konstruktif. Menurut Abuddin Nata (2016), pendidikan yang efektif harus mampu membangun hubungan sosial yang harmonis sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik.

Iklim sekolah yang harmonis juga tercermin dalam adanya komunikasi yang terbuka dan dialogis. Sekolah memberikan ruang bagi seluruh warga untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog. Komunikasi yang sehat akan mencegah kesalahpahaman dan mengurangi potensi konflik. Dalam hal ini, guru memiliki peran penting dalam membimbing peserta didik

untuk berkomunikasi secara santun dan menghargai perbedaan pendapat.

Selanjutnya, kebijakan dan aturan sekolah yang adil dan inklusif juga menjadi faktor penentu dalam menciptakan iklim yang toleran. Aturan sekolah harus dirancang untuk melindungi semua pihak tanpa diskriminasi, serta menegakkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Penegakan aturan yang konsisten akan menciptakan rasa kepercayaan dan keadilan di kalangan warga sekolah.

Iklim sekolah yang harmonis juga didukung oleh kegiatan-kegiatan yang memperkuat kebersamaan, seperti kerja kelompok, kegiatan sosial, dan program lintas budaya. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berinteraksi secara langsung dengan teman yang berbeda latar belakang, sehingga mereka dapat belajar memahami dan menghargai perbedaan secara nyata.

Di era digital, iklim sekolah yang toleran tidak hanya terbatas pada interaksi fisik, tetapi juga mencakup interaksi di ruang digital. Guru dan sekolah perlu membimbing peserta didik dalam berkomunikasi secara etis di media sosial, serta mencegah penyebaran konten yang bersifat intoleran atau provokatif. Literasi digital menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan di lingkungan sekolah modern.

Iklim sekolah yang toleran dan harmonis merupakan hasil dari sinergi antara nilai, kebijakan, interaksi, dan praktik pendidikan yang konsisten. Iklim ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya sekolah yang moderat dan inklusif. Melalui lingkungan yang kondusif, peserta didik tidak hanya belajar secara akademik, tetapi juga mengembangkan sikap toleransi, empati, dan kemampuan hidup berdampingan dalam keberagaman.

d. Peran kepala sekolah dalam membangun budaya moderat

Kepala sekolah memiliki posisi strategis sebagai pemimpin pendidikan yang menentukan arah, kebijakan, dan budaya yang berkembang di lingkungan sekolah. Dalam konteks moderasi beragama, kepala sekolah berperan sebagai *key agent of change* yang memastikan nilai-nilai moderasi tidak hanya menjadi wacana, tetapi terimplementasi secara nyata dalam seluruh aspek kehidupan sekolah. Kepemimpinan yang visioner, inklusif, dan berorientasi pada nilai menjadi kunci utama dalam membangun budaya sekolah yang moderat.

Secara konseptual, budaya moderat di sekolah merupakan hasil dari integrasi nilai-nilai seperti toleransi (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*i'tidal*), dan sikap tengah (*tawasuth*) ke dalam kebijakan, praktik, dan interaksi sehari-hari. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan visi dan misi sekolah yang mencerminkan komitmen terhadap moderasi beragama. Visi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam program-program konkret yang melibatkan seluruh warga sekolah.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), moderasi beragama harus diwujudkan dalam sistem pendidikan melalui kebijakan yang mendukung toleransi, anti-kekerasan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Kepala sekolah berperan dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam kehidupan sosial di sekolah.

Salah satu peran utama kepala sekolah adalah sebagai perancang kebijakan yang inklusif. Kepala sekolah harus memastikan bahwa seluruh aturan dan program sekolah tidak bersifat diskriminatif, melainkan memberikan ruang yang adil bagi semua peserta didik. Kebijakan ini mencakup pengelolaan kurikulum,

kegiatan ekstrakurikuler, serta tata tertib sekolah yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan.

Selain itu, kepala sekolah juga berperan sebagai pemimpin yang memberi teladan. Sikap dan perilaku kepala sekolah akan menjadi acuan bagi guru, peserta didik, dan seluruh warga sekolah. Keteladanan dalam menghargai perbedaan, bersikap adil, serta mengedepankan dialog akan memperkuat internalisasi nilai moderasi secara kolektif. Menurut Abuddin Nata (2016), kepemimpinan dalam pendidikan Islam harus mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi dasar dalam membangun karakter.

Peran berikutnya adalah sebagai penggerak budaya sekolah. Kepala sekolah harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya nilai-nilai moderasi. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti kegiatan lintas budaya, dialog antar peserta didik, serta kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok. Program-program ini akan memperkuat interaksi positif dan membangun rasa kebersamaan di antara warga sekolah.

Kepala sekolah juga memiliki peran penting dalam pengembangan kompetensi guru. Guru merupakan aktor utama dalam implementasi moderasi di kelas, sehingga perlu dibekali dengan pemahaman dan keterampilan yang memadai. Kepala sekolah dapat memfasilitasi pelatihan, workshop, atau forum diskusi yang berkaitan dengan moderasi beragama. Dengan demikian, guru dapat menjalankan perannya secara lebih efektif dan profesional.

Selain itu, kepala sekolah berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Dalam lingkungan yang beragam, potensi konflik tidak dapat dihindari. Kepala sekolah harus mampu menangani konflik secara bijak dan adil, serta mendorong penyelesaian melalui dialog dan pendekatan damai. Peran ini sangat penting dalam

menjaga keharmonisan dan stabilitas lingkungan sekolah.

Di era digital, peran kepala sekolah juga mencakup penguatan budaya moderasi di ruang virtual. Kepala sekolah perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi di sekolah mendukung nilai-nilai moderasi, serta mencegah penyebaran konten yang bersifat intoleran atau provokatif. Kebijakan terkait literasi digital dan etika bermedia menjadi bagian penting dalam membangun budaya moderat di sekolah modern.

Lebih jauh, kepala sekolah juga harus menjalin kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Budaya moderat yang dibangun di sekolah perlu diperkuat oleh lingkungan keluarga dan masyarakat agar internalisasi nilai menjadi lebih efektif. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang intensif, kegiatan bersama, serta program kemitraan yang mendukung pendidikan karakter.

Peran kepala sekolah dalam membangun budaya moderat sangatlah kompleks dan multidimensional. Kepala sekolah tidak hanya bertindak sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin nilai yang mampu menggerakkan seluruh komponen sekolah menuju budaya yang inklusif, toleran, dan harmonis. Kepemimpinan yang kuat dan konsisten akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sekolah sebagai ruang pendidikan yang moderat dan berkeadaban.

- e. Pencegahan intoleransi di lingkungan sekolah
Pencegahan intoleransi di lingkungan sekolah merupakan langkah strategis dalam membangun budaya pendidikan yang moderat, inklusif, dan harmonis. Dalam konteks pendidikan modern, intoleransi tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang agama dan budaya, tetapi juga oleh dinamika sosial serta arus informasi digital yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang

sistematis dan berbasis nilai untuk mencegah berkembangnya sikap intoleran di kalangan peserta didik.

Salah satu upaya utama dalam pencegahan intoleransi adalah melalui integrasi nilai moderasi beragama dalam kurikulum dan pembelajaran. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) perlu dirancang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, serta penolakan terhadap kekerasan. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum berbasis moderasi beragama mampu meningkatkan sikap inklusif dan mengurangi kecenderungan intoleransi pada peserta didik (Fatkhur, 2024).

Selain itu, peran guru sebagai agen utama pencegahan intoleransi sangat penting. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu peserta didik memahami perbedaan secara bijak. Guru dapat menerapkan strategi pembelajaran dialogis, kerja kelompok lintas latar belakang, serta pendekatan reflektif untuk menumbuhkan empati dan sikap saling menghargai. Studi terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan aktif guru dalam membimbing peserta didik berkontribusi signifikan terhadap pembentukan sikap toleransi di sekolah (Alfianur et al., 2024).

Upaya pencegahan intoleransi juga perlu didukung melalui penguatan budaya sekolah yang inklusif. Lingkungan sekolah harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik, tanpa adanya diskriminasi atau marginalisasi. Kegiatan akademik maupun non-akademik, seperti kerja kelompok, program lintas budaya, dan kegiatan sosial, dapat menjadi sarana efektif dalam membangun interaksi positif antar peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa budaya sekolah yang inklusif mampu

menciptakan suasana yang lebih harmonis dan mendukung internalisasi nilai moderasi (Hamdani et al., 2024).

Di era digital, literasi digital menjadi faktor penting dalam pencegahan intoleransi. Peserta didik perlu dibekali kemampuan untuk memilah informasi, berpikir kritis, serta memahami etika dalam berkomunikasi di media sosial. Tanpa literasi digital yang memadai, peserta didik rentan terpapar konten yang bersifat provokatif atau mengandung paham radikal. Oleh karena itu, sekolah perlu mengintegrasikan pendidikan literasi digital sebagai bagian dari upaya pencegahan intoleransi (Nursyamsiah et al., 2024).

Selain itu, program penguatan karakter berbasis moderasi beragama juga dapat menjadi strategi efektif. Program ini dapat berupa pelatihan, seminar, maupun kegiatan pengembangan diri yang menekankan nilai toleransi, empati, dan kebersamaan. Penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai moderasi secara sistematis dapat membentuk sikap anti-radikalisme dan memperkuat karakter peserta didik (Kusuma, 2024).

Terakhir, pencegahan intoleransi memerlukan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah perlu diperkuat oleh lingkungan keluarga dan sosial agar internalisasi berjalan secara konsisten. Sinergi antara berbagai pihak akan menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung terbentuknya sikap moderat pada peserta didik.

D. Praktik Baik Moderasi Beragama di Sekolah

a. Pengertian best practice dalam pendidikan

Istilah best practice dalam pendidikan merujuk pada praktik, strategi, atau pendekatan yang telah terbukti efektif dan berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran maupun pengembangan karakter peserta didik. Best practice bukan sekadar kegiatan yang

dianggap baik, tetapi merupakan praktik yang didasarkan pada pengalaman nyata, memiliki dampak positif yang terukur, serta dapat direplikasi atau diadaptasi dalam konteks yang berbeda.

Dalam konteks pendidikan modern, best practice sering dikaitkan dengan inovasi pembelajaran yang mampu menjawab tantangan zaman, termasuk dalam hal penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Praktik ini biasanya lahir dari refleksi guru atau institusi pendidikan terhadap pengalaman pembelajaran yang berhasil, kemudian didokumentasikan dan dijadikan rujukan untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, best practice menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Secara konseptual, best practice memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, berbasis pada pengalaman nyata (evidence-based), yaitu praktik yang telah diterapkan dan menunjukkan hasil yang positif. Kedua, memiliki efektivitas yang terukur, baik dari segi peningkatan hasil belajar maupun perubahan sikap dan perilaku peserta didik. Ketiga, bersifat inovatif dan kontekstual, artinya mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan pendidikan. Keempat, dapat direplikasi atau dikembangkan, sehingga praktik tersebut tidak hanya bermanfaat bagi satu pihak, tetapi juga dapat diterapkan di tempat lain.

Dalam perspektif pendidikan Islam, konsep best practice sejalan dengan prinsip *uswah hasanah* (keteladanan yang baik), di mana praktik yang berhasil menjadi contoh yang dapat diikuti oleh pihak lain. Menurut Abuddin Nata (2016), pendidikan yang efektif tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi juga pada praktik nyata yang mampu membentuk karakter peserta didik secara holistik. Oleh karena itu, best practice dalam pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek

akademik, tetapi juga pembentukan akhlak dan nilai-nilai moral.

Dalam konteks moderasi beragama, best practice dapat berupa berbagai kegiatan atau program yang berhasil menanamkan nilai toleransi, inklusivitas, dan sikap anti-kekerasan di lingkungan sekolah. Misalnya, program dialog lintas budaya, pembelajaran kolaboratif antar peserta didik yang beragam, atau kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok. Praktik-praktik ini menjadi contoh konkret bagaimana nilai moderasi dapat diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan sekolah.

Selain itu, best practice juga memiliki fungsi sebagai sumber inspirasi dan referensi bagi guru dan lembaga pendidikan lainnya. Dengan mendokumentasikan dan menyebarkan praktik-praktik terbaik, sekolah dapat saling belajar dan mengembangkan inovasi yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Di era digital, best practice juga dapat didokumentasikan dan disebarluaskan melalui berbagai platform teknologi, sehingga jangkauannya menjadi lebih luas. Guru dan sekolah dapat berbagi pengalaman, metode, dan hasil pembelajaran yang berhasil kepada komunitas pendidikan yang lebih luas. Dengan demikian, praktik baik tidak hanya berhenti pada satu institusi, tetapi dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi dunia pendidikan secara umum.

- b. Contoh implementasi moderasi di sekolah dasar
Implementasi moderasi beragama di sekolah dasar (SD) perlu dirancang secara kontekstual, sederhana, dan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Pada usia ini, anak-anak berada dalam fase pembentukan karakter dasar, sehingga nilai-nilai moderasi seperti toleransi, empati, keadilan, dan kebersamaan harus ditanamkan melalui pengalaman konkret dan

pembiasaan sehari-hari. Oleh karena itu, praktik moderasi di SD lebih efektif jika diwujudkan dalam kegiatan nyata yang dekat dengan kehidupan peserta didik.

Salah satu contoh implementasi adalah pembiasaan sikap toleransi dalam kegiatan harian. Guru dapat membiasakan peserta didik untuk saling menghormati teman yang berbeda latar belakang, baik agama maupun budaya. Misalnya, memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, serta mengajarkan siswa untuk tidak mengganggu atau mengejek perbedaan tersebut. Pembiasaan ini akan menumbuhkan sikap saling menghargai sejak dini.

Contoh lainnya adalah pembelajaran berbasis cerita dan keteladanan. Guru dapat menggunakan kisah-kisah Islami yang mengandung nilai toleransi, keadilan, dan kasih sayang sebagai media pembelajaran. Melalui cerita, peserta didik lebih mudah memahami nilai-nilai moderasi secara emosional dan imajinatif. Pendekatan ini efektif karena sesuai dengan karakteristik anak usia SD yang menyukai cerita dan contoh konkret.

Selain itu, implementasi moderasi juga dapat dilakukan melalui kegiatan kerja kelompok yang heterogen. Guru dapat mengelompokkan peserta didik dengan latar belakang yang berbeda untuk menyelesaikan tugas bersama. Melalui interaksi ini, peserta didik belajar bekerja sama, saling membantu, serta menghargai perbedaan pendapat. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), interaksi sosial yang positif menjadi sarana penting dalam menumbuhkan sikap toleransi dan moderasi beragama.

Kegiatan perayaan hari besar secara edukatif juga menjadi contoh implementasi moderasi di sekolah dasar. Sekolah dapat memperkenalkan berbagai hari besar keagamaan dengan pendekatan yang menekankan nilai

kebersamaan dan saling menghormati, tanpa mencampuradukkan ajaran agama. Kegiatan ini membantu peserta didik memahami keberagaman secara positif dan mengurangi potensi prasangka sejak dini.

Selanjutnya, program kegiatan sosial dan kepedulian juga dapat menjadi sarana penanaman nilai moderasi. Misalnya, kegiatan berbagi dengan sesama, bakti sosial, atau kerja bakti di lingkungan sekolah. Kegiatan ini menumbuhkan empati, solidaritas, dan rasa kebersamaan di antara peserta didik. Nilai-nilai ini merupakan bagian penting dari moderasi beragama yang menekankan keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.

Guru juga dapat menerapkan pembelajaran berbasis dialog sederhana. Dalam diskusi ringan, guru dapat mengajak peserta didik untuk berbicara tentang perbedaan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, kemudian membimbing mereka untuk memahami bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dan harus dihargai. Pendekatan ini membantu mengembangkan kemampuan berpikir dan sikap terbuka pada peserta didik.

Selain itu, keteladanan guru menjadi faktor yang sangat penting. Guru harus menunjukkan sikap moderat dalam interaksi sehari-hari, seperti bersikap adil, tidak diskriminatif, dan menghargai perbedaan. Peserta didik cenderung meniru perilaku guru, sehingga keteladanan menjadi metode yang paling efektif dalam pendidikan karakter. Menurut Abuddin Nata (2016), keteladanan merupakan inti dari pendidikan karakter dalam Islam.

Dalam era digital, implementasi moderasi juga dapat dilakukan melalui penggunaan media pembelajaran yang positif, seperti video atau animasi yang mengajarkan nilai toleransi dan kebersamaan. Media ini

membantu peserta didik memahami konsep moderasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.

c. Contoh implementasi di sekolah menengah

Implementasi moderasi beragama di sekolah menengah (SMP/SMA) memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan di sekolah dasar, karena peserta didik berada pada fase perkembangan kognitif dan sosial yang lebih matang. Pada tahap ini, siswa mulai mampu berpikir kritis, mempertanyakan nilai, serta membentuk identitas diri, termasuk dalam aspek keagamaan. Oleh karena itu, pendekatan moderasi beragama di sekolah menengah perlu menekankan dialog, refleksi, dan pengalaman sosial yang lebih mendalam.

Salah satu contoh implementasi adalah pembelajaran berbasis diskusi dan dialog kritis. Guru dapat memfasilitasi diskusi tentang isu-isu keberagaman, toleransi, dan kehidupan sosial dalam perspektif keagamaan. Melalui diskusi ini, peserta didik diajak untuk memahami berbagai sudut pandang, menghargai perbedaan, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Pendekatan ini penting untuk mencegah sikap fanatisme sempit dan membangun cara pandang yang lebih terbuka.

Contoh lainnya adalah program dialog lintas agama atau lintas budaya. Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan yang mempertemukan peserta didik dari latar belakang berbeda untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang keberagaman serta mengurangi prasangka. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), dialog merupakan salah satu pendekatan efektif dalam menanamkan nilai moderasi beragama.

Selain itu, implementasi moderasi juga dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler berbasis nilai toleransi dan kebersamaan. Misalnya, organisasi siswa, kegiatan

sosial, atau komunitas lintas minat yang melibatkan peserta didik dari berbagai latar belakang. Dalam kegiatan ini, siswa belajar bekerja sama, menghargai perbedaan, serta membangun solidaritas sosial. Pengalaman langsung seperti ini sangat efektif dalam membentuk karakter moderat.

Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) juga dapat menjadi sarana implementasi moderasi. Guru dapat memberikan proyek yang berkaitan dengan isu sosial, seperti keberagaman budaya, toleransi antarumat beragama, atau kampanye anti-bullying. Melalui proyek ini, peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga terlibat langsung dalam upaya menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis.

Implementasi moderasi di sekolah menengah juga dapat dilakukan melalui literasi digital dan edukasi media. Peserta didik perlu dibekali kemampuan untuk memilah informasi, memahami bias media, serta menghindari konten yang bersifat provokatif atau radikal. Guru dapat mengajak siswa menganalisis konten media sosial dan mendiskusikan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Hal ini penting karena remaja merupakan kelompok yang sangat aktif di dunia digital.

Selain itu, kegiatan refleksi dan penguatan karakter juga menjadi bagian penting dalam implementasi moderasi. Guru dapat mengajak peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka dalam menghadapi perbedaan, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai keagamaan yang moderat. Refleksi ini membantu peserta didik membangun kesadaran internal yang lebih kuat terhadap pentingnya toleransi dan kebersamaan.

Peran guru sebagai teladan dan fasilitator juga sangat menentukan. Guru harus menunjukkan sikap moderat dalam interaksi sehari-hari, seperti menghargai pendapat siswa, bersikap adil, dan tidak diskriminatif.

Keteladanan ini akan memperkuat internalisasi nilai moderasi secara lebih efektif. Menurut Abuddin Nata (2016), pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang mampu mengintegrasikan antara pengetahuan dan keteladanan dalam praktik nyata.

Sekolah juga dapat mengembangkan program kebijakan internal berbasis moderasi, seperti deklarasi sekolah ramah keberagaman, aturan anti-diskriminasi, serta mekanisme penanganan konflik secara damai. Kebijakan ini akan memperkuat budaya sekolah yang moderat dan memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah.

Implementasi moderasi beragama di sekolah menengah dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti dialog kritis, kegiatan lintas budaya, proyek sosial, literasi digital, serta penguatan karakter. Pendekatan yang komprehensif dan kontekstual ini akan membantu peserta didik mengembangkan sikap moderat yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga tercermin dalam perilaku nyata. Hal ini penting untuk mempersiapkan generasi muda yang mampu hidup dalam keberagaman secara harmonis dan bertanggung jawab.

d. Integrasi moderasi dalam pembelajaran

Integrasi moderasi beragama dalam pembelajaran merupakan upaya sistematis untuk memasukkan nilai-nilai moderasi ke dalam seluruh proses pendidikan, baik pada perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembelajaran. Integrasi ini bertujuan agar nilai-nilai seperti toleransi (tasamuh), keseimbangan (tawazun), keadilan (i'tidal), dan sikap tengah (tawasuth) tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diinternalisasi dan dipraktikkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

Pada tahap perencanaan pembelajaran, guru perlu mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam perangkat pembelajaran, seperti Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) atau modul ajar. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan karakter. Materi ajar juga perlu dipilih secara selektif agar mencerminkan nilai-nilai inklusivitas dan tidak mengandung bias atau diskriminasi. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), moderasi beragama harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan yang mendorong sikap toleran dan menghargai keberagaman.

Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, integrasi moderasi dapat dilakukan melalui berbagai strategi dan metode. Salah satunya adalah pembelajaran dialogis, di mana guru memberikan ruang bagi peserta didik untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan memahami perbedaan secara konstruktif. Selain itu, pembelajaran kolaboratif juga dapat diterapkan dengan melibatkan peserta didik dalam kerja kelompok yang heterogen, sehingga mereka belajar bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang.

Metode pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) dan berbasis proyek (*project-based learning*) juga efektif dalam mengintegrasikan nilai moderasi. Guru dapat menghadirkan isu-isu nyata yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, atau konflik sosial, kemudian mengajak peserta didik untuk mencari solusi secara bersama-sama. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga melatih keterampilan berpikir kritis dan empati.

Selain metode, media pembelajaran juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat integrasi moderasi. Guru dapat menggunakan video, cerita, atau studi kasus yang mengangkat tema keberagaman dan toleransi. Media ini membantu peserta didik memahami nilai moderasi secara lebih konkret dan kontekstual. Di era digital, penggunaan platform pembelajaran daring juga

dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan diskusi yang inklusif dan interaktif.

Pada tahap evaluasi pembelajaran, integrasi moderasi perlu diwujudkan melalui penilaian yang tidak hanya mengukur aspek pengetahuan, tetapi juga sikap dan perilaku peserta didik. Guru dapat menggunakan berbagai instrumen, seperti observasi, jurnal refleksi, dan penilaian diri, untuk menilai sejauh mana peserta didik telah menginternalisasi nilai-nilai moderasi. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran benar-benar berdampak pada pembentukan karakter.

Selain itu, integrasi moderasi juga harus didukung oleh keteladanan guru. Guru harus menunjukkan sikap moderat dalam interaksi sehari-hari, seperti menghargai perbedaan pendapat, bersikap adil, dan tidak diskriminatif. Keteladanan ini akan memperkuat pesan yang disampaikan dalam pembelajaran dan membantu peserta didik menginternalisasi nilai tersebut secara lebih efektif. Menurut Abuddin Nata (2016), pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang mampu mengintegrasikan antara teori dan praktik melalui keteladanan.

Lebih lanjut, integrasi moderasi dalam pembelajaran juga memerlukan kolaborasi antar mata pelajaran. Nilai-nilai moderasi tidak hanya menjadi tanggung jawab guru PAI, tetapi juga dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran lain, seperti Bahasa Indonesia, IPS, atau PPKn. Pendekatan lintas disiplin ini akan memperkuat pemahaman peserta didik bahwa moderasi merupakan nilai universal yang relevan dalam berbagai aspek kehidupan.

Integrasi moderasi dalam pembelajaran merupakan proses yang holistik dan berkelanjutan, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Pendekatan yang komprehensif ini akan membantu

peserta didik tidak hanya memahami nilai-nilai moderasi, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Hal ini penting untuk membentuk generasi yang toleran, inklusif, dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang beragama.

E. Program Pendidikan Berbasis Moderasi

Program pendidikan berbasis moderasi merupakan upaya terencana dan sistematis dalam mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam seluruh aktivitas pendidikan, baik di dalam maupun di luar kelas. Program ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan yang baik, tetapi juga mampu bersikap toleran, inklusif, adil, dan menghargai keberagaman dalam kehidupan sosial.

Secara konseptual, program pendidikan berbasis moderasi berangkat dari prinsip bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter (character building). Oleh karena itu, nilai-nilai seperti toleransi (tasamuh), keseimbangan (tawazun), keadilan (i'tidal), dan sikap tengah (tawasuth) harus diintegrasikan dalam berbagai program pendidikan. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), moderasi beragama dalam pendidikan harus diwujudkan melalui kebijakan, kurikulum, serta praktik pembelajaran yang mendukung kehidupan yang damai dan harmonis.

Program pendidikan berbasis moderasi dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Pertama, program kurikuler, yaitu integrasi nilai moderasi dalam mata pelajaran, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI). Guru dapat merancang materi dan kegiatan pembelajaran yang menekankan pentingnya toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap kekerasan. Pendekatan ini memastikan bahwa nilai moderasi menjadi bagian dari proses pembelajaran formal.

Kedua, program kokurikuler, yaitu kegiatan yang mendukung pembelajaran di kelas, seperti diskusi tematik, seminar, atau workshop tentang keberagaman dan toleransi. Kegiatan ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk memperdalam pemahaman mereka melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Program ini juga dapat melibatkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk memperkaya perspektif peserta didik.

Ketiga, program ekstrakurikuler berbasis moderasi, seperti kegiatan organisasi siswa, klub diskusi, atau komunitas sosial yang menekankan nilai kebersamaan dan inklusivitas. Melalui kegiatan ini, peserta didik belajar bekerja sama, menghargai perbedaan, serta mengembangkan sikap empati. Pengalaman langsung dalam kegiatan ekstrakurikuler menjadi sarana efektif dalam internalisasi nilai moderasi.

Keempat, program pembiasaan dan budaya sekolah, seperti salam, senyum, sapa, serta kegiatan rutin yang menumbuhkan sikap saling menghormati. Sekolah juga dapat mengadakan kegiatan lintas budaya atau peringatan hari besar secara edukatif untuk memperkenalkan keberagaman kepada peserta didik. Pembiasaan ini akan membentuk karakter peserta didik secara bertahap dan berkelanjutan.

Kelima, program literasi digital berbasis moderasi. Di era digital, peserta didik perlu dibekali kemampuan untuk memilah informasi dan berinteraksi secara etis di media sosial. Sekolah dapat menyelenggarakan pelatihan literasi digital yang menekankan pentingnya berpikir kritis, menghindari hoaks, serta menolak konten yang bersifat intoleran atau radikal. Program ini sangat relevan dengan perkembangan teknologi yang memengaruhi pola pikir generasi muda.

Selain itu, program pendidikan berbasis moderasi juga perlu didukung oleh keteladanan guru dan tenaga kependidikan. Guru harus menjadi contoh dalam bersikap

moderat, adil, dan menghargai perbedaan. Keteladanan ini akan memperkuat efektivitas program yang dijalankan. Menurut Abuddin Nata (2016), pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang mampu mengintegrasikan antara teori dan praktik melalui keteladanan.

Program ini juga memerlukan evaluasi dan tindak lanjut untuk memastikan efektivitasnya. Sekolah perlu melakukan penilaian terhadap perubahan sikap dan perilaku peserta didik, serta melakukan perbaikan program secara berkelanjutan. Evaluasi dapat dilakukan melalui observasi, angket, maupun refleksi bersama.

Lebih lanjut, keberhasilan program pendidikan berbasis moderasi sangat bergantung pada kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah perlu diperkuat oleh lingkungan keluarga dan sosial agar internalisasi berjalan secara konsisten. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung terbentuknya karakter moderat pada peserta didik.

F. Kegiatan Ekstrakurikuler dan Moderasi Beragama

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu sarana strategis dalam pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik di luar kegiatan akademik formal. Dalam konteks moderasi beragama, kegiatan ekstrakurikuler memiliki peran penting sebagai wahana internalisasi nilai-nilai toleransi, inklusivitas, kebersamaan, dan sikap anti-kekerasan. Melalui kegiatan yang bersifat partisipatif dan kontekstual, peserta didik dapat mengalami secara langsung praktik hidup dalam keberagaman.

Ekstrakurikuler memungkinkan peserta didik untuk belajar melalui pengalaman (*learning by doing*), sehingga nilai-nilai moderasi tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dihayati dalam praktik nyata. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), moderasi beragama perlu diwujudkan dalam aktivitas sosial yang

mendorong interaksi positif dan saling menghargai antarindividu.

Salah satu bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung moderasi adalah organisasi siswa, seperti OSIS atau organisasi keagamaan sekolah. Dalam organisasi ini, peserta didik belajar bekerja sama dengan teman yang memiliki latar belakang berbeda, mengambil keputusan secara musyawarah, serta menghargai pendapat orang lain. Proses ini melatih sikap demokratis dan toleran yang merupakan bagian dari nilai moderasi.

Selain itu, kegiatan sosial dan kemanusiaan juga menjadi sarana efektif dalam menanamkan nilai moderasi. Misalnya, kegiatan bakti sosial, penggalangan dana, atau program peduli lingkungan. Kegiatan ini mengajarkan peserta didik untuk memiliki empati, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang perbedaan. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip moderasi yang menekankan keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.

Kegiatan seni dan budaya juga memiliki peran penting dalam memperkuat moderasi beragama. Melalui kegiatan seperti pentas seni, festival budaya, atau lomba kreativitas, peserta didik dapat mengenal dan menghargai keberagaman budaya yang ada di masyarakat. Kegiatan ini membantu mengurangi prasangka dan membangun rasa saling menghormati antarindividu.

Selanjutnya, kegiatan diskusi dan kajian keagamaan dapat diarahkan untuk memperkuat pemahaman moderasi beragama. Dalam kegiatan ini, peserta didik diajak untuk memahami ajaran agama secara kontekstual dan tidak ekstrem. Guru atau pembina ekstrakurikuler perlu memastikan bahwa materi yang disampaikan mencerminkan nilai-nilai toleransi dan inklusivitas. Menurut Abuddin Nata (2016), pendidikan Islam harus

mampu membentuk pemahaman keagamaan yang seimbang dan tidak radikal.

Di era digital, kegiatan ekstrakurikuler juga dapat dikembangkan dalam bentuk komunitas literasi digital atau media kreatif. Peserta didik dapat diajak untuk membuat konten positif yang mempromosikan nilai toleransi dan keberagaman, seperti video, podcast, atau kampanye media sosial. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan digital, tetapi juga menjadi sarana dakwah edukatif yang moderat.

Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka atau kegiatan kepemimpinan juga dapat menjadi media penanaman nilai moderasi. Dalam kegiatan ini, peserta didik dilatih untuk bekerja sama, menghargai perbedaan, serta mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini mendukung terbentuknya karakter moderat yang kuat.

Agar kegiatan ekstrakurikuler benar-benar efektif dalam menanamkan moderasi beragama, diperlukan peran aktif guru dan pembina. Mereka harus mampu merancang kegiatan yang inklusif, mengelola dinamika kelompok, serta memberikan keteladanan dalam bersikap moderat. Selain itu, evaluasi terhadap kegiatan juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pembentukan karakter tercapai.

Dengan demikian, kegiatan ekstrakurikuler merupakan sarana yang sangat efektif dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama. Melalui pengalaman langsung, interaksi sosial, dan pembiasaan, peserta didik dapat mengembangkan sikap toleran, inklusif, dan harmonis. Integrasi nilai moderasi dalam kegiatan ekstrakurikuler akan memperkuat pendidikan karakter secara menyeluruh dan berkelanjutan.

BAB 8

Tantangan dan Isu Kontemporer Moderasi Beragama

A. Radikalisme dan Ekstremisme dalam Perspektif Pendidikan

a. Pengertian radikalisme dan ekstremisme

Radikalisme dan ekstremisme merupakan dua konsep penting yang sering digunakan dalam kajian pendidikan, khususnya dalam konteks pembentukan karakter dan pencegahan penyimpangan sikap keagamaan. Dalam perkembangan kajian mutakhir, kedua istilah ini tidak hanya dipahami sebagai fenomena ideologis, tetapi juga sebagai proses sosial dan psikologis yang dapat memengaruhi pola pikir serta perilaku individu, terutama generasi muda di lingkungan pendidikan.

Secara terminologis, radikalisme merujuk pada suatu paham atau ideologi yang menghendaki perubahan secara mendasar dan cepat terhadap sistem sosial, politik, atau keagamaan yang ada, sering kali dengan cara yang tidak moderat. Dalam kajian terbaru, radikalisme juga dipahami sebagai proses berkembangnya keyakinan yang cenderung eksklusif, absolut, dan menolak perbedaan, yang dalam kondisi tertentu dapat mengarah pada tindakan intoleran atau bahkan kekerasan (Widiarni et al., 2024). Dalam konteks pendidikan, radikalisme tidak hanya dilihat sebagai hasil akhir berupa sikap ekstrem, tetapi juga sebagai proses radikalisasi, yaitu tahapan di mana individu mulai mengadopsi pandangan yang sempit, kaku, dan tidak terbuka terhadap dialog.

Radikalisme dalam lingkungan pendidikan sering kali muncul akibat berbagai faktor, seperti pemahaman keagamaan yang parsial, kurangnya literasi kritis, serta pengaruh lingkungan sosial dan media digital. Peserta didik yang tidak memiliki kemampuan berpikir kritis dan pemahaman agama yang komprehensif cenderung lebih rentan terhadap pengaruh paham radikal. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran dan daya tangkal terhadap ideologi yang menyimpang.

Sementara itu, ekstremisme merujuk pada sikap, keyakinan, atau tindakan yang melampaui batas kewajaran dalam mempertahankan suatu pandangan atau ideologi. Ekstremisme sering kali ditandai dengan fanatisme berlebihan, sikap intoleran, serta kecenderungan untuk membenarkan penggunaan kekerasan demi mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kebijakan nasional, ekstremisme bahkan dikaitkan dengan tindakan yang mengarah pada terorisme, terutama ketika melibatkan penggunaan kekerasan berbasis ideologi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021).

Lebih lanjut, penelitian terbaru menunjukkan bahwa ekstremisme sering berkembang dari pemahaman yang kaku dan literal terhadap ajaran agama, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan historis yang melingkupinya (Rochim et al., 2024). Sikap ini biasanya disertai dengan penolakan terhadap keberagaman, stereotip negatif terhadap kelompok lain, serta kecenderungan untuk mengklaim kebenaran secara sepihak. Dalam lingkungan pendidikan, kondisi ini dapat menghambat terciptanya suasana belajar yang inklusif dan harmonis.

Meskipun sering digunakan secara bersamaan, radikalisme dan ekstremisme memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Radikalisme lebih menekankan pada proses atau ideologi yang mengarah pada perubahan drastis, sedangkan ekstremisme lebih mengarah pada manifestasi sikap atau tindakan yang telah melampaui batas, termasuk

penggunaan kekerasan. Namun demikian, keduanya memiliki keterkaitan erat, di mana radikalisme dapat menjadi pintu masuk menuju ekstremisme apabila tidak diimbangi dengan pemahaman yang moderat dan inklusif.

Dalam perspektif pendidikan, pemahaman terhadap konsep radikalisme dan ekstremisme menjadi sangat penting sebagai dasar dalam merancang strategi pencegahan yang efektif. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter yang mampu menanamkan nilai-nilai toleransi, keseimbangan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki ketahanan ideologis yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang menyimpang.

Melalui pendekatan pendidikan yang komprehensif dan berbasis nilai moderasi, radikalisme dan ekstremisme dapat dicegah sejak dini. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran sentral dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak dalam bersikap dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang plural.

b. Ciri-ciri sikap radikal dalam lingkungan pendidikan

Sikap radikal dalam lingkungan pendidikan merupakan salah satu fenomena yang perlu diwaspadai karena dapat mengganggu proses pembelajaran, merusak iklim sekolah yang harmonis, serta menghambat pembentukan karakter peserta didik yang moderat dan inklusif. Dalam konteks pendidikan, radikalisme tidak selalu muncul dalam bentuk tindakan kekerasan, tetapi sering kali diawali dari pola pikir, sikap, dan perilaku yang menunjukkan kecenderungan eksklusif, intoleran, dan menolak perbedaan.

Salah satu ciri utama sikap radikal adalah pemahaman keagamaan yang sempit dan literal. Peserta didik yang memiliki kecenderungan radikal biasanya memahami ajaran agama secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial, historis, dan budaya. Pemahaman ini sering kali

menghasilkan sikap yang kaku dan sulit menerima interpretasi lain. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan yang tidak komprehensif menjadi salah satu faktor utama munculnya sikap radikal di kalangan pelajar (Widiarni et al., 2024).

Ciri berikutnya adalah sikap intoleran terhadap perbedaan. Individu yang memiliki kecenderungan radikal cenderung menolak keberagaman, baik dalam hal agama, budaya, maupun pandangan. Mereka sering kali tidak menghargai pendapat orang lain dan menganggap bahwa hanya pandangannya yang benar. Sikap ini dapat terlihat dalam interaksi sehari-hari di sekolah, seperti enggan bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang atau menunjukkan sikap diskriminatif.

Selain itu, terdapat kecenderungan eksklusivisme sosial, yaitu sikap menutup diri dari kelompok lain dan hanya berinteraksi dengan kelompok yang memiliki pandangan yang sama. Dalam lingkungan pendidikan, hal ini dapat terlihat dari terbentuknya kelompok-kelompok kecil yang bersifat tertutup dan tidak mau berbaur dengan peserta didik lain. Kondisi ini berpotensi menciptakan segregasi sosial dan menghambat terciptanya lingkungan belajar yang inklusif.

Ciri lain yang menonjol adalah fanatisme berlebihan terhadap suatu pandangan atau kelompok. Individu yang memiliki sikap radikal biasanya menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap kelompoknya, bahkan cenderung menolak kritik atau pandangan yang berbeda. Fanatisme ini sering kali disertai dengan sikap defensif dan kecenderungan untuk membenarkan pandangannya secara mutlak. Menurut Rochim et al. (2024), fanatisme yang tidak disertai dengan sikap terbuka terhadap dialog dapat menjadi pintu masuk menuju ekstremisme.

Selanjutnya, penolakan terhadap dialog dan sikap anti-kritis juga menjadi ciri penting dari radikalisme. Peserta didik yang memiliki kecenderungan radikal biasanya tidak terbuka terhadap diskusi atau perdebatan yang sehat. Mereka

cenderung menolak informasi yang bertentangan dengan keyakinannya dan lebih memilih sumber informasi yang memperkuat pandangannya saja. Hal ini menunjukkan rendahnya kemampuan berpikir kritis dan reflektif.

Ciri lainnya adalah kecenderungan membenarkan kekerasan sebagai alat perjuangan. Meskipun tidak selalu diwujudkan dalam tindakan nyata, sikap ini dapat muncul dalam bentuk pembenaran terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama agama atau ideologi tertentu. Dalam konteks pendidikan, hal ini sangat berbahaya karena dapat memengaruhi cara pandang peserta didik terhadap penyelesaian konflik.

Di era digital, ciri sikap radikal juga dapat dilihat dari pola konsumsi informasi yang tidak selektif. Peserta didik yang terpapar konten radikal di media sosial cenderung menerima informasi tanpa melakukan verifikasi, serta mudah terpengaruh oleh narasi yang bersifat provokatif. Hal ini menunjukkan pentingnya literasi digital dalam mencegah penyebaran paham radikal di kalangan pelajar.

Lebih lanjut, sikap superioritas dan klaim kebenaran tunggal juga menjadi indikator radikalisme. Individu yang memiliki sikap ini menganggap bahwa kelompoknya paling benar dan merendahkan kelompok lain. Sikap ini tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moderasi beragama yang menekankan keseimbangan dan penghargaan terhadap keberagaman.

Dalam perspektif pendidikan, mengenali ciri-ciri sikap radikal menjadi langkah awal yang penting dalam upaya pencegahan. Guru dan pihak sekolah perlu memiliki kepekaan terhadap perubahan sikap dan perilaku peserta didik, sehingga dapat melakukan intervensi secara dini. Pendidikan yang menekankan pada penguatan nilai toleransi, dialog, dan berpikir kritis menjadi kunci dalam mengatasi potensi radikalisme di lingkungan sekolah.

c. Faktor penyebab munculnya radikalisme di kalangan peserta didik

Radikalisme di kalangan peserta didik merupakan fenomena kompleks yang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek individu, lingkungan sosial, pendidikan, maupun perkembangan teknologi. Memahami faktor-faktor penyebab ini menjadi langkah penting dalam merancang strategi pencegahan yang efektif di lingkungan pendidikan.

Salah satu faktor utama adalah pemahaman keagamaan yang sempit dan parsial. Peserta didik yang memperoleh pemahaman agama secara tekstual tanpa pendalaman konteks sosial dan historis cenderung memiliki cara pandang yang kaku dan eksklusif. Kondisi ini dapat mendorong munculnya sikap intoleran serta kecenderungan mengklaim kebenaran secara sepihak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman agama yang komprehensif menjadi salah satu pemicu utama berkembangnya radikalisme di kalangan pelajar (Widiarni et al., 2024).

Faktor berikutnya adalah minimnya kemampuan berpikir kritis. Peserta didik yang tidak dibekali keterampilan literasi kritis cenderung mudah menerima informasi tanpa proses verifikasi. Hal ini membuat mereka rentan terhadap narasi radikal, terutama yang disebarkan melalui media digital. Dalam konteks ini, pendidikan yang kurang menekankan pada dialog, analisis, dan refleksi dapat memperkuat kecenderungan tersebut.

Selain itu, pengaruh lingkungan sosial juga memiliki peran signifikan. Lingkungan keluarga, teman sebaya, maupun komunitas tertentu dapat menjadi ruang awal berkembangnya paham radikal. Jika peserta didik berada dalam lingkungan yang eksklusif dan intoleran, maka nilai-nilai tersebut berpotensi terinternalisasi dalam diri mereka. Sebaliknya, lingkungan yang terbuka dan inklusif dapat menjadi faktor protektif terhadap radikalisme.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah paparan media sosial dan konten digital. Di era digital, peserta didik memiliki akses luas terhadap berbagai informasi, termasuk konten yang mengandung paham radikal. Tanpa literasi digital yang memadai, mereka dapat dengan mudah terpengaruh oleh narasi yang bersifat provokatif, manipulatif, dan ideologis. Penelitian menunjukkan bahwa media digital menjadi salah satu jalur utama penyebaran radikalisme di kalangan generasi muda (Rochim et al., 2024).

Selanjutnya, krisis identitas pada remaja juga menjadi faktor yang mendorong munculnya radikalisme. Pada masa perkembangan ini, peserta didik sedang mencari jati diri dan makna hidup. Dalam kondisi tertentu, mereka dapat tertarik pada ideologi radikal yang menawarkan kepastian, identitas yang kuat, serta rasa memiliki terhadap suatu kelompok. Ideologi tersebut sering kali dikemas secara menarik dan emosional, sehingga mudah diterima oleh remaja.

Faktor ketidakadilan sosial dan pengalaman diskriminasi juga dapat memicu radikalisme. Peserta didik yang merasa diperlakukan tidak adil atau mengalami marginalisasi cenderung memiliki rasa frustrasi dan ketidakpuasan. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menarik simpati dan merekrut anggota baru dengan menawarkan solusi yang bersifat ekstrem.

Selain itu, kurangnya peran pendidikan dalam menanamkan nilai moderasi juga menjadi penyebab penting. Sistem pendidikan yang terlalu fokus pada aspek kognitif tanpa diimbangi dengan pembentukan karakter dapat menghasilkan peserta didik yang cerdas secara intelektual, tetapi lemah dalam aspek moral dan sosial. Padahal, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk sikap toleran, inklusif, dan menghargai keberagaman.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kurangnya keteladanan dari figur otoritas, seperti guru atau tokoh masyarakat. Peserta didik cenderung meniru perilaku orang yang mereka anggap sebagai panutan. Jika figur tersebut

menunjukkan sikap intoleran atau eksklusif, maka nilai tersebut dapat dengan mudah diinternalisasi oleh peserta didik.

Terakhir, lemahnya pengawasan dan pembinaan di lingkungan pendidikan juga dapat membuka ruang bagi berkembangnya radikalisme. Sekolah yang tidak memiliki sistem deteksi dini atau program pencegahan yang efektif akan kesulitan mengidentifikasi dan menangani gejala radikalisme sejak awal.

Dengan demikian, faktor penyebab munculnya radikalisme di kalangan peserta didik meliputi pemahaman keagamaan yang sempit, rendahnya literasi kritis, pengaruh lingkungan sosial, paparan media digital, krisis identitas, ketidakadilan sosial, lemahnya pendidikan karakter, kurangnya keteladanan, serta minimnya pengawasan. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk merancang pendekatan pendidikan yang mampu mencegah radikalisme secara komprehensif dan berkelanjutan.

d. Dampak radikalisme terhadap lingkungan sekolah

Radikalisme di lingkungan sekolah merupakan fenomena yang memiliki dampak serius terhadap keberlangsungan proses pendidikan, baik dari aspek akademik maupun sosial. Kehadiran paham radikal tidak hanya memengaruhi individu peserta didik, tetapi juga dapat merusak tatanan budaya sekolah yang seharusnya inklusif, aman, dan harmonis. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai dampak yang ditimbulkan agar upaya pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara tepat.

Salah satu dampak utama adalah terganggunya iklim sekolah yang kondusif. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik untuk belajar dan berkembang dapat berubah menjadi lingkungan yang penuh ketegangan dan kecurigaan. Sikap intoleran dan eksklusif yang muncul akibat radikalisme dapat memicu konflik antar peserta didik, sehingga menghambat terciptanya suasana belajar yang nyaman. Penelitian menunjukkan bahwa

radikalisme berpotensi merusak harmoni sosial di lingkungan pendidikan dan menurunkan kualitas interaksi antar warga sekolah (Rochim et al., 2024).

Dampak berikutnya adalah menurunnya sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Peserta didik yang terpapar paham radikal cenderung memiliki pandangan sempit dan menolak perbedaan. Hal ini dapat terlihat dalam perilaku diskriminatif, seperti enggan berinteraksi dengan teman yang berbeda latar belakang atau bahkan melakukan perundungan (bullying). Kondisi ini bertentangan dengan tujuan pendidikan yang menekankan nilai inklusivitas dan kebersamaan.

Selain itu, radikalisme juga dapat menyebabkan terbentuknya kelompok eksklusif di dalam sekolah. Peserta didik yang memiliki pandangan serupa cenderung membentuk kelompok tertutup yang sulit berinteraksi dengan kelompok lain. Fenomena ini dapat menciptakan segregasi sosial yang menghambat integrasi dan kerja sama antar peserta didik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperkuat polarisasi dan memperlemah kohesi sosial di lingkungan sekolah.

Dampak lain yang cukup serius adalah menurunnya kualitas proses pembelajaran. Radikalisme dapat mengganggu fokus peserta didik dalam belajar, terutama jika mereka lebih tertarik pada ideologi tertentu dibandingkan dengan kegiatan akademik. Selain itu, konflik yang muncul akibat perbedaan pandangan juga dapat mengganggu jalannya pembelajaran di kelas. Menurut Widiarni et al. (2024), radikalisme di kalangan pelajar dapat mengalihkan perhatian dari tujuan utama pendidikan dan menghambat perkembangan intelektual.

Lebih jauh, radikalisme juga dapat memicu perilaku agresif dan kekerasan. Dalam beberapa kasus, sikap radikal dapat berkembang menjadi tindakan nyata yang merugikan orang lain, baik secara verbal maupun fisik. Pembentukan terhadap kekerasan sebagai alat perjuangan merupakan salah satu

ciri ekstremisme yang dapat muncul dari radikalisme yang tidak terkendali. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi keamanan dan keselamatan warga sekolah.

Selain dampak terhadap peserta didik, radikalisme juga berpengaruh pada peran dan otoritas guru. Guru dapat menghadapi kesulitan dalam mengelola kelas jika terdapat peserta didik yang memiliki pandangan radikal dan tidak terbuka terhadap dialog. Kondisi ini dapat menurunkan efektivitas pembelajaran serta menantang profesionalitas guru dalam menjaga netralitas dan inklusivitas di kelas.

Dampak lainnya adalah terhambatnya pembentukan karakter moderat. Pendidikan seharusnya menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan keadilan. Namun, kehadiran radikalisme dapat menghambat proses ini dan bahkan membentuk karakter yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Peserta didik yang terpapar radikalisme berisiko tumbuh menjadi individu yang tidak mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam.

Di era digital, dampak radikalisme juga dapat meluas melalui penyebaran ideologi di media sosial. Peserta didik yang terpapar paham radikal dapat menjadi agen penyebar informasi yang tidak tepat, sehingga memperluas pengaruh radikalisme di kalangan teman sebaya. Hal ini menunjukkan bahwa dampak radikalisme tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah, tetapi juga dapat menjangkau ruang sosial yang lebih luas.

Radikalisme memiliki dampak yang multidimensional terhadap lingkungan sekolah, mulai dari terganggunya iklim belajar, menurunnya toleransi, munculnya konflik sosial, hingga potensi kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif melalui penguatan pendidikan karakter, literasi kritis, serta penanaman nilai moderasi beragama agar lingkungan sekolah tetap menjadi ruang yang aman, inklusif, dan kondusif bagi perkembangan peserta didik.

e. Peran pendidikan dalam mencegah ekstremisme

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam mencegah berkembangnya ekstremisme, khususnya di kalangan peserta didik. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter, penguatan nilai, serta pengembangan pola pikir kritis dan moderat. Melalui pendekatan yang komprehensif, pendidikan dapat menjadi benteng utama dalam menangkal ideologi ekstrem yang berpotensi merusak tatanan sosial dan kehidupan berbangsa.

Salah satu peran utama pendidikan adalah menanamkan nilai-nilai moderasi dan toleransi sejak dini. Peserta didik perlu dibekali dengan pemahaman bahwa perbedaan merupakan bagian dari realitas sosial yang harus dihargai. Nilai-nilai seperti *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *i'tidal* (keadilan) dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendidikan berbasis moderasi beragama mampu membentuk sikap inklusif dan mengurangi kecenderungan ekstremisme pada peserta didik (Widiarni et al., 2024).

Selain itu, pendidikan berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Peserta didik yang memiliki literasi kritis yang baik tidak akan mudah terpengaruh oleh informasi yang bersifat provokatif atau ideologis. Mereka mampu menganalisis, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi sebelum menerimanya sebagai kebenaran. Dalam era digital, kemampuan ini menjadi sangat penting mengingat maraknya penyebaran konten ekstrem melalui media sosial. Menurut Rochim et al. (2024), rendahnya kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu faktor yang mempermudah masuknya paham ekstrem di kalangan pelajar.

Peran pendidikan juga terlihat dalam penciptaan lingkungan sekolah yang inklusif dan aman. Sekolah harus menjadi ruang yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan ujaran

kebencian. Lingkungan yang positif akan mendorong interaksi sosial yang sehat serta memperkuat nilai kebersamaan. Dalam suasana yang kondusif, peserta didik dapat belajar menghargai perbedaan dan mengembangkan empati terhadap sesama.

Selanjutnya, pendidikan memiliki peran dalam mengintegrasikan nilai-nilai moderasi ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Guru dapat merancang materi pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan karakter. Metode pembelajaran seperti diskusi, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek dapat digunakan untuk mengajak peserta didik memahami isu-isu sosial secara lebih mendalam dan kontekstual.

Pendidikan juga berperan dalam penguatan literasi digital. Di era modern, peserta didik sangat rentan terhadap paparan informasi yang tidak terverifikasi. Oleh karena itu, sekolah perlu membekali mereka dengan kemampuan untuk memilah informasi, memahami etika bermedia, serta menghindari konten yang mengandung unsur ekstremisme. Literasi digital menjadi salah satu kunci dalam mencegah penyebaran ideologi ekstrem di kalangan generasi muda (Nursyamsiah et al., 2024).

Selain itu, peran guru sebagai teladan (role model) sangat menentukan dalam pencegahan ekstremisme. Guru tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga menunjukkan sikap moderat dalam interaksi sehari-hari. Keteladanan dalam bersikap adil, terbuka, dan menghargai perbedaan akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap peserta didik. Pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang mampu mengintegrasikan antara pengetahuan dan keteladanan dalam praktik nyata.

Pendidikan juga dapat berfungsi sebagai media deteksi dini terhadap potensi ekstremisme. Guru dan pihak sekolah perlu memiliki kepekaan terhadap perubahan sikap dan perilaku peserta didik yang mengarah pada radikalisme. Dengan

deteksi dini, intervensi dapat dilakukan secara cepat dan tepat sebelum sikap tersebut berkembang lebih jauh.

Terakhir, pendidikan berperan dalam membangun kolaborasi dengan keluarga dan masyarakat. Pencegahan ekstremisme tidak dapat dilakukan oleh sekolah saja, tetapi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat akan menciptakan lingkungan yang konsisten dalam menanamkan nilai-nilai moderasi.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah ekstremisme melalui penanaman nilai toleransi, penguatan berpikir kritis, penciptaan lingkungan inklusif, integrasi kurikulum, literasi digital, keteladanan guru, deteksi dini, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Pendekatan yang holistik ini diharapkan mampu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki sikap moderat dan mampu hidup harmonis dalam keberagaman.

f. Pendekatan deradikalisasi dalam pendidikan

Pendekatan deradikalisasi dalam pendidikan merupakan upaya sistematis untuk mengurangi, menetralkan, dan mencegah berkembangnya paham radikal di kalangan peserta didik melalui proses pendidikan yang komprehensif. Deradikalisasi tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku, tetapi juga menyentuh aspek kognitif (cara berpikir), afektif (sikap), dan sosial (interaksi), sehingga peserta didik mampu mengembangkan pemahaman yang moderat, inklusif, dan berimbang dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Secara konseptual, deradikalisasi dalam pendidikan dipahami sebagai proses transformasi dari pola pikir eksklusif menuju pola pikir terbuka dan toleran. Pendekatan ini tidak bersifat represif, melainkan edukatif dan persuasif, dengan menekankan dialog, refleksi, serta pembentukan kesadaran kritis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan yang berbasis nilai moderasi dan

dialog efektif dalam menekan kecenderungan radikalisme di kalangan pelajar (Widiarni et al., 2024).

Salah satu pendekatan utama dalam deradikalisasi adalah pendekatan edukatif melalui integrasi kurikulum. Nilai-nilai moderasi beragama, seperti toleransi, keadilan, dan keseimbangan, perlu diintegrasikan dalam materi pembelajaran. Guru tidak hanya menyampaikan konsep, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial yang dihadapi peserta didik. Pendekatan ini membantu peserta didik memahami agama secara komprehensif dan kontekstual, sehingga tidak mudah terjebak pada pemahaman yang sempit.

Pendekatan berikutnya adalah penguatan berpikir kritis dan literasi. Peserta didik perlu dibekali kemampuan untuk menganalisis informasi, mengidentifikasi bias, serta mengevaluasi kebenaran suatu informasi. Dalam era digital, kemampuan ini sangat penting untuk mencegah penyebaran paham radikal melalui media sosial. Menurut Rochim et al. (2024), rendahnya literasi kritis menjadi salah satu faktor yang mempermudah masuknya ideologi ekstrem di lingkungan pendidikan.

Selain itu, pendekatan dialogis dan partisipatif juga menjadi bagian penting dalam deradikalisasi. Guru dapat menciptakan ruang diskusi yang terbuka dan aman, di mana peserta didik dapat menyampaikan pendapat dan berdialog secara konstruktif. Melalui dialog, peserta didik belajar memahami perbedaan, mengembangkan empati, serta menghindari sikap klaim kebenaran tunggal. Pendekatan ini juga membantu mengurangi sikap eksklusif dan fanatisme berlebihan.

Pendekatan lain yang efektif adalah keteladanan (*role modeling*). Guru dan tenaga pendidik harus menunjukkan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap adil, menghargai perbedaan, dan mengedepankan dialog. Keteladanan ini menjadi metode yang sangat efektif karena

peserta didik cenderung meniru perilaku yang mereka lihat secara langsung.

Selanjutnya, pendekatan psikologis dan konseling juga diperlukan, terutama bagi peserta didik yang menunjukkan gejala kecenderungan radikal. Melalui bimbingan konseling, peserta didik dapat dibantu untuk memahami diri mereka, mengelola emosi, serta mengembangkan cara berpikir yang lebih sehat dan konstruktif. Pendekatan ini penting karena radikalisme sering kali berkaitan dengan krisis identitas dan kebutuhan akan pengakuan.

Pendekatan deradikalisasi juga dapat dilakukan melalui kegiatan sosial dan kolaboratif. Peserta didik dilibatkan dalam kegiatan yang mendorong interaksi dengan berbagai kelompok, seperti kerja bakti, kegiatan sosial, atau proyek lintas budaya. Pengalaman langsung ini membantu mereka memahami keberagaman secara nyata dan mengurangi prasangka terhadap kelompok lain.

Di era digital, pendekatan deradikalisasi perlu diperkuat dengan literasi digital dan kontra-narasi. Sekolah dapat mengajarkan peserta didik untuk mengenali dan melawan narasi radikal dengan menyebarkan konten positif yang mengedepankan nilai toleransi dan perdamaian. Pendekatan ini penting untuk mengimbangi arus informasi yang sangat cepat di dunia digital.

Selain itu, deradikalisasi dalam pendidikan juga memerlukan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Lingkungan yang konsisten dalam menanamkan nilai moderasi akan memperkuat efektivitas proses deradikalisasi. Tanpa dukungan dari luar sekolah, upaya yang dilakukan di lingkungan pendidikan akan sulit mencapai hasil yang optimal.

B. Tantangan Globalisasi terhadap Moderasi Beragama

Globalisasi merupakan proses integrasi dunia yang ditandai dengan semakin terbukanya arus informasi, budaya, ekonomi, dan teknologi tanpa batas geografis. Dalam konteks pendidikan

dan kehidupan beragama, globalisasi membawa dampak yang sangat signifikan, baik dalam bentuk peluang maupun tantangan. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah bagaimana mempertahankan dan menguatkan nilai-nilai moderasi beragama di tengah derasny arus perubahan global.

Salah satu tantangan utama globalisasi adalah masuknya berbagai ideologi dan paham keagamaan secara bebas. Melalui perkembangan teknologi informasi, peserta didik dapat dengan mudah mengakses berbagai pemikiran keagamaan dari seluruh dunia, termasuk yang bersifat ekstrem atau tidak sesuai dengan konteks lokal. Tanpa kemampuan literasi yang memadai, kondisi ini dapat memicu kebingungan, bahkan mendorong munculnya sikap intoleran dan eksklusif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa globalisasi digital menjadi salah satu faktor yang mempercepat penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda (Widiarni et al., 2024).

Tantangan berikutnya adalah terjadinya pergeseran nilai dan identitas keagamaan. Globalisasi sering kali membawa nilai-nilai baru yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai lokal dan keagamaan. Peserta didik dapat mengalami krisis identitas ketika dihadapkan pada berbagai pilihan nilai yang saling bertentangan. Dalam kondisi ini, sebagian individu dapat memilih jalan ekstrem sebagai bentuk pencarian jati diri yang dianggap lebih “pasti” dan “tegas”.

Selain itu, globalisasi juga memunculkan konflik antara nilai lokal dan nilai global. Nilai-nilai lokal yang menekankan kebersamaan, gotong royong, dan toleransi sering kali berhadapan dengan nilai global yang lebih individualistik dan kompetitif. Ketegangan ini dapat memengaruhi cara pandang peserta didik terhadap keberagaman dan kehidupan sosial. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat melemahkan semangat moderasi beragama.

Tantangan lain yang cukup signifikan adalah maraknya informasi yang tidak terverifikasi (hoaks). Di era globalisasi digital, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat tanpa melalui proses validasi yang memadai. Konten yang

mengandung ujaran kebencian, provokasi, atau narasi radikal dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik. Menurut Rochim et al. (2024), rendahnya kemampuan literasi digital membuat pelajar rentan terhadap pengaruh negatif dari media global.

Globalisasi juga mendorong munculnya polarisasi dan fragmentasi sosial. Akses terhadap berbagai sumber informasi yang beragam dapat menyebabkan terbentuknya kelompok-kelompok dengan pandangan yang berbeda secara tajam. Dalam konteks keagamaan, hal ini dapat memicu perpecahan dan memperkuat sikap eksklusif. Polarisasi ini menjadi tantangan serius dalam upaya membangun moderasi beragama yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan.

Namun demikian, globalisasi tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga peluang untuk memperkuat moderasi beragama. Akses terhadap informasi global memungkinkan peserta didik untuk mempelajari berbagai perspektif keagamaan yang moderat dan inklusif. Teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian secara lebih luas. Oleh karena itu, pendekatan yang tepat diperlukan agar globalisasi dapat dimanfaatkan secara positif.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam membangun literasi global dan keagamaan yang seimbang. Peserta didik perlu dibekali dengan kemampuan untuk memahami perbedaan, berpikir kritis, serta memiliki identitas keagamaan yang kuat namun tetap terbuka. Pendidikan yang berbasis moderasi dapat membantu peserta didik menyaring pengaruh global secara bijak.

Selain itu, diperlukan penguatan kurikulum berbasis nilai moderasi yang mampu mengintegrasikan antara nilai lokal dan global. Guru juga harus berperan aktif sebagai fasilitator yang membantu peserta didik memahami dinamika global secara kontekstual. Pendekatan dialogis dan reflektif menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas globalisasi.

C. Pengaruh Media Sosial terhadap Sikap Keagamaan

Perkembangan media sosial telah membawa perubahan besar dalam cara individu, khususnya generasi muda, memperoleh informasi dan membentuk sikap keagamaan. Platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lainnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang utama dalam penyebaran pengetahuan, termasuk ajaran agama. Dalam konteks ini, media sosial memiliki pengaruh yang signifikan, baik positif maupun negatif, terhadap pembentukan sikap keagamaan peserta didik.

Salah satu pengaruh utama media sosial adalah kemudahan akses terhadap informasi keagamaan. Peserta didik dapat dengan cepat memperoleh berbagai materi keagamaan dari beragam sumber, mulai dari ceramah, kajian, hingga diskusi keagamaan. Hal ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan literasi keagamaan secara mandiri. Namun, tanpa kemampuan seleksi yang baik, peserta didik juga berisiko menerima informasi yang tidak akurat atau bahkan mengandung paham ekstrem. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa media sosial menjadi salah satu jalur utama penyebaran ideologi keagamaan, termasuk yang bersifat radikal (Rochim et al., 2024).

Selain itu, media sosial juga berpengaruh dalam membentuk cara pandang dan interpretasi keagamaan. Konten yang dikonsumsi secara terus-menerus dapat memengaruhi pola pikir peserta didik, baik secara sadar maupun tidak. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sejalan dengan preferensi pengguna, sehingga dapat menciptakan echo chamber atau ruang gema informasi. Dalam kondisi ini, peserta didik hanya terpapar pada satu sudut pandang tertentu, yang berpotensi memperkuat sikap eksklusif dan mengurangi keterbukaan terhadap perbedaan.

Pengaruh lain yang cukup signifikan adalah penyebaran paham radikal dan intoleran secara digital. Media sosial memungkinkan penyebaran konten yang bersifat provokatif, manipulatif, dan ideologis dengan sangat cepat. Peserta didik yang tidak memiliki literasi digital yang memadai dapat dengan

mudah terpengaruh oleh narasi yang menyederhanakan ajaran agama secara sempit dan ekstrem. Menurut Widiarni et al. (2024), paparan konten digital yang tidak terkontrol menjadi salah satu faktor yang mempercepat proses radikalisasi di kalangan generasi muda.

Namun demikian, media sosial juga memiliki dampak positif dalam penguatan nilai keagamaan. Banyak konten edukatif yang mengajarkan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan perdamaian. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah yang efektif jika digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Melalui platform digital, pesan-pesan keagamaan yang moderat dapat disebarluaskan secara luas dan menjangkau berbagai kalangan.

Media sosial juga berperan dalam membentuk identitas keagamaan peserta didik. Interaksi dengan berbagai komunitas online dapat memengaruhi cara peserta didik memahami dan mengekspresikan keyakinan mereka. Dalam beberapa kasus, media sosial dapat memperkuat identitas keagamaan yang positif, tetapi dalam kasus lain juga dapat mendorong munculnya sikap fanatisme jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang komprehensif.

Di sisi lain, media sosial juga dapat memicu polarisasi dan konflik keagamaan. Perdebatan yang terjadi di ruang digital sering kali berlangsung tanpa kontrol dan etika yang memadai, sehingga memunculkan ujaran kebencian dan konflik antar kelompok. Hal ini dapat memengaruhi sikap peserta didik dalam kehidupan nyata, terutama jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyaring dan mengelola informasi secara bijak.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital dan etika bermedia dalam pendidikan. Peserta didik perlu dibekali dengan kemampuan untuk memilah informasi, memahami konteks, serta berinteraksi secara santun di dunia digital. Guru dan sekolah memiliki peran penting dalam membimbing peserta didik agar mampu menggunakan media sosial secara positif dan produktif.

Selain itu, pendidikan juga perlu mengembangkan pendekatan kontra-narasi dengan mendorong peserta didik untuk memproduksi konten yang mengandung nilai moderasi dan toleransi. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi sumber pengaruh, tetapi juga menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan.

D. Polarisasi Keagamaan di Masyarakat

Polarisasi keagamaan merupakan fenomena sosial yang ditandai dengan terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki pandangan keagamaan berbeda secara tajam dan cenderung saling berlawanan. Dalam kondisi ini, perbedaan tidak lagi dipandang sebagai kekayaan, tetapi sebagai sumber konflik yang memicu sikap eksklusif, prasangka, bahkan permusuhan. Dalam beberapa tahun terakhir, polarisasi keagamaan semakin menguat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, dinamika politik, serta perubahan sosial yang cepat.

Secara konseptual, polarisasi keagamaan terjadi ketika individu atau kelompok mengidentifikasi diri secara kuat dengan satu pandangan tertentu dan menolak pandangan lain. Proses ini sering kali dipengaruhi oleh faktor ideologis, sosial, dan psikologis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa polarisasi tidak hanya terjadi di tingkat masyarakat umum, tetapi juga mulai merambah ke lingkungan pendidikan dan generasi muda (Rochim et al., 2024).

Salah satu penyebab utama polarisasi adalah perbedaan pemahaman keagamaan yang tidak dikelola dengan baik. Perbedaan interpretasi terhadap ajaran agama merupakan hal yang wajar, namun ketika tidak disertai dengan sikap toleransi, perbedaan tersebut dapat berkembang menjadi konflik. Sikap klaim kebenaran tunggal dan penolakan terhadap dialog menjadi faktor yang memperkuat polarisasi.

Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah media sosial dan arus informasi digital. Media sosial memungkinkan individu untuk mengakses dan menyebarkan informasi secara cepat,

tetapi juga berpotensi menciptakan ruang gema (echo chamber), di mana seseorang hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinannya. Kondisi ini memperkuat sikap eksklusif dan mengurangi keterbukaan terhadap perbedaan. Menurut Widiarni et al. (2024), media digital menjadi salah satu faktor yang mempercepat terbentuknya polarisasi di kalangan generasi muda.

Selain itu, kepentingan politik dan identitas juga dapat memperkuat polarisasi keagamaan. Dalam beberapa kasus, agama digunakan sebagai alat mobilisasi massa untuk kepentingan tertentu, sehingga memperuncing perbedaan yang ada. Hal ini tidak hanya berdampak pada hubungan antar kelompok masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial secara keseluruhan.

Dampak dari polarisasi keagamaan sangat luas. Salah satunya adalah menurunnya kohesi sosial dan solidaritas masyarakat. Ketika masyarakat terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang saling berlawanan, rasa kebersamaan dan persatuan menjadi melemah. Selain itu, polarisasi juga dapat memicu konflik sosial, baik dalam bentuk verbal maupun fisik, yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan.

Dalam konteks pendidikan, polarisasi keagamaan dapat berdampak pada terbentuknya sikap intoleran di kalangan peserta didik. Peserta didik yang terpengaruh oleh polarisasi cenderung memiliki pandangan yang sempit dan sulit menerima perbedaan. Hal ini dapat menghambat proses pembelajaran yang seharusnya mendorong dialog, kolaborasi, dan penghargaan terhadap keberagaman.

Untuk mengatasi polarisasi keagamaan, diperlukan pendekatan yang komprehensif, salah satunya melalui penguatan dialog antar kelompok. Dialog yang terbuka dan konstruktif dapat membantu mengurangi kesalahpahaman serta membangun saling pengertian. Selain itu, pendidikan juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai moderasi beragama, seperti toleransi, keseimbangan, dan keadilan.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah penguatan literasi digital, agar masyarakat mampu memilah informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang bersifat provokatif. Dengan literasi yang baik, individu dapat lebih bijak dalam menyikapi perbedaan dan tidak mudah terjebak dalam polarisasi.

Selain itu, diperlukan peran aktif tokoh agama, pendidik, dan pemerintah dalam menciptakan narasi yang menyejukkan dan inklusif. Kolaborasi antara berbagai pihak akan membantu membangun masyarakat yang lebih harmonis dan mampu mengelola perbedaan secara konstruktif.

E. Peran Pendidikan dalam Mengatasi Intoleransi

Intoleransi merupakan sikap yang menolak, tidak menghargai, atau bahkan memusuhi perbedaan, baik dalam aspek agama, budaya, maupun pandangan hidup. Dalam masyarakat yang majemuk, intoleransi menjadi ancaman serius terhadap harmoni sosial dan persatuan. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran strategis dalam mengatasi dan mencegah berkembangnya sikap intoleran, khususnya di kalangan generasi muda.

Pendidikan berfungsi tidak hanya sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan nilai. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama sejak dini. Peserta didik perlu dibekali pemahaman bahwa perbedaan adalah realitas sosial yang harus dihargai, bukan ditolak. Nilai-nilai seperti saling menghormati, empati, dan keadilan harus menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendidikan berbasis moderasi beragama mampu meningkatkan sikap inklusif dan mengurangi kecenderungan intoleransi di kalangan pelajar (Widiarni et al., 2024).

Salah satu peran penting pendidikan adalah mengintegrasikan nilai toleransi dalam kurikulum. Kurikulum tidak hanya berisi materi akademik, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman. Guru dapat memasukkan

tema-tema seperti pluralisme, dialog antaragama, dan kehidupan sosial dalam materi pembelajaran. Pendekatan ini membantu peserta didik memahami bahwa perbedaan merupakan bagian dari kehidupan yang harus dikelola secara bijak.

Selain itu, pendidikan berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang bersifat provokatif atau intoleran. Mereka mampu menganalisis informasi, memahami konteks, serta mengambil keputusan secara rasional. Dalam era digital, kemampuan ini menjadi sangat penting mengingat banyaknya informasi yang beredar tanpa verifikasi yang jelas (Rochim et al., 2024).

Pendidikan juga berperan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan aman. Sekolah harus menjadi ruang yang bebas dari diskriminasi dan kekerasan, di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan diterima. Lingkungan yang positif akan mendorong interaksi sosial yang sehat dan memperkuat nilai kebersamaan. Dalam suasana seperti ini, sikap toleransi dapat berkembang secara alami melalui pengalaman sehari-hari.

Peran guru sebagai teladan (role model) juga sangat penting dalam mengatasi intoleransi. Guru harus menunjukkan sikap moderat, terbuka, dan menghargai perbedaan dalam interaksi dengan peserta didik. Keteladanan ini memiliki pengaruh besar karena peserta didik cenderung meniru perilaku yang mereka lihat. Pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang mampu mengintegrasikan antara pengajaran dan keteladanan dalam praktik nyata.

Selain itu, pendidikan dapat mengatasi intoleransi melalui pendekatan dialogis dan kolaboratif. Guru dapat memfasilitasi diskusi yang melibatkan berbagai sudut pandang, sehingga peserta didik belajar memahami perbedaan secara konstruktif. Kegiatan kerja kelompok yang heterogen juga dapat menjadi

sarana untuk membangun sikap saling menghargai dan bekerja sama.

Pendidikan juga memiliki peran dalam penguatan literasi digital dan etika bermedia. Peserta didik perlu dibekali kemampuan untuk memilah informasi dan menghindari konten yang mengandung ujaran kebencian atau provokasi. Literasi digital yang baik akan membantu mereka menjadi pengguna media yang bijak dan bertanggung jawab (Nursyamsiah et al., 2024).

Lebih lanjut, pendidikan berfungsi sebagai media deteksi dini terhadap sikap intoleran. Guru dan pihak sekolah perlu memiliki kepekaan terhadap perubahan perilaku peserta didik yang mengarah pada intoleransi. Dengan deteksi dini, intervensi dapat dilakukan secara cepat melalui pendekatan edukatif dan persuasif.

Terakhir, keberhasilan pendidikan dalam mengatasi intoleransi sangat bergantung pada kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan di sekolah perlu diperkuat di lingkungan keluarga dan sosial agar internalisasi berjalan secara konsisten. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung terbentuknya karakter toleran.

F. Strategi Penguatan Moderasi Beragama

Penguatan moderasi beragama merupakan langkah strategis dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman. Moderasi beragama tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai praktik nyata yang harus diinternalisasikan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya melalui pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan agar nilai-nilai moderasi dapat tertanam kuat dalam diri peserta didik dan masyarakat.

Salah satu strategi utama adalah penguatan kebijakan pendidikan berbasis moderasi. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu merumuskan kebijakan yang secara eksplisit memasukkan nilai-nilai moderasi beragama dalam sistem

pendidikan. Kebijakan ini mencakup pengembangan kurikulum, standar pembelajaran, serta program-program pendidikan yang mendukung terciptanya sikap toleran dan inklusif. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), moderasi beragama harus menjadi arus utama (mainstreaming) dalam pembangunan pendidikan nasional.

Strategi berikutnya adalah integrasi nilai moderasi dalam proses pembelajaran. Guru perlu mengembangkan metode pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan karakter. Pendekatan seperti pembelajaran berbasis masalah, diskusi dialogis, dan pembelajaran kolaboratif dapat digunakan untuk menanamkan nilai toleransi, empati, dan keadilan. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai moderasi dalam pembelajaran efektif dalam membentuk sikap inklusif peserta didik (Widiarni et al., 2024).

Selain itu, peningkatan kompetensi guru menjadi strategi yang sangat penting. Guru sebagai ujung tombak pendidikan harus memiliki pemahaman yang kuat tentang moderasi beragama serta kemampuan untuk mengimplementasikannya dalam pembelajaran. Pelatihan, workshop, dan pengembangan profesional berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam mengelola keberagaman di kelas.

Strategi lain adalah penguatan budaya sekolah yang inklusif dan moderat. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang mencerminkan nilai-nilai moderasi, seperti saling menghormati, keterbukaan, dan keadilan. Budaya sekolah dapat dibangun melalui pembiasaan sehari-hari, kegiatan bersama, serta aturan yang mendukung kehidupan yang harmonis. Lingkungan yang positif akan memperkuat internalisasi nilai moderasi secara alami.

Selanjutnya, pengembangan program pendidikan berbasis moderasi juga menjadi langkah penting. Program ini dapat berupa kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler yang dirancang untuk menanamkan nilai toleransi dan kebersamaan. Kegiatan seperti dialog lintas

budaya, bakti sosial, dan proyek kolaboratif dapat memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dalam mengelola keberagaman.

Di era digital, strategi penguatan moderasi juga harus mencakup literasi digital dan kontra-narasi. Peserta didik perlu dibekali kemampuan untuk memilah informasi dan menghindari konten yang mengandung unsur intoleransi atau radikalisme. Selain itu, mereka juga perlu didorong untuk memproduksi konten positif yang mempromosikan nilai-nilai moderasi. Hal ini penting untuk mengimbangi arus informasi digital yang sangat cepat (Rochim et al., 2024).

Strategi berikutnya adalah penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nilai-nilai moderasi tidak dapat ditanamkan secara optimal jika hanya dilakukan di sekolah. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial sangat diperlukan untuk menciptakan konsistensi dalam pembentukan karakter. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang intensif, kegiatan bersama, serta program pendidikan berbasis komunitas.

Selain itu, monitoring dan evaluasi program moderasi juga menjadi bagian penting dalam strategi penguatan. Sekolah perlu melakukan penilaian terhadap efektivitas program yang telah dijalankan, baik dari segi perubahan sikap peserta didik maupun dampaknya terhadap lingkungan sekolah. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan program ke depan.

Terakhir, keteladanan dari seluruh warga sekolah merupakan strategi yang tidak kalah penting. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan harus menunjukkan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan ini akan menjadi contoh nyata bagi peserta didik dan memperkuat internalisasi nilai moderasi.

Strategi penguatan moderasi beragama harus dilakukan secara holistik melalui kebijakan pendidikan, integrasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, penguatan budaya sekolah,

pengembangan program, literasi digital, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta evaluasi berkelanjutan. Pendekatan yang komprehensif ini diharapkan mampu membentuk generasi yang toleran, inklusif, dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang beragama.

G. Moderasi Beragama di Era Digital

Era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam cara memahami, mengamalkan, dan menyebarkan ajaran agama. Teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial dan platform digital, telah menjadi ruang baru bagi interaksi keagamaan. Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa perkembangan digital tidak justru memperkuat sikap ekstrem, tetapi sebaliknya mendorong terciptanya kehidupan yang toleran dan harmonis.

Moderasi beragama di era digital dapat dipahami sebagai upaya menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan yang seimbang, inklusif, dan tidak berlebihan dalam ruang digital. Nilai-nilai seperti toleransi (tasamuh), keseimbangan (tawazun), keadilan (i'tidal), dan sikap tengah (tawasuth) perlu dihadirkan dalam interaksi online, baik dalam bentuk komunikasi, produksi konten, maupun konsumsi informasi. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), moderasi beragama harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan digitalisasi.

Salah satu tantangan utama di era digital adalah maraknya penyebaran informasi keagamaan yang tidak terverifikasi. Media sosial memungkinkan siapa saja untuk memproduksi dan menyebarkan konten tanpa melalui proses validasi yang memadai. Hal ini membuka peluang bagi tersebarnya paham radikal, ujaran kebencian, dan interpretasi agama yang sempit. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa media digital menjadi salah satu sarana utama dalam penyebaran ideologi ekstrem di kalangan generasi muda (Rochim et al., 2024).

Selain itu, fenomena echo chamber atau ruang gema juga menjadi tantangan serius. Algoritma media sosial cenderung

menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga individu hanya terpapar pada satu sudut pandang tertentu. Kondisi ini dapat memperkuat sikap eksklusif dan mengurangi keterbukaan terhadap perbedaan. Dalam konteks keagamaan, hal ini berpotensi memperkuat polarisasi dan melemahkan nilai moderasi.

Di sisi lain, era digital juga memberikan peluang besar dalam penguatan moderasi beragama. Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah yang efektif untuk menyebarkan pesan-pesan keagamaan yang moderat dan inklusif. Konten edukatif seperti video, podcast, dan artikel dapat digunakan untuk mengajarkan nilai toleransi, perdamaian, dan kebersamaan kepada masyarakat luas. Dengan strategi yang tepat, media digital dapat menjadi alat yang kuat dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya moderasi.

Dalam konteks pendidikan, moderasi beragama di era digital dapat diperkuat melalui literasi digital dan etika bermedia. Peserta didik perlu dibekali kemampuan untuk memilah informasi, memahami konteks, serta berinteraksi secara santun di dunia maya. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga kesadaran etis dalam menggunakan teknologi. Menurut Widiarni et al. (2024), penguatan literasi digital menjadi kunci dalam mencegah penyebaran paham radikal di kalangan pelajar.

Selain itu, diperlukan pengembangan kontra-narasi digital untuk melawan penyebaran ideologi ekstrem. Peserta didik dan pendidik dapat berperan aktif dalam menciptakan konten yang mempromosikan nilai moderasi, seperti kampanye toleransi, dialog lintas budaya, dan cerita inspiratif tentang keberagaman. Pendekatan ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam membangun narasi positif di ruang digital.

Peran guru juga sangat penting dalam konteks ini, yaitu sebagai fasilitator dan pembimbing digital. Guru tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga membimbing peserta didik dalam menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung

jawab. Keteladanan guru dalam berinteraksi di dunia digital akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap peserta didik.

Selain itu, moderasi beragama di era digital juga memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, seperti sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Sinergi ini penting untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan mendukung penyebaran nilai-nilai positif. Tanpa kolaborasi yang kuat, upaya penguatan moderasi akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Moderasi beragama di era digital merupakan upaya penting dalam menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dan nilai-nilai keagamaan. Meskipun era digital membawa berbagai tantangan, seperti penyebaran hoaks, polarisasi, dan radikalisme, namun juga menawarkan peluang besar untuk memperkuat nilai toleransi dan inklusivitas. Melalui literasi digital, kontra-narasi, keteladanan, dan kolaborasi, moderasi beragama dapat terus dikembangkan sebagai fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis di era modern.

BAB 9

Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Moderasi Beragama

A. Keluarga sebagai Basis Pendidikan Moderasi

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi setiap individu. Dalam konteks pembentukan karakter dan sikap keagamaan, keluarga memiliki peran yang sangat strategis sebagai fondasi awal dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Nilai-nilai seperti toleransi, keseimbangan, keadilan, dan sikap saling menghormati pertama kali diperkenalkan dan dipraktikkan dalam lingkungan keluarga sebelum individu berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas.

Sebagai institusi sosial paling awal, keluarga berfungsi sebagai agen sosialisasi nilai dan norma. Anak-anak belajar melalui interaksi sehari-hari dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Pola komunikasi, cara menyelesaikan konflik, serta sikap terhadap perbedaan yang ditunjukkan oleh orang tua akan sangat memengaruhi pembentukan karakter anak. Jika keluarga mampu menanamkan nilai-nilai moderasi sejak dini, maka anak akan memiliki dasar yang kuat untuk bersikap toleran dan inklusif dalam kehidupan sosial.

Salah satu peran utama keluarga adalah menanamkan pemahaman keagamaan yang seimbang dan tidak ekstrem. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengenalkan ajaran agama secara komprehensif, tidak hanya dari aspek ritual, tetapi juga nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama. Pemahaman agama yang utuh akan membantu anak menghindari cara pandang yang sempit dan eksklusif.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendidikan keluarga yang berbasis nilai moderasi beragama dapat menjadi benteng awal dalam mencegah radikalisme pada anak (Widiarni et al., 2024).

Selain itu, keluarga juga berperan dalam membentuk sikap toleransi terhadap keberagaman. Anak yang dibiasakan untuk menghargai perbedaan sejak kecil akan lebih mudah beradaptasi dalam masyarakat yang plural. Orang tua dapat menanamkan nilai ini melalui contoh nyata, seperti menghormati tetangga yang berbeda agama, tidak menyampaikan ujaran kebencian, serta membiasakan dialog yang sehat dalam keluarga.

Peran keluarga juga terlihat dalam pembentukan karakter melalui keteladanan (role model). Anak cenderung meniru perilaku orang tua, sehingga sikap moderat yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari akan lebih efektif dibandingkan dengan nasihat semata. Keteladanan dalam bersikap adil, tidak diskriminatif, dan terbuka terhadap perbedaan akan membentuk pola pikir anak secara alami.

Di era digital, keluarga memiliki peran penting dalam mengawasi dan membimbing penggunaan media digital. Anak-anak saat ini sangat rentan terhadap paparan informasi dari internet, termasuk konten yang mengandung paham radikal. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan pendampingan, mengajarkan literasi digital, serta membangun komunikasi yang terbuka agar anak mampu memilah informasi secara bijak. Menurut Rochim et al. (2024), kurangnya pengawasan keluarga terhadap aktivitas digital anak dapat meningkatkan risiko terpapar ideologi ekstrem.

Selain itu, keluarga juga berperan dalam membangun komunikasi yang terbuka dan dialogis. Anak perlu diberikan ruang untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut. Komunikasi yang sehat akan membantu anak mengembangkan

kemampuan berpikir kritis serta memahami perbedaan secara konstruktif. Hal ini penting untuk mencegah munculnya sikap fanatisme dan klaim kebenaran tunggal.

Keluarga juga dapat memperkuat moderasi melalui pembiasaan nilai-nilai sosial, seperti gotong royong, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Kegiatan sederhana seperti membantu tetangga, berbagi dengan yang membutuhkan, atau terlibat dalam kegiatan sosial dapat menjadi sarana efektif dalam menanamkan nilai kemanusiaan yang universal.

Lebih lanjut, keberhasilan keluarga sebagai basis pendidikan moderasi sangat bergantung pada konsistensi dan sinergi dengan lingkungan pendidikan lainnya. Nilai-nilai yang diajarkan di rumah perlu diperkuat di sekolah dan masyarakat agar internalisasi berjalan secara optimal. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci dalam membentuk karakter anak yang moderat.

Keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai basis pendidikan moderasi beragama. Melalui penanaman nilai sejak dini, keteladanan, komunikasi yang terbuka, pengawasan digital, serta pembiasaan nilai sosial, keluarga dapat membentuk generasi yang toleran, inklusif, dan mampu hidup harmonis dalam keberagaman. Peran ini menjadikan keluarga sebagai fondasi utama dalam upaya menciptakan masyarakat yang damai dan berkeadilan.

B. Peran Orang Tua dalam Pendidikan Keagamaan

Orang tua memiliki peran fundamental dalam pendidikan keagamaan anak, karena keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak mengenal nilai, norma, dan keyakinan. Pendidikan keagamaan yang diberikan oleh orang tua tidak hanya berkaitan dengan aspek ritual, tetapi juga mencakup pembentukan sikap, karakter, dan cara pandang terhadap kehidupan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan keagamaan dalam keluarga sangat

menentukan arah perkembangan religiusitas anak di masa depan.

Salah satu peran utama orang tua adalah sebagai pendidik pertama (primary educator) dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan. Sejak usia dini, anak mulai belajar tentang konsep ketuhanan, ibadah, serta nilai moral melalui bimbingan orang tua. Proses ini berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan melalui interaksi sehari-hari. Pendidikan yang diberikan sejak dini akan membentuk dasar keimanan dan karakter anak secara kuat. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif orang tua dalam pendidikan agama anak berkontribusi signifikan terhadap pembentukan sikap religius yang positif (Widiarni et al., 2024).

Selain itu, orang tua berperan sebagai teladan (role model) dalam praktik keagamaan. Anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat, sehingga sikap dan kebiasaan orang tua dalam menjalankan ajaran agama akan menjadi contoh langsung bagi anak. Keteladanan dalam beribadah, bersikap jujur, menghargai sesama, dan menunjukkan kasih sayang merupakan bentuk pendidikan yang paling efektif. Pendidikan keagamaan yang hanya bersifat verbal tanpa diikuti oleh praktik nyata akan sulit diinternalisasi oleh anak.

Peran penting lainnya adalah membimbing pemahaman keagamaan yang moderat dan komprehensif. Orang tua perlu memastikan bahwa anak memahami ajaran agama secara seimbang, tidak sempit, dan tidak ekstrem. Pemahaman yang utuh mencakup aspek spiritual, sosial, dan kemanusiaan. Dengan demikian, anak tidak hanya menjadi religius secara ritual, tetapi juga memiliki sikap toleran dan inklusif dalam kehidupan bermasyarakat.

Orang tua juga berperan dalam membangun kebiasaan religius dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan ini dapat dilakukan melalui kegiatan rutin seperti berdoa, membaca kitab suci, serta melaksanakan ibadah bersama. Kebiasaan

yang dilakukan secara konsisten akan membentuk karakter religius yang melekat pada diri anak. Selain itu, suasana keluarga yang religius dan harmonis akan memperkuat internalisasi nilai-nilai tersebut.

Di era digital, peran orang tua semakin kompleks, terutama dalam mengawasi dan mengarahkan konsumsi informasi keagamaan anak. Anak-anak saat ini memiliki akses luas terhadap berbagai sumber informasi, termasuk konten keagamaan di media sosial. Tanpa pendampingan, mereka berisiko terpapar informasi yang tidak tepat atau mengandung paham ekstrem. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan edukasi literasi digital serta membangun komunikasi yang terbuka agar anak mampu menyaring informasi secara bijak. Menurut Rochim et al. (2024), pengawasan keluarga menjadi faktor penting dalam mencegah penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda.

Selain itu, orang tua memiliki peran dalam mendorong dialog dan keterbukaan dalam memahami agama. Anak perlu diberikan ruang untuk bertanya dan berdiskusi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan agama. Sikap terbuka dari orang tua akan membantu anak mengembangkan pemahaman yang lebih kritis dan tidak dogmatis. Pendekatan dialogis ini juga dapat mencegah munculnya sikap fanatisme dan klaim kebenaran tunggal.

Peran lain yang tidak kalah penting adalah menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Dalam masyarakat yang plural, anak perlu dibekali kemampuan untuk hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda latar belakang. Orang tua dapat menanamkan nilai ini melalui contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati perbedaan dan tidak melakukan diskriminasi.

Lebih lanjut, orang tua juga berperan dalam bekerja sama dengan sekolah dan lingkungan sosial. Pendidikan keagamaan yang efektif membutuhkan sinergi antara

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan di rumah perlu diperkuat di sekolah agar proses internalisasi berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Peran orang tua dalam pendidikan keagamaan sangat luas dan mencakup berbagai aspek, mulai dari penanaman nilai, keteladanan, pembiasaan, pengawasan digital, hingga pembentukan sikap toleran. Peran ini menjadi kunci dalam membentuk generasi yang tidak hanya religius, tetapi juga moderat, inklusif, dan mampu hidup harmonis dalam keberagaman.

C. Lingkungan Sosial dan Pembentukan Sikap Moderat

Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk sikap dan perilaku individu, termasuk dalam hal keberagaman. Setelah keluarga dan sekolah, lingkungan sosial menjadi ruang interaksi yang lebih luas di mana individu belajar memahami keberagaman, membangun relasi, serta menginternalisasi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks moderasi beragama, lingkungan sosial memiliki peran strategis dalam membentuk sikap yang toleran, inklusif, dan seimbang.

Secara sosiologis, lingkungan sosial mencakup berbagai unsur seperti teman sebaya, masyarakat sekitar, organisasi sosial, serta media yang dikonsumsi individu. Interaksi dalam lingkungan ini memberikan pengalaman langsung yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan pola pikir dan sikap. Individu yang tumbuh dalam lingkungan yang menghargai perbedaan cenderung memiliki sikap yang lebih terbuka dan moderat dibandingkan dengan mereka yang hidup dalam lingkungan yang eksklusif dan homogen.

Salah satu peran utama lingkungan sosial adalah sebagai media sosialisasi nilai-nilai moderasi. Nilai seperti toleransi, saling menghormati, dan kerja sama dapat dipelajari melalui interaksi sehari-hari. Misalnya, keterlibatan dalam kegiatan masyarakat yang beragam, seperti gotong royong atau kegiatan sosial lintas kelompok, dapat memperkuat

rasa kebersamaan dan mengurangi prasangka. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman sosial yang positif berkontribusi terhadap pembentukan sikap inklusif pada individu (Widiarni et al., 2024).

Selain itu, lingkungan sosial juga berperan dalam membentuk sikap melalui interaksi dengan teman sebaya. Kelompok teman memiliki pengaruh yang sangat kuat, terutama pada usia remaja. Nilai dan norma yang berkembang dalam kelompok tersebut dapat memengaruhi cara pandang individu terhadap agama dan keberagaman. Jika lingkungan pergaulan mendukung sikap terbuka dan dialogis, maka individu akan lebih mudah mengembangkan sikap moderat. Sebaliknya, lingkungan yang cenderung eksklusif dapat mendorong munculnya sikap intoleran.

Lingkungan sosial juga berfungsi sebagai ruang praktik langsung nilai toleransi. Berbeda dengan pembelajaran di kelas yang bersifat teoritis, lingkungan sosial memberikan kesempatan bagi individu untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Interaksi dengan orang yang berbeda latar belakang agama, budaya, dan pandangan akan melatih kemampuan individu dalam menghargai perbedaan dan mengelola konflik secara konstruktif.

Namun demikian, lingkungan sosial juga dapat menjadi faktor risiko dalam pembentukan sikap tidak moderat. Lingkungan yang dipenuhi dengan ujaran kebencian, diskriminasi, atau ideologi ekstrem dapat memengaruhi individu untuk mengadopsi sikap yang sama. Dalam era digital, lingkungan sosial tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga virtual. Media sosial menjadi bagian dari lingkungan sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan sikap. Menurut Rochim et al. (2024), paparan terhadap konten digital yang tidak terkontrol dapat mempercepat penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda.

Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi penguatan moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti membangun komunitas yang inklusif, mendorong dialog antar kelompok, serta mengembangkan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai latar belakang. Lingkungan yang positif akan memperkuat nilai-nilai moderasi yang telah ditanamkan dalam keluarga dan sekolah.

Selain itu, peran tokoh masyarakat dan pemimpin lokal juga sangat penting dalam mengarahkan nilai-nilai yang berkembang di lingkungan sosial. Tokoh yang memiliki pengaruh dapat menjadi agen perubahan dalam membangun budaya toleransi dan mengurangi potensi konflik. Keteladanan yang ditunjukkan oleh tokoh masyarakat akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku individu dalam komunitas.

Lingkungan sosial juga perlu didukung dengan penguatan literasi sosial dan digital. Individu harus dibekali kemampuan untuk memahami dinamika sosial, mengenali perbedaan, serta menyikapi informasi secara bijak. Literasi ini penting untuk mencegah individu terjebak dalam narasi yang bersifat provokatif atau diskriminatif.

Lebih lanjut, kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pembentukan sikap moderat. Nilai-nilai yang diajarkan di rumah dan sekolah perlu diperkuat melalui praktik nyata di masyarakat agar internalisasi berjalan secara konsisten.

Lingkungan sosial memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan sikap moderat. Melalui interaksi yang positif, pengalaman sosial yang inklusif, serta dukungan dari berbagai pihak, lingkungan sosial dapat menjadi sarana efektif dalam menanamkan nilai toleransi dan membangun kehidupan yang harmonis dalam keberagaman.

D. Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam membentuk sikap, pola pikir, dan perilaku keagamaan masyarakat. Dalam konteks kehidupan sosial yang majemuk, keberadaan mereka tidak hanya sebagai pemimpin simbolik, tetapi juga sebagai agen perubahan (agent of change) yang mampu mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang harmonis, toleran, dan moderat. Peran ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya tantangan seperti intoleransi, radikalisme, dan polarisasi keagamaan.

Tokoh agama berperan utama dalam menyampaikan ajaran keagamaan yang moderat dan kontekstual. Melalui ceramah, pengajian, dan berbagai aktivitas dakwah, tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk pemahaman keagamaan masyarakat. Penyampaian ajaran yang menekankan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan toleransi dapat membantu mencegah berkembangnya paham ekstrem. Penelitian menunjukkan bahwa narasi keagamaan yang moderat memiliki kontribusi signifikan dalam menekan kecenderungan radikalisme di masyarakat (Widiarni et al., 2024).

Selain itu, tokoh agama juga berperan sebagai penafsir ajaran agama yang bijak. Dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer, masyarakat sering kali membutuhkan panduan keagamaan yang relevan dengan kondisi zaman. Tokoh agama yang memiliki wawasan luas dan pendekatan yang inklusif dapat memberikan pemahaman yang tidak kaku, sehingga ajaran agama tetap dapat diterapkan tanpa menimbulkan konflik sosial.

Sementara itu, tokoh masyarakat memiliki peran dalam membangun kohesi sosial dan menjaga harmoni antar kelompok. Tokoh masyarakat, seperti kepala desa, pemimpin komunitas, atau tokoh adat, memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan memahami dinamika sosial yang terjadi. Mereka dapat menjadi mediator dalam

menyelesaikan konflik serta mendorong terciptanya dialog antar kelompok yang berbeda.

Peran penting lainnya adalah sebagai teladan (*role model*) dalam kehidupan sehari-hari. Baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat dituntut untuk menunjukkan sikap moderat, adil, dan terbuka terhadap perbedaan. Keteladanan ini memiliki dampak yang kuat karena masyarakat cenderung meniru perilaku pemimpin yang mereka hormati. Sikap inklusif yang ditunjukkan oleh tokoh akan memperkuat nilai-nilai moderasi di tingkat akar rumput.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga berperan dalam mencegah dan menangkal penyebaran paham radikal. Mereka dapat memberikan klarifikasi terhadap informasi yang keliru serta meluruskan pemahaman keagamaan yang menyimpang. Dalam era digital, peran ini semakin penting karena banyaknya informasi yang beredar tanpa verifikasi. Menurut Rochim et al. (2024), keterlibatan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi kepada publik dapat membantu mengurangi pengaruh negatif dari konten radikal.

Selain itu, mereka juga memiliki peran dalam mendorong dialog antaragama dan antarbudaya. Dialog yang terbuka dan konstruktif dapat membantu mengurangi prasangka serta membangun saling pengertian. Tokoh agama dan masyarakat dapat menjadi fasilitator dalam kegiatan dialog, sehingga tercipta ruang komunikasi yang sehat di tengah perbedaan.

Peran lain yang tidak kalah penting adalah kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pemerintah. Tokoh agama dan masyarakat dapat bekerja sama dengan sekolah dalam program penguatan moderasi beragama, seperti seminar, pelatihan, atau kegiatan sosial. Kolaborasi ini akan memperluas jangkauan pendidikan moderasi dan memperkuat dampaknya di masyarakat.

Di era digital, tokoh agama dan tokoh masyarakat juga dituntut untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah dan edukasi. Dengan memproduksi konten yang positif dan edukatif, mereka dapat menjangkau generasi muda secara lebih efektif. Pendekatan ini menjadi penting untuk mengimbangi arus informasi yang sering kali dipenuhi oleh narasi negatif.

Namun demikian, peran ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan kepentingan, keterbatasan literasi digital, serta tekanan sosial dan politik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas bagi tokoh agama dan masyarakat agar mampu menjalankan perannya secara optimal dalam konteks yang terus berkembang.

E. Kolaborasi Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat

Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam membangun pendidikan yang holistik, khususnya dalam penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Ketiga lingkungan ini merupakan ekosistem pendidikan yang saling melengkapi dalam membentuk karakter peserta didik. Tanpa sinergi yang baik, proses internalisasi nilai-nilai moderasi akan berjalan parsial dan kurang efektif.

Sekolah sebagai lembaga formal memiliki peran dalam memberikan pendidikan terstruktur dan sistematis. Melalui kurikulum, metode pembelajaran, serta kegiatan pendidikan, sekolah menanamkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kebersamaan. Namun, nilai-nilai tersebut tidak akan optimal jika tidak diperkuat oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, sekolah perlu membangun komunikasi yang intensif dengan orang tua dan komunitas untuk memastikan kesinambungan pendidikan nilai.

Keluarga sebagai lingkungan pertama memiliki peran dalam menanamkan nilai dasar dan pembiasaan perilaku. Nilai-nilai yang diajarkan di sekolah akan lebih mudah diinternalisasi jika didukung oleh praktik yang konsisten di

rumah. Orang tua perlu memahami dan mendukung program sekolah, sehingga terdapat keselarasan antara pendidikan formal dan informal. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak berkontribusi positif terhadap pembentukan karakter dan sikap moderat (Widiarni et al., 2024).

Sementara itu, masyarakat berfungsi sebagai ruang praktik sosial bagi peserta didik. Nilai-nilai yang diperoleh di sekolah dan keluarga akan diuji dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan sosial yang inklusif dan harmonis akan memperkuat sikap toleransi, sedangkan lingkungan yang penuh konflik dapat menghambat proses tersebut. Oleh karena itu, masyarakat perlu berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi pengembangan karakter moderat.

Kolaborasi antara ketiga elemen ini dapat diwujudkan melalui komunikasi yang efektif dan berkelanjutan. Sekolah dapat mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua, seperti rapat wali murid atau seminar parenting, untuk menyampaikan program pendidikan dan perkembangan peserta didik. Komunikasi yang terbuka akan membantu menyamakan persepsi dan tujuan pendidikan.

Selain itu, kolaborasi juga dapat dilakukan melalui program bersama yang melibatkan berbagai pihak. Kegiatan seperti bakti sosial, dialog lintas budaya, seminar moderasi beragama, serta kegiatan keagamaan yang inklusif dapat menjadi sarana untuk memperkuat kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Program ini tidak hanya memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, tetapi juga memperkuat hubungan antar pihak.

Peran penting lainnya adalah sinkronisasi nilai dan norma yang diajarkan. Sekolah, keluarga, dan masyarakat perlu memiliki kesamaan visi dalam menanamkan nilai moderasi beragama. Ketidaksesuaian nilai yang diajarkan di masing-masing lingkungan dapat menimbulkan kebingungan pada

peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik untuk memastikan konsistensi dalam pendidikan karakter.

Di era digital, kolaborasi ini juga harus mencakup pengawasan dan pembinaan di ruang digital. Peserta didik tidak hanya berinteraksi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Sekolah dan orang tua perlu bekerja sama dalam mengawasi penggunaan media sosial serta memberikan edukasi literasi digital. Menurut Rochim et al. (2024), kurangnya sinergi dalam pengawasan digital dapat meningkatkan risiko paparan paham radikal di kalangan pelajar.

Kolaborasi juga perlu didukung dengan peran aktif tokoh masyarakat dan pemimpin lokal. Mereka dapat menjadi penghubung antara sekolah dan masyarakat serta membantu menciptakan program yang relevan dengan kebutuhan lokal. Dukungan dari tokoh masyarakat akan memperkuat legitimasi program dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Namun demikian, kolaborasi ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan latar belakang, keterbatasan waktu, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya kerja sama. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama serta upaya berkelanjutan untuk membangun hubungan yang harmonis antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.

F. Program Penguatan Moderasi Berbasis Komunitas

Program penguatan moderasi beragama berbasis komunitas merupakan pendekatan strategis yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses internalisasi nilai-nilai moderasi. Berbeda dengan pendekatan formal yang berpusat pada institusi pendidikan, pendekatan berbasis komunitas menekankan pada partisipasi aktif warga, kearifan lokal, serta dinamika sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai moderasi tidak hanya dipahami secara

teoritis, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara konseptual, program berbasis komunitas bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya moderasi beragama. Masyarakat dilibatkan secara langsung dalam berbagai kegiatan yang mendorong sikap toleransi, dialog, dan kerja sama lintas kelompok. Pendekatan ini dinilai efektif karena masyarakat memiliki kedekatan emosional dan sosial yang kuat, sehingga proses internalisasi nilai menjadi lebih natural dan berkelanjutan. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), penguatan moderasi beragama perlu dilakukan melalui pendekatan kultural dan sosial yang melibatkan komunitas sebagai basis utama.

Salah satu bentuk program yang dapat dikembangkan adalah forum dialog lintas agama dan budaya. Kegiatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk saling mengenal, berdiskusi, dan memahami perbedaan secara konstruktif. Dialog yang dilakukan secara rutin dapat mengurangi prasangka serta memperkuat hubungan sosial antar kelompok. Selain itu, forum ini juga dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan potensi konflik secara damai.

Program lain yang efektif adalah kegiatan sosial kolaboratif. Masyarakat dari berbagai latar belakang dapat dilibatkan dalam kegiatan seperti gotong royong, bakti sosial, atau bantuan kemanusiaan. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat solidaritas, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan empati. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman sosial yang melibatkan kerja sama lintas kelompok dapat meningkatkan sikap toleransi dan mengurangi potensi konflik (Widiarni et al., 2024).

Selain itu, penguatan peran komunitas keagamaan juga menjadi bagian penting dalam program ini. Organisasi keagamaan dapat menjadi agen penyebar nilai moderasi melalui kegiatan dakwah, pengajian, dan pendidikan nonformal. Dengan pendekatan yang inklusif dan

kontekstual, komunitas keagamaan dapat membantu masyarakat memahami ajaran agama secara seimbang dan tidak ekstrem.

Di era digital, program berbasis komunitas juga dapat dikembangkan melalui komunitas digital dan media sosial. Masyarakat dapat membentuk kelompok atau platform online yang mempromosikan nilai-nilai toleransi dan perdamaian. Konten edukatif, kampanye digital, serta diskusi online dapat menjadi sarana efektif untuk menjangkau generasi muda. Menurut Rochim et al. (2024), pemanfaatan media digital secara positif dapat menjadi strategi penting dalam melawan penyebaran paham radikal.

Program penguatan moderasi juga dapat dilakukan melalui pelatihan dan workshop bagi masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang moderasi beragama, literasi digital, serta keterampilan komunikasi yang inklusif. Pelatihan ini dapat melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan akademisi sebagai narasumber.

Selanjutnya, pengembangan kearifan lokal (local wisdom) juga menjadi strategi yang efektif. Setiap komunitas memiliki nilai-nilai budaya yang menjunjung tinggi kebersamaan dan harmoni. Nilai-nilai tersebut dapat diangkat kembali sebagai dasar dalam membangun moderasi beragama. Pendekatan ini lebih mudah diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan konteks lokal.

Keberhasilan program berbasis komunitas sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan dukungan berbagai pihak. Pemerintah, lembaga pendidikan, serta organisasi sosial perlu bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan program yang berkelanjutan. Kolaborasi ini akan memperkuat dampak program dan memperluas jangkauan implementasi.

Namun demikian, program ini juga menghadapi tantangan, seperti perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang persuasif, inklusif, dan berkelanjutan agar program dapat diterima dan dijalankan secara efektif.

G. Dampak Lingkungan Sosial terhadap Sikap Keagamaan

Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk sikap keagamaan individu. Sebagai ruang interaksi yang luas setelah keluarga dan sekolah, lingkungan sosial menjadi tempat di mana nilai-nilai keagamaan tidak hanya dipelajari, tetapi juga dipraktikkan dan diuji dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, kualitas lingkungan sosial akan sangat menentukan apakah sikap keagamaan yang berkembang bersifat moderat, inklusif, atau justru sebaliknya.

Salah satu dampak positif lingkungan sosial adalah pembentukan sikap toleransi dan inklusivitas. Individu yang hidup dalam lingkungan yang beragam dan terbuka cenderung memiliki pengalaman interaksi yang lebih luas dengan orang dari latar belakang berbeda. Pengalaman ini dapat menumbuhkan pemahaman bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dan harus dihargai. Penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial yang positif berkontribusi pada pembentukan sikap keagamaan yang moderat dan tidak eksklusif (Widiarni et al., 2024).

Selain itu, lingkungan sosial juga dapat memperkuat internalisasi nilai-nilai keagamaan melalui praktik sosial. Nilai seperti empati, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama sering kali dipelajari melalui kegiatan sosial, seperti gotong royong, kegiatan keagamaan bersama, atau aksi kemanusiaan. Pengalaman langsung ini membantu individu memahami bahwa ajaran agama tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat.

Namun demikian, lingkungan sosial juga dapat memberikan dampak negatif, terutama jika dipenuhi dengan nilai-nilai yang tidak toleran atau eksklusif. Individu yang berada dalam lingkungan yang cenderung homogen dan menolak perbedaan berisiko mengembangkan sikap keagamaan yang sempit. Sikap seperti klaim kebenaran tunggal, prasangka terhadap kelompok lain, dan penolakan terhadap dialog dapat berkembang dalam lingkungan seperti ini.

Pengaruh teman sebaya juga menjadi faktor penting dalam pembentukan sikap keagamaan. Pada usia remaja, individu cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman sebaya dibandingkan dengan keluarga. Nilai dan norma yang berkembang dalam kelompok pertemanan dapat memengaruhi cara pandang terhadap agama. Jika kelompok tersebut memiliki pandangan yang moderat, maka individu akan terdorong untuk bersikap terbuka. Sebaliknya, jika kelompok tersebut cenderung radikal, maka risiko adopsi sikap ekstrem akan meningkat (Rochim et al., 2024).

Di era digital, lingkungan sosial tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga virtual melalui media sosial. Platform digital menjadi ruang baru bagi individu untuk berinteraksi dan memperoleh informasi keagamaan. Dampaknya bisa sangat besar, karena individu dapat terpapar berbagai pandangan keagamaan dalam waktu singkat. Jika tidak diimbangi dengan literasi digital yang baik, individu dapat dengan mudah terpengaruh oleh narasi yang bersifat provokatif atau radikal.

Selain itu, lingkungan sosial juga memengaruhi pembentukan identitas keagamaan. Interaksi dengan berbagai kelompok sosial dapat membantu individu memahami posisinya dalam masyarakat serta membentuk identitas yang lebih inklusif. Namun, dalam beberapa kasus, lingkungan sosial juga dapat mendorong munculnya identitas yang eksklusif jika individu merasa perlu membedakan diri secara tajam dari kelompok lain.

Dampak lain yang penting adalah kemampuan individu dalam mengelola konflik keagamaan. Lingkungan sosial yang sehat akan memberikan ruang bagi dialog dan penyelesaian konflik secara damai. Sebaliknya, lingkungan yang penuh ketegangan dapat memperburuk konflik dan memperkuat polarisasi.

Untuk memaksimalkan dampak positif lingkungan sosial, diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan kondusif. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan nilai toleransi, pengembangan kegiatan sosial lintas kelompok, serta peran aktif tokoh masyarakat dalam membangun harmoni. Selain itu, pendidikan juga perlu memberikan bekal kepada individu agar mampu berinteraksi secara bijak dalam lingkungan sosial yang beragam.

Lingkungan sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap sikap keagamaan, baik dalam membentuk sikap moderat maupun ekstrem. Lingkungan yang positif akan mendorong terbentuknya sikap toleran dan inklusif, sedangkan lingkungan yang negatif dapat memicu sikap eksklusif dan intoleran. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung penguatan moderasi beragama agar tercipta kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk.

BAB 10

Literasi Keagamaan dan Moderasi Beragama

A. Konsep Literasi Keagamaan

Literasi keagamaan merupakan konsep penting dalam pendidikan modern, khususnya dalam konteks masyarakat yang plural dan dinamis. Secara umum, literasi keagamaan tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan memahami teks-teks keagamaan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menginterpretasikan, merefleksikan, dan mengimplementasikan ajaran agama secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, literasi keagamaan menjadi fondasi dalam membentuk sikap beragama yang moderat, inklusif, dan kontekstual.

Secara konseptual, literasi keagamaan dapat dipahami sebagai kemampuan individu dalam memahami ajaran agama secara komprehensif, baik dari aspek teologis, historis, maupun sosial. Individu yang memiliki literasi keagamaan yang baik tidak hanya mengetahui ajaran agamanya sendiri, tetapi juga memiliki pemahaman dasar tentang agama lain serta mampu menghargai perbedaan yang ada. Hal ini penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman.

Literasi keagamaan juga mencakup kemampuan berpikir kritis terhadap informasi keagamaan. Di era digital, individu dihadapkan pada berbagai sumber informasi yang beragam, termasuk yang mengandung bias atau interpretasi yang tidak tepat. Oleh karena itu, literasi keagamaan harus diiringi dengan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memilah

informasi secara rasional. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rendahnya literasi keagamaan dapat menjadi salah satu faktor yang memicu munculnya sikap intoleran dan radikal (Widiarni et al., 2024).

Selain itu, literasi keagamaan memiliki dimensi praktis dan kontekstual, yaitu kemampuan untuk mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, toleransi, dan tanggung jawab sosial harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Dengan demikian, literasi keagamaan tidak berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan sikap dan tindakan.

Dalam perspektif pendidikan, literasi keagamaan menjadi bagian penting dari pendidikan karakter dan moderasi beragama. Melalui proses pembelajaran, peserta didik dibekali dengan pemahaman yang utuh tentang agama serta kemampuan untuk hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog, refleksi, dan pengalaman sosial sebagai sarana pembelajaran.

Literasi keagamaan juga berkaitan dengan kemampuan memahami konteks sosial dan budaya. Ajaran agama tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial di mana ia dipraktikkan. Oleh karena itu, individu perlu memahami bagaimana nilai-nilai agama dapat diterapkan secara kontekstual tanpa kehilangan esensi ajarannya. Kemampuan ini akan membantu individu menghindari pemahaman yang kaku dan tekstual.

Di era globalisasi dan digitalisasi, literasi keagamaan semakin penting karena individu dihadapkan pada arus informasi global yang sangat cepat. Media sosial dan platform digital menjadi sumber utama informasi keagamaan bagi banyak orang. Tanpa literasi yang memadai, individu dapat dengan mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak sesuai dengan nilai moderasi. Menurut Rochim et al. (2024), penguatan literasi keagamaan menjadi salah satu strategi penting dalam mencegah penyebaran paham ekstrem di kalangan generasi muda.

Selain itu, literasi keagamaan juga berperan dalam membangun sikap dialogis dan terbuka. Individu yang memiliki literasi keagamaan yang baik cenderung lebih siap untuk berdialog dan memahami perspektif orang lain. Hal ini penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan mengurangi potensi konflik.

Pengembangan literasi keagamaan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat. Ketiga lingkungan ini harus bekerja sama dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pembentukan literasi keagamaan yang kuat. Sinergi ini akan memastikan bahwa nilai-nilai yang diajarkan dapat diinternalisasi secara konsisten.

Literasi keagamaan merupakan kemampuan yang mencakup pemahaman, analisis, dan penerapan ajaran agama secara komprehensif dan kontekstual. Literasi ini menjadi kunci dalam membentuk sikap keagamaan yang moderat, toleran, dan inklusif, serta dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi. Oleh karena itu, penguatan literasi keagamaan perlu menjadi prioritas dalam sistem pendidikan dan kehidupan masyarakat.

B. Literasi Keagamaan dalam Pendidikan Islam

Literasi keagamaan dalam pendidikan Islam merupakan aspek penting dalam membentuk pemahaman keagamaan yang komprehensif, kontekstual, dan moderat. Dalam perspektif pendidikan Islam, literasi keagamaan tidak hanya berfokus pada kemampuan membaca dan memahami teks-teks keislaman, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menginterpretasikan ajaran Islam secara tepat, kritis, dan relevan dengan dinamika kehidupan modern. Dengan demikian, literasi keagamaan menjadi fondasi dalam membangun sikap beragama yang seimbang (wasathiyah).

Secara konseptual, literasi keagamaan dalam pendidikan Islam mencakup pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pemikiran ulama. Peserta didik tidak hanya diajarkan untuk membaca teks, tetapi juga

memahami makna, konteks historis, dan relevansi ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini penting untuk menghindari pemahaman yang tekstual dan sempit, yang berpotensi melahirkan sikap eksklusif.

Selain itu, literasi keagamaan dalam pendidikan Islam juga menekankan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Peserta didik perlu dilatih untuk menganalisis berbagai pandangan keagamaan, memahami perbedaan interpretasi, serta mengambil sikap yang bijak. Kemampuan ini sangat penting di era digital, di mana informasi keagamaan sangat mudah diakses dari berbagai sumber. Penelitian menunjukkan bahwa penguatan literasi keagamaan dalam pendidikan Islam dapat mengurangi kecenderungan radikalisme dan meningkatkan sikap toleransi (Widiarni et al., 2024).

Dalam praktiknya, literasi keagamaan dalam pendidikan Islam juga mencakup internalisasi nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan ('adl), toleransi (tasamuh), keseimbangan (tawazun), dan kasih sayang (rahmah). Nilai-nilai ini tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari di sekolah. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami ajaran Islam, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam interaksi sosial.

Pendidikan Islam juga berperan dalam mengembangkan sikap inklusif dan dialogis melalui literasi keagamaan. Peserta didik diajak untuk memahami bahwa perbedaan merupakan bagian dari sunnatullah yang harus dihargai. Pendekatan dialogis dalam pembelajaran, seperti diskusi dan studi kasus, dapat membantu peserta didik memahami berbagai perspektif dan menghindari sikap klaim kebenaran tunggal.

Di era globalisasi dan digitalisasi, literasi keagamaan dalam pendidikan Islam perlu diperkuat dengan literasi digital keagamaan. Peserta didik harus mampu memilah informasi, mengenali sumber yang kredibel, serta menghindari konten yang mengandung ujaran kebencian atau paham ekstrem. Menurut Rochim et al. (2024), rendahnya literasi digital menjadi

salah satu faktor yang mempermudah penyebaran ideologi radikal di kalangan pelajar.

Selain itu, literasi keagamaan dalam pendidikan Islam juga berkaitan dengan kemampuan kontekstualisasi ajaran agama. Peserta didik perlu memahami bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam berbagai situasi sosial yang berbeda tanpa kehilangan esensi nilai-nilainya. Pendekatan ini akan membantu mereka menghadapi tantangan modern dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keislaman yang moderat.

Peran guru dalam mengembangkan literasi keagamaan sangatlah penting. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator dan pembimbing yang membantu peserta didik memahami ajaran agama secara mendalam dan kontekstual. Keteladanan guru dalam bersikap moderat juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan ini.

Selain itu, penguatan literasi keagamaan juga memerlukan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan di sekolah perlu diperkuat di lingkungan keluarga dan sosial agar internalisasi berjalan secara konsisten. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pembentukan sikap keagamaan yang moderat.

Literasi keagamaan dalam pendidikan Islam merupakan upaya untuk membekali peserta didik dengan pemahaman yang komprehensif, kritis, dan kontekstual terhadap ajaran Islam. Literasi ini menjadi kunci dalam membentuk generasi yang tidak hanya religius, tetapi juga toleran, inklusif, dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang beragama.

C. Literasi Digital dan Pemahaman Keagamaan

Literasi digital telah menjadi kompetensi penting dalam era modern, terutama dalam kaitannya dengan pembentukan pemahaman keagamaan. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan individu mengakses berbagai sumber pengetahuan agama secara cepat dan luas. Namun, kemudahan ini juga menghadirkan tantangan serius, karena tidak semua

informasi yang tersedia memiliki validitas dan otoritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, literasi digital menjadi kunci dalam memastikan bahwa pemahaman keagamaan yang terbentuk bersifat moderat, kritis, dan kontekstual.

Secara konseptual, literasi digital dalam konteks keagamaan dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi keagamaan secara bijak melalui media digital. Literasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis penggunaan teknologi, tetapi juga aspek kognitif dan etis dalam menyikapi informasi. Individu yang memiliki literasi digital yang baik mampu membedakan antara informasi yang valid dan yang menyesatkan, serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang bersifat provokatif.

Salah satu dampak utama literasi digital terhadap pemahaman keagamaan adalah kemampuan dalam memilah sumber informasi yang kredibel. Di era media sosial, siapa pun dapat memproduksi konten keagamaan tanpa memiliki otoritas keilmuan yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan distorsi pemahaman agama. Oleh karena itu, peserta didik perlu dibekali kemampuan untuk mengenali sumber yang terpercaya, seperti lembaga resmi atau ulama yang memiliki kompetensi. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital berkontribusi terhadap meningkatnya penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda (Rochim et al., 2024).

Selain itu, literasi digital juga berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap konten keagamaan. Individu tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga menganalisis isi, konteks, dan tujuan dari informasi tersebut. Kemampuan ini penting untuk menghindari pemahaman yang tekstual dan sempit, serta untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak benar.

Fenomena echo chamber atau ruang gema menjadi salah satu tantangan dalam literasi digital. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi

pengguna, sehingga individu hanya terpapar pada satu sudut pandang tertentu. Kondisi ini dapat memperkuat sikap eksklusif dan menghambat keterbukaan terhadap perbedaan. Dalam konteks keagamaan, hal ini berpotensi memperkuat polarisasi dan melemahkan moderasi.

Namun demikian, literasi digital juga memberikan peluang besar dalam memperluas pemahaman keagamaan. Individu dapat mengakses berbagai perspektif keagamaan dari berbagai belahan dunia, sehingga memperkaya wawasan dan mendorong sikap yang lebih inklusif. Konten edukatif yang disajikan secara menarik melalui media digital dapat menjadi sarana efektif dalam pembelajaran agama.

Dalam konteks pendidikan, literasi digital perlu diintegrasikan dengan pendidikan keagamaan yang berbasis nilai moderasi. Peserta didik tidak hanya diajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana memanfaatkannya untuk memperkuat nilai-nilai toleransi, keadilan, dan perdamaian. Menurut Widiarni et al. (2024), integrasi literasi digital dalam pendidikan agama dapat meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan serta mengurangi potensi radikalisme.

Selain itu, literasi digital juga mencakup etika bermedia dalam konteks keagamaan. Individu perlu memahami bahwa setiap tindakan di dunia digital memiliki dampak sosial. Oleh karena itu, penting untuk menghindari penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan konten yang dapat memicu konflik. Etika digital menjadi bagian penting dalam menjaga harmoni sosial di ruang maya.

Peran guru dan orang tua sangat penting dalam membimbing peserta didik dalam penggunaan media digital. Guru dapat mengintegrasikan literasi digital dalam pembelajaran, sementara orang tua dapat memberikan pengawasan dan pendampingan di rumah. Kolaborasi ini akan membantu peserta didik mengembangkan kemampuan literasi digital secara optimal.

Selain itu, diperlukan pengembangan kontra-narasi digital sebagai upaya untuk melawan penyebaran paham ekstrem. Peserta didik dapat didorong untuk memproduksi konten positif yang mempromosikan nilai moderasi beragama. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten yang bermanfaat.

Literasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman keagamaan di era modern. Literasi ini memungkinkan individu untuk mengakses informasi secara luas, tetapi juga menuntut kemampuan untuk memilah dan mengelola informasi secara bijak. Oleh karena itu, penguatan literasi digital menjadi langkah strategis dalam membangun pemahaman keagamaan yang moderat, kritis, dan inklusif.

D. Pencegahan Misinterpretasi Ajaran Agama

Misinterpretasi ajaran agama merupakan salah satu faktor utama yang dapat memicu munculnya sikap intoleran, eksklusif, bahkan radikal dalam kehidupan beragama. Kesalahan dalam memahami teks dan konteks ajaran agama sering kali terjadi akibat keterbatasan pengetahuan, pendekatan yang terlalu tekstual, serta kurangnya kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, pencegahan misinterpretasi menjadi langkah penting dalam membangun pemahaman keagamaan yang moderat, komprehensif, dan kontekstual.

Secara konseptual, misinterpretasi ajaran agama terjadi ketika individu memahami teks keagamaan secara parsial tanpa mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan metodologisnya. Ajaran agama yang seharusnya membawa pesan kedamaian dan keadilan dapat disalahartikan menjadi legitimasi untuk tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan yang sempit dan tidak komprehensif berkontribusi terhadap munculnya ekstremisme di kalangan generasi muda (Widiarni et al., 2024).

Salah satu langkah utama dalam pencegahan misinterpretasi adalah penguatan literasi keagamaan yang komprehensif. Peserta didik perlu dibekali kemampuan untuk memahami

sumber ajaran agama secara mendalam, termasuk metode penafsiran (tafsir) yang benar. Pemahaman ini mencakup aspek bahasa, konteks turunnya ayat (asbab al-nuzul), serta relevansi dengan kondisi kekinian. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami teks secara literal, tetapi juga mampu menangkap makna substansialnya.

Selain itu, penting untuk mengembangkan pendekatan kontekstual dalam memahami ajaran agama. Ajaran agama tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial di mana ia dipraktikkan. Oleh karena itu, individu perlu memahami bahwa interpretasi ajaran agama dapat berbeda sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Pendekatan ini akan membantu menghindari pemahaman yang kaku dan tidak relevan dengan kondisi masyarakat modern.

Pencegahan misinterpretasi juga memerlukan penguatan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Individu harus mampu menganalisis berbagai informasi keagamaan, mempertanyakan sumbernya, serta mengevaluasi kebenarannya. Kemampuan ini sangat penting di era digital, di mana informasi keagamaan dapat diakses dengan mudah dari berbagai sumber yang belum tentu kredibel. Menurut Rochim et al. (2024), rendahnya kemampuan literasi kritis menjadi salah satu faktor yang mempermudah penyebaran pemahaman keagamaan yang menyimpang.

Peran guru dan pendidik sangat penting dalam proses ini, yaitu sebagai fasilitator yang membimbing pemahaman keagamaan yang benar. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membantu peserta didik memahami perbedaan interpretasi serta mengembangkan sikap terbuka terhadap berbagai pandangan. Pendekatan dialogis dalam pembelajaran dapat menjadi sarana efektif untuk menghindari pemahaman yang sempit.

Selain itu, keteladanan tokoh agama dan pemuka masyarakat juga berperan dalam mencegah misinterpretasi. Tokoh yang memiliki pemahaman yang moderat dan inklusif dapat memberikan contoh nyata dalam memahami dan mengamalkan

ajaran agama secara bijak. Mereka juga dapat berperan dalam meluruskan pemahaman yang keliru di masyarakat.

Di era digital, pencegahan misinterpretasi juga harus dilakukan melalui penguatan literasi digital keagamaan. Individu perlu dibekali kemampuan untuk memilah informasi, mengenali sumber yang kredibel, serta menghindari konten yang mengandung ujaran kebencian atau paham ekstrem. Selain itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan kontra-narasi digital yang menyebarkan pemahaman keagamaan yang moderat dan damai.

Pencegahan misinterpretasi juga dapat dilakukan melalui dialog antaragama dan antarmazhab. Dialog ini memberikan ruang bagi individu untuk memahami perbedaan secara konstruktif serta mengurangi prasangka. Melalui dialog, individu dapat menyadari bahwa perbedaan interpretasi merupakan hal yang wajar dalam tradisi keagamaan.

Lebih lanjut, kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah misinterpretasi. Nilai-nilai yang diajarkan di sekolah perlu diperkuat di lingkungan keluarga dan sosial agar internalisasi berjalan secara konsisten. Sinergi ini akan menciptakan lingkungan yang mendukung pemahaman keagamaan yang benar.

E. Penguatan Nalar Kritis dalam Pendidikan Agama

Penguatan nalar kritis dalam Pendidikan Agama merupakan salah satu kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika sosial-keagamaan di era modern yang ditandai oleh arus informasi yang sangat cepat dan tidak selalu terverifikasi. Dalam konteks ini, pendidikan agama tidak lagi cukup hanya berfokus pada transfer pengetahuan keagamaan secara tekstual, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi ajaran agama secara reflektif dan kontekstual. Nalar kritis memungkinkan peserta didik tidak sekadar menerima doktrin secara pasif, tetapi juga mampu menghubungkan antara teks keagamaan dengan realitas

kehidupan secara lebih rasional dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan pandangan Abou El Fadl (2001) yang menegaskan bahwa interpretasi keagamaan harus melibatkan etika pemahaman yang terbuka, dialogis, dan mempertimbangkan konteks sosial agar tidak terjebak pada pemaknaan yang sempit dan eksklusif.

Dalam perspektif pendidikan Islam, penggunaan akal ('aql) memiliki posisi penting sebagai instrumen untuk memahami wahyu secara lebih mendalam tanpa menafikan otoritas teks. Nalar kritis dalam hal ini bukan berarti menolak teks keagamaan, tetapi justru memperkuat kemampuan untuk memahami maksud dan tujuan syariat secara lebih komprehensif. Pendidikan agama yang mengabaikan aspek kritis berpotensi melahirkan pemahaman yang literalistik dan kaku, yang pada gilirannya dapat membuka ruang bagi munculnya sikap intoleran dan eksklusif. Zamroni (2017) menegaskan bahwa rendahnya literasi kritis dalam memahami informasi keagamaan, terutama di ruang digital, dapat meningkatkan kerentanan peserta didik terhadap misinformasi dan ideologi keagamaan yang ekstrem.

Lebih lanjut, penguatan nalar kritis dalam pendidikan agama juga sangat relevan dengan perkembangan teknologi digital yang memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus konsumen informasi keagamaan. Kondisi ini menuntut peserta didik untuk memiliki kemampuan literasi digital yang kuat agar mampu memilah informasi yang valid, otoritatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama yang moderat. Tanpa kemampuan ini, ruang digital dapat menjadi medium penyebaran pemahaman agama yang bias dan tidak bertanggung jawab.

Paulo Freire (2005) dalam konsep pendidikan kritisnya menekankan bahwa proses pendidikan seharusnya bersifat dialogis, di mana peserta didik tidak diposisikan sebagai objek, melainkan subjek aktif yang mampu berpikir, bertanya, dan merefleksikan realitas secara kritis. Dalam konteks pendidikan agama, pendekatan ini sangat penting untuk membangun kesadaran intelektual peserta didik agar tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga mampu mengolahnya secara mandiri dan kontekstual. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi ruang dialog antara teks, guru, dan realitas sosial.

Pada akhirnya, penguatan nalar kritis dalam Pendidikan Agama berkontribusi besar dalam membentuk generasi yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga memiliki kedewasaan intelektual dan spiritual. Pendidikan agama yang berbasis nalar kritis akan melahirkan individu yang moderat, inklusif, dan mampu merespons perbedaan secara bijaksana. Al-Attas (1993) menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia beradab (insan adabi), yaitu individu yang memahami hakikat ilmu dan mampu menempatkan segala sesuatu secara proporsional dalam kerangka nilai-nilai ilahiah. Dengan demikian, integrasi antara iman, ilmu, dan nalar kritis menjadi fondasi penting dalam membangun pendidikan agama yang relevan dengan tantangan zaman modern.

F. Strategi Pengembangan Literasi Keagamaan

Strategi pengembangan literasi keagamaan merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan individu dalam memahami, menafsirkan, mengevaluasi, dan mengaplikasikan ajaran agama secara tepat, kontekstual, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan modern, literasi keagamaan tidak lagi dipahami sebatas kemampuan membaca teks-teks keagamaan, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis terhadap informasi keagamaan yang tersebar di berbagai media, khususnya ruang digital yang sangat dinamis. Menurut Abou El Fadl (2001), pemahaman keagamaan yang sehat harus melibatkan proses interpretasi yang etis dan bertanggung jawab, sehingga literasi keagamaan menjadi instrumen penting untuk menghindari pemaknaan tekstual yang sempit dan eksklusif.

Dalam praktiknya, pengembangan literasi keagamaan dapat dilakukan melalui integrasi pembelajaran berbasis literasi di lembaga pendidikan, di mana peserta didik tidak hanya diberikan materi ajar berbasis hafalan, tetapi juga dilatih untuk membaca, memahami, dan mengkritisi sumber-sumber keagamaan secara mendalam. Pendekatan ini menuntut adanya perubahan paradigma dari pembelajaran yang bersifat teacher-centered menuju student-centered learning yang mendorong peserta didik aktif dalam proses pencarian makna. Freire (2005) menegaskan bahwa pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis

(conscientization), di mana peserta didik mampu membaca realitas sosial secara reflektif dan tidak menerima informasi secara pasif.

Selain itu, strategi pengembangan literasi keagamaan juga sangat erat kaitannya dengan penguatan literasi digital, mengingat sebagian besar informasi keagamaan saat ini diakses melalui internet dan media sosial. Dalam hal ini, peserta didik perlu dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi sumber yang kredibel, membedakan antara informasi yang valid dan hoaks, serta memahami konteks di balik setiap narasi keagamaan yang beredar. Zamroni (2017) menekankan bahwa literasi kritis dalam era digital menjadi kunci untuk mencegah penyebaran paham keagamaan yang ekstrem dan tidak berbasis pada pemahaman yang utuh.

Lebih jauh, pengembangan literasi keagamaan juga dapat diperkuat melalui pendekatan kolaboratif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sinergi ini penting karena pembentukan pemahaman keagamaan tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Dengan adanya kolaborasi tersebut, nilai-nilai keagamaan dapat dipahami secara lebih holistik dan tidak terfragmentasi oleh satu sumber informasi saja. Hal ini sejalan dengan pandangan Al-Attas (1993) yang menekankan pentingnya integrasi antara ilmu, adab, dan nilai spiritual dalam proses pendidikan Islam.

Pada akhirnya, strategi pengembangan literasi keagamaan bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan agama, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata secara bijaksana, moderat, dan inklusif. Dengan literasi keagamaan yang kuat, peserta didik diharapkan mampu menghadapi tantangan era digital dengan sikap kritis, selektif, dan bertanggung jawab, sehingga agama benar-benar menjadi sumber etika dan pencerahan dalam kehidupan sosial.

G. Masa Depan Moderasi Beragama dalam Pendidikan

Masa depan moderasi beragama dalam pendidikan menjadi salah satu isu strategis yang semakin penting di tengah dinamika sosial, politik, dan perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. Moderasi beragama dalam konteks

pendidikan tidak hanya dipahami sebagai sikap tengah antara ekstrem kanan dan kiri dalam beragama, tetapi juga sebagai pendekatan pedagogis yang menekankan pada keseimbangan, toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap keragaman. Dalam perspektif ini, pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk cara pandang peserta didik agar tidak terjebak pada pemahaman keagamaan yang kaku, eksklusif, dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) yang menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan upaya untuk menghadirkan pemahaman dan praktik beragama yang seimbang, adil, serta menghargai keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ke depan, pendidikan akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama terkait dengan arus informasi digital yang tidak terfilter dengan baik. Media sosial dan platform digital telah menjadi ruang utama dalam penyebaran informasi keagamaan, yang di satu sisi membuka akses pengetahuan yang luas, tetapi di sisi lain juga berpotensi menyebarkan paham-paham ekstrem dan intoleran. Dalam konteks ini, moderasi beragama dalam pendidikan harus diarahkan pada penguatan literasi digital keagamaan, yaitu kemampuan peserta didik untuk memilah, memahami konteks, serta mengkritisi informasi keagamaan secara rasional dan bertanggung jawab. Zamroni (2017) menegaskan bahwa tanpa kemampuan literasi kritis yang memadai, peserta didik akan rentan terhadap manipulasi informasi yang dapat mengarah pada radikalisme berbasis digital.

Selain itu, masa depan moderasi beragama dalam pendidikan juga sangat ditentukan oleh kemampuan institusi pendidikan dalam mengintegrasikan nilai-nilai moderasi ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang dialogis, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan menjadi sangat penting untuk membentuk kesadaran peserta didik yang terbuka terhadap perbedaan. Freire (2005) menekankan bahwa pendidikan yang humanis adalah pendidikan yang mendorong dialog kritis dan kesadaran reflektif, sehingga peserta didik tidak hanya menjadi penerima

informasi, tetapi juga subjek aktif dalam membangun pemahaman sosial dan keagamaan.

Lebih jauh, peran guru sebagai agen moderasi beragama juga menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan internalisasi nilai-nilai moderasi dalam pendidikan. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan dalam menunjukkan sikap toleran, inklusif, dan adil dalam menyikapi perbedaan pandangan keagamaan. Dalam konteks ini, penguatan kompetensi guru dalam memahami konsep moderasi beragama menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan agar proses pendidikan berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, masa depan moderasi beragama dalam pendidikan sangat bergantung pada sinergi antara kurikulum, pendidik, peserta didik, serta lingkungan sosial yang mendukung. Jika nilai-nilai moderasi berhasil diinternalisasikan secara konsisten, maka pendidikan akan melahirkan generasi yang tidak hanya religius secara ritual, tetapi juga matang secara sosial, terbuka terhadap perbedaan, dan mampu berkontribusi dalam menjaga harmoni kehidupan berbangsa. Al-Attas (1993) menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia beradab yang mampu menempatkan segala sesuatu secara proporsional dalam kerangka nilai-nilai ilahiah, sehingga moderasi beragama menjadi bagian integral dari pembentukan karakter tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2009). Islam transformatif. Pustaka Firdaus.
- Abusama, Q., Asiah, S., & Yasin, Z. (2025). Actuating Pendidikan Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits. *Journal of Islamic Education Management Research*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.58194/jiemr.v1i1.242>
- Ahdan Hawari, F., Istiqomah, I., & Abu Bakar, Y. (2024). Tujuan Pendidikan dalam Perspektif Islam. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research*, 1(3c), 1108–1124. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i3c.1818>
- Akbar, A., Sukino, S., & Muttaqin, I. (2025). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4). <https://doi.org/org/10.57171/jt.v4i2.514>
- Al-Attas, S. M. N. (1979). Aims and objectives of Islamic education. Hodder and Stoughton.
- Al-Ghazali, A. H. M. (2005). *Ihya' 'Ulum Al-Din* (Jilid I). Dar Al-Ma'arif.
- Al-Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh al-Wasathiyah al-Islamiyyah wa al-Tajdid: Ma'alim wa Manarat*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (2020). *Al-khashaish al-ammah lil-Islam*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradhawi, Y. (2007). *Kalimat fi Al-Wasathiyah al-Islamiyyah wa Ma'alimiha*. Dar Al-Shuruq
- Al-Qaradhawi, Y. (2013). *Al-Shahwah Al-Islamiyyah bain Al-Juhud wal-Tatharruf* (Cet. ke-12). Dar Al-Shuruq.
- Al-Qurthubi, M. A. (2006). *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (Jilid IV). Muassasah Al-Risalah.
- Al-Tabari, M. I. J. (2001). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran* (Cet. ke-1). Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Thabari, M. J. (2001). *Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an* (Jilid II). Muassasah Al-Risalah.
- Angin, R., & Juariyah, J. (2024). Pengembangan Program Pimpinan Aisyiyah Ranting Karimata, Kecamatan Summersari Kabupaten Jember dalam Pelayanan Warga Lansia. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 45–52. <https://doi.org/10.57218/jompaabdi.v3i1.1042>

- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Arief, A. (2002). *Pengantar ilmu dan metodologi pendidikan Islam*. Ciputat Press.
- Arifudin, O., Ibrahim, T., & Pendidikan Islam, M. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Tahsinia*, 5(6), 966–977. <https://doi.org/org/10.57171/jt.v5i6.604>
- Arikarani, Y., Azman, Z., Ansyah, F. P., Aisyah, S., & Kirti, T. D. Z. (2016). Konsep Pendidikan Islam dalam Penguatan Moderasi Beragama. *Jurnal: Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/ej.v7i1.840>
- Aslan, A. (1999). *Religious Pluralism in Christian and Islamic Philosophy: The Thought of John Hick and Seyyed Hossein Nasr*. Routledge.
- As-Shidqi, M. H., Nugraha, M. S., & Arifudin, O. (2025). Menggali Potensi Transformasi Islam dan Perencanaan Pendidikan. *UMADIL: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/org/10.24042/a8x4w281>
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Kencana Prenada Media.
- Azra, A. (2016). Islam Indonesia: Kontribusi pada Peradaban Global. *Prisma* 29, no. 04 (2010): 83–92
- Azra, A. (2017). *Islam Indonesia: Kontribusi pada peradaban global*. Kencana.
- Azra, A. (2020). *Moderasi Islam di Indonesia: Dari Ajaran, Ibadah, hingga Perilaku*. Jakarta: Kencana.
- Azra, A. (2020). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Kencana Prenada Media Group.
- Azzahra, S., Marlina, E., & Dewi, R. S. (2024). Strategi Efektif Menanamkan Nilai Kejujuran pada Generasi Muda melalui Pendidikan Karakter. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 5(3), 326–330. <https://doi.org/org/10.54371/ainj.v5i3.555>
- Azzet, A. M. (2011). *Urgensi pendidikan karakter di Indonesia*. Ar-Ruzz Media.
- Bakar, R. M., Syam, R., Nur Haq, M., & Auliannisa, S. H. (2024). Psikoedukasi Pemahaman dan Pencegahan Bullying bagi Siswa SMA 1 Muhammadiyah UNISMUH Makassar. *Jurnal*

- Abdi Masyarakat Indonesia, 4(2), 325–334.
<https://doi.org/10.54082/jamsi.1103>
- Banks, J. A. (2010). *Multicultural education: Issues and perspectives* (7th ed.). John Wiley & Sons.
- Banks, J. A., & McGee Banks, C. A. (2010). *Multicultural education: Transformative knowledge and action*. Teachers College Press.
- Barokah, N., Annisa, K. N., Saputri, T. L., & Mukmin, M. (2025). Peran Strategis Metode Khusus Pembelajaran PAI dalam Mengoptimalkan Pemahaman Ajaran Agama Pada Siswa. *Journal of Instructional and Development Researches*, 5(1), 141–149. <https://doi.org/10.53621/jider.v5i1.465>
- Barton, G. (2002). *Abdurrahman Wahid: Muslim democrat, Indonesian president*. University of New South Wales Press.
- Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2005). *What works in character education: A research-driven guide for educators*. Character Education Partnership.
- Bintari, A., & Musyarapah, M. (2023). Manajemen Konflik dalam Pendidikan Islam Multikultural. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 7(4), 1718. <https://doi.org/10.35931/am.v7i4.2700>
- Biyanto. (2023). *Islam Wasathiyah dalam perdebatan ulama dan cendekiawan Muslim*. Pena Salsabila
- Bruinessen, M. van. (2014). *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*. Bandung: Mizan.
- Bruner, J. (2019). *The process of education* (revised ed.). Harvard University Press.
- Bukhari, M. I. (2002). *Shahih Al-Bukhari (Jilid I)*. Dar Ibn Katsir.
- Busa, E. N. (2023). Pengembangan Karakter Pada Peserta Didik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Educational: Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pengajaran*, 1(2), 92–98. <https://doi.org/org/10.51878/educational.v1i2.204>
- Damon, W. (2002). *Bringing in a new era in character education*. Hoover Institution Press.
- Daradjat, Z. (2004). *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. ke-5). Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. (2007). *Kebijakan departemen agama dalam pengembangan pendidikan Islam*. Departemen Agama RI.

- Devisiana, D., Meisyani, L., Magay, D., & Riniwati, R. (2024). Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. *Proceeding National Conference of Christian Education and Theology*, 2(2), 103–112. <https://doi.org/10.46445/nccet.v2i2.962>
- Dewi, F. H. M. P., La'i, H. N., Zahra, I. Y., Darojah, Z., & Mardiyah. (2025). Perencanaan Strategis dan Tata Kelola Lembaga Pendidikan Yang Terukur. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1013–1024. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1230>
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia*. LP3ES.
- Diniah, S., Al-Falaq, S. A., Sabilah, V. I., & Maulana, R. (2024). Pengaruh Pendidikan Karakter dan Multikultural dalam Membangun Sikap Toleransi dan Perdamaian Pada Peserta Didik. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 10(September), 1–23. <https://doi.org/org/10.36989/didaktik.v10i3.4112>
- Dwi, Khusnul, & Danik. (2022). Pemikiran Abraham Maslow Tentang Motivasi dalam Belajar. *Tajdid Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 6(1), 37–48. <https://doi.org/org/10.52266/tajdid.v6i1.767>
- Fadjar, A. M. (2019). *Reformasi pendidikan Islam*. Fajar Dunia.
- Fazlur Rahman. (2010). *Islamic Methodology in History* (Reprint). Islamic Research Institute.
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the oppressed* (30th anniversary ed.). Continuum. (Original work published 1970).
- Freire, P. (2018). *Pedagogy of the oppressed* (50th anniversary ed.). Bloomsbury Academic.
- Grant, C. A., & Sleeter, C. E. (2011). *Doing multicultural education for achievement and equity* (2nd ed.). Routledge.
- Hakeu, F., Pakaya, I. I., & Tangkudung, M. (2023). Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Gamifikasi dalam Proses Pembelajaran di MIS Terpadu Al-Azhfar. *Awwaliyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 6(2), 154–166. <https://doi.org/10.58518/awwaliyah.v6i2.1930>
- Hamdani, A. D., Dewi, D. A., & Hayat, R. S. (2023). Minimnya Literasi Budaya dan Kewargaan Dapat Mereduksi Nilai Karakter Kebangsaan. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial*, 231

- Bahasa dan Pendidikan, 4(1), 140–147.
<https://doi.org/10.55606/cendikia.v4i1.2348>
- Hamidullah, M. (2005). *Nabi Islam: Pengaruh dan Risalahnya bagi Peradaban Manusia* (Terj. R. Wahyudi). Pustaka Pelajar.
- Hanafi, H. (2015). *Studi Filsafat 1: Pembacaan Atas Tradisi Islam Kontemporer* (Terjemahan Miftah Faqih). Yogyakarta: LKiS.
- Hanum, L. (2017). *Perencanaan Pembelajaran*. In *Perencanaan Pembelajaran*.
<https://doi.org/10.52574/syiahkualauniversitypress.270>
- Hapsari, T. A. R. (2025). *Membangun Budaya Belajar Menyenangkan di Madrasah melalui Kurikulum Cinta dan Strategi Pembelajaran Mendalam*. *Progressive of Cognitive and Ability*, 4(2), 86–92.
<https://doi.org/10.56855/jpr.v4i2.1441>
- Hartati, L., Nurhayati, N., & Hidayat, N. (2024). *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Keunggulan Bersaing pada lembaga Pendidikan*. *Journal of Education Research*, 5(2), 1980–1987.
<https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.1080>
- Hasan, S. H. (2021). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis moderasi*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 115–138.
- Hasibuan, C., & Nalibaho, D. (2020). *Peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran*. *Jurnal Pendidikan*, 5(1), 10–20.
<https://doi.org/org/10.61722/jssr.v3i1.3525>
- Hasibuan, P. M., & Hadijaya, Y. (2024). *Implementasi Budaya Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Guru*. *Journal of Education Research*, 5(3), 2802–2809.
<https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1284>
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Hidayat, D. F. (2022). *Desain Metode Ceramah Dalam Pembelajaran*. *Jurnal Inovatif*, 8(2), 356–371.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55148/inovatif.v8i2.300>
- Hidayat, K. (2012). *Agama Punya Seribu Nyawa*. Noura Books.
- Hidayat, K., & Nafis, M. W. (2003). *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ibnu Hajar Al-'Asqalani. (2003). *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari* (Jilid I). Dar Al-Ma'arif.

- Ibnu Katsir, I. U. (2000). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (Jilid I). Dar Al-Tayyibah.
- Ibnu Khaldun. (2000). *Muqaddimah* (F. Rosenthal, Trans.). Princeton University Press. (Original work published 1377).
- Ibnu Taimiyyah, A. H. (2004). *Majmu' Al-Fatawa* (Jilid XX). Maktabah Al-'Ubaikan.
- Imarah, M. (2011). *Al-Islam wa Al-Ta'addudiyah: Al-Ikhtilaf wal-Tanawwu' fi Itar Al-Wahidah*. Dar Al-Shuruq.
- Indriyati, Prasetya, O., Mafrudoh, L., Adenan, & Suhendra, A. (2024). Stop bullying sebagai upaya pencegahan perilaku perundungan di lingkungan sekolah. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 119–125. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21509>
- Isma, A., Fadhilatunisa, D., Juharman, M., Azzahra, A. S. P., & Faruq, A. F. Al. (2024). Pengaruh Media E-Learning Berbasis Gamification Terhadap Minat Belajar Mahasiswa. *Jurnal MediaTIK*, 6(2), 1–7. <https://doi.org/10.59562/mediatik.v6i2.1389>
- Izutsu, T. (2002). *God and Man in the Quran: Semantics of the Quranic Weltanschauung*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Jalal, F., Surakhmad, W., & Jalal, F. (2002). Paradigma Baru Pendidikan Islam. *Jurnal Penelitian*, 11(1), 141–174.
- Juanda, I. (2021). Peranan Orang Tua Dalam Membiasakan Pengamalan Ibadah Shalat Anak. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1(1), 105–126. <https://doi.org/10.58561/jkpi.v1i1.9>
- Jubaedah, D., Dermawan, M. J., & Burhanuddin, B. M. (2025). Etika Bisnis Presektif Islam Umum dan Khusus. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 9(1), 25–43. <https://doi.org/org/10.51476/syarie.v5i2.379>
- Judrah, M., Arjum, A., & Islam Ahmad Dahlan, U. (2024). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Karakter Peserta Didik Upaya Penguatan Moral. *Journal of Instructional and Development Researches*, 4(1), 25–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.53621/jider.v4i1.282>
- Kahfi, A., Binamadani, S., Guru, P., & Ibtidaiyah, M. (202M). Implementasi Profil Pelajar Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Karakter Siswa Di Sekolah. *Dirasah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar*, 5(2), 138–151. <https://doi.org/org/10.51476/dirasah.v5i2.402>

- Kemendikbud. (2017). Panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan untuk sekolah menengah atas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Moderasi Beragama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Moderasi beragama. Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI. (2019). Moderasi beragama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. (2022). Panduan implementasi Kurikulum Merdeka. Kemendikbudristek.
- Khaira, A. A., Aisyah, G., Dewi, H. N. K., Aulia, R. A., & Laksana, A. (2024). Pengaruh Media Digital dalam Penggunaan Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Interpersonal pada Remaja. *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 02(04), 357–366. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i4.1376>
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh* (Terjemahan M. Zuhri & A. Qarib). Semarang: Dina Utama.
- Khumayroh, S., Mujahidin, E., Andriana, N., & Kamal, M. R. (2025). Perencanaan Sarana Prasarana Lembaga Pendidikan di SDIT Putra Pakuan Bogor. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 1122. <https://doi.org/10.30868/im.v8i02.8661>
- Lestari, U. F., Wati, M., Afandi, M., Subhan, M., & Sahbana, M. D. R. (2024). Strategi Pembelajaran Diferensiasi dalam Pendidikan Agama Islam: Perspektif Psikologis. *Journal of Education Research*, 5(4), 5272–5280. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1806>
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Lubis, M. (2020). Pendidikan agama Islam berbasis multikultural. Kencana Prenada Media Group.
- Ma'ad, F. A., & Mardhiyah. (2024). Strategi Penyusunan dan Pengisian Rencana Kerja, Anggaran, dan Evaluasi Diri dalam Rencana Strategis Satuan Pendidikan Islam. *Jurnal*

- Pendidikan Integratif, 5(3), 115–122.
<https://doi.org/org/10.21154/inej.v4i2.7248>
- Majelis Ulama Indonesia. (2019). Keputusan ijtima ulama komisi fatwa MUI tentang moderasi beragama. Majelis Ulama Indonesia.
- Manao, M. M., Sijabat, O. P., Situmorang, A. R., Hutaaruk, A., & Panjaitan, S. (2021). Mengatur Kualitas Guru Melalui Program Guru Penggerak. *Educational Learning and Innovation*, 1(2), 98–116. <https://doi.org/10.46229/elia.v2i1>
- Marbun, S. K. (2023). Analisis Pemahaman dan Implementasi Nilai-nilai Multikulturalisme dalam Hadis Sebagai Landasan untuk Membangun Harmoni Sosial di Era Globalisasi. *Shihah: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 88–100. <https://doi.org/org/10.51900/shh.v6i2.19400>
- Mardapi, D. (2020). Pengukuran, penilaian, dan evaluasi pendidikan (edisi ke-3). Parama Publishing.
- Maulida, A., Wibowo, H., & Rusyidi, B. (2023). Rancang Bangun Model Pengembangan Kegiatan Pendampingan Sosial Pada Remaja Generasi Z Dalam Mengatasi Krisis Identitas. *Share: Social Work Journal*, 13(01), 92–101. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46633>
- Misbah, S. (2022). Penerapan Metode Umpan Balik (Feed Back Partner) untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Materi Struktur dan Kebahasaan Teks Anekdote Kelas X IPS-2 SMAN 4 Kota Bima Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 2(2), 63–74. <https://doi.org/10.53299/jppi.v2i2.219>
- Mubarak, B., & Anhar, A. (2024). Upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Guru SMP IT Nurul Khalifah Bima Berbasis Kompetensi Profesional. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(3), 76–82. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v4i3.532>
- Muchtar, N. E. P., Hermawansyah, Nihayah, D. H., Prawirosastro, C. L., & Hidayati, N. N. (2025). Strategi Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam (N. N. Hidayati (ed.)). Tuban: Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah.
- Muchtar, N. E. P., Inayati, I. N., Mukaromah, N., Rusmayani, & Riani, D. (2025). Media dan Sumber Belajar Pendidikan

- Agama Islam (N. N. Hidayati (ed.)). Tuban: Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah.
- Muchtar, N. E. P., Prawirosastro, C. L., Hidayati, N. N., Puspitasari, I., & Suriadi. (2025). *Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Kontemporer* (M. I. Wiratama (ed.)). Tuban: Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah.
- Muflich, M. F., Muchtar, N. E. P., & Sholikhah, A. F. (2024). Strategi Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembelajaran Nilai Tasamuh Di SMPN 1 Lamongan. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 11, 191. <https://doi.org/10.51311/nuris.v11i2.574>
- Muhaimin. (2004). *Wacana pengembangan pendidikan Islam. PSAPM bekerja sama dengan Pustaka Pelajar.*
- Muhaimin. (2008). *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran.* RajaGrafindo Persada.
- Muhaimin. (2012). *Paradigma pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan pendidikan agama Islam di sekolah.* Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam.* RajaGrafindo Persada.
- Mulyasa, E. (2011). *Manajemen pendidikan karakter.* Bumi Aksara.
- Muqtedar Khan, M. A. (2019). *Islam and Good Governance: A Political Philosophy of Ihsan.* New York: Palgrave Macmillan.
- Muslim, I. H. (2006). *Shahih Muslim (Jilid I).* Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi.
- Muslimin, I. (2023). Konsep dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Fajar Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 31–49. <https://doi.org/org/10.56013/fj.v3i1.2010>
- Nafisah, D., & Sahlan, M. (2023). Spesifikasi Konsep Evaluasi pada Pengembangan Teknik Assesmen Kompetensi Sikap terhadap Pembelajaran PAI di SMP. *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 216–231. <https://doi.org/10.21154/maalim.v4i2.6685>
- Nasaruddin Umar. (2019). *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Nashir, H. (2010). Muhammadiyah gerakan pembaruan. Suara Muhammadiyah.
- Nashir, H. (2019). Moderasi Indonesia dan kemoderatan muhammadiyah. Suara Muhammadiyah.
- Nata, A. (2016). Islam Rahmatan lil'Alamin sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 3(1), 111–132. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3385>
- Nata, A. (2021). Pemikiran pendidikan Islam dan barat. RajaGrafindo Persada.
- Nurhayati, R., Andra Ningsih, D., P, S., Muh. Taufiq Nur, A., Kurnia, S., Hidayah, N., Fitrawati, N., & Khairati, M. (2023). Keterampilan Memberikan Penguatan (Reinforcement) Pada Mata Pelajaran PAI di SMK Negeri 6 Bone. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, 15(2), 145–154. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v15i2.2176>
- Panji, A. L., Afendi, A. R., Ramli, A., Sudadi, S., & Mubarak, A. (2023). Pendidikan Islam Dengan Penanaman Nilai Budaya Islami. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 6(1), 9–21. <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v6i1.2155>
- Pohl, F. (2019). Islamic education and civil society in Indonesia. *Comparative Education Review*, 50(3), 389–409.
- Pratama, L. R. (2022). Manajemen Pendidikan Karakter PAUD. *Jambura Early Childhood Education Journal*, 4(2), 182–194. <https://doi.org/10.37411/jecej.v4i2.1125>
- Putri, F. T., & Suhaeni, H. (2025). Ragam Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Al-Khazin: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 36–47. <https://doi.org/Al-Khazin: Jurnal Pendidikan Agama Islam>
- Rachmad, F. (2023). Kesadaran Manfaat Perencanaan Strategis Bagi Lembaga Pendidikan. *Jaamer: Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi*, 1(2), 2023. <https://doi.org/org/10.5281/zenodo.8385597>
- Rahmi, Pertiwi, G., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Jenis Jenis Penelitian Ilmiah Kependidikan. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 41–52. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.59>
- Ramadani, S., & Sofa, A. R. (2025). Kejujuran dalam Perspektif Pendidikan Islam : Nilai Fundamental , Strategi Implementasi , dan Dampaknya terhadap Pembentukan Karakter Santri di

- Pesantren. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 193–210.
<https://doi.org/org/10.61132/jmpai.v3i1.848>
- Ramadhani, N., & Musyarapah. (2024). Tujuan Pendidikan Islam dalam Membentuk Generasi Berakhlak Mulia. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 3(2), 78–91.
<https://doi.org/10.55080/jpn.v2i2.88>
- Rizkiyana, M. F., Suhardi, I. S. D., & Dewi, R. S. (2024). Peran Guru dalam Mengembangkan Karakter Kerja di Lingkungan Sekolah. *Ainara Journal: Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan*, 5(3), 365–371.
<https://doi.org/10.54371/ainj.v5i3.554>
- Rizqy, M., Zachani, N. S. A., Fajri, S., & Suryandari, M. (2023). Pengaruh Media Teknologi Informasi Modern Terhadap Aktivitas Dakwah di Era Revolusi Industri 4.0. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(1), 22–42.
<https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i1.146>
- Rosela, D., Mulyadi, W., & Kusumawati, Y. (2025). Peran Lingkungan Keluarga Dalam Membentuk Sikap Moderasi Beragama Pada Anak. *Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 8(1), 31–47.
<https://doi.org/org/10.54069/attadrib.v8i1.847>
- Rukhmana, T. (2021). Memahami sumber data peneltitian. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.
<https://doi.org/org/10.47827/jer.v5i3.238>
- Rusmiati, E. T. (2023). Penanaman Nilai-Nilai Toleransi pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 248–256. <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v6i2.3077>
- Said Agil Husain Al-Munawar. (2021). Aktualisasi nilai-nilai Qur'ani dalam sistem pendidikan Islam. Ciputat Press.
- Said Ramadhan Al-Buthi, M. (1993). *Al-Jihad fil-Islam: Kaifa Nafhamuhu? Wa Kaifa Numarisuhu?* Dar Al-Fikr.
- Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2020). *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Cet. ke-2). Lentera Hati.

- Shihab, M. Q. (2020). Wasathiyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama. Lentera Hati.
- Sleeter, C. E. (2011). The academic and social value of ethnic studies: A research review. National Education Association.
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2018). Evaluation theory, models, and applications (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Suhartini, C., Setiawan, I., Darsih, E., & Hanggara, A. (2024). Pelatihan Literasi Digital: Meningkatkan Kemampuan Remaja Dalam Menghadapi Tantangan Digital di TBM Hipapelnis Desa Kalimanggiskulon. Kalandra: Pengabdian Jurnal Kepada Masyarakat, 03(01), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.55266/jurnalkalandra.v3i1.357>
- Sulaeman, R., Tafsir, A., & Insan, H. S. (2022). Program Dakwah Lapangan Untuk Membentuk Karakter Peserta Didik Yang Islami Pada Madrasah Aliyah Karya Bakti Sukasari Kabupaten Bandung. Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan, 8(2), 210–223. <https://doi.org/org/10.37755/sjip.v8i2.747>
- Suprayogo, I. (2004). Pendidikan berparadigma Al-Quran. Aditya Media.
- Suryani, A. (2017). Pendidikan Islam dan deradikalisasi. Jurnal Pendidikan Islam, 6(1), 1–22. <https://doi.org/10.14421/jpi.2017.61.1-22>
- Suyanto, & Jihad, A. (2021). Menjadi guru profesional: Strategi meningkatkan kualifikasi dan kualitas guru di era global. Erlangga.
- Syaltut, M. (2001). Al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah (Cet. ke-18). Dar Al-Shuruq.
- Syifaurrehman, S., Fiqriani, M., Karoma, K., & Idi, A. (2025). Strategi Mengajar yang Efektif dan Peran Guru Sebagai Kunci Pembelajaran Bermakna. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia, 4(1), 244–254. <https://doi.org/10.31004/jpion.v4i1.364>
- Tilaar, H. A. R. (2002). Pendidikan untuk masyarakat Indonesia baru. Gramedia.
- Tilaar, H. A. R. (2004). Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional. Gramedia.

- Tilaar, H. A. R. (2022). Beberapa agenda reformasi pendidikan nasional dalam perspektif abad 21 (edisi ke-4). Indonesia Tera.
- Tilaar, H.A.R. (2004). Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Grasindo.
- Tim Penyusun Tafsir Tematik LPMQ. (2011). Al-Qur'an dan Kebhinnekaan. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.
- Ulin Nuha, N., Tobroni, & Faridi. (2024). Pemahaman Pendidikan Agama Islam dalam Dinamika Sosial Masyarakat. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 10(2), 611–622. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i2.929
- UNESCO. (2020). Curriculum framework for global citizenship education. UNESCO Publishing.
- Vahlevi, D. R. L. (2023). Relevansi Investasi Ala Rosulullah Di Era Modernisasi. *At-Tasharruf “Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah,”* 5(2), 108–115. <https://doi.org/10.32528/at.v5i2.1081>
- Wahid Foundation. (2016). Laporan survei nasional: Potensi radikalisme dan ekstremisme di kalangan Islam Indonesia. Wahid Foundation.
- Wahid, A. (2006). Islam kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan transformasi kebudayaan. The Wahid Institute.
- Wahid, A. (2020). Pergulatan negara, agama, dan kebudayaan. Desantara.
- Wahid, S. (2018). Memadukan Keislaman dan Keindonesiaan, Esai-Esai Kebangsaan. Pustaka Tebuireng.
- Yuniarsih, S. M., Win Martani, R., & Hasanah, N. (2023). Pendampingan Posyandu Remaja di Desa Purworejo Kecamatan Sragi dengan Optimalisasi Peran Kader Kesehatan Remaja. *Borneo Community Health Service Journal*, 3(1), 24–29. <https://doi.org/10.35334/neotype.v3i1.3194>
- Yusuf, M., Marauleng, A., Syam, I., Masita, S., & Marsuanti. (2024). Efektivitas Ragam Metode Dalam Pembelajaran PAI. *Al-Abshor: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 233–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.71242/w9qyak28>

- Zubaedi. (2021). Desain pendidikan karakter: Konsepsi dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan (edisi ke-2). Kencana Prenada Media Group
- Zuhdi, D. (2010). Humanisasi pendidikan: Menemukan kembali pendidikan yang manusiawi. Bumi Aksara.

PROFIL PENULIS

Achmad Munib, S.Pd.,M.S.I



Achmad Munib, S.Pd.I., M.S.I. merupakan akademisi dan praktisi pendidikan Islam yang aktif dalam pengembangan pendidikan, dakwah, serta pembinaan keagamaan di lingkungan masyarakat dan pesantren. Saat ini beliau mengabdikan sebagai dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Wahid Hasyim serta dipercaya sebagai Direktur PPLWH Semarang. Selain aktif di dunia akademik, beliau juga menjadi pengasuh Pondok Pesantren An Najma UNNES dan Ketua Majelis Khidmah Asma'ul Husna Unwahs Semarang.

Perjalanan pendidikan beliau dimulai dari MI Raudhatussibyan Plangan Gunungpati, kemudian melanjutkan ke MTs Al Islam Gunungpati dan MA Nurul Ulum Jekulo Kudus. Pendidikan tinggi ditempuh pada Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Wahid Hasyim hingga memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.). Selanjutnya, beliau menyelesaikan pendidikan Magister Studi Islam (M.S.I.) di UIN Walisongo Semarang.

Dalam perjalanan intelektual dan spiritualnya, Achmad Munib juga menimba ilmu di beberapa pondok pesantren, di antaranya Pondok Bareng Kudus dan Pondok Kaliwungu Kendal. Hingga saat ini beliau masih aktif dalam kegiatan kepesantrenan di Pondok Pesantren An Najma UNNES serta Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim.

Dengan latar belakang akademik dan pengalaman pesantren yang kuat, beliau memiliki perhatian besar terhadap pengembangan Pendidikan Agama Islam, pembinaan karakter, serta penguatan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan masyarakat modern. Di sela aktivitasnya, beliau memiliki hobi mengaji dan belajar sebagai bagian dari komitmen dalam menuntut ilmu sepanjang hayat.

Telepon/WhatsApp: 089678090807

Email: Masmunib.99@gmail.com

Alamat: Terwidi RT 02 RW 04, Kelurahan Plangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

Muhammad Abror Rosyidin, M.Pd.



Muhammad Abror Rosyidin, M.Pd. adalah dosen pada Universitas Hasyim Asy'ari pada prodi Pendidikan Agama Islam yang lahir di Mojokerto. Ia menyelesaikan pendidikan S-1 Prodi Hukum Keluarga dan S-2 Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY) Tebuireng Jombang serta sedang melanjutkan studi S-3 di Universitas Islam Malang (Unisma). Pernah melakukan studi singkat di Universitas Ibn Thofail Maroko pada 2013. Mata kuliah yang ia ampu meliputi Studi Pemikiran Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari, Fikih Ibadah, Fikih Muamalah, Desain dan Perencanaan Pembelajaran PAI, Pancasila, Materi PAI MTs/MA, Kewarganegaraan, Karya Tulis Ilmiah, serta Etika Profesi Keguruan. Kini dipercaya sebagai Ketua Pusat Kajian Pemikiran Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari. (PKPHA) Unhasy Periode 2025-2027. Dalam lima tahun terakhir, ia aktif meneliti pemikiran pendidikan Islam dan kontribusi ulama Nusantara, serta melaksanakan pengabdian masyarakat melalui pendampingan sekolah menulis dan media di lingkungan Tebuireng. Ia juga aktif mempublikasikan berbagai artikel ilmiah pada jurnal nasional terindeks Sinta dan Scopus, serta menjadi salah satu penulis buku "Gus Sholah dalam Cerita dan Kenangan Santri Millenial" (2020) dan kontributor buku *Pesantren Interaction with Digital Media Technology Challenges for Santri Da'wah in The Era of Society 5.0* (2024). Terbaru, pada 2026 menjadi salah satu penulis dari 3 buku, yaitu "Pemikiran Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari, Teoritis dan Praktis" Buku 1 dan 2, serta buku "Pendidikan Agama Islam dalam Dinamila Sosial dan Muktikulturalisme"

Dr. Nicky Estu Putu Muchtar, M.Pd



Dr. Nicky Estu Putu Muchtar, M.Pd merupakan seorang akademisi yang telah mengabdikan diri dalam dunia pendidikan Islam. Beliau menempuh pendidikan S1 dua kali yakni di UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Pendidikan Agama Islam sedangkan satunya di Universitas Muhammadiyah Jember jurusan PIAUD, jenjang S2 beliau di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Manajemen Pendidikan Islam dan melanjutkan S3 di UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang jurusan Pendidikan Agama Islam Berbasis Interdisipliner. Saat ini beliau serta aktif mengajar di Universitas Islam Lamongan, aktif di kegiatan lembaga sosial kemasyarakatan serta pondok pesantren, dan beliau juga aktif menulis beberapa buku terkait pendidikan, khususnya PAI dan beberapa artikel jurnal ilmiah. Dengan latar belakang akademik yang kuat serta pengalaman praktis di dunia pendidikan, Dr. Nicky Estu Putu Muchtar, M.Pd terus berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan Islam yang holistik, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Dr. Kurnia Muhajarah, S.Pd.I., M.S.I

Dewi Hidayatun Nihayah

Dewi Hidayatun Nihayah, lahir di kota Tuban Jawa Timur. Penulis sangat aktif di bidang literasi dan telah mengikuti berbagai perlombaan di bidang tersebut. Penulis juga memiliki ketertarikan yang mendalam dalam bidang bahasa Inggris. Sehingga, ia mengikuti berbagai macam pelatihan dan seminar pada bidang literasi maupun bahasa Inggris baik secara online maupun offline. Ketertarikannya dalam bidang kepenulisan sejak duduk dibangku SMK mengantarkannya melahirkan buku ilmiah dan juga buku fiksi yang telah berkisar 10 buku, penulis juga aktif menulis essay dan artikel. Penulis juga pernah juara 3 lomba cipta puisi di tingkat PKPT IPNU IPPNU Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban tahun 2020, juara 3 lomba essay (IELFest) Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro tahun 2021, juga banyak menjuarai lomba cabor tennis meja juara 1, tahun 2017, juara 3 tennis meja ganda putri PORKAB V Tuban tahun 2018, juara 3 tennis meja ganda putri AKSIOMA se-kabupaten tuban tahun 2017. Saat ini

penulis masuk jurusan Ilmu Hukum di Universitas Sunan Bonang (USB) Tuban dengan Beasiswa Sobat Bumi Pertamina Founation, dan aktif di organisasi intra maupun ekstra kampus.

MODERASI BERAGAMA

dalam Pendidikan Agama Islam

Buku ini disusun sebagai upaya akademik untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya moderasi beragama dalam konteks Pendidikan Agama Islam. Di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, arus informasi digital yang sangat cepat, serta munculnya berbagai pandangan keagamaan yang beragam, pendidikan agama memiliki peran strategis dalam membentuk sikap keberagamaan yang seimbang, toleran, dan inklusif. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi konsep penting yang perlu diinternalisasikan dalam proses pembelajaran agar peserta didik tidak hanya memahami ajaran agama secara tekstual, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara kontekstual dalam kehidupan sosial. Pembahasan dalam buku ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari konsep dasar moderasi beragama, urgensinya dalam pendidikan Islam, penguatan nalar kritis, pengembangan literasi keagamaan, hingga tantangan dan prospek moderasi beragama di masa depan. Seluruh kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi pendidik, mahasiswa, peneliti, dan pemerhati pendidikan Islam dalam memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama secara lebih mendalam.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan keilmuan, serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun pendidikan Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah
Penerbit HN Publishing
Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari,
Kabupaten Tuban, Jawa Timur
hn.publishing24@gmail.com
<https://yph-annihayah.com>

